



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2021 - 2026





H. SUKIRMAN, S.H.
BUPATI BANGKA BARAT

BONG MING MING, S.E.
WAKIL BUPATI BANGKA BARAT



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021-2026, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang PembuatandanPelaksanaanKajianLingkunganHidupStrategisdalamPenyusunanRencana Pembangunan JangkaMenengahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri E Tahun 2014);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARATTAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bangka Barat yang dipimpin oleh camat.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
12. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
21. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi bupati serta target pembangunan nasional.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
27. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
28. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
30. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
31. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
32. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
33. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
35. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pembangunan daerah.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD diselenggarakan berazaskan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan nasional.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RPJMD adalah tersedianya dokumen RPJMD sebagai:

- a. penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD; dan
- d. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup RPJMD meliputi:
 - a. Visi dan misi Bupati;
 - b. Tujuan, sasaran dan strategi;
 - c. Arah kebijakan pembangunan daerah; dan
 - d. Program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan;
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	Kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis;
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB IX	Penutup.

- (3) Fungsi RPJMD sebagai pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD, Renstra, Renja dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan RPJMD melalui Penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Renstra dan Renja.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin bahwa:
 - a. Program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah;
 - b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi rencana terhadap hasil program prioritas RPJMD mencakup indikasi yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD;
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi RPJPD.

- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
 - b. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, dan pemekaran Daerah.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan RKPD dan Perubahan Renstra.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 6.58/TAHUN 2021)

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANGKA BARAT TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala daerah yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi serta program pembangunan daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup RPJMD meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5(lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Prinsip RPJMD:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat bersama para pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan tujuan:

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025;
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 8



lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021–2026
Nomor 6 Tahun 2021
tanggal 19 Oktober 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

v

DAFTAR GAMBAR

xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3	Hubungan Antardokumen	I-10
1.4	Maksud dan Tujuan	I-14
1.5	Sistematika Penyusunan Dokumen	I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-20
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana	II-25
2.1.4	Demografi	II-27
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-36
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-66
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.3.1	Fokus Pelayanan Urusan Wajib	
2.3.1.1	Pendidikan	II-73
2.3.1.2	Kesehatan	II-85
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-99
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-114
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	II-117
2.3.1.6	Sosial	II-121
2.3.1.7	Tenaga Kerja	II-127
2.3.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-129



2.3.1.9	Pangan	II-131
2.3.1.10	Pertanahan	II-136
2.3.1.11	Lingkungan Hidup	II-138
2.3.1.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-148
2.3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-149
2.3.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-149
2.3.1.15	Perhubungan	II-150
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika	II-156
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	II-161
2.3.1.18	Penanaman Modal	II-164
2.3.1.19	Kepemudaan dan Olahraga	II-172
2.3.1.20	Statistik	II-185
2.3.1.21	Persandian	II-186
2.3.1.22	Kebudayaan	II-188
2.3.1.23	Perpustakaan	II-191
2.3.1.24	Kearsipan	II-194
2.3.2	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan	II-195
2.3.2.1	Kelautan dan Perikanan	II-195
2.3.2.2	Pariwisata	II-198
2.3.2.3	Kehutanan	II-206
2.3.2.4	Pertanian	II-209
2.3.2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-215
2.3.2.6	Perindustrian	II-216
2.3.2.7	Transmigrasi	II-218
2.3.3	Fokus Layanan Urusan Penunjang	II-218
2.3.3.1	Perencanaan Pembangunan	II-218
2.3.3.2	Keuangan	II-219
2.3.3.3	Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan	II-221
2.3.3.4	Sekretariat Daerah	II-225
2.3.3.5	Penelitian dan Pengembangan	II-226
2.3.3.6	Pengawasan	II-227
2.3.3.7	Sekretariat Dewan	II-229
2.3.3.8	Pemerintahan Umum	II-231
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-233
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-233
2.4.2	Fokus Wilayah/Infrastruktur	II-238
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-242
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-244



BAB III KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Ekonomi	III-1
3.1.1	Ekonomi Global	III-1
3.1.2	Ekonomi Nasional	III-3
3.1.2.1	Tantangan Perekonomian Nasional Tahun 2020—2024	III-5
3.1.2.2	Sasaran Perekonomian Nasional Tahun 2020—2024	III-7
3.1.3	Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-12
3.1.4	Ekonomi Kabupaten Bangka Barat	III-15
3.2	Keuangan Daerah	III-24
3.2.1	Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	III-26
3.2.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016—2020	III-26
3.2.1.2	Neraca Daerah	III-40
3.2.2	Analisis Keuangan Daerah	III-46
3.2.2.1	Kapasitas Fiskal Daerah	III-46
3.2.2.2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	III-49
3.2.2.3	Kemampuan Mendanai Pengeluaran Daerah	III-53
3.2.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah	III-54
3.2.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-55
3.2.3.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-55
3.2.3.2	Analisis Pembiayaan	III-57
3.2.4	Kerangka Pendanaan	III-59
3.2.4.1	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-59
3.2.4.2	Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2021—2026	III-64
3.2.5	Sensitivitas Keuangan Daerah	III-70

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1	Permasalahan Daerah	IV-2
4.1.2	Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan	IV-18
4.1.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-18
4.1.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-23
4.1.2.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-33
4.1.2.4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	IV-37



4.2	Isu Strategis	
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV-43
4.2.2	Isu Nasional	IV-51
4.2.3	Isu Strategis Provinsi	IV-57
4.2.4	Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat	IV-59
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		
5.1	Visi dan Misi	V-1
5.1.1	Visi	V-1
5.1.2	Misi	V-3
5.2	Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-5
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-18
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII-1
BAB IX PENUTUP		IX-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat	II-3
Tabel 2.2	Kelas Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Barat	II-6
Tabel 2.3	Jenis Tanah di Kabupaten Bangka Barat	II-8
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan <i>Eksisting</i> Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019	II-17
Tabel 2.5	Jumlah <i>Kulong</i> di Kabupaten Bangka Barat	II-18
Tabel 2.6	Sebaran <i>Kulong</i> di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020	II-20
Tabel 2.7	Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat 2019—2020	II-26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-29
Tabel 2.9	Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-29
Tabel 2.10	Rata-Rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Barat	II-30
Tabel 2.11	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Barat per Kecamatan Tahun 2021—2026	II-34
Tabel 2.12	Perkembangan Nilai Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-36
Tabel 2.13	Perkembangan Nilai Kategori dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-39
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020	II-41
Tabel 2.15	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-42
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2016—2020	II-46
Tabel 2.17	Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016—2020 (dalam %)	II-48
Tabel 2.18	Klasifikasi Kategori PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 Berdasarkan Tipologi <i>Klassen</i>	II-51



Tabel 2.19	PDRB Per Kapita Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha (Ribu rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-52
Tabel 2.20	Laju Inflasi Kabupaten Bangka Barat menggunakan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang	II-55
Tabel 2.21	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk miskin dan Persentase penduduk di Atas Garis Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-56
Tabel 2.22	Garis Kemiskinan Tahun 2016—2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota	II-57
Tabel 2.23	Laju pertumbuhan Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-58
Tabel 2.24	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2020	II-59
Tabel 2.25	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2020	II-62
Tabel 2.26	Kategori Unggulan Daerah (LQ) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-64
Tabel 2.27	Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016—2020	II-67
Tabel 2.28	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-70
Tabel 2.29	Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020/2021	II-74
Tabel 2.30	Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020/2021	II-79
Tabel 2.31	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	II-81
Tabel 2.32	Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	II-82
Tabel 2.33	Sarana/Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-92
Tabel 2.34	Indikator Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-92
Tabel 2.35	Indikator Pengendalian Penyakit Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-94
Tabel 2.36	Prevalensi Balita <i>Stunting</i> per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021	II-95



Tabel 2.37	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-95
Tabel 2.38	Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-100
Tabel 2.39	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-102
Tabel 2.40	Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-104
Tabel 2.41	RTH Publik per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-107
Tabel 2.42	Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-108
Tabel 2.43	Pola Ruang Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014	II-109
Tabel 2.44	Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.45	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-113
Tabel 2.46	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020	II-114
Tabel 2.47	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-115
Tabel 2.48	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-116
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-118
Tabel 2.50	Jumlah Petugas Satpol PP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-119
Tabel 2.51	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-120
Tabel 2.52	Jumlah Keseluruhan dan Jumlah WKSBM Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-123
Tabel 2.53	Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang Terdampak Bencana dan Tertangani Tahun 2016—2020	II-125
Tabel 2.54	Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial, dan Terintervensi di Kabupaten Bangka Barat Pada Periode 2016—2020	II-126



Tabel 2.55	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-126
Tabel 2.56	Jumlah Investor Nasional Di Kabupaten Bangka Barat Periode 2016-2020	II-128
Tabel 2.57	Jumlah Rasio Daya Serap, Bekerja Pada Perusahaan dan Jumlah Seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat Periode 2016—2020	II-128
Tabel 2.58	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-130
Tabel 2.59	Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-132
Tabel 2.60	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-135
Tabel 2.61	Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-137
Tabel 2.62	Perhitungan Indeks Pencemaran Air Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-140
Tabel 2.63	Kualitas Udara Ambien Kabupaten Bangka Barat 2020	II-141
Tabel 2.64	Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2016—2020	II-143
Tabel 2.65	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-145
Tabel 2.66	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2016 - 2020	II-147
Tabel 2.67	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-148
Tabel 2.68	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2.69	Jumlah Sarana Prasarana, Arus Penumpang, dan Barang Angkutan Umum Tahun 2016-2020	II-151
Tabel 2.70	Jumlah KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	II-154
Tabel 2.71	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-155
Tabel 2.72	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Urusan perhubungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-156



Tabel 2.73	Daftar Desa yang Masih Terdapat Sinyal <i>Provider</i> 2G dan <i>Blankspot</i> Area di Kabupaten Bangka Barat	II-157
Tabel 2.74	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-159
Tabel 2.75	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-160
Tabel 2.76	Jumlah Sebaran Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020	II-167
Tabel 2.77	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (Miliar)	II-169
Tabel 2.78	Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-171
Tabel 2.79	Jumlah dan Persentase Wirausaha Muda per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-175
Tabel 2.80	Level Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-178
Tabel 2.81	Perolehan Peringkat Kejuaraan <i>Multi Event</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016—2020	II-181
Tabel 2.82	Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio lapangan Olahraga per 1000 Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020	II-184
Tabel 2.83	Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-185
Tabel 2.84	Indikator Statistik Kabupaten Bangka Barat 2016—2020	II-186
Tabel 2.85	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-189
Tabel 2.86	Aspek dan Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-192
Tabel 2.87	Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (Juta Rupiah)	II-197
Tabel 2.88	Potensi Wisata Setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	II-198
Tabel 2.89	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-200
Tabel 2.90	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-201



Tabel 2.91	Jumlah PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-202
Tabel 2.92	Kawasan <i>Geopark</i> Bangka Barat di Kabupaten Bangka Barat	II-204
Tabel 2.93	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-206
Tabel 2.94	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-214
Tabel 2.95	Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-215
Tabel 2.96	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	II-216
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-219
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-220
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-222
Tabel 2.100	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-223
Tabel 2.101	Indikator Urusan Pelaksanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-226
Tabel 2.102	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-227
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-227
Tabel 2.104	Nilai SAKIP Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-228
Tabel 2.105	Komponen Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018—2020	II-229
Tabel 2.106	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-230
Tabel 2.107	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016—2020	II-233
Tabel 2.108	Rata-rata Pengeluaran perkapita perbulan Menurut Kelompok Komoditas (%) di Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016 – 2020	II-237
Tabel 2.109	Persentase Rata-Rata perkapita perbulan Menurut Kelompok Non Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 —2020	II-238
Tabel 2.110	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-239



Tabel 2.111	Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019	II-241
Tabel 2.112	Jumlah Penginapan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-242
Tabel 2.113	Jumlah SDM di Kabupaten Bangka Barat yang Berkualifikasi S-1, S-2, dan S-3 Tahun 2016—2020	II-245
Tabel 2.114	Tingkat Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-246
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bangka Barat	II-247
Tabel 2.116	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-251
Tabel 3.1	Ekonomi Global: Pertumbuhan, Volume Perdagangan dan Harga Komoditas (% yoy)	III-2
Tabel 3.2	Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021, 2022, dan 2025	III-14
Tabel 3.3	Proyeksi Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-16
Tabel 3.4	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	III-17
Tabel 3.5	Proyeksi Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat 2021-2026	III-19
Tabel 3.6	Master Plan Rencana Pembagian Kapling Lahan Kawasan Industri Tanjung Ular	III-20
Tabel 3.7	Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-21
Tabel 3.8	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-24
Tabel 3.9	Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	III-28
Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016—2020	III-31
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016 – 2020	III-33
Tabel 3.12	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016—2020	III-37



Tabel 3.13	Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020	III-40
Tabel 3.14	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020	III-42
Tabel 3.15	Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020	III-44
Tabel 3.16	Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	III-48
Tabel 3.17	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	III-55
Tabel 3.18	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020	III-56
Tabel 3.19	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016-2020	III-57
Tabel 3.20	Realisasi Selisih Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Tahun 2016—2020	III-58
Tabel 3.21	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	III-61
Tabe 3.22	Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	III-65
Tabel 3.23	Perhitungan Proyeksi Belanja Prioritas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-68
Tabel 4.1	Data Kasus Covid-19 Kabupaten Bangka Barat (Periode Januari 2021—Mei 2021)	IV-49
Tabel 5.1	Keselaran Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	V-8
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	V-17
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2025	VI-7
Tabel 6.3	Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017—2022) dan Tahap IV (2022—2025)	VI-10
Tabel 6.4	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VI-11
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VI-15
Tabel 6.6	Fokus Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VI-16



Tabel 6.7	Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VI-17
Tabel 6.8	Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat	VI-18
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026	VI-20
Tabel 7.1	Proyeksi Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Akhir Periode RPJMD	VIII-3
Tabel 8.2	Target Indikator Kinerja Utama Daerah Sebagai Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026	VIII-4
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026	VIII-7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	I-4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	II-5
Gambar 2.2	Peta Ketinggian Kabupaten Bangka Barat	II-6
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Barat	II-7
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bangka Barat	II-8
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Bangka Barat	II-10
Gambar 2.6	Peta DAS Kabupaten Bangka Barat	II-11
Gambar 2.7	Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar perKecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	II-13
Gambar 2.8	Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat perKecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	II-14
Gambar 2.9	Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung perKecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	II-16
Gambar 2.10	Peta Penggunaan Lahan <i>Eksisting</i> Kabupaten Bangka Barat	II-18
Gambar 2.11	Peta Sebaran <i>Kulong</i> di Kabupaten Bangka Barat	II-19
Gambar 2.12	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat	II-23
Gambar 2.13	Peta Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat	II-25
Gambar 2.14	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Barat 2019	II-26
Gambar 2.15	Diagram Distribusi Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-32
Gambar 2.16	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-33
Gambar 2.17	Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-35
Gambar 2.18	Perkembangan PDRB dan LPE Kabupaten Bangka Barat 2016-2020	II-40
Gambar 2.19	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-44



Gambar 2.20	Pertumbuhan Rata-Rata Sektor PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-49
Gambar 2.21	Perbandingan PDRB per Kapita dengan Pertumbuhan PDRB ADHB Tahun 2016—2020	II-53
Gambar 2.22	Grafik PDRB ADHK PerKapita Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-54
Gambar 2.23	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-60
Gambar 2.24	Grafik Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019—2020	II-62
Gambar 2.25	Perkembangan Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-66
Gambar 2.26	Grafik Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-68
Gambar 2.27	Grafik Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 — 2020	II-70
Gambar 2.28	Grafik Pengeluaran perkapita Kabupaten Bangka Barat (Ribu Rupiah) Tahun 2016—2020	II-72
Gambar 2.29	Grafik Target Capaian dan APK PAUD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-75
Gambar 2.30	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-77
Gambar 2.31	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-78
Gambar 2.32	Persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020	II-104
Gambar 2.33	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak Tahun 2017—2020	II.105
Gambar 2.34	Perkembangan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 - 2018	II-106
Gambar 2.35	Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	II-111
Gambar 2.36	Kondisi Pantai Tanjung Ular	II-112
Gambar 2.37	Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020	II-116
Gambar 2.38	Penduduk yang Menyandang Masalah Sosial di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-123



Gambar 2.39	Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-135
Gambar 2.40	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-136
Gambar 2.41	Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2018	II-139
Gambar 2.42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-140
Gambar 2.43	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-144
Gambar 2.44	Rasio Izin Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-154
Gambar 2.45	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif serta Anggota Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-163
Gambar 2.46	Persentase Peningkatan Unit Usaha Mikro dan Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-164
Gambar 2.47	Jumlah Unit Usaha Mikro dan Jenis Usaha Mikro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-165
Gambar 2.48	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-167
Gambar 2.49	Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020	II-168
Gambar 2.50	Persentase Investasi IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	II-171
Gambar 2.51	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-175
Gambar 2.52	Persentase Wirausaha Muda di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-176
Gambar 2.53	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-178
Gambar 2.54	Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-179
Gambar 2.55	Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-181
Gambar 2.56	Target dan Capaian Prestasi Olahraga di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-182



Gambar 2.57	Grafik Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-184
Gambar 2.58	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Bangka Barat yang Dilestarikan Tahun 2017—2020	II-192
Gambar 2.59	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-193
Gambar 2.60	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-198
Gambar 2.61	Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	II-209
Gambar 2.62	Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat	II-210
Gambar 2.63	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-212
Gambar 2.64	Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (ton)	II-214
Gambar 2.65	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	II-217
Gambar 2.66	Jumlah ASN Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	II-226
Gambar 2.67	Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2019 (juta rupiah)	II-324
Gambar 2.68	Produktivitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020	II-235
Gambar 2.69	Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2018 (juta rupiah)	II-241
Gambar 2.70	Perkembangan Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020	II-243
Gambar 3.1	Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024	III-8
Gambar 3.2	Proyeksi Pertumbuhan Nilai PDRB ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-18
Gambar 3.5	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	III-32
Gambar 3.6	Target dan Realisasi Serapan Anggaran Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020	III-34
Gambar 3.7	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017—2020	III-53



Gambar 3.8	Rasio Kemampuan Mendanai Pengeluaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020	III-54
Gambar 3.9	Grafik Proyeksi Persentase Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	III-66
Gambar 4.1	Permasalahan Daerah Kabupaten Bangka Barat	IV-18
Gambar 4.2	Rekapitulasi Jumlah Indikator dan Persentase TPB menurut Kriteria	IV-44
Gambar 4.3	Rekapitulasi Pencapaian TPB Menurut Tujuan	IV-45
Gambar 4.4	Sinergitas Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat	IV-59
Gambar 4.5	Skema Keterkaitan Antar isu Strategis	IV-60
Gambar 5.1	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005—2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026	V-5
Gambar 5.2	kerangka keterkaitan isu strategis dengan indikator sasaran	V-19
Gambar 6.1	Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah	VI-6



#ayokebangkabarat



BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang—Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Dalam perspektif pembangunan, Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran strategis sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya, untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bangka Barat, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat 2 mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan berjangka secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana pembangunan berjangka tersebut antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

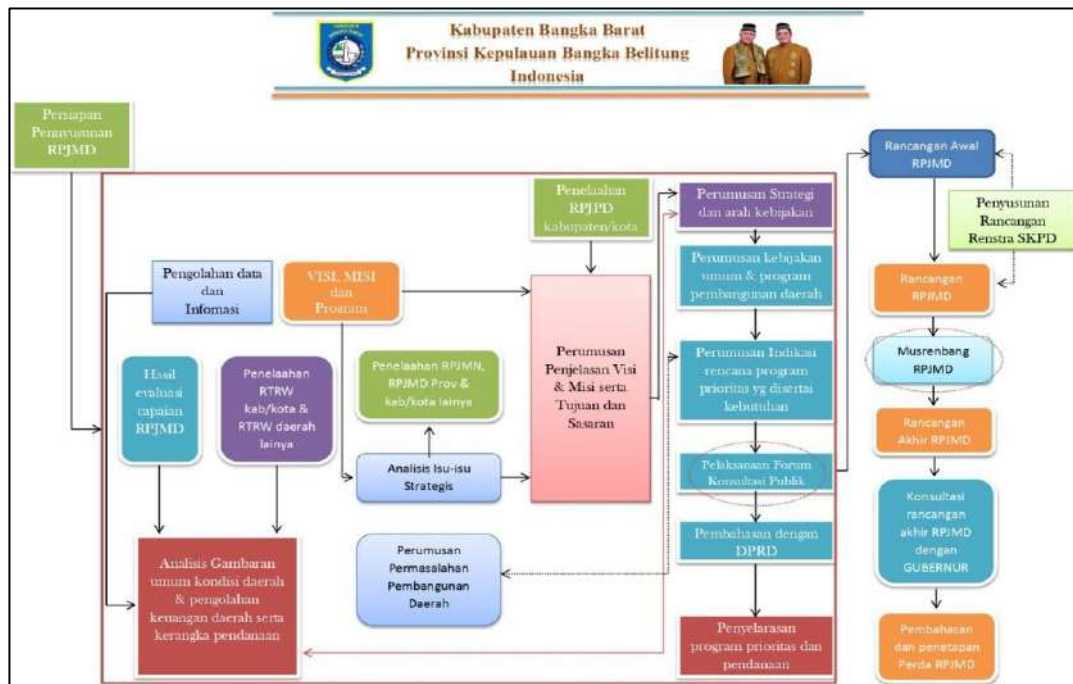
Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi



dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan atas-bawah untuk menyinergikan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN, Renstra K/L, RPJPD dan RPJMD Provinsi, konsisten dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat, KLHS Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pendekatan bawah-atas menjangkau aspirasi kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

Pasal 70 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap Raperda dan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026.

Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat ini disusun secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Adapun alur proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 secara keseluruhan tampak pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal RPJMD hingga perumusan Rancangan Akhir RPJMD.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 16 ayat 4, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang tersebut berdasarkan dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang telah disusun. Hasil Musrenbang tersebut menjadi dasar penyempurnaan dokumen Rancangan RPJMD menjadi Rancangan Akhir



RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disampaikan kepada Sekretaris Daerah. Selanjutnya Raperda disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Hasil persetujuan Raperda oleh DPRD Kabupaten Bangka Barat disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi gubernur menjadi dasar kepala daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) Sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005—2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan



- atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri E Tahun 2014);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D).

1.3 Hubungan Antardokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berikut hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya:

1.3.1 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RPJMN Tahun 2020—2024

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dilakukan dengan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020—2024. Selain itu, target dalam RPJMN Tahun 2020—2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026.

1.3.2 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka



Belitung Tahun 2017—2022. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Secara khusus, pengembangan daerah Kabupaten Bangka Barat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 menjadi daerah pengembangan kawasan pendukung pembangunan pariwisata melalui pengembangan kawasan peruntukan pariwisata Kawasan Kota Tua Muntok, dan Pengembangan Kawasan Industri serta Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular Muntok.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005—2025

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD Tahun 2005—2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barat berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Barat. Selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005—2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005—2025 dengan Visinya “Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025”. Dengan kata lain, dilakukan upaya untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005—2025 dijabarkan dalam program



pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.4 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014—2034

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 berpedoman pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014—2034. Keseluruhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal – hal yang menyangkut aspek keruangan menyelaraskan dengan arah dan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014—2034.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 memperhatikan dan mempedomani struktur, pola ruang, dan kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat tahun 2014—2034 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034. Artinya, keseluruhan perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal – hal yang menyangkut aspek keruangan tetap berpedoman pada RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034. Dengan demikian perencanaan dan



pelaksanaan pembangunan serta dinamika pemangku kepentingan tetap mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan lingkungan.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021—2026 dengan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Barat. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah yakni dalam dokumen rencana pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD.

1.3.7 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan RKPD Kabupaten Bangka Barat

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 nantinya dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.



1.3.8 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam rentang waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

1.3.9 RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional, nasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain Rencana Aksi *Sustainable Development Goals*, Standar Pelayanan Minimal, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 bermaksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Barat yang berorientasi substansi pada pendekatan holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.



1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026, yaitu:

- a. Memberikan gambaran mengenai kondisi umum pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016—2020);
- b. Memberikan informasi dan analisis permasalahan dan isu strategis yang terjadi atau dialami oleh masyarakat Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun yang lalu dan masa yang akan datang;
- c. Memberikan informasi mengenai potensi/ kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun lalu dan proyeksi lima tahun ke depan.
- d. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat ke dalam strategi pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022—2026;
- e. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- f. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen

Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disajikan dengan sistematika:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

BAB III KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang proyeksi ekonomi makro, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan daerah, dan sensitivitas keuangan daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator pembangunan dan penetapan target.

BAB VI STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target berdasarkan bidang urusan.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci untuk jangka waktu lima tahun.

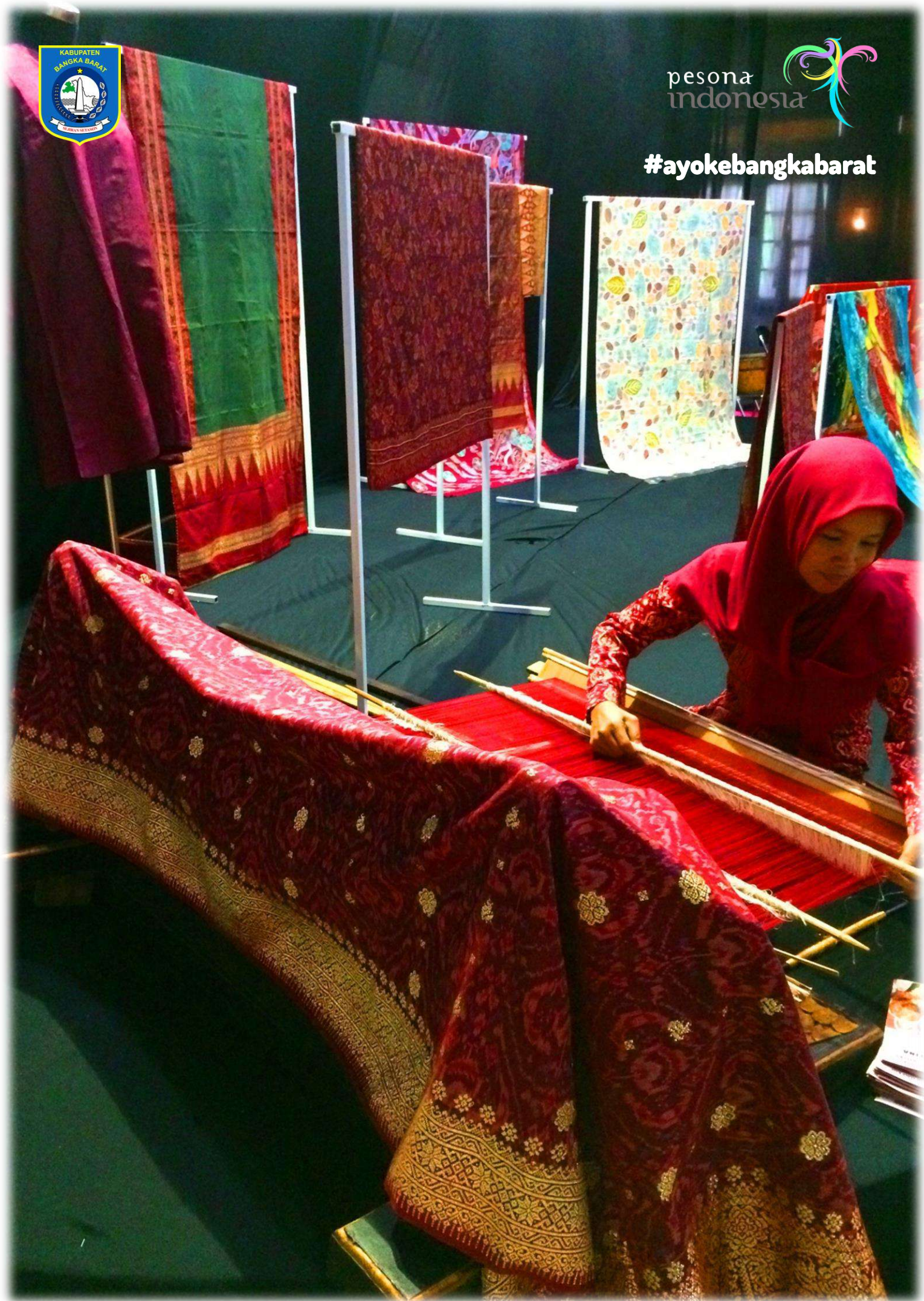
BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.



pesona
indonesia 

#ayokebangkabar



BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH





Rencana pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan karakteristik serta kondisi wilayah agar pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Bangka Barat memberikan penjelasan tentang kondisi daerah serta capaian pembangunan Kabupaten Bangka Barat secara umum. Gambaran umum daerah ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah strategis dikarenakan posisinya berdekatan dengan Pulau Sumatera. Kabupaten Bangka Barat menjadi pintu gerbang masuknya barang dan penumpang dari Pulau Sumatera yang melewati laut. Secara geografis, Kabupaten Bangka Barat terletak di bagian barat Pulau Bangka, pada posisi antara 105° 00'-106° 00' Bujur Timur dan 01° 00'-02° 10' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut.



1. Sebelah utara dengan Laut Natuna;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Bangka yang merupakan kabupaten induk pada era sebelum pemekaran. Kabupaten Bangka Barat juga merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan lebih kurang 214,85 ha, meskipun sampai dengan saat ini belum berpenghuni. Selain itu, kawasan pesisir di Kabupaten Bangka Barat juga cukup luas dengan panjang pantai 297,38 km. Akan tetapi, wilayah kepulauan serta pesisir yang luas tersebut sampai saat ini masih sebatas potensi dan belum secara optimal dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Dalam tujuan pengembangan daerah, upaya pemberdayaan masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir dirasa masih sangat minim meskipun Kabupaten Bangka Barat tidak termasuk pada kategori daerah pedalaman dan tidak terdapat wilayah yang letaknya terisolir atau terpencil yang sulit untuk diakses.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah 284.886,05 ha terdiri dari 6 kecamatan, 4 kelurahan dan 60 desa. Tahun 2018 terjadi penambahan kelurahan berdasarkan Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelurahan Keranggan dan Menjelang, sehingga jumlah kelurahan di Kabupaten Bangka Barat menjadi 6 kelurahan. Luas wilayah, persentase luas wilayah, kecamatan,



desa/kelurahan di Kabupaten Bangka Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah, dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat

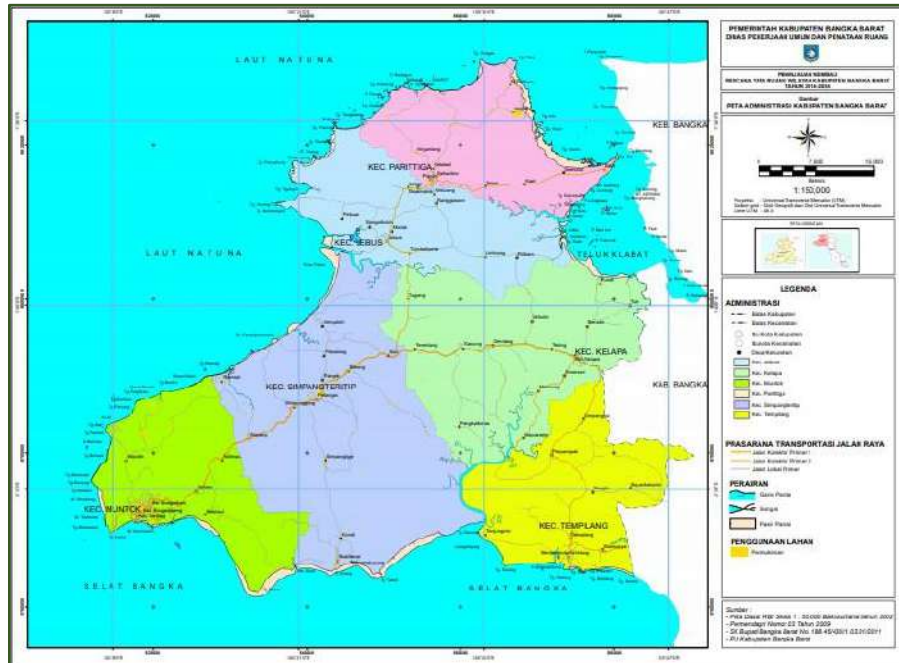
No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan
1.	Kelapa	59.140,76	20,76	1 kelurahan, 13 desa	Air Bulin, Dendang, Kacung, Kayu Arang, Kelapa, Mancung, Pusuk, Tebing, Tugang, Tuik, Terentang, Pangkal beras, Sinar sari, dan Beruas
2.	Tempilang	30.019,21	13,70	9 desa	Air Lintang, Benteng Kota, Buyan Kelumbi, Penyampak, Sangku, Simpang Yul, Sinar Surya, Tanjung Niur dan Tempilang
3.	Muntok	36.795,25	12,92	5 kelurahan, 4 desa	Air Belo, Air Limau, Air Putih, Belo Laut, Sungai Baru, Sungai Daeng, Tanjung, Keranggan, Menjelang
4.	Simpangteritip	78.447,89	27,54	13 desa	Air Nyatoh, Berang, Ibul, Kundi, Mayang, Pelangas, Rambat, Simpang Gong, Simpang Tiga, Bukit Terak, Air Menduyung, Pangek dan Peradong
5.	Jebus	38.811,63	13,62	11 desa	Jebus, Ketap, Limbung, Rangi Asam, Rukam, Sungai Buluh, Tumbak Petar, Mislak, Air



No	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan
					Kuang, Pebuar, dan Sinar Manik
6.	Parittiga	32.671,31	11,47	10 desa	Air Gantang, Bakit, Cupat, Kapit, Kelabat, Puput, Sekar Biru, Semulut Telak, dan Teluk Limau
		284.886,05	100	66	

sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014–2034; Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018

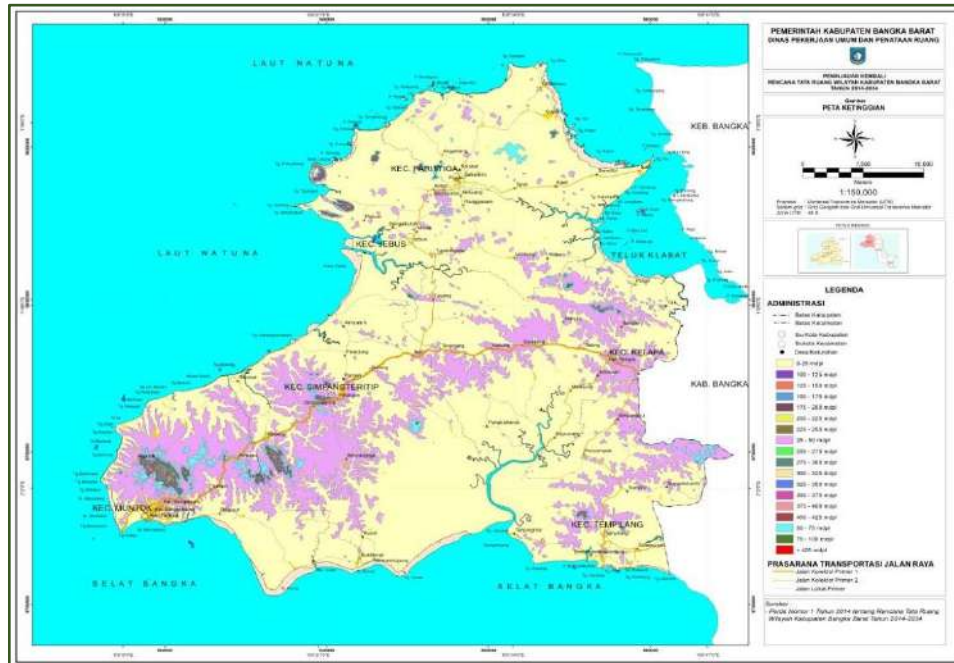
Berdasarkan tabel tersebut, seluruh wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka. Wilayah daratan tersebut terbagi dalam enam kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa dengan luas wilayah 59.140,76 ha, Kecamatan Tempilang dengan luas wilayah 30.019,21 ha, Kecamatan Muntok dengan luas wilayah 36.795,25 ha, Kecamatan Simpangteritip dengan luas wilayah 78.447,89, Kecamatan Jebus dengan luas wilayah 38.811,63 ha, dan Kecamatan Parittiga dengan luas wilayah 32.671,31 ha. Terlihat dari data tersebut bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Simpangteritip dengan persentase luas 27,54%, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Parittiga dengan persentase luas hanya 11,47% dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jika dilihat dari jumlah kelurahan dan desa, Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan paling banyak, sedangkan Kecamatan Muntok memiliki jumlah desa dan kelurahan paling sedikit. Pemetaan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Bangka Barat dilihat berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Kondisi ketinggian Kabupaten Bangka Barat mulai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai dengan 425 mdpl. Ketinggian 25 mdpl tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan ketinggian 425 mdpl hanya terletak di Kecamatan Muntok, tepatnya di Bukit Menumbing atau lebih dikenal dengan sebutan Gunung Menumbing. Secara jelas, gambaran ketinggian Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

Berdasarkan kondisi kemiringan lahan, Kabupaten Bangka Barat memiliki lahan yang relatif datar dan tidak terdapat adanya gunung. Kemiringan lahan Kabupaten Bangka Barat secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2.

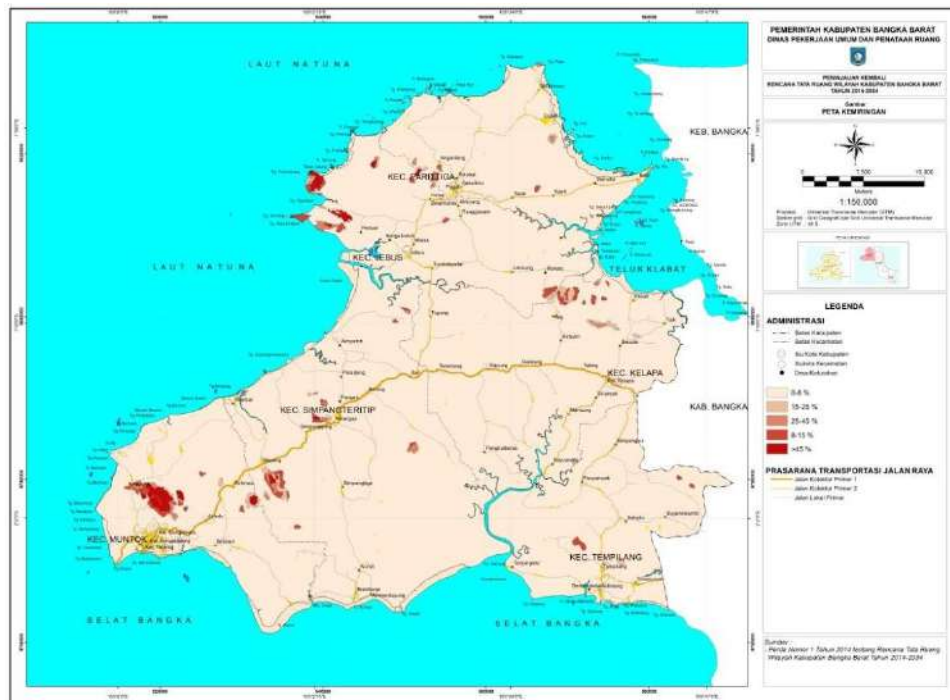
Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Barat

No	Kemiringan	Kategori	Luas (ha)	Persentase
1.	0-3	Datar	255.438	89,7
2.	3-8	Landai	23.416	8,2
3.	8-15	Agak miring	2.055	0,7
4.	15-25	Miring	1.249	0,4
5.	25-45	Agak curam	1.127	0,4
6.	>45	Curam	1.602	0,6
Jumlah			284.887	100

sumber: Peta dasar RBI Bakosurtanal, 2002

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa kemiringan lahan Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh kelas 0-3% atau datar sebesar 89% (255.438 ha), sedangkan untuk kemiringan lahan dengan kategori curam atau >45% hanya sebesar 0,6% (1.602 ha). Lokasi dengan kategori kelas kemiringan

curam sebagian besar terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus. Sementara itu, hampir di seluruh kecamatan kondisi kemiringan lahannya termasuk dalam kategori datar. Gambaran kondisi kemiringan lahan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.3.

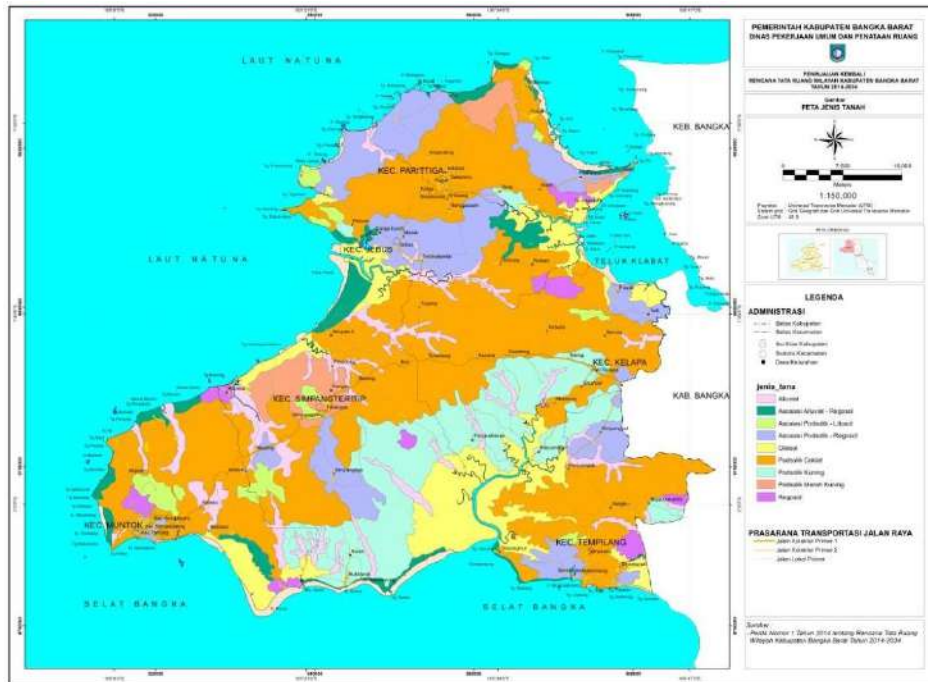


Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

C. Kondisi Geologi

Tanah di wilayah Kabupaten Bangka Barat mempunyai pH rata-rata di bawah 5 yang mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti: pasir kuarsa, kaolin, batu gunung, dan sebagainya. Jenis tanah di Kabupaten Bangka Barat meliputi: podsolik coklat, podsolik kuning, podsolik merah kuning, asosiasi podsolik-regosol, asosiasi podsolik litosol, regosol, gleisol, alluvial, asosiasi alluvial regosol. Di samping itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi kandungan mineral yang sangat beragam pula, seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih, bauksit di Teluk Limau, dan

mineral timah yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan atau dikenal juga dengan istilah daerah sabuk timah. Gambaran jenis tanah Kabupaten Bangka Barat terlihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

Tampak jelas, sebagian besar tanah Kabupaten Bangka Barat berjenis podsolik coklat tersebar yang di seluruh kecamatan dengan luas 126.196 ha atau 44% dari luas keseluruhan jenis tanah di Kabupaten Bangka Barat. Secara detail, jenis tanah Kabupaten Bangka Barat disajikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Bangka Barat

No	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase
1.	Podsolik Merah Kuning	9.472	3
2.	Podsolik Cokelat	126.196	44
3.	Podsolik Kuning	37.558	13
4.	Asosiasi Podsolik-Regosol	37.648	13
5.	Asosiasi Podsolik-litosol	6.486	2

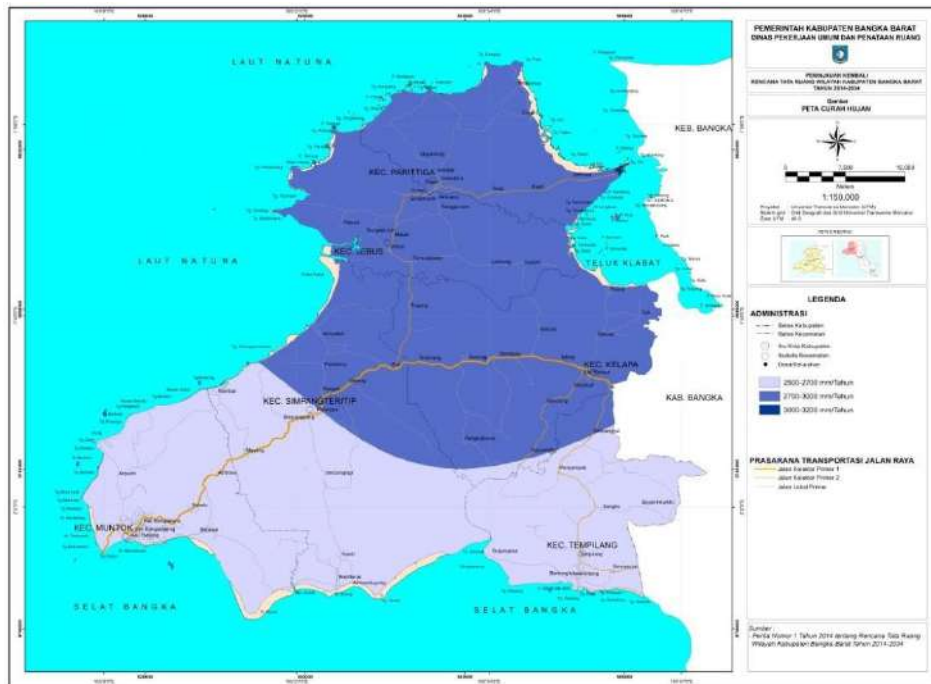


No	Jenis Tanah	Luas (ha)	Persentase
6.	Regosol	5.759	2
7.	Gleisol	33.359	12
8.	Alluvial	18.915	7
9	Asosiasi Alluvial-Regosol	9.481	3
Jumlah		284.876	100

sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, 2007

D. Kondisi Klimatologi

Iklm di Kabupaten Bangka Barat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu iklim tropis dan basah. Iklim tropis dan iklim basah merupakan daerah dengan bulan basah selama 7-9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Berdasarkan hasil digitasi peta curah hujan Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada kegiatan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034, tingkat curah hujan tertinggi sebesar 3000-3200 mm/tahun dan terendah pada kisaran antara 2500-2700 mm/tahun. Intensitas curah hujan tertinggi terletak di daerah Bakit Kecamatan Parittiga, sedangkan tingkat curah hujan terendah terletak di Kecamatan Muntok, Tempilang, dan sebagian besar Kecamatan Simpangteritip. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm-406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Peta curah hujan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.5.



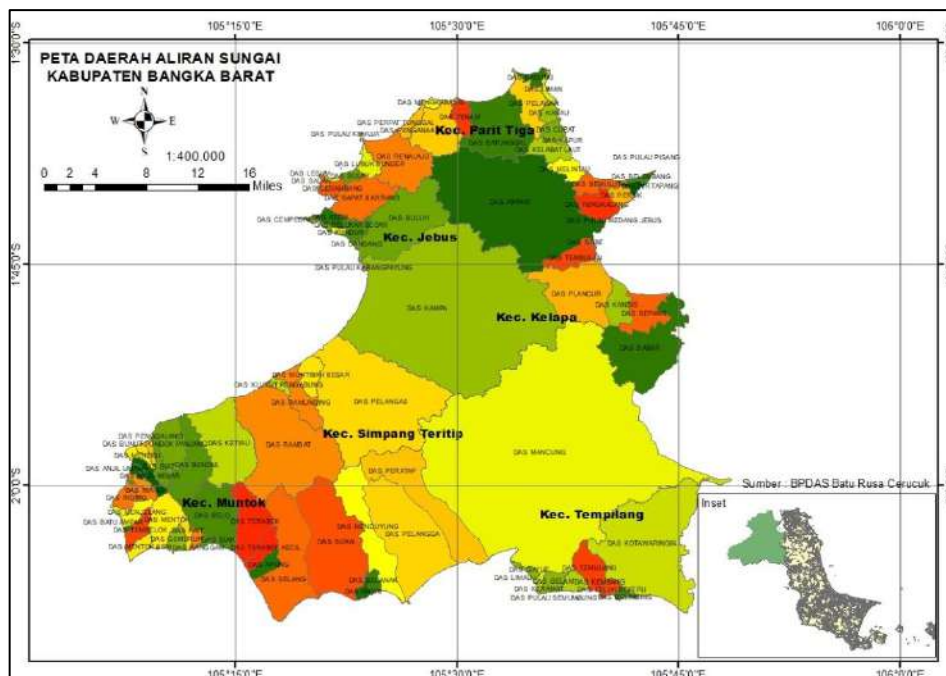
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

Kabupaten Bangka Barat juga memiliki intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi, yakni antara 19,0-57,3% dengan tekanan udara antara 1.008,9-1.011,1 mbs. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari yang berasal dari arah utara, arah angin bulan April berasal dari arah barat, sedangkan pada bulan nya bergeser ke arah selatan, tenggara, timur, dan pada bulan November kembali ke arah barat.

Suhu udara per bulannya antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan tingkat kelembaban rata-rata 80–87%. Intensitas curah hujan di Kabupaten Bangka Barat Hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun). Adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini berpotensi meningkatkan persediaan air, baik air tanah maupun air permukaan jika lingkungan tetap terjaga dengan baik.

E. Kondisi Hidrologi

Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Baturusa Cerucuk, secara hidrologi Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 96.513 ha. DAS terluas adalah DAS Mancung yang terletak di Kecamatan Tempilang dengan luas 59.844 ha. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki 470 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Gambaran DAS dan sungai di Kabupaten Bangka Barat tampak pada gambar 2.6.



Gambar 2.6 Peta DAS Kabupaten Bangka Barat
sumber: BPDAS HL Baturusa Cerucuk, 2021

Secara umum, dampak kerusakan lingkungan mulai terjadi pada DAS di Kabupaten Bangka Barat, seperti mulai berkurangnya debit dan menurunnya kualitas air karena aktivitas masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan.



F. Penggunaan Lahan

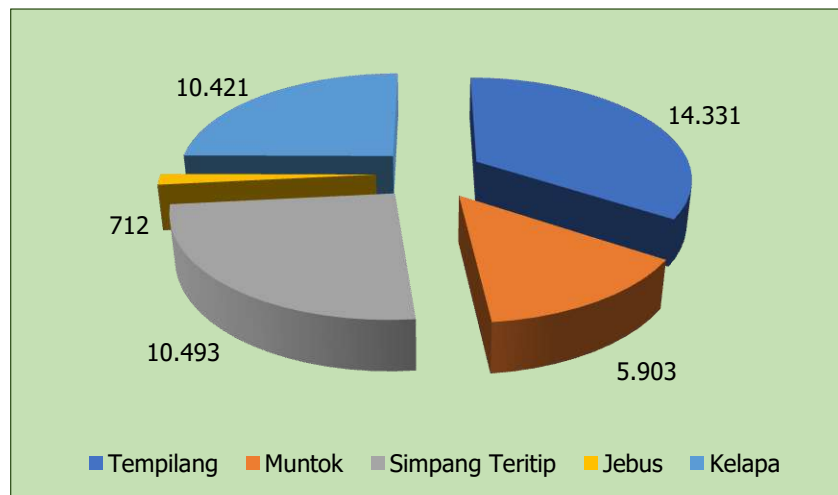
Peruntukan lahan Kabupaten Bangka Barat telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034 yang terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan Budidaya dalam pengembangan wilayahnya diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta kawasan bagi peruntukan lainnya.

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya secara rinci diperuntukkan bagi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta untuk kawasan peruntukan lainnya.

- a. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Barat hampir tersebar di semua Kecamatan dengan total luasan mencapai ± 77.742 ha yang terdiri dari hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luasan ± 2.050 ha tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki kawasan peruntukan hutan rakyat yang terluas yaitu Kecamatan Simpangteritip dengan luasan ± 851 ha, diikuti dengan Kecamatan Kelapa dengan luasan ± 741 ha.
- c. Kawasan peruntukan pertanian diklasifikasi menjadi 4, yaitu:
(1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, mempunyai luasan ± 15.812 ha, akan tetapi sebagian besar kawasan tersebut berada di kawasan hutan; (2) kawasan peruntukan hortikultura

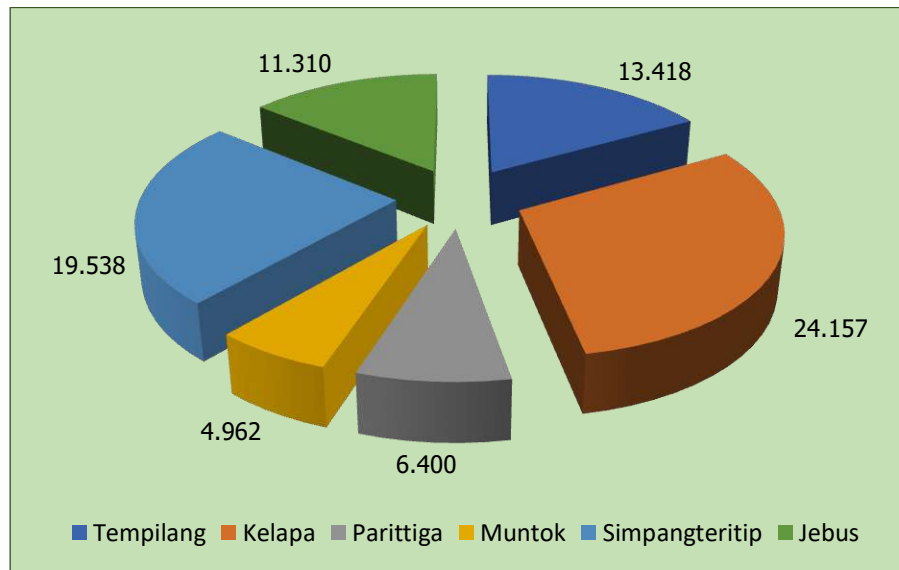
mempunyai luasan ± 1.598 ha; (3) Kawasan peruntukan peternakan yang terdapat di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Muntok, dan Kecamatan Jebus dengan luas keseluruhan ± 72 ha; (4) Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas ± 121.645 ha. Kawasan ini dibagi menjadi dua (2) jenis, yaitu kawasan peruntukan perkebunan besar seluas ± 41.860 ha, dan kawasan peruntukan perkebunan rakyat seluas ± 79.785 ha. Kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Parittiga. Secara detail, luas kawasan perkebunan besar dapat dilihat pada gambar 2.7.



Gambar 2.7 Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar perKecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)

sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Sementara itu, kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua kecamatan. Dari luasan perkebunan rakyat sebesar ±79.785 ha, terdapat ± 166 ha berada di kawasan hutan produksi. Secara detail, luas kawasan peruntukan perkebunan rakyat dapat dilihat pada gambar 2.8.



Gambar 2.8 Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat perKecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)
sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014–2034

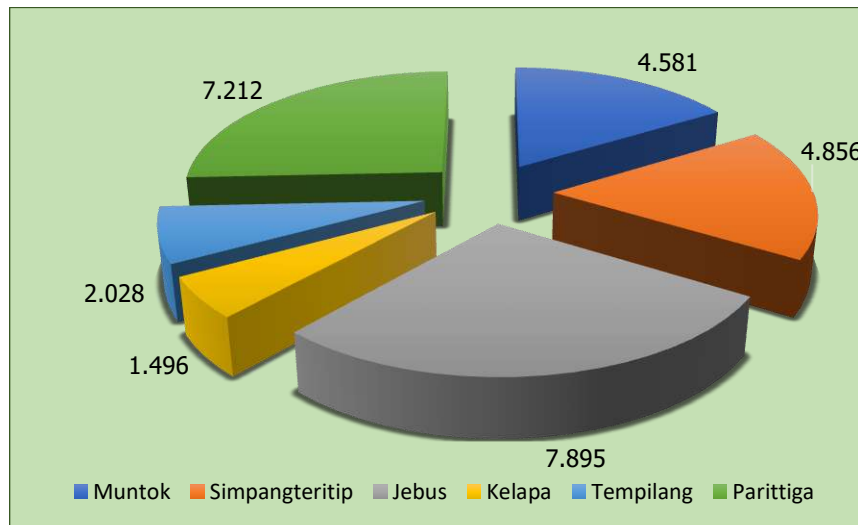
- d. Kawasan peruntukan perikanan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan (air tawar dan air payau) serta peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan saat ini telah didukung dengan adanya pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Muntok, serta didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.
- e. Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat, tetapi sampai dengan saat ini masih banyak kawasan peruntukan pertambangan yang belum dikelola dan terdapat juga ruang pasca tambang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Muntok yang dibagi menjadi dua kawasan industri yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Tanjung Ular



- dengan luas \pm 1.275 ha serta kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian dengan luas \pm 139 ha.
- g. Kawasan peruntukan pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) Satuan Kawasan Wisata (SKW) yaitu SKW I yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip, SKW II yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, serta SKW III yang terdapat di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang.
 - h. Kawasan Peruntukan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan. Luasan Kawasan Perkotaan yang ada yaitu \pm 9.331 ha serta luasan Kawasan Permukiman Perdesaan yang ada yaitu \pm 11.987 ha.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, hutan konservasi, pantai berhutan bakau, dan hutan cagar budaya, serta ilmu pengetahuan. Kawasan hutan lindung terdapat di pulau utama/induk Pulau Bangka yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas \pm 28.068 ha. Dari 6 kecamatan tersebut, Kecamatan Jebus memiliki kawasan hutan lindung terluas yaitu 7.895 ha (28%), sedangkan Kecamatan Kelapa memiliki kawasan hutan lindung terkecil yaitu 1.496 ha (6%). Sebaran luasan kawasan hutan lindung terlihat pada gambar 2.9.



Gambar 2.9 Diagram Luasan Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)
sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014–2034

Selain itu, di Kabupaten Bangka Barat terdapat pula Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan cagar budaya.

- a. KSA/KPA Menumbing seluas ± 3.333 ha yang terdapat di Kecamatan Muntok;
- b. KSA/KPA Jering Menduyung seluas ± 3.538 ha yang terdapat di Kecamatan Simpangteritip; dan seluas ± 71 ha yang terdapat di Kecamatan Tempilang;
- c. KSA/KPA Gunung Maras seluas ± 1.216 ha yang terdapat di Kecamatan Kelapa; dan
- d. Pulau-pulau kecil yang tersebar di setiap kecamatan dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan luas ± 185 ha, kecuali Pulau Nanas yang direncanakan sebagai kawasan wisata pulau kecil dengan luas ± 27 ha. Kawasan Pantai berhutan mangrove tersebar di semua kecamatan dengan total luas 22.640 ha. Kecamatan Simpangteritip memiliki luasan terbesar pantai berhutan mangrove dengan luas 6.354 ha dan Kecamatan Parittiga memiliki luasan pantai berhutan mangrove terkecil, yakni seluas 1.508 ha.



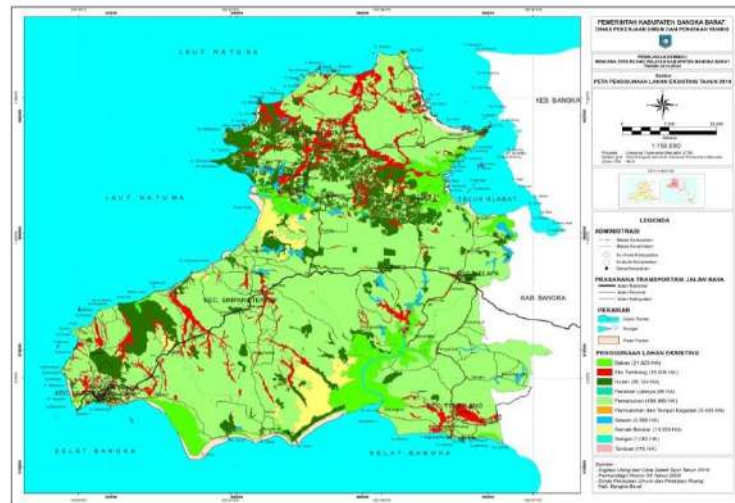
Berdasarkan kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kondisi penggunaan lahan *existing* tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat secara rinci terdapat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan *Existing*
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Mangrove/bakau	21.823
2	Eks tambang	18.606
3	Hutan	36.124
4	Perairan lainnya	56
5	Perkebunan	184.989
6	Permukiman dan tempat kegiatan	5.435
7	Sawah	3.398
8	Semak belukar	13.255
9	Sungai	1.083
10	Tambak	115

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2020

Lahan di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar digunakan untuk perkebunan seluas 184.989 ha. Selain itu, peruntukkan hutan seluas 36.124 ha, kawasan mangrove seluas 21.823 ha, dan lahan bekas pertambangan timah seluas 18.606 ha. Penggunaan lahan terkecil untuk perairan lainnya seluas 56 ha. Penggunaan lahan *existing* lebih detail tampak pada gambar 2.10.



Gambar 2.10 Peta Penggunaan Lahan *Existing* Kabupaten Bangka Barat
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

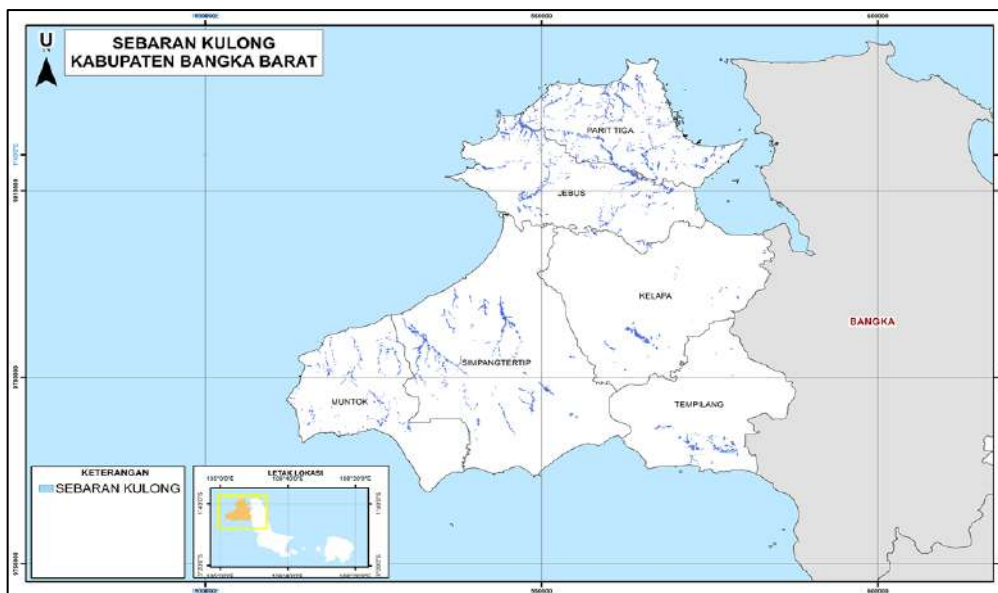
Tipe penggunaan lahan bekas tambang timah merupakan empat teratas dalam penggunaan lahan *existing* di Kabupaten Bangka Barat seluas 18.606 ha. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten potensial di sektor pertambangan dan penggalian. Pertambangan yang paling banyak dilakukan adalah pertambangan bijih timah. Oleh karena itu, tidak salah jika kabupaten ini sering disebut sebagai lumbung timah. Namun kegiatan pertambangan timah, terutama pertambangan ilegal ini akan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang tergenang oleh air yang biasa disebut *kulong*. Jumlah *kulong* di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Jumlah *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat¹

No.	Kecamatan	Jumlah Kulong
1	Jebus	839
2	Kelapa	225
3	Muntok	481
4	Parittiga	1.216
5	Simpangteritip	1.011
6	Tempilang	264
Total		4.036

¹Fadillah Sabri, Taufik Aulia, M. Novriansyah. 2020. *Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Kulong di Bangka Belitung*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 38–40.

Sebaran *kulong* di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berada di dalam kawasan hutan sebanyak 2.524 *kulong* seluas 1.161.043 ha. Jumlah *kulong* terbanyak berada di Hutan Produksi (HP) sebanyak 2.097 *kulong* seluas 916,974 ha. Selain itu, terdapat juga di Area Penggunaan Lain (APL) di luar Hutan Produksi sebanyak 1,512 *kulong* seluas 711,547 ha. Di kawasan Hutan Lindung terdapat 377 *kulong* seluas 228,037 ha sedangkan jumlah *kulong* yang paling sedikit terdapat di kawasan KPA/KSA yaitu sebanyak 50 *kulong* seluas 16,033 ha. Gambar peta sebaran *kulong* di Kabupaten Bangka Barat disajikan pada gambar 2.11.



Gambar 2.11 Peta Sebaran *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat
sumber: *Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Kulong di Bangka Belitung, 2020*

Adanya *kulong* di kawasan HL dan KSA/KPA menandakan bahwa kegiatan pertambangan atau pembukaan lahan telah dilakukan secara ilegal. Sebaran *kulong* berdasarkan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.6.



Tabel 2.6 Sebaran *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Kulong
1.	APL	711.547	1.512
2.	HL	228.037	377
3.	HP	916.974	2.097
4.	KPA/KSA	16.033	50
Total		1.872.591	4.036

sumber: Inventarisasi dan Model Pemanfaatan *Kulong* di Bangka Belitung, 2020

Keberadaan *kulong* dari kegiatan pertambangan mengindikasikan bahwa suatu kawasan telah mengalami degradasi mutu lingkungan atau dengan kata lain lingkungan tersebut telah rusak. Akan tetapi, kerusakan tersebut dapat diminimalisasi dengan upaya pemulihan kesehatan lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan *kulong*. Hal ini cukup beralasan, mengingat banyaknya jumlah *kulong* dan sangat potensial untuk dimanfaatkan. Adanya pemanfaatan *kulong* juga bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sumber daya *kulong* dengan karakteristiknya masing-masing dapat menjadi potensi yang berpeluang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air baku, mandi dan mencuci, serta pariwisata.

Kulong di Kabupaten Bangka Barat yang telah dimanfaatkan adalah *Kulong* Sekar Biru menjadi tempat ekowisata, *Kulong* PAM Perumnas digunakan sebagai sumber air baku, dan *Kulong* PDAM Menumbing. Selain itu, *kulong* yang berpotensi dikembangkan sebagai tempat ekowisata karena memiliki keunikan karakteristik warna *kulong*, keberadaan *kulong* di luar kawasan hutan, dan pengembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah *Kulong* Telaga Biru Muntok.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi yang strategis, yaitu sebagai pintu masuk regional Sumatera yang menggunakan jalur laut. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hirarki



perkotaan, yaitu terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat meliputi:

- a. Kota Muntok ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Kota Kelapa dan Kota Parittiga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak, dan Sangku ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

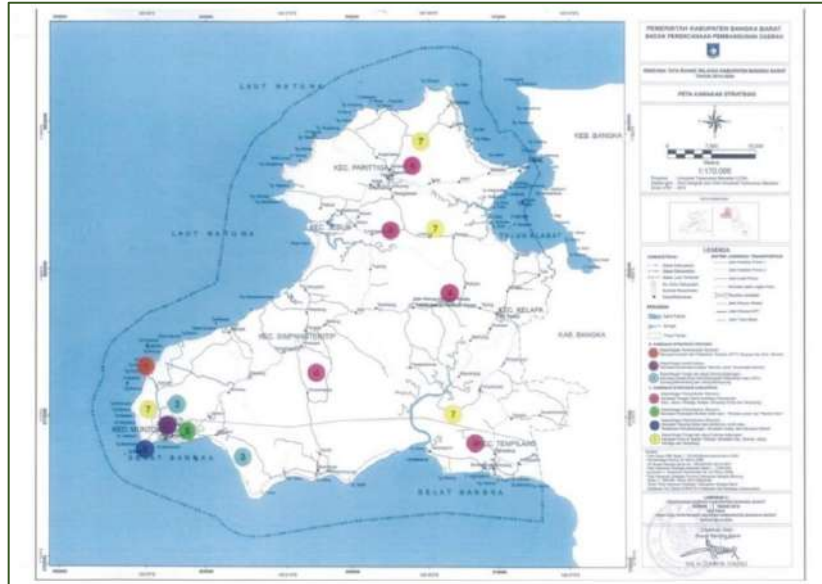
Posisi Kabupaten Bangka Barat yang sangat strategis yakni sebagai pintu gerbang penghubung antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Koridor Sumatera memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka Kabupaten Bangka Barat dapat memainkan peran strategisnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala kabupaten, provinsi, regional Sumatera, maupun pada skala nasional. Dengan adanya potensi tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan atas dasar kepentingan dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034, meliputi:



- a. Kawasan Strategis Provinsi:
 1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang berada di Kecamatan Muntok.
 2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya atau disebut sebagai "Muntok Lama" yang berada Kecamatan Muntok.
 3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten:
 1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu :
 - a) Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpangteritip, dan Tempilang;
 - b) Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas "Muntok Lama" dan "Muntok Baru";
 - c) Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok;
 - d) Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
 2. Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu kawasan konservasi budaya Muntok Lama yang berada di Kecamatan Muntok. Kawasan ini akan dikembangkan dan ditata menjadi wisata budaya serta ilmu pengetahuan.
 3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu kawasan kritis di sekitar "*kulong*" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga, dan Tempilang.

Sebaran Kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.12.



Gambar 2.12 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat
sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

4. Potensi Wisata

Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034 dibagi menjadi 3 SKW (Satuan Kawasan Wisata), yaitu:

- a. SKW I meliputi Kecamatan Muntok dan Simpangteritip. Objek wisata yang ada di SKW I terdiri dari:
 - 1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Pantai Bidadari, Pantai Muntok Asin, Pantai Batu Rakit, Pantai Air Mas Rambat, Pantai Air Nyatoh, Pantai Menggris dan Pantai Karang Aji, Gunung Menumbing, Batu Balai, Tanah Merah, Tungau, dan Mentiba.
 - 2) Wisata Budaya: Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Masjid Jami Muntok, Kelenteng Cina Muntok, Peleburan Timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem



Hamengkubuwono IX, BTW, Makam Bangsawan Melayu, dan Kampung Melayu.

b. SKW II meliputi Kecamatan Jebus dan Parittiga. Objek wisata yang ada di SKW II terdiri dari:

- 1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Ru, Pulau Nanas, Pantai Blembang, Bukit Mempari, Kebun Teh Tayu, Pulau Beri-Beri, Bembang, Siangau, dan Pala Jebu.
- 2) Wisata Budaya: Kelenteng Cina, Makam Haji Khotamarrasyid Bin H. Usman, Sembahyang Bulan, dan Sembahyang Kubur.

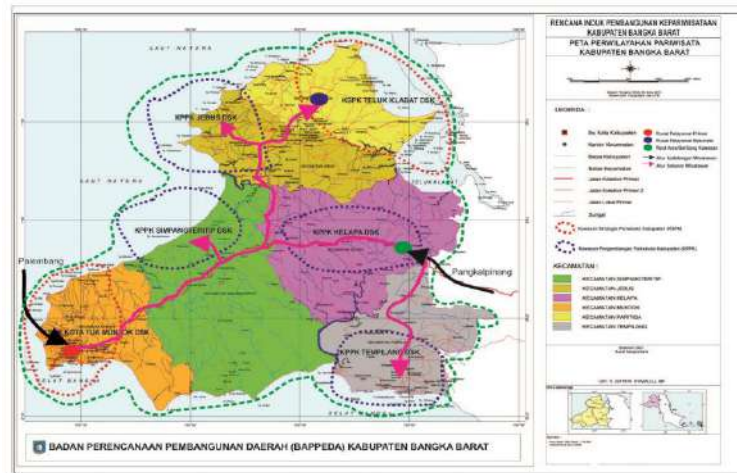
c. SKW III meliputi Kecamatan Tempilang dan Kelapa, terdiri dari kawasan:

- 1) Wisata Alam: Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedacak, Air Panas Dendang, perkebunan sawit, sarang burung walet.
- 2) Wisata Budaya: Benteng Kota Tempilang.

Adapun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat (KPPK) terdiri dari:

- a. KPPK Pariwisata Budaya Bahari Simpangteritip dan sekitarnya;
- b. KPPK Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir Jebus sekitarnya;
- c. KPPK *rest* area wilayah Kelurahan Kelapa dan sekitarnya; dan
- d. KPPK Pariwisata Budaya atau Tradisi Tempilang dan sekitarnya.

Gambaran Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.13.



Gambar 2.13 Peta Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat
sumber: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2027

Berdasarkan gambaran kondisi dan potensi geografis Kabupaten Bangka Barat, potensi pengembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat dapat mengoptimalkan kondisi geografis yang mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan), memiliki tingkat kesuburan “sedang” dapat berpotensi dikembangkan pada sektor perkebunan, sedangkan letak strategis Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan berpotensi menunjang di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, keindahan ekosistem pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata dan di sektor perdagangan dan jasa.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungannya, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir atau genangan dan daerah berpotensi abrasi. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah



Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Daerah rawan bencana di Kabupaten Bangka Barat terlihat pada gambar 2.14.



Gambar 2.14 Peta Rawan Bencana Kabupaten Bangka Barat 2019
sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034

Selama kurun waktu dua tahun terakhir, secara keseluruhan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat 2019–2020

Tahun	Jenis Bencana	Kelapa	Tempilang	Muntok	Simpangteritip	Jebus	Parittiga
2019	Angin Puting Beliung			2			
	Gelombang Pasang		1				
	Abrasi			1			
	Gempa Bumi	1		1			
	Tsunami		1	1	1	1	1
	Banjir						1
2020	Angin Puting Beliung		1	3			
	Gelombang Pasang						
	Abrasi						



Tahun	Jenis Bencana	Kelapa	Tempilang	Muntok	Simpangteritip	Jebus	Parittiga
	Gempa Bumi						
	Tsunami						
	Banjir					1	

sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka Tahun 2019; Kabupaten Bangka Barat dalam Angka Tahun 2020

2.1.4. Demografi

Penduduk adalah salah satu aset penting yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat dalam upaya proses pembangunan daerah. Aset penting ini berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kualitas penduduk yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat. Semakin tinggi tingkat kualitas penduduknya, maka akan semakin baik pula proses pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Barat. Sebaliknya, apabila tingkat kualitas penduduknya rendah, maka proses pembangunan akan terkendala bahkan dapat menjadi beban daerah. Hal ini karena rendahnya kualitas penduduk dapat berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya analisis demografi secara mendalam yang dapat dijadikan sebagai ladsan atau pedoman bagi bupati dan wakil bupati dalam proses penyusunan maupun pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada kebijakan kependudukan.

Demografi sendiri merupakan ilmu tentang kependudukan yang meliputi statistik penduduk atau perubahan-perubahan pada statistik penduduk yang dapat disebabkan oleh berbagai macam peristiwa seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dalam praktiknya, penduduk tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan semata. Lebih dari itu, penduduk dapat berperan subjek penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat di segala bidang.



Perubahan demografi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat di tengah dinamisnya perkembangan masyarakat. Perlu adanya aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat sebagai modal pembangunan yang kuat. Aspek-aspek ini juga menjadi bagian dari aspek demografi, yaitu sumber daya alam, ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, jumlah penduduk, dan sumber daya manusia.

Berdasarkan informasi demografi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten Bangka Barat berjumlah 204.527 jiwa dengan laju perubahan pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 1,21%. Angka ini dapat dikategorikan sebagai laju pertumbuhan sedang. Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bangka Barat tetap perlu dikendalikan agar tidak meningkat yang pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Secara administratif dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kelapa, Kecamatan Tempilang, Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga. Dari 6 kecamatan ini, Kecamatan Muntok merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak, yakni 53.008 jiwa atau sebesar 25,92% dari total banyaknya penduduk di Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Jebus merupakan wilayah dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.531 jiwa atau 11,02% dari total banyaknya penduduk di Kabupaten Bangka Barat. Secara



lengkap, statistik penduduk per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat terlihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk per kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	(%)
1.	Kelapa	34.823	17,03
2.	Tempilang	28.246	13,81
3.	Muntok	53.008	25,92
4.	Simpangteritip	30.658	14,99
5.	Jebus	22.531	11,02
6.	Parittiga	35.261	17,24
	Total	204.527	100

sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu tiga tahun 2017—2020 sebesar 1,21% per tahun. Berdasarkan data pada tabel 2.8, Kecamatan Parittiga merupakan kecamatan yang memiliki LPP tertinggi yakni sebesar 1,58% per tahun dan Kecamatan Kelapa merupakan kecamatan yang memiliki LPP rata-rata terendah, yaitu sebesar 1,00% per tahun. Secara rinci, LPP setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No	Kecamatan	LPP(%)
1.	Kelapa	1,00
2.	Tempilang	1,14
3.	Muntok	1,05
4.	Simpangteritip	1,29
5.	Jebus	1,29
6.	Parittiga	1,58

sumber : Data diolah, 2021

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai 73 jiwa/km². Tercatat, Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan rata - rata kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bangka Barat, yaitu mencapai 102 jiwa/km², sedangkan Kecamatan



Simpangteritip merupakan kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk paling rendah, yaitu sebesar 46 jiwa/km². Meskipun Kecamatan Muntok (102 jiwa/km²) memiliki penduduk terbanyak di Kabupaten Bangka Barat, bila dihitung berdasarkan klasifikasi rata-rata kepadatan penduduknya, Kecamatan Muntok tetap pada kualifikasi kepadatan penduduk yang rendah. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kecamatan lain yang memiliki kepadatan penduduk di bawah Kecamatan Muntok secara otomatis juga tergolong memiliki kepadatan penduduk dengan kualifikasi rendah. Secara rinci, perhitungan kepadatan penduduk Kabupaten Bangka Barat, rata-rata kepadatan penduduk perkecamatan tahun 2017–2020, dan klasifikasi kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Rata-Rata Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Tahun	Banyaknya Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata (Jiwa/km ²)	Klasifikasi	Rata-rata Kepadatan 2020 (Jiwa/km ²)
Kelapa	2017	33.141	573,8	58	59	Rendah	73
	2018	33.761		59			
	2019	34.056		59			
	2020	34.823		61			
Tempilang	2017	26.692	461,06	58	60	Rendah	
	2018	27.281		59			
	2019	27.530		60			
	2020	28.246		61			
Muntok	2017	50.303	505,94	99	102	Rendah	
	2018	51.467		102			
	2019	51.795		102			
	2020	53.008		105			
Simpangteritip	2017	28756	637,35	45	46	Rendah	
	2018	29287		46			
	2019	29529		46			
	2020	30658		48			
Jebus	2017	21131	351,93	60	62	Rendah	
	2018	21605		61			
	2019	21876		62			



Kecamatan	Tahun	Banyaknya Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rata-rata (Jiwa/km ²)	Klasifikasi	Rata-rata Kepadatan 2020 (Jiwa/km ²)
	2020	22531		64			
Parittiga	2017	32603	354,11	92	96	Rendah	
	2018	33665		95			
	2019	34245		97			
	2020	35261		100			

Sumber : data diolah, 2021

Keterangan:

Klasifikasi (Modifikasi Permen PUPR No 02/PRT/M/2016)

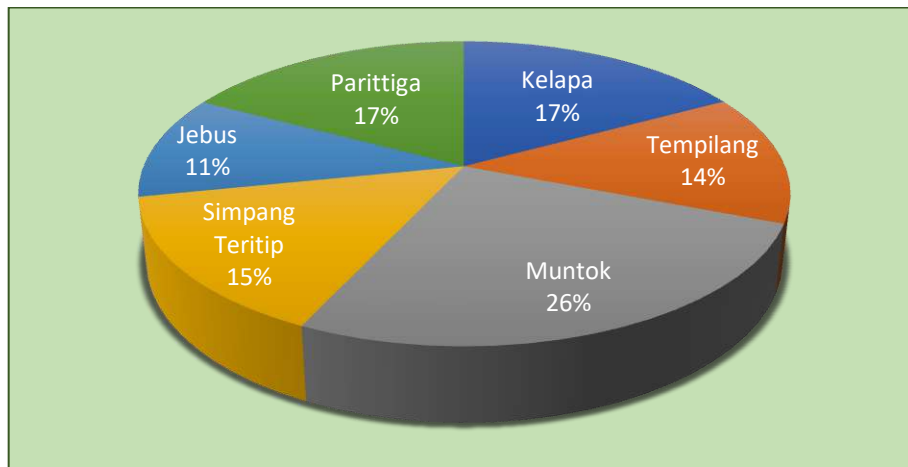
Sangat Padat: >40.000 (jiwa/km²)

Tinggi: 20.100 - 40.000 (jiwa/km²)

Sedang: 15.100 - 20.000 (jiwa/km²)

Rendah: <15.000 (jiwa/km²)

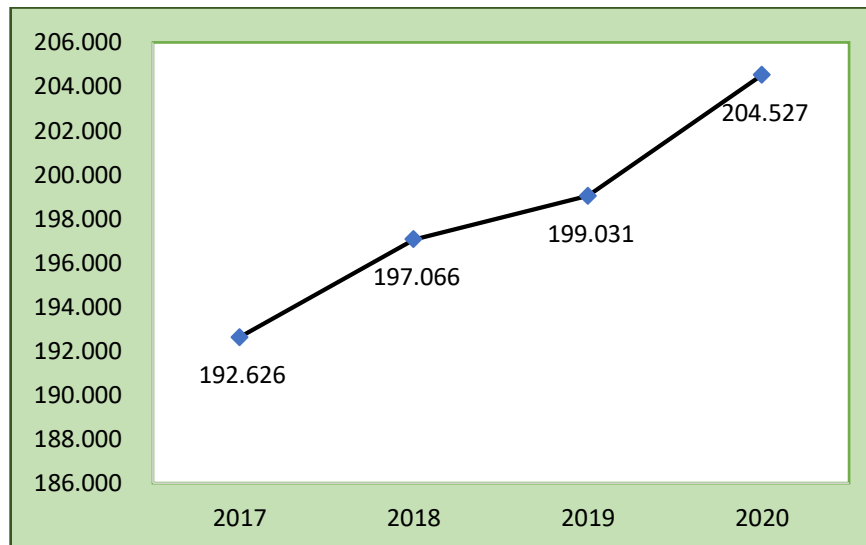
Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Muntok merupakan kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada kecamatan lain, walaupun luas wilayah Kecamatan Muntok bukan merupakan wilayah terluas atau terkecil. Kecamatan Simpangteritip merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan daerah lain, termasuk bila dibandingkan dengan Kecamatan Muntok. Oleh sebab itu, kepadatan penduduk tidak berkorelasi dengan luas lahan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diharapkan untuk tetap mempertimbangkan pemerataan penduduk agar tidak terjadi kepadatan pada daerah atau wilayah tertentu saja. Dapat dikatakan bahwa upaya penyeimbangan pemerataan (distribusi) penduduk di setiap kecamatan dapat dilakukan melalui pengarahan oleh para pengambil kebijakan. Gambaran distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.15.



Gambar 2.15 Diagram Distribusi Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka akan semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan sesuai kondisi daerah agar laju pertumbuhan penduduk yang tinggi atau peningkatan jumlah penduduk tidak menjadi masalah, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun dari perspektif dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai bagi masyarakat. Peningkatan penduduk di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.16.



Gambar 2.16 Grafik Jumlah Penduduk
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Di samping itu, dapat pula kita lihat proyeksi penduduk di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021—2026 yang diperoleh berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata pertahun periode 2017—2020 dengan melibatkan jumlah penduduk di tahun 2017 sebagai tahun dasar, jumlah penduduk 2020 sebagai tahun akhir, dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017—2020. Penghitungan proyeksi penduduk tersebut menggunakan Metode *Postcensal Estimated*. Dihasilkan bahwa dengan menggunakan rumus tersebut terjadi peningkatan penduduk di Kecamatan Kelapa setiap tahunnya sebanyak 456 jiwa, Kecamatan Tempilang sebanyak 482 jiwa, Kecamatan Muntok sebanyak 892 jiwa, Kecamatan Simpangteritip sebanyak 543, Kecamatan Jebus sebanyak 382, dan Kecamatan Parittiga sebanyak 757 jiwa. Hasil perhitungan dengan menggunakan Metode *Postcensal Estimated* terlihat pada tabel 2.11.

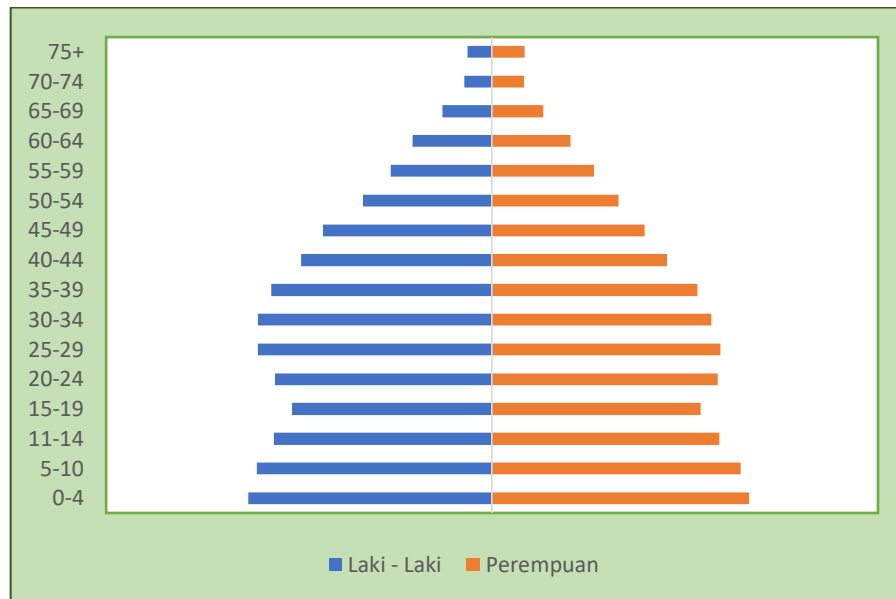


Tabel 2.11 Proyeksi Penduduk Kabupaten Bangka Barat per Kecamatan Tahun 2021—2026

Kecamatan	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kelapa	35.279	35.735	36.191	36.647	37.103	37.559
Tempilang	28.728	29.209	29.691	30.172	30.654	31.136
Muntok	53.900	54.791	55.683	56.574	57.466	58.358
Simpangteritip	31.201	31.744	32.286	32.829	33.372	33.915
Jebus	22.913	23.295	23.677	24.059	24.441	24.823
Parittiga	36.018	36.775	37.533	38.290	39.047	39.804
Jumlah	208.038	211.549	215.061	218.572	222.083	225.594

sumber: Data diolah, 2021

Di sisi lain, bila ditinjau dari aspek usia, banyaknya penduduk Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh masyarakat usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2020 mencapai 137.917 jiwa atau senilai 67,43% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang ini dapat menjadi keuntungan bagi perkembangan daerah Kabupaten Bangka Barat. Keuntungan (*demographic dividend*) disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan tantangan yang hadir dapat pula menjadi ancaman bagi perkembangan daerah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang merupakan tingkat ketergantungan yang ditinjau dari usia non produktif (0-14 tahun dan besar dari 65 tahun), sebesar 57.074 jiwa (0-14 tahun) atau senilai 27,91% dan 9.536 jiwa (>65 tahun) atau senilai 4,66%. Banyaknya penduduk berdasarkan aspek usia dapat dilihat pada gambar 2.17.



Gambar 2.17 Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Gender di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Dapat disimpulkan bahwa banyaknya penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15—64 tahun) dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, jasmani, rohani, optimalisasi pengelolaan tata kota dan desa. Banyaknya jumlah penduduk diusia produktif ini tidak akan dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam proses pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Oleh sebab itu, agar kondisi seperti ini tidak menjadi ancaman dalam proses pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus menyiapkan kebijakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan handal bagi masyarakat di berbagai bidang.



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah barang barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh daerah pada periode satu tahun. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah nilai PDRB. Angka PDRB bermanfaat untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap kategori ekonomi.

Perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mengalami pukulan yang cukup berat akibat pandemi Covid-19 dengan tingkat kontraksi PDRB sebesar -5,43% pada tahun 2020. Secara umum, PDRB Kabupaten Bangka Barat mencapai angka sekitar Rp10.3 triliun pada tahun 2020. Diketahui bahwa kapasitas ekonomi Kabupaten Bangka Barat ditopang oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan dengan angka Rp4.9 triliun dan diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori pertanian, dan yang terakhir adalah kategori pertambangan dengan nilai kisaran pada angka Rp1 triliun. Secara detail, perkembangan nilai kategori dalam PDRB tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Perkembangan Nilai Kategori dalam PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Kategori		2016	2017	2018r	2019*	2020**
		(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)
Sektor Primer						
A	Pertanian	1.281.698	1.279.011	1.299.049	1.296.720	1.343.376
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.168.179	1.196.312	1.202.074	1.218.992	1.052.798
Sektor Sekunder						
C	Industri Pengolahan	4.171.349	4.443.577	4.753.190	5.327.372	4.944.826
D	Listrik, dan gas	3.463	3.677	3.991	4.592	5.479
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah,	606	653	653	666	716



Kategori		2016	2017	2018r	2019*	2020**
		(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)
	limbah dan daur ulang					
F	Konstruksi	514.076	550.316	590.110	612.823	603.886
Sektor Tersier						
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.086.086	1.165.904	1.218.669	1.270.768	1.188.430
H	Transportasi dan Pergudangan	76.828	82.861	88.282	91.234	79.032
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.938	103.646	88.282	91.234	79.032
J	Informasi dan Komunikasi/Information	30.006	32.600	106.546	110.487	109.765
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	34.014	34.708	36.025	40.546	50.475
L	Real Esta	173.761	182.532	195.846	198.926	208.685
M,N	Jasa Perusahaan	12.368	12.875	13.453	13.503	12.274
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326.245	351.692	380.124	403.251	400.728
P	Jasa Pendidikan	127.585	140.038	152.805	161.989	160.755
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	60.655	66.053	71.452	76.252	77.070
R,S, T,U	Jasa lainnya	25.285	27.256	28.381	29.654	28.264
Produk Domestik Regional Bruto		9.190.201	9.673.709	10.177.199	10.897.397	10.306.008

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

BPS Kabupaten Bangka Barat menganalisis kontribusi dengan cara membagi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer adalah kategori lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Sektor ini meliputi kategori lapangan usaha Pertanian, Pertambangan, dan Penggalian. Sektor Sekunder adalah kategori lapangan usaha yang mengolah bahan baku dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi kategori lapangan usaha Bangunan, Industri Pengolahan dan Listrik, Gas dan Air Bersih. Sektor tersier adalah kategori lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Kategori lapangan usaha ini



meliputi Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-jasa.

Berdasarkan PDRB lapangan usaha dengan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2019 mengalami peningkatan yang cukup baik, namun mengalami penurunan di sebagian besar kategori pada tahun 2020. Secara umum, beberapa kategori lapangan usaha yang memiliki kemajuan yang cukup pesat adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan lainnya. Dari beberapa peningkatan lapangan usaha tersebut dapat kita lihat bahwa sektor sekunder dan tersier justru berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan sektor primer. Perkembangan ini menunjukkan adanya indikasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di Kabupaten Bangka Barat.

Kategori lapangan usaha konstruksi memperlihatkan pembangunan infrastruktur, *real estate* menggambarkan perumahan dan kategori lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat sudah masuk ke era industrialisasi yang lebih maju. Demikian juga pada kategori lapangan usaha pertanian menunjukkan perkembangan yang cukup baik di tahun 2018 dan 2020, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan -0,18%. Hal ini dikarenakan harga komoditas pertanian seperti sawit berfluktuasi akibat perang dagang Amerika dan Tiongkok.

Pandemi Covid-19 menjadi suatu tantangan yang berat bagi perekonomian nasional, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Barat juga mengalami penurunan pada sebagian besar kategori ekonomi unggulannya, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar serta eceran;



reparasi mobil dan sepeda motor, maupun kategori lainnya. Hal ini terlihat dari perkembangan nilai kategori PDRB dari tahun 2016—2020 pada tabel 2.13.

Tabel 2.13 Perkembangan Nilai Kategori dalam PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

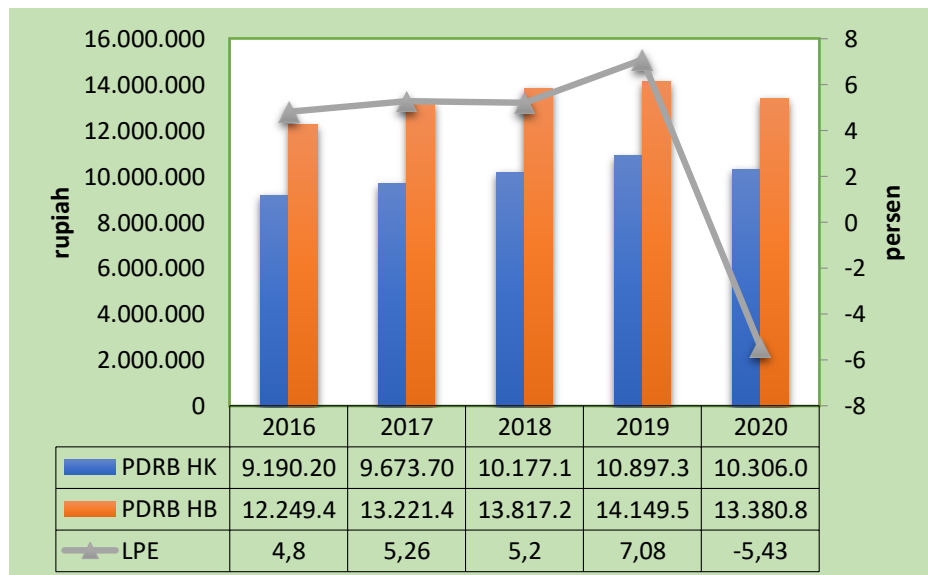
No.	Kategori	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
		(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)	(Juta Rupiah)
Sektor Primer						
A	Pertanian	1.858.567	1.865.339	1.666.972	1.636.538	1.779.445
B	Pertambangan dan Penggalian	1.337.909	1.416.122	1.309.927	1.176.959	1.006.117
Sektor Sekunder						
C	Industri Pengolahan	5.137.644	5.578.855	6.083.728	6.416.637	5.736.245
D	Listrik, dan gas	6.160	7.460	8.189	9.590	11.603
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	880	986	998	1.025	1.171
F	Konstruksi	770.096	880.683	997.151	1.062.657	1.052.522
Sektor Tersier						
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.652.680	1.851.269	2.010.133	1.990.959	1.873.023
H	Transportasi dan Pergudangan	113.202	122.348	132.363	140.699	124.730
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143.824	154.679	132.363	140.699	124.730
J	Informasi dan Komunikasi/Information	37.067	41.162	165.724	177.841	187.597
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	49.852	53.332	45.710	51.686	64.131
L	Real Esta	247.216	265.344	289.216	295.076	316.046
M,N	Jasa Perusahaan	17.735	18.816	20.254	20.983	20.316
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	535.691	588.123	624.887	669.574	693.922
P	Jasa Pendidikan	214.619	236.915	251.828	269.780	282.508
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	90.188	99.946	108.588	119.860	122.491
R,S,T, U	Jasa lainnya	36.103	40.047	43.122	46.002	45.900
PDRB		12.249.433	13.221.427	13.817.299	14.149.513	13.380.887

sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019 meningkat, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan



yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB 2016—2019 hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Penurunan pada tahun 2020 dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2019 mencapai Rp14.14 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp13.380 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,49%. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,5%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB menjadi Rp13,38 triliun.



Gambar 2.18 Perkembangan PDRB dan LPE
Kabupaten Bangka Barat 2016-2020

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Nilai PDRB ADHB dalam periode tahun 2016—2019 meningkat dari Rp12.24 triliun pada tahun 2016, menjadi Rp13.22 triliun pada tahun 2017. Tahun 2018 nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp13.8 triliun. Meningkat di tahun 2019 menjadi Rp14.14 triliun, sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp13.38 triliun. Karakteristik perekonomian Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari



struktur perekonomian yang menggambarkan tentang keunggulan masing-masing kategori. Keunggulan ini dihitung berdasarkan kontribusi setiap kategori terhadap total PDRB. Kontribusi yang paling besar dapat dikategorikan sebagai kategori basis dan kategori unggulan daerah. Nilai PDRB ADHB dan ADHK kabupaten/kota Provinsi Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14 PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten/Kota
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Kabupaten	PDRB HB	PDRB HK
		Nilai (Miliar Rupiah)	Nilai (Miliar Rupiah)
1.	Pangkalpinang	13.464	8.798
2.	Belitung Timur	7.857	5.465
3.	Bangka Selatan	8.695	6.054
4.	Bangka Tengah	8449	5.715
5.	Bangka Barat	13.391	10.306
6.	Belitung	9839	6.352
7.	Bangka	13.944	9.987

sumber: BPS Provinsi Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB Harga Berlaku tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ke-3 sebesar Rp13.391 miliar dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di peringkat pertama diduduki Kabupaten Bangka, disusul peringkat ke-2 Kota Pangkalpinang. Sementara nilai PDRB Harga Konstan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat teratas se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp10.306 miliar. Kontribusi masing-masing kategori terhadap PDRB ADHB tahun 2016—2020 tergambar dalam tabel 2.15.



Tabel 2.15 Distribusi PDRB ADHB
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	Kategori	2016	2017	2018 ^f	2019*	2020**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Sektor Primer						
A	Pertanian	15,17	14,11	12,06	11,57	13,33
B	Pertambangan dan Penggalian	10,92	10,71	9,48	8,32	7,51
Sektor Sekunder						
C	Industri Pengolahan	41,94	42,20	44,03	45,35	42,84
D	Listrik, dan gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,29	6,66	7,22	7,51	7,87
Sektor Tersier						
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	14,00	14,55	14,07	14,05
H	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,93	0,96	0,99	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	1,20	1,26	1,40
J	Informasi dan Komunikasi/Information	0,30	0,31	0,33	0,37	0,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,40	0,42	0,45	0,47
L	Real Estat	2,02	2,01	2,09	2,09	2,36
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	4,45	4,52	4,73	5,18
P	Jasa Pendidikan	1,75	1,79	1,82	1,91	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	0,79	0,85	0,91
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Kategori industri pengolahan menjadi kontributor terbesar bagi pembentukan PDRB pada rentang waktu tahun 2016—2020. Pada tahun 2019, peranannya mencapai 45,35% terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Barat. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan kategori industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 5,47%. Meskipun di tahun 2020 distribusi PDRB kategori industri pengolahan mengalami penurunan yaitu



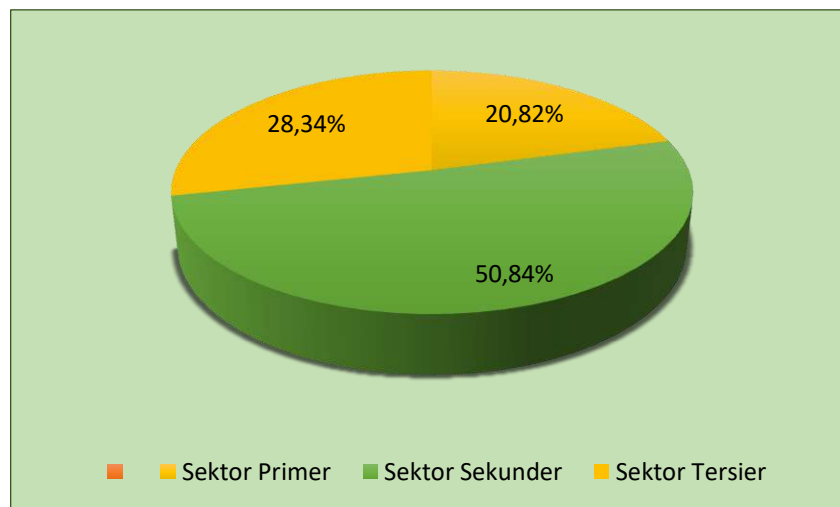
sebesar 42,87% dengan laju pertumbuhan ekonomi -10,6%, kategori tersebut masih menjadi kontributor terbesar.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu penyedia kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan industri. Penurunan produksi juga berarti penurunan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2016—2017, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB menjadi penyumbang terbesar ke-2 terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat. Meskipun demikian, selama tahun 2016—2019, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,17%, menjadi 14,11% pada tahun 2017. Selanjutnya menurun di tahun 2018 sebesar 12,06%, dan tahun 2019 perlahan turun menjadi sebesar 11,57%. Sebaliknya terjadi pada tahun 2020, tercatat meningkat menjadi 13,33%. Pengaruh pandemi Covid-19 memang memiliki pola yang berbeda terhadap kategori ini. Pada awalnya, terjadi penurunan pertumbuhan. Namun nyatanya malah berbalik dampaknya menjadi positif. Tentunya kedepan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan harus menjadi perhatian bagi daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Sebab, terbukti kategori ini tumbuh positif disaat terjadinya krisis.

Kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mempunyai peran cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat. Selama tahun 2016—2020, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang terbesar ke-3. Pada tahun 2019, peranan pada kategori ini menempati peringkat kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat dengan peranan nilai tambah yang dihasilkan mencapai 14,07%. Namun, nilai pada tahun 2019 tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 kategori ini mencapai

angka 14,55% dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 14,05%. Kategori ini berdampak signifikan disebabkan penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini karena hadirnya kebijakan *social distancing* dan himbauan untuk *stay at home*. Pada bidang penjualan mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan yang signifikan akibat menurunnya pendapatan masyarakat yang terdampak.

Timah masih menjadi komoditas utama pada kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kabupaten Bangka Barat. Selama tahun 2016—2020, lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar ke-4 terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2016—2020, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sempat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan stok timah dunia sehingga mengakibatkan harga logam timah menurun. Distribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada gambar 2.19.



Gambar 2.19 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
sumber: Data diolah, 2021

Sektor sekunder menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat yaitu 50,84% terdiri dari kategori lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 42,87%, listrik dan gas sebesar 0,09%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,01% dan konstruksi memiliki kontribusi yang cukup tinggi



yaitu sebesar 7,87%. Sementara sektor primer hanya memiliki kontribusi sebesar 20,8%. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,30%. Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalan memiliki kontribusi sebesar 7,52% terhadap perekonomian. Sektor tersier yang merupakan kategori pendukung kegiatan administrasi, jasa perdagangan, dan lain-lain memiliki kontribusi sebesar 28,34% terhadap perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam kategori ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB ADHK secara berkala.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menurun. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai Rp10,30 triliun, turun dibandingkan tahun 2019 yang bernilai sebesar Rp10,89 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada tahun



2020 mengalami kontraksi sebesar -5,43%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. LPE PDRB Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 disajikan dalam tabel 2.16.

Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Tahun 2016—2020

No.	Kategori	2016 (%)	2017 (%)	2018r (%)	2019* (%)	2020** (%)
Sektor Primer						
A	Pertanian	7,46	-0,21	1,57	(0,18)	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	-13,63
Sektor Sekunder						
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Listrik, dan gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
Sektor Tersier						
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	2,80	3,70	-0,65
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	10,51	12,55	18,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	6,55	7,14	-0,44
L	Real Estat	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69
PDRB		4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021



Perekonomian Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016—2019 mengalami percepatan pertumbuhan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat sebesar 5,59%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami pada tahun 2019 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7,08%. Kategori industri pengolahan; listrik dan gas sejak tahun 2016—2019 memberikan kontribusi pertumbuhan yang baik. Pada tahun 2019, listrik dan gas menjadi kontributor utama dengan pencapaian 15,06% dari 8,55% di tahun 2018. Kontributor terbesar kedua dan ketiga yaitu kategori informasi dan komunikasi; dan kategori industri pengolahan masing-masing dengan capaian 12,55% dan 12,08%.

Pada tahun 2020, hampir keseluruhan kategori mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 76,19% atau 16 kategori dari 21 kategori yang menurun secara signifikan. Pertahanan pertumbuhan ekonomi bersumber dari kategori listrik dan gas sebesar 19,30%. Selain itu, kategori informasi dan komunikasi menjadi kontributor kedua terbesar setelah kategori listrik dan gas dengan pencapaian 18,44%.

Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi menurun secara agregat. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai -5,43% pada tahun 2020. Kategori-kategori yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa lainnya. Kategori yang paling terpuak di era pandemi Covid-19 adalah pertambangan dan penggalian dengan penurunan sebesar 13,63%.

Perbandingan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat dengan PDRB ADHK kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.17.



Tabel 2.17 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016—2020

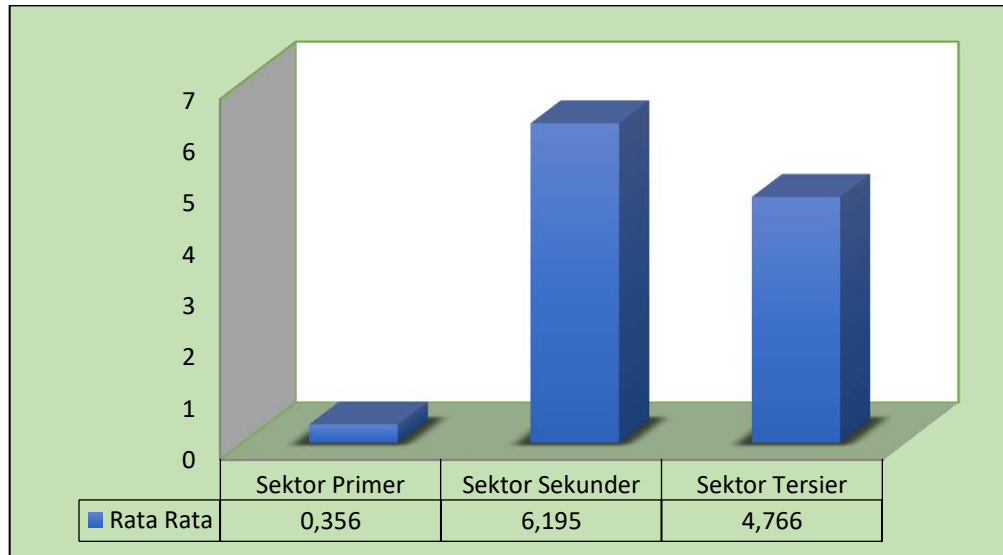
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Bangka	4,63	5,04	4,52	2,89	-0,73
Belitung	4,96	5,30	5,38	3,36	-2,31
Bangka Barat	4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43
Bangka Tengah	3,05	3,46	3,42	1,23	-2,87
Bangka Selatan	4,30	4,57	4,52	2,55	-1,99
Belitung Timur	4,25	4,85	4,22	3,29	-0,66
Pangkalpinang	5,17	5,19	5,08	3,29	-3,02
Jumlah/Total	4,53	4,89	4,69	3,65	-2,62

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Jika dilihat secara spasial per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka, laju pertumbuhan ekonominya berfluktuasi pada tahun 2016—2019, Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan di tahun 2016—2019, tetapi pada tahun 2019 mengalami kontraksi. Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016—2019. Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016—2017 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2018—2019 mulai mengalami penurunan dan angka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016—2019 terendah se-Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten Bangka Selatan mengalami peningkatan dari 2016—2017 dan pada tahun 2018—2019 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016—2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018—2019 mengalami penurunan hal tersebut pula terjadi di Kota Pangkalpinang. Secara keseluruhan pada tahun 2020 seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan kontraksi paling tinggi yaitu Kabupaten Bangka barat.

Apabila dilihat dari pertumbuhan per sektor, menunjukkan bahwa ditahun 2020 pertumbuhan sektor sekunder paling tinggi, disusul sektor

tersier dan primer. Perhatikan grafik pertumbuhan rata-rata sektor PDRB pada gambar 2.20.



Gambar 2.20 Pertumbuhan Rata-Rata Sektor PDRB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa sektor sekunder tahun 2016—2020 memiliki tingkat perkembangan yang cukup signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Sektor tersier menjadi penopang kedua pertumbuhan ekonomi di Bangka Barat sementara sektor primer mempunyai kontribusi terendah pertumbuhan ekonomi di tahun 2019—2020. Jika dilihat grafik pertumbuhan rata-rata pertahun sektor primer menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun hanya sebesar 0,36%, sedangkan sektor sekunder menunjukkan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,2% dan sektor tersier sebesar 4,8%.

Selanjutnya akan dilakukan analisis kategori menggunakan empat kuadran. Empat kuadran merupakan kluster yang memisahkan kategori yang mengalami peningkatan maupun penurunan, baik dari sisi kontribusi maupun pertumbuhan. Terdapat empat klasifikasi yang akan dibuat untuk



memberikan indikasi pada setiap kategori yang sudah disusun menurut Sjafrizal (1997)².

1. Kategori Relatif Tertinggal (dengan klasifikasi distribusi $<5,88\%$ dan pertumbuhan $<5,22\%$);
2. Kategori Berkembang Cepat (dengan klasifikasi Kontribusi Sektor $<5,88\%$ dan Pertumbuhan Sektor $>5,22\%$);
3. Kategori Maju tapi Tertekan (dengan klasifikasi distribusi $>5,88\%$ dan pertumbuhan $<5,22\%$);
4. Kategori Maju dan Tumbuh Cepat (dengan klasifikasi distribusi $>5,88\%$ dan pertumbuhan $>5,22\%$).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat delapan kategori yang mendapatkan status relatif tertinggal. Diketahui bahwa kategori tersebut memiliki rata-rata distribusi dan pertumbuhan yang cukup rendah selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat memiliki lima kategori yang mengalami perkembangan yang cukup baik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan lebih tinggi dari $5,22\%$. Hal ini berhubungan dengan pemerintahan dan kategori jasa seperti keuangan, asuransi pendidikan, serta kategori utilitas seperti listrik dan gas.

Selanjutnya, terdapat lima kategori yang termasuk kuadran maju tapi tertekan. Kategori dengan tingkat distribusi $>5,88\%$ dari keseluruhan kategori merupakan kategori yang harus sangat diperhatikan oleh pemerintah baik dari sisi eksternal maupun internal masyarakat. Diketahui bahwa dalam lima tahun terakhir, empat dari lima kategori yang ada di kuadran ini berkembang dengan cukup baik dan positif. Terdapat satu kategori yang mengalami perlambatan, yaitu kategori pertambangan dan penggalian. Pelemahan pada kategori pertambangan dan penggalian dianggap cukup wajar, mengingat cadangan timah yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat semakin menipis, sehingga pemerintah harus

²Sjafrizal, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat* (Prisma, LP3ES, Nomor 3, 1997).



lebih fokus untuk mempersiapkan kategori lainnya untuk semakin tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik dari sisi SDM maupun kawasan. Secara rinci, perhatikan tabel 2.18.

Tabel 2.18 Klasifikasi Kategori PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 Berdasarkan Tipologi *Klassen*

Kriteria	Pertumbuhan Sektoral < 5,22%	Pertumbuhan Sektoral > 5,22%
Kontribusi Sektoral < 5,88	<p>SEKTOR RELATIF TERTINGGAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan air, Pengelolaan sampah. limbah dan daur ulang (0,01;4.83) (Kontribusi;Pertumbuhan) • Jasa Perusahaan, (0,144;0,812) • Jasa lainnya, (0,314;4.386) • Informasi dan (0,8; 0,144) • Komunikasi/Information,(0,894;4.68) • Transportasi dan Pergudangan,(0,984;2.176) • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,044;2.048) • Real Estate (2,11;4.974) 	<p>SEKTOR BERKEMBANG CEPAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Keuangan dan Asuransi(0,398;10,794) • Listrik. Dan gas (0,066;10,438) • Jasa Pendidikan, (1,876;6,71) • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (0,814;6,588) • Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,656;5,762)
Kontribusi Sektoral > 5,88	<p>SEKTOR MAJU TAPI TERTEKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan (43.278;4,35) • Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,02;3.496) • Pertanian kehutanan dan perikanan (13.242;2,44) • Pertambangan dan Penggalian (9.39;-1,73) • Konstruksi (7,11;5.162) 	<p>SEKTOR MAJU DAN TUMBUH CEPAT</p>

sumber: data diolah, 2021

B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB perkapita per tahun diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB tahun itu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Artinya,



pengukuran tersebut bertujuan untuk melihat berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. Kenaikan PDRB perkapita merupakan indikasi awal dari perekonomian masyarakat yang semakin baik. PDRB perkapita merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB perkapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19 PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha (Ribu rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

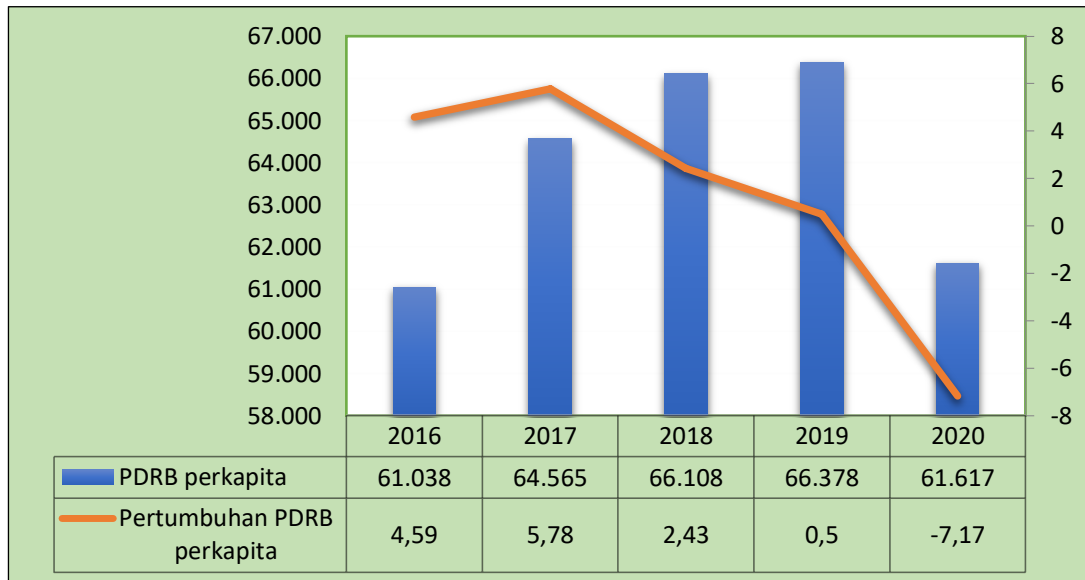
Tahun	ADHB		ADHK	
	Perkapita	Tumbuh (%)	Perkapita	Tumbuh (%)
2016	61.038	4,59	45.794,4	2,66
2017	64.565	5,78	47.240,0	3,16
2018	66.108	2,43	48.692,2	3,07
2019	66.378,8	0,5	51.122,4	4,99
2020	61.617,2	-7,17	47.420,6	-7,24

sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB ADHB perkapita Kabupaten Bangka Barat selama empat tahun terakhir (2016—2019) selalu mengalami kenaikan dan menurun di tahun 2020. Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar Rp61,617,2 juta atau terjadi kontraksi sebesar -7,17%. PDRB ADHK perkapita tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp47,420,6 juta yang mengalami kontraksi dari tahun 2019 sebesar -7,24%. Perbandingan PDRB perkapita

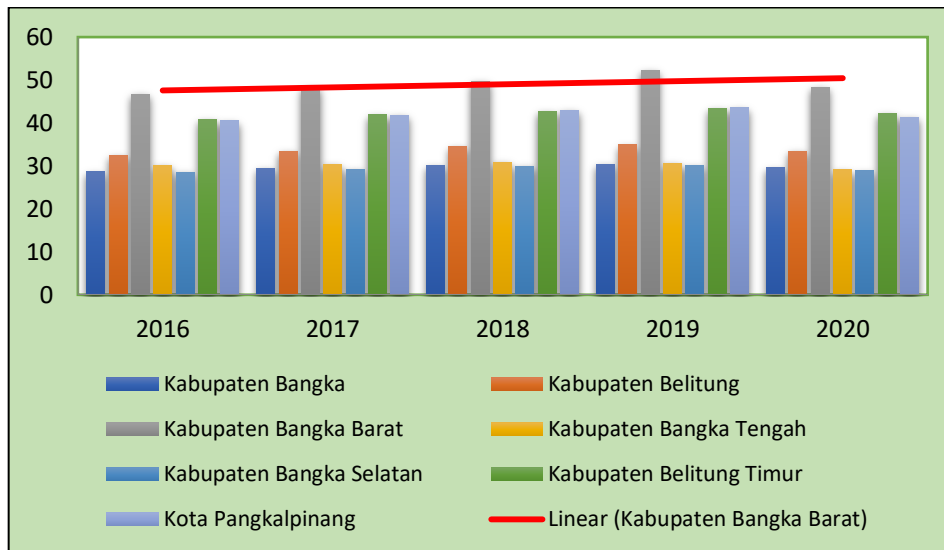


dengan Pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2016—2020 dapat dilihat pada gambar 2.21.



Gambar 2.21 Perbandingan PDRB perkapita dengan Pertumbuhan PDRB perkapita Tahun 2016—2020
sumber : BPS Bangka Barat, 2021

Untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran penduduk, serta tingkat pembangunan di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat (ADHB) selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai PDRB perkapita sebesar Rp61,038 juta dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019, namun mengalami penurunan menjadi Rp61,617 juta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016—2020), PDRB perkapita di Kabupaten Bangka Barat pertumbuhannya mengalami fluktuatif antara 0,5%—5,78% sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020 menjadi -7.17%. Untuk melihat perbandingan PDRB Kabupaten Bangka Barat dengan kabupaten lainnya digambarkan pada gambar 2.22 .



Gambar 2.22 Grafik PDRB ADHK Perkapita Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sumber : Data diolah, 2021

Jika dilihat PDRB perkapita kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Dari tahun 2016—2020 Kabupaten Bangka Barat tertinggi angka PDRB ADHK perkapita menurut kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2016—2019 menunjukkan tren meningkat namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan tetapi dalam nilai PDRB ADHK perkapita masih menunjukkan angka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik di atas menunjukkan bahwa tren pendapatan perkapita di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016—2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Kondisi menarik justru didapatkan ketika membandingkan pendapatan perkapita antar kabupaten. Diketahui bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan, hal ini



menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun, meskipun pertumbuhannya semakin menurun.

C. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Data inflasi Kabupaten Bangka Barat merujuk ke angka inflasi Kota Pangkalpinang. Selama enam tahun terakhir ini laju inflasi di Kota Pangkalpinang berfluktuasi. Persentase laju inflasi dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20 Laju Inflasi Kabupaten Bangka Barat menggunakan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Inflasi	%	7,78	2,66	3,45	2,31	1,09

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.19, selama lima tahun terakhir ini laju inflasi di Kota Pangkalpinang berfluktuasi. Inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,78%. Adapun inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,09%. Angka inflasi pada tahun 2016 sebesar 7,78%. Pada tahun 2017 laju inflasi menurun cukup tajam yaitu 2,66%. Pada tahun 2018 laju inflasi mengalami kenaikan menjadi 3,45%. Pada tahun 2019 laju inflasi menurun menjadi 2,31% dan pada tahun 2020 laju inflasi kembali mengalami penurunan menjadi 1,09%.

Inflasi yang terjadi didorong oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, transportasi, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Jika tingkat inflasi tidak dikontrol, maka daya beli masyarakat akan semakin berkurang, sehingga diperlukan peranan pemerintah dalam menjaga harga bahan kebutuhan pokok agar tetap stabil. Hal ini



seharusnya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena tingkat inflasi mempengaruhi daya beli masyarakat.

D. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,89% berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional (10,19%) pada September 2020. Jika dilihat secara Nasional, tingkat kemiskinan di Bangka Belitung terendah ke-4 pada September 2020. Di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan Bali terendah se-Indonesia. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka Garis Kemiskinan tertinggi namun angka kemiskinannya rendah yaitu no 4 terendah se-Indonesia.

Pada konteks Kabupaten Bangka Barat, selama kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun, yaitu dari 2,74% di tahun 2016 menjadi 2,70% di tahun 2020. Seiring dengan hal tersebut, persentase penduduk di atas garis kemiskinan pun mengalami peningkatan yaitu dari 97,26% di tahun 2016 menjadi 97,30% di tahun 2020. Adapun garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 sebesar Rp440.850, menjadi Rp589.894 di tahun 2020. Garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan persentase penduduk di atas garis miskin Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk miskin dan Persentase penduduk di Atas Garis Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	440.850	497.567	520.642	549.496	589.894
Jumlah penduduk miskin	5.460	6.060	6.350	5.650	5.830
Persentase Penduduk Miskin	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70
Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	97,26	97,02	96,95	97,33	97,30

sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021



1. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk miskin

Berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 berada di peringkat terendah ketiga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah Rp589.894/kapita/bulan. Garis kemiskinan tertinggi ditempati oleh Kabupaten Belitung sebesar Rp812.321/kapita/bulan. Sementara garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan, yakni sebesar Rp561.617/kapita/bulan. Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22 Garis Kemiskinan Tahun 2016—2020
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Bangka Belitung	534.229	587.530	631.467	677.716	721.455
Bangka	427.684	475.024	497.164	541.925	577.093
Belitung	610.072	652.989	704.855	766.276	812.321
Bangka Barat	440.850	497.567	520.642	549.496	589.894
Bangka Tengah	586.445	653.308	680.907	693.842	721.331
Bangka Selatan	415.359	462.716	483.823	523.155	561.617
Belitung Timur	528.572	563.309	622.396	684.277	725.395
Kota Pangkalpinang	604.011	654.044	700.949	748.487	795.653

sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Walaupun berada pada peringkat terendah ketiga, garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2019 laju pertumbuhan garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan sebesar 5,54%. Sementara pada tahun 2020 laju pertumbuhan garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 7,35%. Laju pertumbuhan garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.23.



Tabel 2.23 Laju pertumbuhan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016—2020

Wilayah	Laju Pertumbuhan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Bangka Belitung	9,32	9,98	7,48	7,32	6,45
Bangka	10,83	11,07	4,66	9,00	6,49
Belitung	5,18	7,03	7,94	8,71	6,01
Bangka Barat	10,38	12,87	4,64	5,54	7,35
Bangka Tengah	10,92	11,40	4,22	1,90	3,96
Bangka Selatan	10,83	11,40	4,56	8,13	7,35
Belitung Timur	4,74	6,57	10,49	9,94	6,01
Kota Pangkalpinang	14,47	8,28	7,17	6,78	6,30

sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan laju pertumbuhan garis kemiskinan kabupaten/kota tahun 2016 menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang memiliki laju GK tertinggi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 14,47% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2017 GK tertinggi yaitu di Kabupaten Bangka Barat yaitu 12,87% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan GK tertinggi yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 10,49% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan GK tertinggi yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebesar 9,94% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 GK tertinggi yaitu di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan yaitu 7,35% lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Bangka Barat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.24.



Tabel 2.24 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				Persentase Penduduk Miskin (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1.	Bangka	16,45	18,02	16,52	15,41	5,10	5,47	4,92	4,51
2.	Belitung	14,11	14,00	11,88	12,07	7,77	7,56	6,29	6,27
3.	Bangka Barat	6,06	6,35	5,65	5,83	2,98	3,05	2,67	2,70
4.	Bangka tengah	11,39	11,12	9,80	9,64	6,07	5,81	5,02	4,85
5.	Bangka Selatan	7,88	7,58	7,02	7,49	3,92	3,70	3,36	3,52
6.	Belitung Timur	8,44	8,93	8,51	8,56	6,81	7,06	6,60	6,52
7.	Pangkalpinang	9,76	10,27	9,00	9,40	4,80	4,95	4,25	4,36

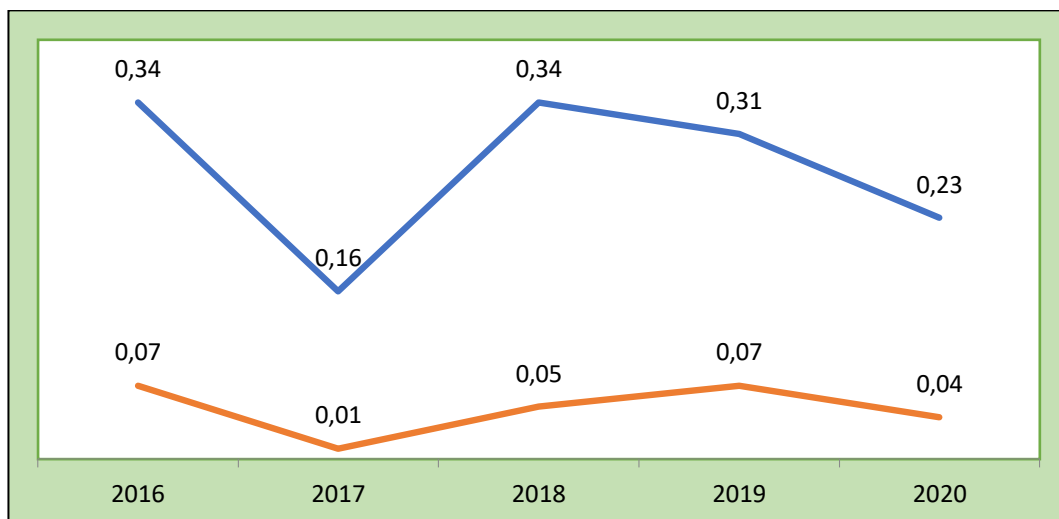
sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu dari 2017—2020 terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data ini menunjukkan indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Mengukur kemiskinan tidak cukup hanya melihat penambahan dan pengurangan jumlah penduduk miskin, namun ada pula dimensi lain yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga berkaitan dengan cara mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin (GK). Semakin tinggi nilai indeks ini, maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Bila memperhatikan gambar dibawah ini, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2020 fluktuatif. Pada tahun 2017 menurun menjadi 0,16 dari 0,34 di tahun 2016. Di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 0,31 menjadi 0,23. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016—2020 fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0,07 menjadi 0,01 pada tahun 2017, pada tahun 2018 naik sampai 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 0,04 turun. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dapat dilihat pada gambar 2.21.



Gambar 2.23 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

E. Tingkat Ketimpangan dan Pemerataan Ekonomi

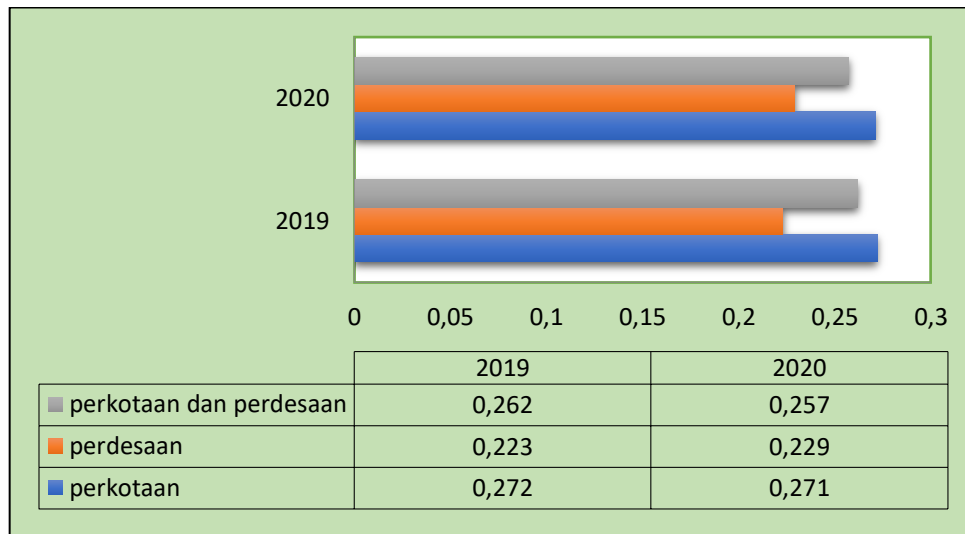
Kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian, baik skala makro maupun mikro. Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten maupun kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya PDRB setiap tahunnya. Semakin besar pertumbuhan PDRB-nya, maka diasumsikan makin baik



pula perkembangan ekonomi yang tentunya akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata.

Pada kondisi tertentu, peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan atau meningkatkan PDRB. Apakah hal itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat atau hanya beberapa gelintir saja. Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya pengusaha kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah. Namun jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh seluruh masyarakat, maka semuanya pun dapat memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan selalu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan *Gini Ratio* di daerah pedesaan. September 2020, *Gini Ratio* di daerah perkotaan sebesar 0,271 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibandingkan bulan Maret 2020 sebesar 0,276 dan juga mengalami penurunan sebesar 0,001 poin jika dibandingkan bulan September 2019, yakni sebesar 0,272. Untuk daerah pedesaan pada September 2020, *Gini Ratio* sebesar 0,229 naik 0,009 poin dibandingkan pada bulan Maret 2020 sebesar 0,220 dan naik sebesar 0,006 poin dibandingkan bulan September 2019, yakni sebesar 0,223. Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar 2.24.



Gambar 2.24 Grafik Perkembangan *Gini Ratio* Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019—2020
sumber: BPS Kepulauan Bangka Belitung, 2021

F. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. TPT Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2020

Kabupaten/Kota	Persentase			
	2017	2018	2019	2020
Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42
Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82
Bangka Barat	4,23	3,11	2,85	4,12
Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59
Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42
Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93
Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,39	5,25

sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021



TPT Kabupaten Bangka Barat menunjukkan capaian yang bervariasi. Pada tahun 2017 TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,23%, sedangkan pada tahun 2020 menjadi 4,12%. Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Barat relatif lebih baik (rendah) jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran provinsi yang mencapai 5,25%, Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah provinsi.

Angka pengangguran di Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 hanya mencapai angka 2,85%. Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat erat kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa kategori unggulan menurun dan berakibat terhentinya sementara bisnis, serta otomatis terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja.

Penduduk angkatan kerja Kabupaten Bangka Barat berdasarkan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 103.518 jiwa dari 154.529 jiwa. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 67%. Tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Bangka Barat berada pada angka 2,85%. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya yakni sebesar 3,11%. Berdasarkan data Kabupaten Bangka Barat dalam angka tahun 2020, pengangguran didominasi oleh lulusan SMA se-derajat sebesar 49,92%.

G. Kategori Unggulan Daerah (*Location Quotient*)

Untuk mengetahui suatu cara menentukan kategori unggulan dalam keunggulan komparatif daerah adalah dengan alat analisis *Location*



Quotient (LQ). LQ juga bermanfaat untuk memahami potensial salah satu kategori suatu wilayah terhadap kategori yang sama terhadap daerah yang lebih luas (provinsi), daerah yang diteliti merupakan bagiannya (Wiwekananda, 2016). Kategori unggulan daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26 Kategori Unggulan Daerah (LQ)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Sektor Primer							
A	Pertanian	0.73	0.73	0.69	0.65	0.64	0.69
B	Pertambangan dan Penggalian	0.94	0.93	0.94	0.91	0.89	0.92
Sektor Sekunder							
C	Industri Pengolahan	2.03	2.03	2.07	2.21	2.25	2.12
D	Listrik, dan gas	0.41	0.41	0.42	0.43	0.51	0.44
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.37	0.36	0.38	0.36	0.38	0.37
F	Konstruksi	0.67	0.67	0.67	0.63	0.66	0.66
Sektor Tersier							
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.84	0.83	0.84	0.83	0.84	0.84
H	Transportasi dan Pergudangan	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.47	0.47	0.45	0.41	0.44	0.45
J	Informasi dan Komunikasi/Information	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17	0.17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	0.21	0.20	0.20	0.20	0.22	0.21
L	Real Esta	0.61	0.60	0.59	0.57	0.59	0.59
M,N	Jasa Perusahaan	0.53	0.52	0.51	0.49	0.53	0.52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.69	0.70	0.69	0.65	0.69	0.68
P	Jasa Pendidikan	0.58	0.61	0.61	0.58	0.60	0.60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.56	0.56	0.58	0.54	0.56	0.56
R,S,T,U	Jasa lainnya/	0.39	0.40	0.38	0.35	0.37	0.38

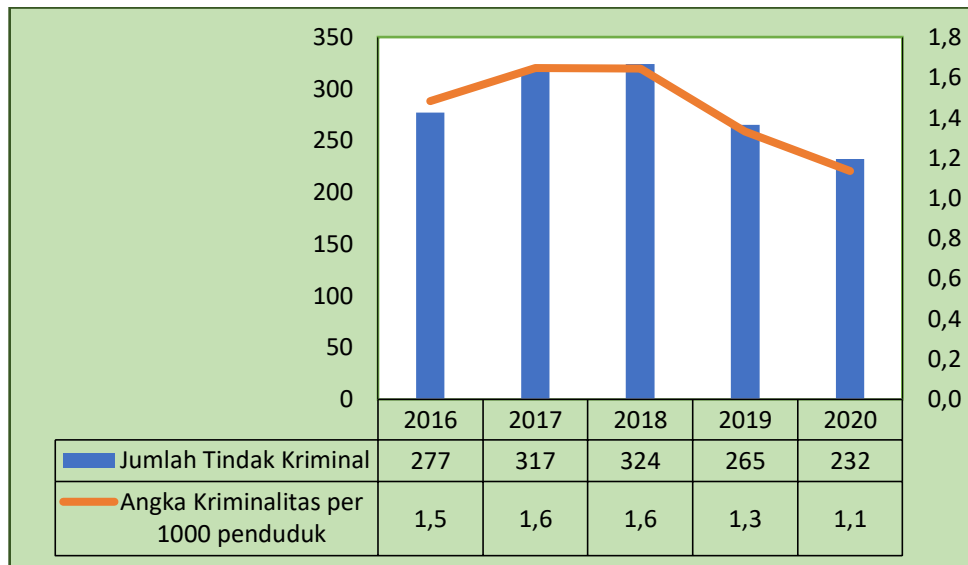
sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, Data diolah, 2021



Hasil menunjukkan bahwa hanya terdapat satu kategori lapangan usaha yang menjadi kategori basis di Kabupaten Bangka Barat, yaitu kategori industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa hanya satu kategori lapangan usaha yang dapat dilakukan ekspor karena terjadi surplus, sedangkan lainnya, harus dilakukan impor. Untuk sektor pertanian terkonfirmasi hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dinas terkait bahwa kategori lapangan usaha pertanian untuk pangan masih harus mengimpor. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat hanya bisa memenuhi persediaan pangan sebesar 15% saja dari kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kategori jasa lainnya masih berpotensi besar untuk dikembangkan dan bisa menjadi ladang peluang usaha bagi masyarakat.

H. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran, dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Selama kurun waktu 2016—2020, angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi dan cenderung meningkat namun menurun di tahun 2020. Total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat memperlihatkan adanya penurunan sebesar 22% atau 59 perkara, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.25 Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber : Polres Bangka Barat, 2021

Sebagaimana gambar 2.25 tersebut, angka kriminalitas pada tahun 2016—2018 cenderung mengalami kenaikan namun pada tahun 2019—2020 cenderung mengalami penurunan kasus kriminalitas. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 33 kasus dan rasio kriminalitas per 1000 penduduk turun sebesar 0,2.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan. IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IPM Kabupaten Bangka



Barat sebesar 67,60 dan meningkat setiap tahun menjadi 67,94 (2017), 68,68 (2018), 69,05 (2019), dan 69,08 (2020). Secara rinci, capaian setiap komponen IPM Kabupaten Bangka Barat diuraikan sebagai berikut.

A. Angka Harapan Hidup (AHH)

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir-AHH

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dibandingkan dengan AHH kabupaten/kota lainnya tampak pada tabel 2.27.

Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016—2020

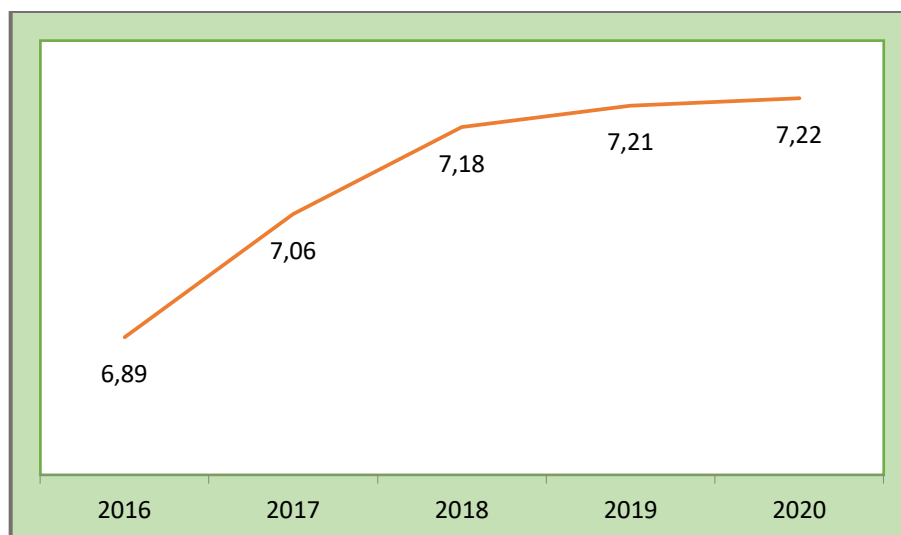
Wilayah Babel	Angka Harapan Hidup				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Bangka Belitung	69,92	69,95	70,18	70,50	70,64
Bangka	70,52	70,56	70,73	70,99	71,06
Belitung	69,52	70,44	70,64	70,94	71,05
Bangka Barat	69,52	69,56	69,73	69,99	70,06
Bangka Tengah	66,99	70,49	70,78	71,16	71,36
Bangka Selatan	66,99	67,13	67,47	67,90	68,16
Belitung Timur	71,30	71,37	71,59	71,90	72,03
Kota Pangkalpinang	72,57	72,64	72,86	73,17	73,30

sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel 2.26, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat sejak tahun 2016—2020 terus mengalami peningkatan meskipun pencapaiannya masih di bawah AHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rata-rata angka harapan hidup saat lahir penduduk Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun yang lalu mencapai 69,7 tahun. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Bangka Barat hanya bertambah 0,07 poin, melambat dari pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini juga dirasakan oleh kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 25 tahun keatas. Lamanya sekolah merupakan angka lamanya sekolah dari masuk SD sampai kelas terakhir. RLS tidak mempertimbangkan putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, tidak naik kelas dan masuk sekolah dasar diusia terlalu muda maupun terlambat. Angka RLS Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 tergambar dalam gambar grafik 2.26.



Gambar 2.26 Grafik Rata - Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan data RLS 2016—2020 tersebut, RLS Kabupaten Bangka Barat memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, RLS Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,89 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bangka Barat yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 6,89 tahun atau hampir menamatkan pendidikan di kelas VII. Kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat



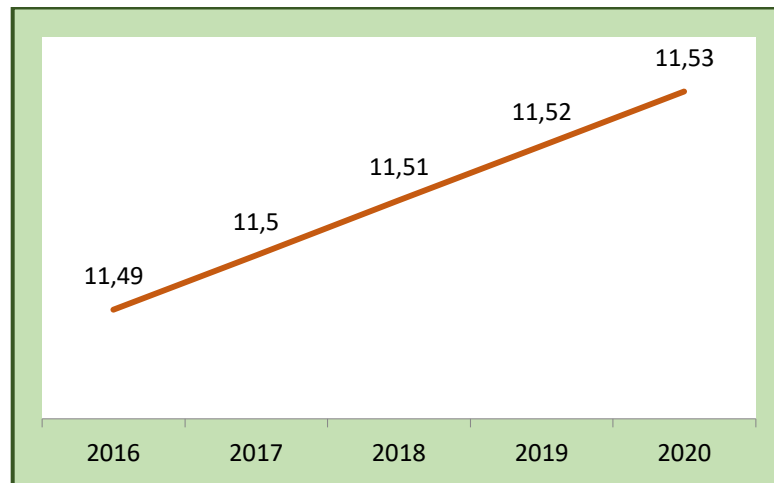
terlihat dari angka RLS di tahun 2017—2020, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menamatkan pendidikan hingga kelas VII SMP (7 tahun). Meskipun meningkat, kondisi ini perlu mendapat perhatian dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun yang menjadi prioritas nasional.

Kemajuan RLS Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun tergolong lambat. Secara umum, menurut Berlian³ lambatnya peningkatan angka RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) kemiskinan penduduk; 2) kapasitas fiskal pemerintah daerah; 3) faktor geografi, jarak ke sekolah yang jauh; 4) ketersediaan layanan pendidikan (rasio jumlah anak per ruang kelas); dan 5) tingkat pendidikan penduduk.

C. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umurnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia tujuh tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia tujuh tahun. Perkembangan Angka HLS Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir konsisten terus mengalami peningkatan 0,01 poin setiap tahunnya dan dapat dilihat pada gambar 2.27.

³N.V.A Berlian, 2011, 'Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun', *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17.1, 43–55.



Gambar 2.27 Grafik Angka HLS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 —2020

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka Barat sejak 2016 hingga 2020 adalah 11,5 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Bangka Barat diharapkan menamatkan pendidikan sampai dengan SMA kelas 11. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi kelima setelah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tampak pada tabel 2.28.

Tabel 2.28 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Wilayah	(tahun)
1.	Kep. Bangka Belitung	12,05
2.	Bangka	12,77
3.	Belitung	11,85
4.	Bangka Barat	11,53
5.	Bangka Tengah	11,81
6.	Bangka Selatan	11,37
7.	Belitung Timur	11,52
8.	Pangkalpinang	13,15

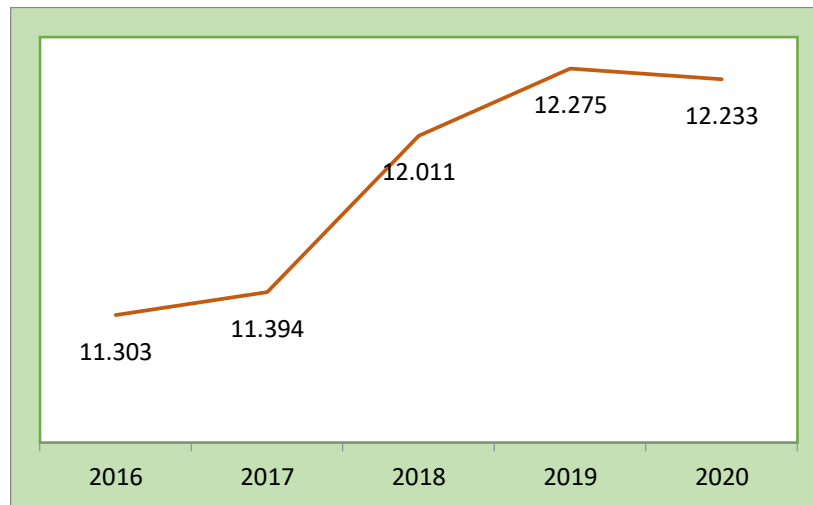
sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021



D. Pengeluaran perkapita

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran perkapita dapat mengungkap mengenai pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik kondisi tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Indikator ini untuk mengukur persentase total pengeluaran rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran. Jika semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non pangan terhadap total pengeluaran, berarti semakin membaik tingkat perekonomian penduduk. Pergerakan indikator pengeluaran perkapita Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 disajikan dalam gambar 2.28.



Gambar 2.28 Grafik Pengeluaran perkapita
Kabupaten Bangka Barat (Ribu Rupiah) Tahun 2016—2020
sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Secara garis besar, pergerakan indikator pengeluaran perkapita di Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016, besaran pengeluaran perkapita adalah Rp11.303.000. Kemudian di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp11.394.000, dan meningkat menjadi Rp12.011.000 pada tahun 2018. Tahun 2019 terjadi lonjakan cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp12.275.000. Pada Tahun 2020 capaian sebesar Rp12.233.000. Capaian di tahun terakhir yaitu tahun 2020 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 (*baseline*).

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek pelayanan umum terdiri dari fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan.



2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan tantangan dalam menjamin kualitas penyediaan layanan pendidikan. Pembagian kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembagian tanggung jawab yang terputus antarjenjang pemerintahan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang anak usia dini dan pendidikan dasar tidak dapat melepaskan tanggung jawab untuk memperhatikan kualitas layanan pendidikan menengah yang berada di daerahnya walaupun merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Begitu pula sebaliknya, pemerintah provinsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, yang merupakan input bagi jenjang pendidikan menengah yang merupakan kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja



urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK dan APM SD/MI, APK dan APM SMP/MTs, Angka Putus Sekolah, Kondisi Pendidikan Dasar, dan sekolah terakreditasi/ tidak terakreditasi.

A. Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal, meliputi TK dan Raudhatul Athfal (RA), sedangkan jalur pendidikan non formal, meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD sejenis. Kondisi PAUD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020/2021 terlihat pada tabel 2.29 .

Tabel 2.29 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020/2021

No.	Jenis Layanan PAUD	Jumlah		Jumlah Siswa
		Negeri	Swasta	
1.	TK	16	25	2.025
2.	KB/TPA/SPS	0	124	4.281

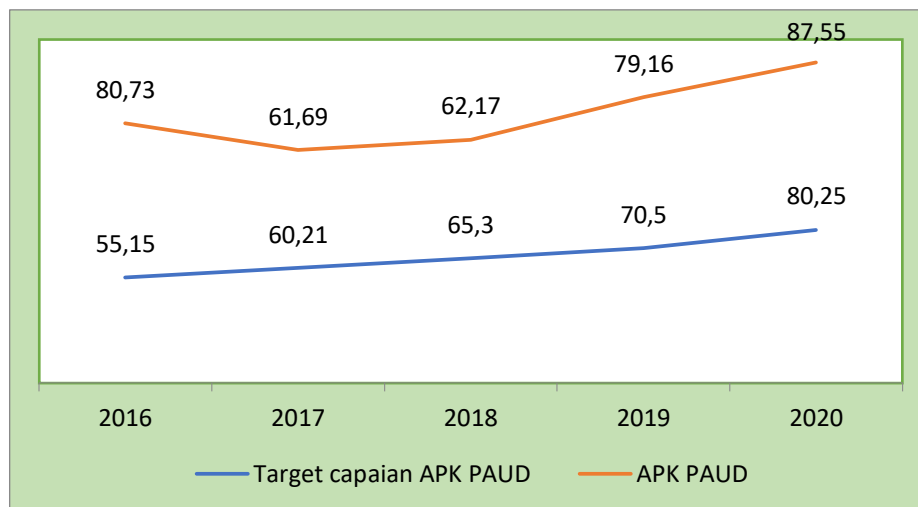
sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas lembaga PAUD baik milik pemerintah maupun swasta di Kabupaten Bangka Barat cukup banyak sehingga dapat membantu pembangunan manusia di daerah. Hingga tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki lembaga PAUD sebanyak 165 sekolah/lembaga yang terbagi menjadi 2 jenis layanan: TK dan KB/TPA/SPS. Jumlah TK di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 41



sekolah yang terdiri atas 16 TK negeri dan 25 TK swasta. Selain itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki PAUD Nonformal dengan tiga jenis layanan (KB/TPA/SPS) sebanyak 124 lembaga.

Berdasarkan data APK PAUD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020, persentase anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir melebihi target yang direncanakan kecuali tahun 2018. Pada tahun 2016, APK PAUD Kabupaten Bangka Barat mencapai 80,73% dari target sebesar 55,15%. Capaian tersebut menurun di tahun 2017 (61,69%) meskipun melebihi target yang direncanakan sebesar 60,21%. Sejak tiga tahun terakhir ini, 2018—2020, capaian APK PAUD Kabupaten Bangka Barat membaik meskipun di tahun 2018 capaian tidak mencapai target. Hingga tahun 2020, APK PAUD Kabupaten Bangka Barat mencapai 87,55%. Target capaian dan APK PAUD Kabupaten Bangka Barat disajikan pada gambar 2.29 .



Gambar 2.29 Grafik Target Capaian dan APK PAUD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

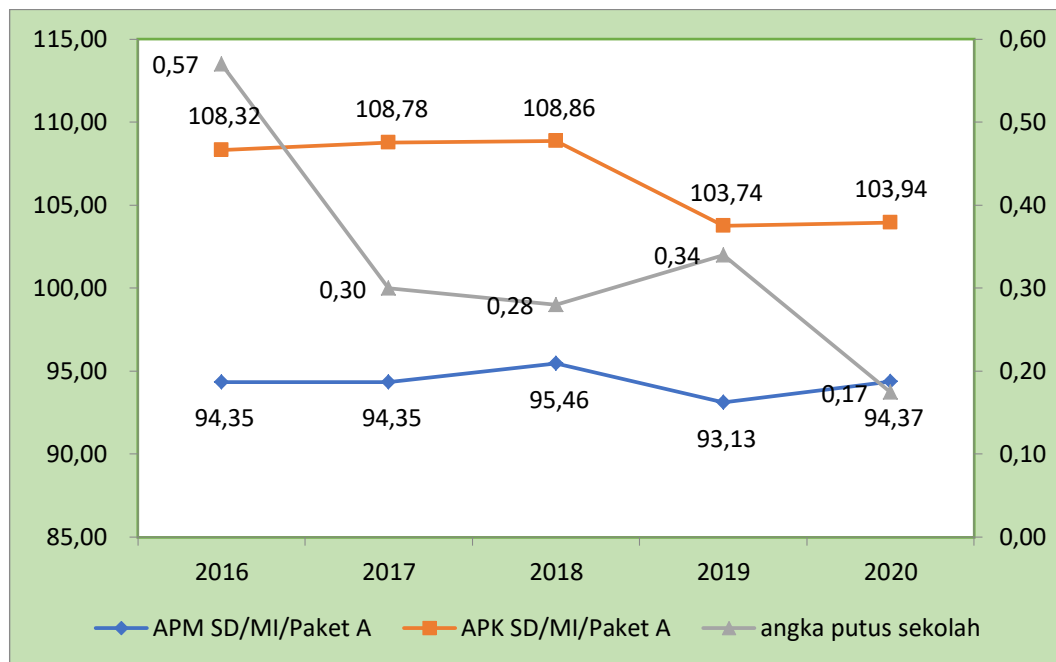
sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021



B. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah

Pemerintah Indonesia telah menandatangani MDGs di tahun 2000 dan pada tanggal 25 September 2015 secara resmi Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDG's*) disahkan, termasuk Indonesia. Melalui SDG's ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dan wajib belajar 9 tahun. Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun, dapat dilihat dari indikator APK, APM, dan Angka Putus Sekolah. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

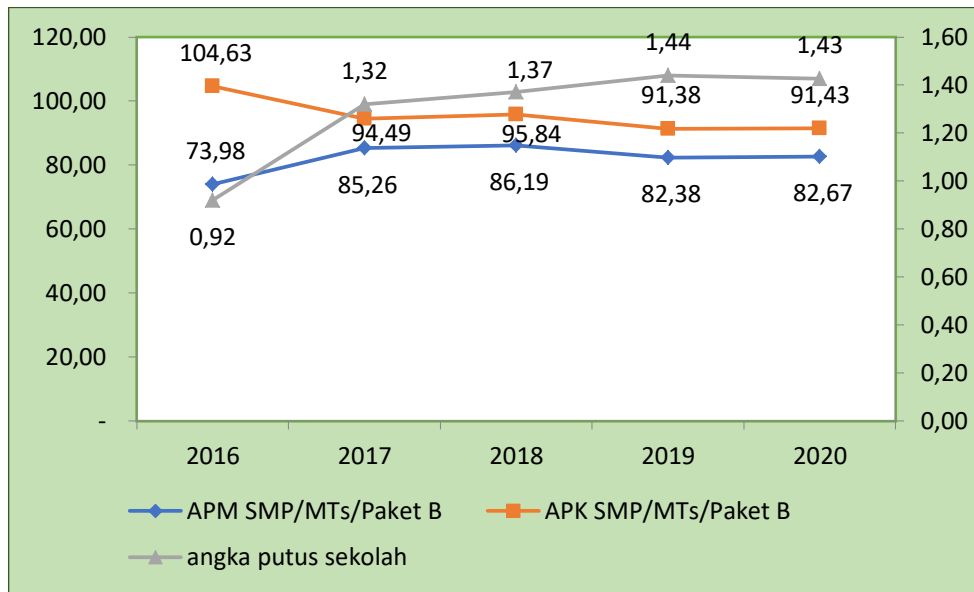
APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya terhadap jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Ketercapaian program pendidikan di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan APK, APM, dan Angka Putus Sekolah dapat dilihat pada grafik gambar 2.30 dan 2.31 .



Gambar 2.30 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.27 di atas, capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 melampaui angka 100% yang melewati capaian APK SD/MI/Paket A secara Nasional. Pada tahun 2018 APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat mencapai 108,86%. Sementara itu, pada tahun 2019 APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat menunjukkan adanya penurunan dengan capaian 103,74%. Berbeda di tahun 2020, capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat terjadi peningkatan sebesar 103,94% meskipun tidak signifikan. Terlihat adanya upaya yang telah dilakukan pada tahun 2020 untuk meningkatkan APK SD/MI/Paket A sehingga angka putus sekolah dari 0,34% di tahun 2019 menurun menjadi 0,17%. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2020, APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat yakni 103,94% berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,43% (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2021).



Gambar 2.31 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Realisasi APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 bersifat fluktuasi. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat tidak stabil yang disebabkan oleh naik turunnya angka putus sekolah. Berdasarkan grafik pada gambar 2.29, APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat tahun 2017 sebesar 94,49%, menurun cukup signifikan dari tahun 2016 sebesar 104,63%. Pada tahun 2018, APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan sebesar 95,84%. Sementara di tahun 2019 terjadi penurunan sehingga capaian APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat sebesar 91,38%. Pada tahun 2020, angka putus sekolah menunjukkan penurunan sehingga APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat meningkat sebesar 91,43%. Meskipun capaian di tahun 2020 tidak terlalu signifikan, angka tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,19%.

Berdasarkan data capaian APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat tersebut, naik turunnya APK



dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang tidak stabil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat melalui *Forum Group Discussion* (FGD) Maret 2021, terjadinya putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, pernikahan dini, dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

C. Kondisi Pendidikan Dasar

Kondisi Pendidikan Dasar menggambarkan keadaan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, kondisi ruang kelas, dan angka kelulusan. Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan disajikan pada tabel 2.30.

Tabel 2.30 Kondisi Pendidikan Dasar
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020/2021

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah		Kondisi ruang kelas			Jumlah Siswa	Guru (orang)		
		N	S	B	RR	RB		Jumlah	S-1/D-IV	Tersertifikasi
1.	SD	127	7	636	310	161	24.862	1.481	1.388	535
2.	MI	2	3				900	49		
3.	SMP	27	8	298	88	27	7.965	501		184
4.	MTs	3	8				1.691	177		

sumber: Dikpora Kabupaten Bangka Barat, 2021

Keterangan:

- B : kondisi kelas baik
- RR : kondisi kelas rusak ringan
- RB : kondisi kelas rusak berat



Lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penuntasan secara kuantitas telah cukup memadai, hanya saja kondisi ruang kelas baik di SD/MI maupun SMP/MTs masih terdapat kondisi rusak ringan dan rusak berat. Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tahun 2020 sebanyak 1.709 orang dari 2.208 orang, sedangkan guru yang bersertifikat pendidik adalah 535 orang atau 34,96% dari total guru (Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Tetap Yayasan (GTY), dan Guru Tidak Tetap (GTT) SD).

Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 184 orang atau 27,13% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah tersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat. Namun, masih perlu perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan bagi guru GTT dan PTT.

D. Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2020 tampak pada tabel 2.31.



Tabel 2.31 Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah Dasar/MI					
	Terakreditasi A	25	30	31	29	25
	Terakreditasi B	87	90	92	93	95
	Terakreditasi C	18	13	9	14	16
	Belum Terakreditasi	8	5	6	3	3
2.	SMP/MTs					
	Terakreditasi A	19	20	20	19	19
	Terakreditasi B	16	17	18	20	20
	Terakreditasi C	2	3	4	4	4
	Belum Terakreditasi	8	6	4	3	3

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi hingga tahun 2020 sebanyak 82% dari 139 sekolah. Akreditasi terbesar di kategori Baik yaitu sebanyak 95 sekolah. Pada jenjang SMP/MTs, di tahun 2020 juga telah terakreditasi A sebanyak 19 sekolah, terakreditasi B sebanyak 20 sekolah, dan terakreditasi C sebanyak 4 sekolah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Ini menunjukkan bahwa penyelenggara pendidikan sangat serius dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerahnya masing-masing. Capaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.



Tabel 2.32 Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Urusan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No.	Indikator	Target Perpres 59/2017	Capaian (%)				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	100	100	100	100	TTC
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	90,2	80,13	87,76	88,48	SS
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	80,43	82,6%	84,78	84,78	SS
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	108,7	108,86	103,74	103,94	SB
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Meningkatnya APK	94,49	95,84	91,38	91,43	SB



No.	Indikator	Target Perpres 59/2017	Capaian (%)				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
	SMP/MTs/ sederajat.	SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).					
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	7,06	7,18	7,21	7,22	SB
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	61,69	62,17	79,16	79,97	SS
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	29,50	34,18	35,81	47,07	SS
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sed	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2019.	SD:86,73 SMP:90,33	SD:87,69 SMP:89,93	SD:89,77 SMP:90,15	SD:90,79 SMP:90,42	SS



No.	Indikator	Target Perpres 59/2017	Capaian (%)				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
	erajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	97,77	98,02	99,81	Data 2020 belum tersedia	TTC
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	97,77	98,02	99,81	n/a	TTC
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b)	(tidak ada dalam lampiran	64,86	67,03	69,19	70,27	TTC



No.	Indikator	Target Perpres 59/2017	Capaian (%)				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
	internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Perpres 59/2017)					
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	37,78	35,23	37,51	39,71	TTC

2.3.1.2. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk itu, salah satu kebijakan pembangunan daerah di bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas rumah sakit. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan tersebut perlu ditunjang dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, fasilitas, peralatan, dan perbekalan kesehatan yang dapat menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 12-15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan



melalui pendekatan promotif (promosi kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan). Secara umum, pelayanan kesehatan dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas. Pelayanan Puskesmas sendiri dibantu oleh puskesmas pembantu (pustu), pos kesehatan desa (poskesdes), pondok bersalin desa (polindes), pos pelayanan terpadu (posyandu), dan pos pembinaan terpadu (posbindu) untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

Kabupaten Bangka Barat memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason yang berada di Kota Muntok. Selain itu, di Kabupaten Bangka Barat terdapat dua rumah sakit swasta, yakni Rumah Sakit Bakti Timah di Kota Muntok dan Rumah Sakit Gunung Manik yang berada di Kecamatan Parittiga. Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason perlu mendapatkan prioritas, terutama dalam peningkatan kapasitas pelayanan medis atau kesehatan maupun sarana prasarana sebagai unsur pendukung pelayanan. Hal ini mengingat bahwa rumah sakit harus menjadi rujukan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Implementasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memiliki indikator-indikator pelayanan dasar di bidang kesehatan. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan harapan masyarakat mendapatkan mutu pelayanan dasar secara layak di bidang kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Di dalam aspek perencanaan daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun



2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut sebagai implementasi ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya terdapat indikator-indikator pelayanan dasar di bidang kesehatan, yang setiap tahun diukur sebagai bentuk capaian kinerja di bidang kesehatan. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diuraikan sebagai berikut.

A. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai 7,37. Terjadi peningkatan bila dibandingkan berturut-turut pada tahun 2019 (6,01); tahun 2018 (4,76); tahun 2017 (6,58); dan tahun 2016 (6,63). Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 meningkat mencapai 8,51 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2019 (6,28); 2018 (6,62); 2017 (8,43) dan 2016 (7,14). Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 mencapai 3,97 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 (5,19); 2018 (3,70); 2017 (5,00); dan 2016 (5,36) nya, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan mencapai 56,72 (2020) dari sebelumnya mencapai 136,50 (2019); 185,23 (2018); 105,35 (2017); dan 127,52 (2016).

Dari uraian di atas, maka AKI dan AKBa per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2016-2020, tetapi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dan AKBa per 1000



kelahiran hidup mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu. Namun pelayanan kesehatan bayi dan balita perlu ditingkatkan. Selanjutnya hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator lainnya, seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, cakupan balita *pneumonia* yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan kunjungan kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan yang dilakukan paling sedikit 4 kali selama hamil, cakupan pelayanan nifas, cakupan *neonatus* dengan komplikasi yang ditangani, dan cakupan pelayanan anak balita.

Cakupan pelayanan anak balita yang tertangani di Kabupaten Bangka Barat berjalan dengan baik, yaitu 93,71 (2020); 94,75 (2019); 95,04 (2018); 97,66 (2017); dan 87,47 (2016). Kemudian, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mencapai 72,50 (2020), dan cakupan pelayanan nifas mencapai 97,33 (2020), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 96,25 (2019); 97,13 (2018); 97,87 (2017) dan 94,83 (2016). Cakupan ibu hamil K4 pada tahun 2020 mencapai 95,25. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 mencapai 95,01. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mencapai 85,36% (2020).

Cakupan balita *pneumonia* yang ditangani mencapai 25% (2020). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 97,30% (2020). Cakupan balita gizi buruk yang tertangani di Kabupaten Bangka Barat sangat baik, yaitu 100% tahun 2016-2020. Hal tersebut didukung oleh prevalensi gizi buruk yang cukup rendah dan menurun setiap tahunnya.



Rendahnya prevalensi dikarenakan cakupan posyandu per satuan balita yang baik, yaitu 1:84. Artinya, setiap posyandu melayani 84 balita. Dengan keberadaan Posyandu yang efektif di setiap desa/kelurahan, maka cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dapat berjalan optimal.

Selain itu, terdapat indikator pendukung lainnya yang menegaskan bahwa pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat, antara lain: persentase balita yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 87,47% (2016) menjadi 94,52% (2020). Persentase ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar dari 92,15% (2016) menjadi 95,25% (2020). Persentase ibu bersalin yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapat pelayanan persalinan sesuai standar dari 95,31% (2016) menjadi 96,61% (2020). Persentase bayi baru lahir yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 98,75% (2016) menjadi 99,38% (2020). Prevalensi Kekurangan Gizi (*Under Weight*) pada Balita mencapai 3,55% (2020).

Di dalam data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020 juga terdapat data yang mendeskripsikan upaya pemerintah daerah memaksimalkan pelayanannya, dengan melihat Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 3.651, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 3.505, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 3.521, dan jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 11.371.



B. Sarana/Fasilitas Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus diikuti oleh peningkatan sarana atau fasilitas kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas, serta memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai. Artinya, masyarakat dengan mudah dan cepat mengakses atau menjangkau pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Pada tahun 2020, rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk adalah 1:5.550, cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) pada tahun 2020 adalah 100%, dan Rasio Rumah Sakit (TT) per satuan penduduk mencapai 1:66.607. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO/ *World Health Organization*), Rasio Rumah Sakit (TT) Per Satuan Penduduk yang Ideal adalah 1:1.000 (1 tempat tidur:1.000 penduduk).

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini melaksanakan penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) dengan memaksimalkan peran puskesmas dan pustu dalam melayani kesehatan masyarakat, sehingga cakupan puskesmas dapat optimal mencapai 133,33 dan cakupan pustu mencapai 26,56. Dengan data tersebut maka sektor kesehatan, khususnya sarana/fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas dalam menunjang pembangunan daerah.

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2021, terdapat indikator-indikator pendukung lainnya yang mendeskripsikan kinerja pemerintah daerah, antara lain persentase sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu, serta jaringannya yang sesuai standar sebesar 88,89%. Persentase peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sebesar 100%. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan mencapai 100%; Persentase ketersediaan obat dan vaksin mencapai 100%; Persentase puskesmas yang melaksanakan



BOK mencapai 100%; Persentase puskesmas yang melaporkan serta melakukan tata laksana penyakit menular mencapai 100%.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pelayanan telah dilaksanakan proses akreditasi rumah sakit di Kabupaten Bangka Barat. Capaian predikat Strata Akreditasi Puskesmas yaitu 7 Puskesmas Madya dan 1 Puskesmas Utama. Di bidang pelayanan gawat darurat terdapat indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten mencapai 100%. Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan medis yang didanai dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mencapai 100%.

Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang, antara lain optimalisasi pelaksanaan mekanisme pelaporan dan tata laksana puskesmas dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular. Pengembangan pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama/ kemitraan, optimalisasi posyandu lansia. Pada tahun 2020, rasio rumah sakit (TT) per satuan penduduk sebesar 0,02. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam hal ini melaksanakan penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) dengan memaksimalkan peran puskesmas dan pustu dalam melayani kesehatan masyarakat. Dengan demikian cakupan puskesmas dapat optimal mencapai 100 dan cakupan pustu mencapai 26,69. Dengan data tersebut maka sektor kesehatan, khususnya sarana maupun fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas menunjang pembangunan daerah. Rasio rumah sakit per satuan penduduk, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.33.



Tabel 2.33 Sarana/Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
2.	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Cakupan puskesmas pembantu	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2021

C. Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain sarana maupun fasilitas kesehatan, terdapat variabel kesehatan lainnya, seperti tenaga kesehatan. Dengan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang optimal, maka pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Rasio tenaga kesehatan merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan di suatu daerah untuk mencapai target pembangunan tertentu. Menurut WHO, Sumber Daya Manusia Kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan kesehatan. Secara rinci data tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2.34 Indikator Tenaga Kesehatan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,22	0,33	0,39	0,39	0,43
2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,27	0,38	0,44	0,45	0,46



No.	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	112,36	112,33	101,71	118,80	108,47
4.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96,74	98,36	96,93	96,96	97,30
5.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00	100,00	100,00	100,00	92,19

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2021

D. Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit merupakan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang, sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pengendalian penyakit menular di Kabupaten Bangka Barat antara lain cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC Bakteri Tahan Asam (BTA) mencapai 100%, tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mencapai 76,57% di tahun 2020 dari 71,74% pada tahun 2016, tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) menurun menjadi 5,50% pada tahun 2020 dari 5,82% di tahun 2016, proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2019 mencapai 100%, proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mencapai 57,14 pada tahun



2020. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi mencapai 0,48% di tahun 2020.

Pada tahun 2020, penderita diare yang ditangani sebanyak 2.132 orang, angka kejadian malaria sebanyak 131, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 39.249 orang, jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 3.977 orang, jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan sebanyak 493 orang. Secara rinci data pengendalian penyakit di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Pengendalian Penyakit
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	71,74	81,65	85,66	101,97	76,57
2	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	59,15	52,83	59,49	64,44	57,14
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
5	Penderita diare yang ditangani	3.435	2.732	3.405	2.332	2.132
6	Angka kejadian Malaria	112	75	154	91	131
7	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	n/a	0,72	0,45	0,59	0,48
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	n/a	21.723	41.497	38.519	39.249



No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	n/a	4.809	3.315	3.636	3.977
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	n/a	318	437	462	493

Penanggulangan COVID-19 telah menyita perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap isu-isu strategis nasional lainnya, salah satunya adalah Pencegahan *stunting*. Penyebaran COVID-19 mengakibatkan berbagai kegiatan dihentikan/dibatasi untuk mengurangi kontak langsung demi memutus rantai penyebaran virus tersebut. Akibatnya, program-program yang berkaitan dengan Pencegahan *stunting* menjadi terhambat. Padahal, *stunting* adalah salah satu dari Proyek Prioritas Nasional yang harus mendapat perhatian penuh dan harus segera ditangani oleh pemerintah demi mencapai target penurunan 14% pada tahun 2024. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita per Bulan Februari tahun 2021 sebesar 11,10% (1.552 balita *stunting* dari 13.980 balita), menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 12,38% (1.750 balita *stunting* dari 14.134 balita). Secara rinci prevalensi balita *stunting* per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat disajikan dalam tabel 2.36.

Tabel 2.36 Prevalensi Balita *Stunting* per Wilayah Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021

Puskesmas	Per 23 September 2020			Per 28 Februari 2021		
	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%
MUNTOK	2.772	111	4,00	2.876	138	4,80
SIMPANGTERITIP	1.522	338	22,21	1.505	278	18,47
KUNDI	698	270	38,68	733	238	32,47
KELAPA	2.755	439	15,93	2.649	425	16,04



Puskesmas	Per 23 September 2020			Per 28 Februari 2021		
	Total Balita Diukur	Balita Stunting	%	Total Balita Diukur	Balita Stunting	%
JEBUS	1.695	136	8,02	1.673	139	8,31
PUPUT	1.526	144	9,44	1.535	102	6,64
SEKAR BIRU	988	98	9,92	912	90	9,87
TEMPILANG	2.178	214	9,83	2.097	142	6,77
KABUPATEN	14.134	1.750	12,38	13.980	1.552	11,02

sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, 2021

1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	87,93	91,71	95,48	96,47	SS
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	-	67,90	88,03	50,09	SB
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	15,3	22,94	15,12	12,26	SS
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	25	33,3	16,96	12,38	TTC
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	22	25,54	13,34	9,7	TTC
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	11,2	9,44	5,69	3,56	SS
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	7,3	6,2	9,54	6,21	SS
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	51	46,8	45,53	49,64	TTT



No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	104.33	185.23	136.95	56.71	TTC
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	87.93	91.87	95.54	96.61	SS
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	87,93	91.87	95.54	96.61	SS
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	8.43	6.62	6.28	6.28	TTT
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	5.00	3.70	5.19	3.97	TTC
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	6.58	4.76	6.01	3.40	TTC
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	100	100	100	100	SS
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0.61	0.497	0.55	0.478	SS
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	81.65	85.65	101.97	76.57	SS
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0.80	0.75	0.70	0.65	SB
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	100	100	100	100	SS
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	29 DAN 3	29 DAN 3	22 DAN 3	22 DAN 5	SB
3.3.5.(a)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	6	6	6	6	SS
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan	Meningkat	6	6	6	6	SS



No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
	dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	menjadi 35.					
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	5,91	6,06	6,23	6,15	TTT
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	15.38	29.30	27.23	27.33	SB
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	9.90	13.30	14.97	16	SB
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	6	6	6	6	SS
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	0	0	0	0	SS
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	434.69	678.77	741.67	794.15	TTC
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0	0	0	0	TTC
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	50,20	37,20	41,43	45,11	TTT
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100	100	100	100	SS
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	440.80	473.98	463.43	472.42	SS
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	n.a.	n.a.	n.a.	86.99	NA
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	88.82	91.12	93.71	95.10	SB
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	64	64	64	64	SS
6.2.1.(d)	Jumlah	Meningkat	13	15	19	21	SS



No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
	desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).						

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum bergerak dalam pelayanan dalam menyediakan sarana dan prasarana publik primer dalam mendukung kegiatan pembangunan suatu daerah. Indikator capaian kinerja pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat yaitu meliputi jaringan jalan, rasio tempat ibadah, jaringan irigasi, Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan perencanaan tata ruang.

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Transportasi darat merupakan salah satu faktor penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian. Jalan sebagai prasarana transportasi berperan mendukung distribusi barang dan jasa yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, jalan sebagai prasarana utama dalam perhubungan darat harus diperhatikan kondisi dan penggunaannya.

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan dikategorikan baik, apabila permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan. Berdasarkan Buku Induk Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



memiliki jalan nasional dengan panjang 600,40 km yang terbagi pada beberapa kabupaten salah satunya Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, panjang jalan provinsi sepanjang 108,61 km dan jalan kabupaten sepanjang 700,92 km. Dari seluruh panjang ruas jalan tersebut, panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan, namun ada peningkatan di tahun 2018. Pada tahun 2016, panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 551,69 km. Pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 543,18 km. Artinya, terjadi penurunan panjang ruas jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan panjang ruas jalan dalam kondisi baik seperti keadaan di tahun 2016. Sementara panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2018 hingga 2020 berfluktuatif. Secara rinci, kondisi jaringan jalan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.38.

Tabel 2.38 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik (km)	551,69	543,18	551,69	347,174	398,604
Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	78,71	77,50	78,71	49,53	56,87
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Sedang (km)	33,33	35,3	33,33	179,671	157,158
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Sedang (%)	4,76	5,04	4,76	25,63	22,42
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak (km)	60,19	59,67	60,19	174,076	145,159
Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak (%)	8,59	8,51	8,59	24,84	20,71
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak Berat (km)	55,70	62,76	55,70	0	0
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak Berat (%)	7,95	8,95	7,95	0	0
Panjang jalan seluruhnya	700,92	700,92	700,92	700,92	700,92



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(km)					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,79	0,77	0,79	0,50	0,57

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021

B. Rasio Jaringan Irigasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Secara operasional, jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap, sementara jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap, dan jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap. Adapun indikator rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier.

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pembukaan lahan sawah terus dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan untuk mendukung mengembangkan persawahan tersebut telah dibangun irigasi primer dan sekunder di beberapa lokasi persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bangka Barat. Namun, sampai saat ini irigasi tersebut belum dapat digunakan



sesuai fungsinya, estafet pembangunan pada jaringan tersier dirasa masih minim dikarenakan belum memiliki sistem jaringan pengairan lanjutan yang baik dan optimal. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat luas irigasi Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2020 sebesar 2.404 ha. Artinya tidak mengalami penambahan luas selama lima tahun. Sementara panjang saluran irigasi Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun 2016—2020 sepanjang 57.264,77 m.

C. Tempat Ibadah

Pelayanan peribadahan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jumlah tempat ibadah menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.39.

Tabel 2.39 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Masjid	Musala	Gereja Kristen Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Kelenteng
1.	Kelapa	35	16	2	0	0	1	0
2.	Tempilang	30	15	2	0	0	0	0
3.	Muntok	52	31	8	1	0	1	1
4.	Simpangteritip	22	43	0	0	0	1	3
5.	Jebus	18	19	1	0	0	0	1
6.	Parittiga	19	28	7	0	0	3	12
Bangka Barat		176	152	20	1	0	6	17

sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.39 terlihat bahwa agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam, antara lain beragama Islam, Khonghucu, Kristen, dan Buddha. Tempat peribadatan yang mendominasi di Kabupaten Bangka Barat adalah Masjid dan Musala, yaitu sebanyak 176 masjid dan 152 musala yang tersebar di berbagai



kecamatan. Selain masjid dan musala, tempat ibadah yang mendominasi selanjutnya adalah Gereja Kristen Protestan dan Klenteng.

Banyaknya masjid, musala, gereja, dan klenteng menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Bangka Barat sebagian besar beragama Islam dan Kristen. Selain itu, keberadaan kelenteng yang merupakan tempat peribadatan etnis Tionghoa juga menandakan banyaknya etnis Tionghoa yang berada di Kabupaten Bangka Barat sehingga terjadi akulturasi budaya antara masyarakat suku Melayu yang merupakan suku asli dengan etnis Tionghoa di Kabupaten Bangka Barat. Bentuk akulturasi dapat dilihat pada kesenian, arsitektur, adat-istiadat, dan kuliner.

D. Penduduk Berakses Air Bersih

Kabupaten Bangka Barat memiliki PDAM yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, jumlah pelanggan air PDAM Kabupaten Bangka Barat sebanyak 4.911 pelanggan. Beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Muntok memperoleh porsi terbesar dari angka tersebut dan memiliki jumlah pelanggan PDAM sebesar 4.248 pelanggan, kemudian Kecamatan Parittiga memperoleh porsi sebesar 420 pelanggan, dan di Kecamatan Tempilang memiliki 243 pelanggan. Pada tahun 2020, BPS Kabupaten Bangka Barat juga mencatat penyebaran air yang dilakukan ke wilayah-wilayah Kabupaten Bangka Barat sebesar 923.872 m³. Adapun Kecamatan Muntok memperoleh porsi terbesar dari angka tersebut yaitu 803.809 m³, sedangkan Kecamatan Parittiga memperoleh porsi sebesar 88.881 m³. Jumlah pelanggan dan air yang disalurkan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.40.



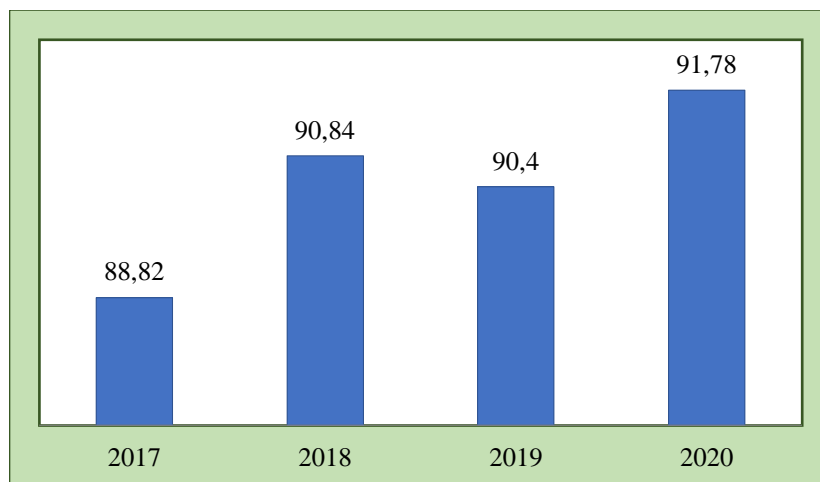
Tabel 2.40 Jumlah Pelanggan PDAM dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)
1.	Kelapa	-	-
2.	Tempilang	243	31.182
3.	Muntok	4.248	803.809
4.	Simpangteritip	-	-
5.	Jebus	-	-
6.	Parittiga	420	88.881
Bangka Barat		4.911	923.872

Sumber: *Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2021*

E. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Cakupan penduduk dengan akses air minum berkualitas (layak) mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu 88,82% menjadi 91,78% di tahun 2020. Akses air minum berkualitas (layak) untuk masyarakat memang hampir mencapai 100%. Namun demikian, dari segi kualitas, kontinuitas, dan jangkauan masih harus menjadi hal yang diperhatikan. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.32.

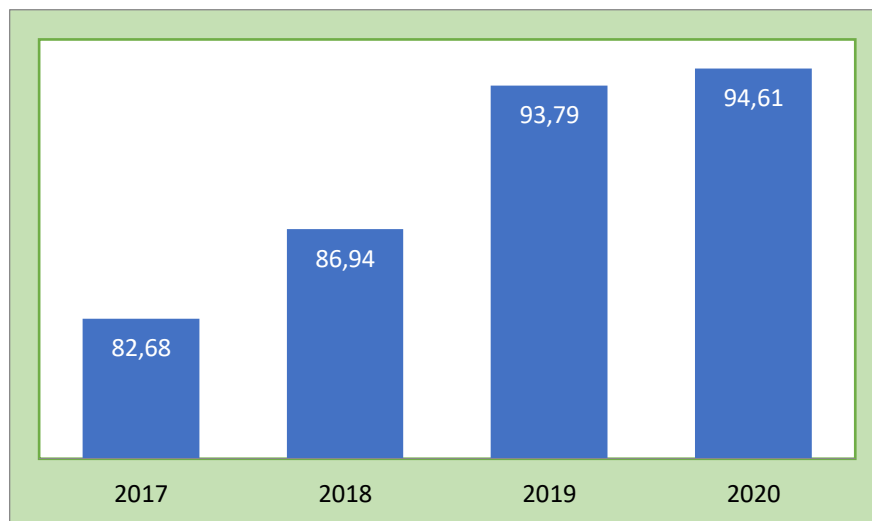


Gambar 2.32 Persentase penduduk berakses air minum layak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020

sumber: *Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021*

F. Persentase Penduduk Bersanitasi Layak

Kewajiban pemerintah dalam menyediakan perumahan rakyat selain air bersih dan listrik adalah memenuhi kebutuhan sanitasi. Cakupan rumah penduduk bersanitasi dilihat dari keluarga yang memiliki jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Perkembangan penduduk yang bersanitasi layak semakin meningkat setiap tahun dalam kurun waktu 2017–2020. Pada tahun 2017 penduduk yang bersanitasi layak sebesar 82,68% dan pada tahun 2020 mencapai 94,61%. Persentase penduduk bersanitasi layak disajikan dalam gambar grafik 2.33.



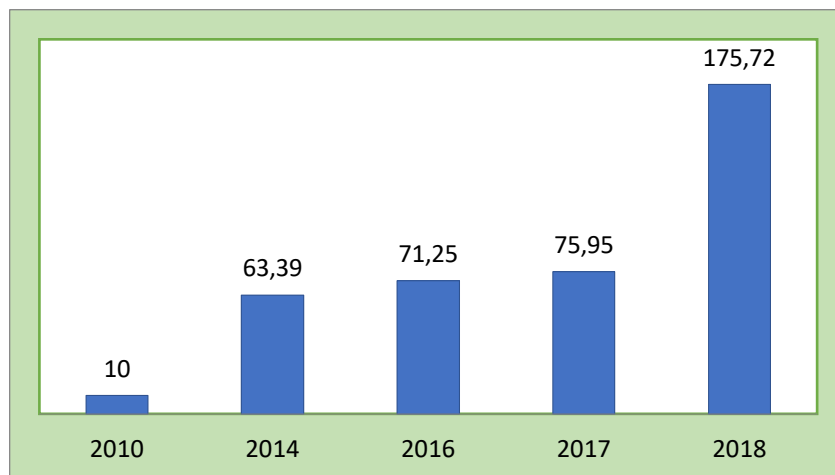
Gambar 2.33 Persentase Penduduk Bersanitasi Layak Tahun 2017—2020
sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.3.1.3.2 Perencanaan Tata Ruang

A. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pasal 20 menyebutkan bahwa terdapat dua jenis RTH, yaitu RTH publik dan RTH privat. Proporsi

RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah. Perkembangan RTH di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.34.



Gambar 2.34 Perkembangan RTH Publik
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010—2018

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana grafik perkembangan RTH pada gambar 2.29 terlihat bahwa total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat sebesar 175,72 ha. Luasan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan kawasan areal perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha atau hanya 1,88% dari total wilayah perkotaan Kabupaten Bangka Barat, sehingga kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH, tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga di kecamatan lainnya. Luasan RTH publik setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat secara rinci disajikan pada tabel 2.41.



Tabel 2.41 RTH Publik per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Wilayah	Luasan Kawasan Perkotaan (ha)	Luasan RTH (ha)	%
Kec. Muntok	4.345	175,72	4,04
Kec. Simpangteritip	978	0	0
Kec. Tempilang	959	0	0
Kec. Kelapa	1.067	0	0
Kec. Jebus	1.067	0	0
Kec. Parittiga	915	0	0
Kab. Bangka Barat	9.331	175,72	1.88

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2021;
RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014–2034

Sebagaimana tabel 2.41, terlihat bahwa penambahan luas RTH di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu delapan tahun berfluktuatif. Total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175,72 ha atau 9,38% dari total RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan yaitu 1.866,12 ha. Dengan demikian kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH di Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan RTH diharapkan tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga kecamatan lainnya.

B. Persentase Bangunan Ber-IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan agar bangunan memenuhi standar persyaratan teknis.

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang akan mendirikan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus sesuai dengan persyaratan administratif



serta persyaratan teknis yang berlaku. Kondisi Bangunan yang telah memiliki IMB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016—2020 tampak pada tabel 2.42.

Tabel 2.42 Persentase Bangunan ber-IMB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.730	1.993	2.223	2.480	2.749
2.	Jumlah Bangunan	46.254	44.752	44.752	46.862	46.862
3.	Persentase bangunan ber-IMB	3,72	4,45	4,97	5,29	5,87

sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan tabel 2.42 tersebut terlihat bahwa persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 persentase bangunan ber-IMB sebesar 3,73% dan di tahun 2020 menjadi 5,87%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah bangunan yang memiliki IMB setiap tahunnya. Dalam rangka peningkatan persentase bangunan yang ber-IMB yang disebabkan rendahnya efektivitas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian, dan kesadaran masyarakat, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang.

C. Ketaatan Terhadap RTRW

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan terkait penataan ruang, maka keberadaan dokumen RTRW sangatlah penting. Pada tahun 2014 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034. Dalam penetapan pola ruang pada RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, baik pada naskah rencana maupun pada gambar peta pola ruang, dapat dikemukakan pola



ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat, seperti pada tabel 2.43.

Tabel 2.43 Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014

No.	Kawasan Lindung	Lokasi Kecamatan
1.	Kawasan Hutan Lindung	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang
2.	Kawasan Bergambut	Kecamatan Muntok, Simpangteritip, Kelapa dan Jebus
3.	Kawasan Hutan Bakau	Kelapa, Jebus, Tempilang, Simpangteritip
4.	Sempadan Pantai	Kelapa, Parittiga, Simpangteritip
5.	Sempadan Sungai	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang
6.	Sempadan <i>Kolong</i>	Muntok, Jebus, Tempilang
7.	Suaka Alam/Cagar Alam	Muntok, Simpangteritip, Kelapa
8.	Cagar Budaya	Muntok
9.	Taman Hutan Raya	-
10.	Rawan Banjir	Muntok, Parittiga, Jebus,
11.	Rawan Abrasi Pantai	Parittiga, Tempilang, dan Simpangteritip
	Kawasan Budidaya	Lokasi Kecamatan
1.	Produksi	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang
2.	Perkebunan	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang
3.	Permukiman	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang
4.	Pertanian (Sawah)	Simpangteritip, Jebus, Kelapa, Muntok

sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan PK RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034 tersebut diperoleh skor 90,27 sehingga direkomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Bangka Barat tidak perlu dilakukan revisi meskipun belum seluruh pola ruang Kabupaten Bangka Barat terealisasi sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena sebagian besar realisasi perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Barat masih belum terbangun.



Kendala yang dihadapi pada urusan tata ruang di antaranya disebabkan oleh minimnya produk rencana rinci yang harus ditetapkan berdasarkan amanat dari Perda RTRW, sehingga alat untuk pengendalian ruang belum ada. Hal ini karena belum adanya peta yang tersedia di Badan Informasi Geografi (BIG) sesuai dengan persyaratan dalam penyusunan rinci akibat keterbatasan anggaran dan peralatan pendukung. Hingga tahun 2020 produk-produk terkait dengan perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.44.

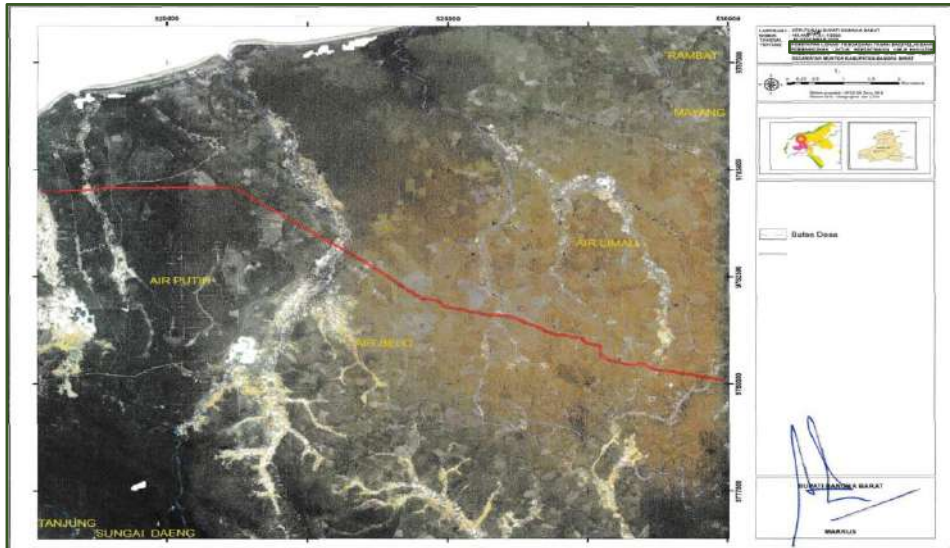
Tabel 2.44 Produk Perencanaan Tata Ruang
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Jenis Kebijakan	Tahun
1.	Perbup RTBL Cluster Eropa	2016
2.	Perbup RTBL Cluster Melayu	2017
3.	Perbup RTBL Cluster Cina	2018
4.	Penetapan Lokasi Pelabuhan Sesuai dengan Tata Ruang	2019
5.	Usulan Perubahan Kawasan Hutan	2019
6.	Perbup Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2020
7.	SOP surat Keterangan Ruang	2020
8.	Keputusan Bupati Terkait Peninjauan Kembali RTRW	2020
9.	Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	2020

sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2021

Selama kurun waktu lima tahun produk perencanaan tata ruang di Kabupaten Bangka Barat sejumlah sembilan kebijakan. Adapun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat sebanyak tiga kebijakan yakni RTBL Klaster Eropa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok, RTBL Klaster Melayu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama, serta Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau pada Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/503.A/1.3.1.1/2020

tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kegiatan pembangunan jalan Tanjung Ular-Air Limau Kecamatan Muntok.



Gambar 2.35 Peta Pengadaan Tanah untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau
sumber: SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/503.A/1.3.1.1/2020

Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau menjadi hal yang penting mengingat Kawasan Tanjung Ular menjadi Kawasan strategi Provinsi sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan rencana struktur jaringan transportasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan pemerataan pelayanan transportasi dan perkembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat.



Gambar 2.36 Kondisi Pantai Tanjung Ular

sumber: <https://storiesonbabel.com/menara-suar-tanjung-ular>

Selain berperan sebagai jalan pembuka ke Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka Barat dipandang penting juga oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kabupaten yang strategis secara ekonomi sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di dalam RTRW telah menetapkan sistem transportasi darat melalui jaringan jalan khusus KIPT, yaitu Ruas jalan Muntok-Air Putih Tanjung Ular-Air Limau sejauh 13,8 km untuk menunjang kawasan tersebut.

Kabupaten Bangka Barat akan menjadi daerah maju di berbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, perhubungan transportasi darat dan laut ke depan dengan adanya KIPT Tanjung Ular. Diharapkan adanya KIPT Tanjung Ular dapat menjadi hal positif untuk menarik investor berbagai bidang untuk segera membangun atau menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat dapat bangkit dan *multiflier effect* dari keberadaan kawasan tersebut dapat dirasakan berbagai pihak.



Tabel 2.45 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	17	17	17	17	TTC
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	0	0	0	1 keg.	SS
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	88,8 2%	90,84 %	90,40 %	91,78 %	SB
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	82,6 8%	86,94 %	93,79 %	94,61 %	SB
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	88,8 2%	90,84 %	90,40 %	91,78 %	SB
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	67,5 Liter/ det	67,5 Liter/ det	67,5 Liter/ det	67,5 Liter/ det	TKD
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	11,7 1%	12,85 %	15,35 %	data belum ada	SB
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	1,31 %	1,78 %	2,05 %	2,04%	SB
6.3.1.(a)	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	0	0	0	0	TTT
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	16.6 7%	16.67 %	16.67 %	16.67 %	TTC



2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat pada urusan wajib perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator berikut.

A. Persentase Rumah Layak Huni

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak serta terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Persentase rumah layak huni adalah nisbah antara jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk. Persentase layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.46 .

Tabel 2.46 Persentase Rumah Layak Huni
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No.	Tahun	Persentase
1.	2017	86,60
2.	2018	88,05
3.	2019	89,39
4.	2020	91,26

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.46, persentase rumah layak huni di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 4,66%. Koordinasi dalam setiap perencanaan antarpihak terkait sangat penting terutama dalam mewujudkan perumahan layak huni di Kabupaten Bangka Barat meskipun persentase rumah layak huni cenderung terus meningkat.

Disisi lain, terdapat rumah yang tidak layak huni. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan



prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun atau disediakan dan prasarana dasar yang ada sehingga perlu ditingkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan agar dapat mengatasi masalah seperti jumlah *backlog*/defisit, perumahan dan rumah tidak layak huni yang masih banyak. Dengan demikian dapat terwujud pengembangan kawasan permukiman yang terpadu yaitu kawasan permukiman yang dilandasi dengan kebijakan permukiman pada agenda 21 Nasional, yaitu rumah yang layak dan permukiman yang berkelanjutan dalam lingkup perkotaan.

B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh terjadi karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana prasarana pendukung kehidupan manusia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta terbatasnya lahan permukiman. Indikator persentase lingkungan permukiman kumuh merupakan persentase dari luas lingkungan permukiman kumuh dibagi dengan luas wilayah. Perkembangan persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

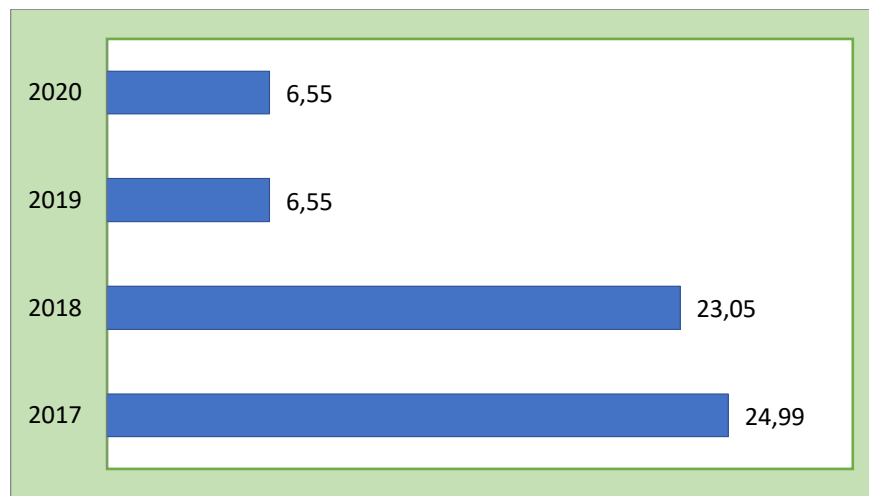
No.	Tahun	Persentase
1.	2017	0,030
2.	2018	0,029
3.	2019	0,025
4.	2020	0,025

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.47, persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bangka Barat terus menurun setiap tahunnya. Persentase areal kawasan kumuh yang paling besar terjadi pada tahun 2017 dan terus menurun sampai tahun 2020. Pada tahun 2017 persentase

lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,03%, kemudian pada tahun 2019 hingga pada tahun 2020 menurun menjadi 0,025%.

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2017–2020 juga mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.37.



Gambar 2.37 Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017–2020

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.48 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017–2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	86,60%	88,05%	89,39%	91,26%	Tercapai



2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) mengatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Salah satunya yang disebutkan dalam point (e) berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Artinya, terwujud atau terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, sedangkan perlindungan masyarakat berkaitan dengan kondisi dinamis dan kelompok masyarakat disiapkan serta dibekali pengetahuan maupun keterampilan untuk memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus memastikan ketersediaan dan kesesuaian tugas pokok serta kewenangan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sedangkan Satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan serta dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana. Tujuannya untuk mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara



keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Lebih lanjut, data capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Bangka Barat terkait dengan bidang urusan atau indikator urusan wajib pemerintahan dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	145,67	79,33	79,33	85,83	84,17
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	-	-	95,78	95,78	95,78
4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	-	83,54	70,88	42,71
5.	Persentase Penegakan PERDA	%	-	-	-	100	100

sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada bagian cakupan perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2016 berjumlah 874 orang petugas atau sebesar 145,67%. Tahun 2017 dan 2018 berjumlah 476 orang petugas atau sebesar 79,33%. Pada tahun 2019 cakupan Linmas mengalami peningkatan berjumlah 515 orang petugas atau sebesar 85,83%. Sedangkan di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, yakni berjumlah 505 orang petugas atau sebesar 84,17%.

Di tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) periode tahun 2016—2020 mencapai 100%. Jumlah pelanggaran K3 ini merupakan jumlah yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Barat selama periode 2016—2020. Sementara pada bagian cakupan pelayanan bencana kebakaran pada periode tahun 2018—2020 sebesar 95,78%. Persentase



ini dihasilkan dari jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 2.721,18 km² dibandingkan dengan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Bangka Barat sebesar 2.841,05 km².

Hasil capaian kinerja pada bagian tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2018 sebesar 83,54%. Persentase ini dihasilkan dari 137 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dan 164 jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK. Di tahun 2019 berjumlah sebesar 70,88% dengan rincian 258 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dan 364 jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK. Sedangkan di tahun 2020 berjumlah sebesar 42,71%. Persentase ini dihasilkan dari 126 jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dan 295 jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK. Terakhir, bila dilihat capaian kinerja pada persentase penegakan Perda Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2019–2020 sebesar 100%. Jumlah penegakan perda ini merupakan jumlah penyelesaian penegakan perda dibandingkan dengan jumlah pelanggaran perda yang terjadi.

Tabel 2.50 Jumlah Petugas Satpol PP
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2020

No.	Status	Satuan	Jumlah Petugas				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	PNS	Orang	10	10	10	10	10
2.	Non PNS	Orang	89	95	118	118	116
Total			99	105	128	128	126

sumber: Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.50, jumlah petugas Satpol PP yang berstatus PNS pada periode tahun 2016–2020 berjumlah 10 orang. Jumlah petugas Satpol PP yang berstatus non PNS pada tahun 2016 berjumlah 89 orang.



Pada tahun 2017 mengalami peningkatan berjumlah 95 orang. Di tahun 2018 dan 2019 berjumlah 118 orang, serta di tahun 2020 mengalami pengurangan sebanyak dua orang, sehingga berjumlah 116 orang petugas yang berstatus non PNS.

Satpol PP Kabupaten Bangka Barat saat ini masih bergabung dengan Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, maka jumlah petugas dari dua bidang tersebut dapat dirincikan bahwa jumlah petugas pemadam kebakaran periode tahun 2018–2020 berjumlah 7 orang, sedangkan pada bidang penanggulangan bencana pada periode tahun 2017–2020 berjumlah 7 orang petugas. Penggabungan tersebut dinilai belum optimal.

Tabel 2.51 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017–2020

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017)	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	3.831	1.524	128	176	tidak tercapai
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	0	0	0	0	tidak tercapai
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Rp48.9 M	Rp5.6 M	0	0	tercapai
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	0	0	0	0	tidak tercapai

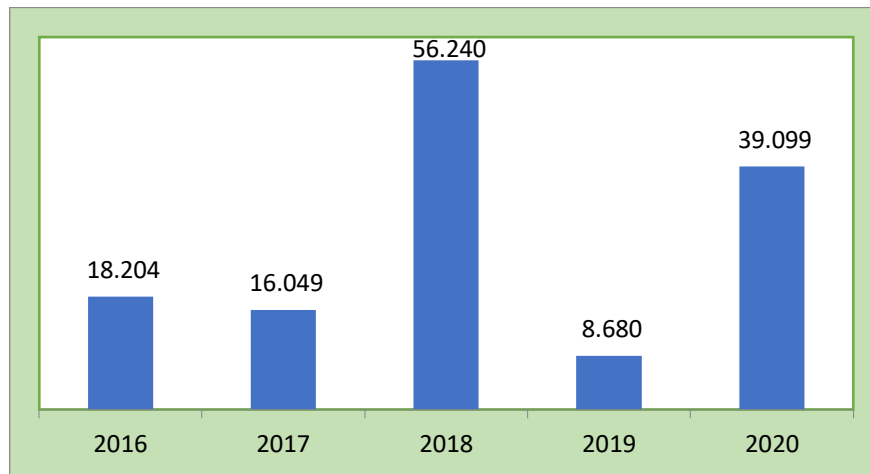


2.3.1.6. Sosial

Aspek sosial menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pembangunan daerah. Hal ini karena pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Cara atau pedoman tindakan tersebut selanjutnya terangkum dalam suatu kebijakan sosial. Tujuannya adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat. Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 pada Urusan Sosial diuraikan sebagai berikut.

A. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial, tertangani, dan skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pada tahun 2019, istilah PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Dalam peraturan tersebut disebutkan terdapat 26 jenis PPKS. Penduduk yang menyandang masalah sosial di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun (2016—2020) dapat dilihat pada gambar 2.38.



Gambar 2.38 Penduduk yang Menyandang Masalah Sosial di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.38, penduduk yang menyandang masalah sosial di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun naik turun. Jumlah penduduk yang menyandang masalah sosial terbanyak berada di tahun 2018 yaitu 56.240 jiwa. Hingga tahun 2020, penyandang masalah sosial di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 39.099 jiwa naik dari tahun sebelumnya yang hanya 8.680 jiwa. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, PMKS di Kabupaten Bangka Barat yang telah menerima bantuan sosial yang tertangani selama lima tahun terakhir sebesar 100%. Bantuan sosial yang dimaksudkan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Kebutuhan dasar dimaksud meliputi permasalahan kesehatan, pendidikan, dan PMKS yang terpenuhi melalui program BPNT, PKH, PBI, serta JKN.



B. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, dan rehabilitasi sosial. Di Kabupaten Bangka Barat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial selama periode 2016—2020 memiliki persentase yang bervariasi, terutama dalam kurun waktu 2016—2018 yang berjumlah 33% dan 2019—2020 mengalami sedikit penurunan, yakni berjumlah 25%.

Persentase WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial ini diperoleh dari jumlah WKSBM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan jumlah WKSBM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan. Jumlah WKSBM di Kabupaten Bangka Barat pada periode 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.52.

Tabel 2.52 Jumlah Keseluruhan dan Jumlah WKSBM Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Jumlah WKSBM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Keseluruhan WKSBM	12	12	12	13	13
2.	Jumlah WKSBM Aktif	4	4	4	3	3

sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Sebagaimana tabel 2.52 Kabupaten Bangka Barat memiliki 12 WKSBM tahun 2016—2018. Dari 12 WKSBM, yang aktif hanya berjumlah 4 WKSBM, sedangkan pada periode 2019—2020 terdapat peningkatan



jumlah WKSBM, yakni berjumlah 13 WKSBM. Namun, justru terdapat penurunan yang WKSBM yang aktif, yakni hanya terdapat 3 WKSBM saja.

C. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2011), Indeks rawan bencana yang ada di Pulau Bangka tergolong sedang-tinggi, walau hal tersebut tidak menimbulkan kerugian harta maupun jiwa yang signifikan. Dengan demikian, hal tersebut belum menjadi fokus perhatian pemerintah maupun masyarakat. Namun, bila dihitung secara menyeluruh, kerugian akibat bencana alam relatif jauh lebih besar, terutama kerugian terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian Irvani dan Indra Gunawan (2015) tentang Studi Pendahuluan Potensi Bencana Alam (*Geo-Disaster*) di Pulau Bangka, Kabupaten Bangka Barat teridentifikasi memiliki potensi bencana alam, seperti erosi, sedimentasi, bencana banjir, gempa bumi, longsor, dan angin puting beliung.⁴ Senada dengan hal tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Barat menyatakan bahwa kondisi di Kabupaten Bangka Barat terutama di Kota Muntok sangat rawan banjir dan di beberapa lokasi sudah mulai abrasi, seperti di Tanjung Laut dan beberapa daerah bakau pun sudah mulai habis karena perambahan dari penambangan liar.⁵

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus mampu menyediakan bantuan sosial bagi korban bencana alam yang terjadi. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, persentase korban bencana alam yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada periode 2016—2020 berjumlah 100%. Persentase ini diperoleh dari jumlah korban bencana yang seharusnya

⁴Irvani and Indra Gunawan, 'Studi Pendahuluan Potensi Bencana Alam (Geo-Disaster) Di Pulau Bangka', *Promine*, 3.2 (2015), 1–9.

⁵<http://portal.bangkabaratkab.go.id/> tahun 2020.



menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, dikalikan 100%. Data terdampak bencana dan tertangani yang ada di Kabupaten Bangka Barat pada periode 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.53 .

Tabel 2.53 Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang Terdampak Bencana dan Tertangani Tahun 2016—2020

No.	WKSBM	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Terdampak Bencana	2.174	80	2.873	298	431
2.	Tertangani	2.174	80	2.873	298	431

sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.53 jumlah yang terdampak bencana di Kabupaten Bangka Barat tertinggi di tahun 2018 dengan jumlah 2.873 orang dan keseluruhan korban tertangani. Jumlah yang terdampak bencana terkecil terjadi di tahun 2017 sebanyak 80 orang terdampak bencana dan semua dapat tertangani. Secara keseluruhan, terdampak bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016—2020 dapat tertangani semua.

D. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar. Melihat data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jasa di Kabupaten Bangka Barat pada



periode 2016—2020 berjumlah 100%. Data jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bangka Barat periode 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.54.

Tabel 2.54 Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial, dan Terintervensi di Kabupaten Bangka Barat Pada Periode 2016—2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	223	151	256	269	345
2.	Terintervensi	223	151	256	269	345

sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.54 jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terbesar terdapat pada tahun 2020 dengan jumlah 345 orang, sedangkan jumlah terkecil terdapat pada tahun 2017 dengan jumlah 151 orang. Secara keseluruhan, jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 terintervensi.

Tabel 2.55 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	19,16%	23,48%	39,85%	42,89%	SS
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai	Menurun menjadi 2,8 juta	3240	3147	3152	3239	SB



No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Kriteria
			2017	2018	2019	2020	
	bersyarat/Program Keluarga Harapan.						
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	0	0	0	0	NA
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	25 jiwa	17 jiwa	23 jiwa	13 jiwa	SB

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata keberbagai pelosok daerah di Kabupaten Bangka Barat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Hal ini karena ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek mendasar dalam kehidupan manusia yang mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Dilihat dari dimensi ekonomi, berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berupaya dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Dalam urusan ketenagakerjaan, investor memiliki peranan penting. Semakin banyak investor yang menanamkan modal atau usahanya, maka akan semakin membuka peluang hadirnya lapangan kerja bagi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, jumlah investor nasional pada tahun 2016—2020 dijelaskan pada tabel 2.56.



Tabel 2.56 Jumlah Investor Nasional
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Investor	21	22	22	22	23

sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, 2021

Bila melihat data tabel 2.56 terdapat peningkatan pada jumlah investor nasional yang menanamkan modal atau membuka usahanya di Kabupaten Bangka Barat. Jumlah investor nasional tersebut stagnan dalam kurun waktu tiga tahun, yakni tahun 2017—2019. Namun, di tahun 2020 bertambah satu investor, sehingga menjadi 23 investor. Jika dilihat dari jumlah investor tersebut, maka jumlah nilai investasi berskala nasional yang tercatat pada tahun 2020 berjumlah Rp417.082.000.000,00 dengan rasio daya serap tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dan jumlah seluruh PMA/PMDN dijelaskan pada tabel 2.57.

Tabel 2.57 Jumlah Rasio Daya Serap, Bekerja pada Perusahaan dan
Jumlah Seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016—2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	118,33	104,73	140,86	228,86	196,35
2.	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	355	314	986	1602	1178
3.	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	3	3	7	7	6

sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel 2.57 memperlihatkan bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada periode 2016—2019 terus mengalami kenaikan. Kenaikan rasio serap tenaga kerja terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 228,86%. Di tahun 2020 mengalami penurunan dengan jumlah 196,35%. Kondisi yang sama terlihat pada jumlah tenaga kerja yang bekerja pada



perusahaan PMA/PMDN yang terus mengalami kenaikan pada periode 2016-2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1.178 orang. Penurunan ini juga cukup beralasan karena jumlah seluruh PMA/PMDN juga mengalami penurunan di tahun 2020 dari 7 perusahaan pada tahun 2019 turun menjadi 6 perusahaan di tahun 2020.

Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari dampak penyebaran Covid-19 yang berimbas besar terhadap dunia usaha, termasuk juga berpengaruh besar terhadap dunia usaha yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kondisi ini juga sekaligus menjadi tantangan atau peluang bagi kepala daerah untuk mampu membangkitkan dunia usaha, sehingga lapangan pekerjaan semakin tersedia bagi masyarakat.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan perempuan dan anak masih menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan daerah. Kesenjangan diantara perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan akses, partisipasi, kontrol, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya masih menjadi isu utama. Oleh karenanya, banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, terdapat empat orang perempuan yang menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2019—2024 dari total keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat berjumlah 25 orang. Dari hasil pemilihan legislatif tersebut, maka dapat dilihat proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Bangka Barat saat ini sebesar 16%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan. Langkah ini menjadi salah satu strategi



dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang dimulai dari pembangunan ekonomi keluarga.

Di lain pihak, urusan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan juga menjadi salah satu hal utama. Urusan ini semakin menjadi fokus oleh semua pihak di masa pandemi Covid-19. Hadirnya urusan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi merupakan salah satu dampak dari terganggunya keuangan, kesehatan, dan keamanan keluarga.

Selain itu, hadirnya peran gender yang disematkan menjadi tanggung jawab perempuan, khususnya di bidang domestik, dapat menyebabkan tekanan psikis. Tekanan ini meningkat karena bertambahnya pekerjaan rumah tangga yang ditanggung oleh perempuan. Berdasarkan laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat, terdapat 24 kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti sepanjang tahun 2020 oleh masing-masing unit pelayanan terkait, baik oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason, Dinas Kesehatan, POLRES, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangka Barat. Secara rinci, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tiap kecamatan terlihat dalam tabel 2.58.

Tabel 2.58 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kecamatan Muntok	37	7	5	3	10
2.	Kecamatan Simpangteritip	10	4	-	-	1
3.	Kecamatan Jebus	2	1	2	5	2
4.	Kecamatan Parittiga	7	3	1	2	5
5.	Kecamatan Kelapa	1	4	1	-	3
6.	Kecamatan Tempilang	1	-	1	2	3
Bangka Barat		58	19	10	12	24

sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Barat, 2021



Sebagaimana tabel 2.58 dapat dilihat bahwa masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Barat. Tahun 2016 merupakan tahun terbesar yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu sebanyak 58 kasus. Selama lima tahun, kasus kekerasan tertinggi berada di Kecamatan Muntok sedangkan Kecamatan Tempilang merupakan kecamatan yang memiliki kasus kekerasan terendah. Kasus kekerasan menurun signifikan di tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 kasus kekerasan bertambah 2 kasus sehingga menjadi 10 kasus dan semakin tinggi kasus kekerasan hingga tahun 2020 sebanyak 24 kasus.

2.3.1.9. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Berdasarkan Undang—Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk yaitu pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, dan gizi.



Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Indikator capaian kinerja dalam urusan pangan meliputi:

A. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan secara kuantitas, namun terpenting adalah kualitas dari pangan tersebut, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.59.

Tabel 2.59 Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)
1.	2016	2.016,47	116,37
2.	2017	2.662	69,7
3.	2018	2.728	120,9
4.	2019	2.487,30	69,38
5.	2020	2.779	76

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.59, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016—2020 ketersediaan energi cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi masih di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 kondisi ketersediaan energi

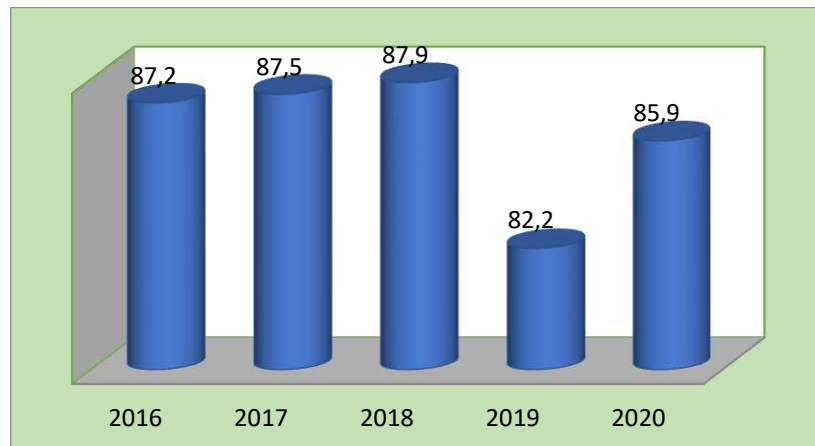


ketersediaan energi mencapai 2.779 kal/kap/hr, atau 15,79% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Adapun Ketersediaan protein pada tahun 2016—2020 berfluktuasi, namun demikian selama kurun waktu lima tahun kisaran ketersediaan protein masih di atas kecukupan protein penduduk Indonesia.

A. Skor Pola Pangan Harapan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2015—2020 terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator terkait ketahanan pangan, yaitu produksi padi yang menunjukkan ketersediaan pangan utama maupun dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat.

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam. Skor PPH merupakan indikator strategis dan penggunaannya menjadi tolak ukur dari gambaran kualitas konsumsi pangan. Skor PPH ini pun menjadi salah satu indikator kinerja utama urusan pangan. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat disajikan pada gambar 2.39.

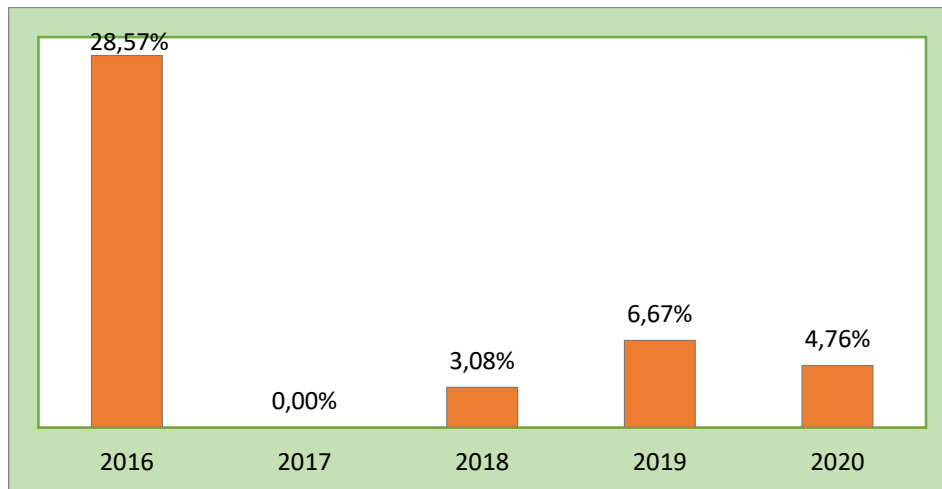


Gambar 2.39 Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Skor PPH di Kabupaten dalam kurun waktu 2016—2018 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Skor PPH mulai meningkat mencapai 85,9. Peningkatan ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat semakin baik, semakin beragam, dan berimbang. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

B. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan persentase antara jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.40.



Gambar 2.40 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun mengalami tren penurunan. Bahkan pada tahun 2017 mencapai 0%. Pada tahun 2020 pengawasan dan pembinaan pangan hanya 4,76%. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang dilakukan masih belum optimal dilaksanakan. Pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan perlu ditingkatkan agar keamanan pangan dapat terjamin untuk masyarakat.

Tabel 2.60 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	Menurun	10,48	10,47	8,47	BELUM ADA DATA	tercapai



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Skor PPH : 87,5 Tingkat Konsumsi Ikan : 79,28 kg/kap/hr	Skor PPH : 87,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 91,76 kg/kap/hr	Skor PPH : 82,2 Tingkat Konsumsi Ikan : 32,01 kg/kap/hr	Skor PPH : 85,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 39,06 kg/kap/hr	tidak tercapai

2.3.1.10. Pertanian

Pembangunan bidang pertanian mempunyai peranan penting. Hal ini karena tanah mempunyai fungsi ekonomis dan sosial. Terlebih lagi, tanah menjadi sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Dalam mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, maka pengelolaan pertanian perlu dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada. Dengan demikian, indikator pertanian ditunjukkan pada tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah. Semakin besar presentase luas lahan bersertifikat, maka menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya berperan mengurangi kasus-kasus tanah negara.

Persentase luas lahan bersertifikat merupakan hasil bagi antara luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikali seratus persen. Hingga tahun 2020 Kabupaten Bangka Barat memiliki total 47.663 bidang tanah dengan luas lahan bersertifikat 474.291.407 m². Sementara itu, luas lahan di Kabupaten Bangka Barat adalah 2.848.860.500 m². Secara rinci bidang



dan luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat terdapat pada tabel 2.61.

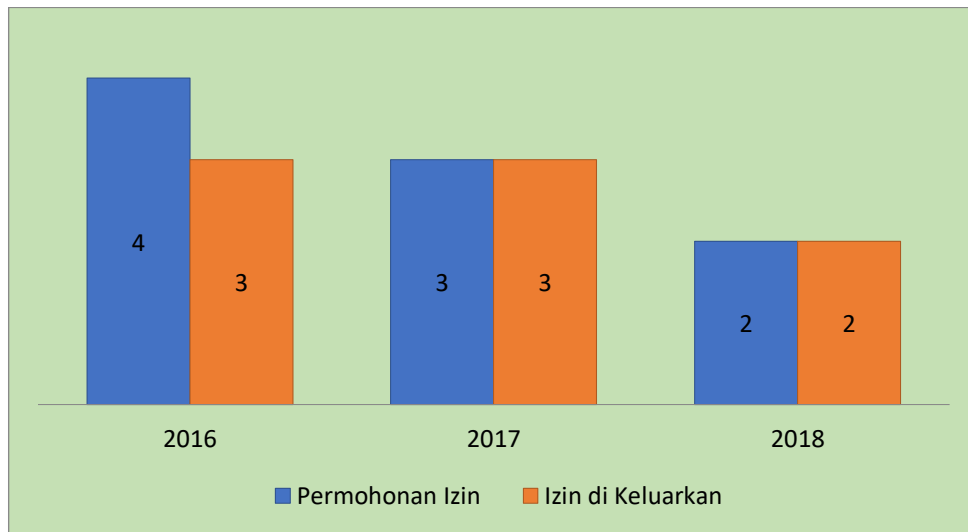
Tabel 2.61 Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Jenis Sertifikat	Bidang	Luas (m ²)
Hak Milik	46.395	122.304.975
Hak Guna Usaha	57	347.257.780
Hak Guna Bangunan	781	1.349.855
Hak Pakai	386	3.263.971
Hak Wakaf	44	114.826
Jumlah	47.663	474.291.407

sumber: BPN Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.61 tersebut, dapat diketahui bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 adalah 16,65%. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 16,6% dari tahun 2016 hanya sebesar 0,05%. Meskipun telah terjadi peningkatan persentase lahan bersertifikat dalam kurun waktu enam tahun, akan tetapi tingkat ketertiban administrasi terkait pertanahan di Kabupaten Bangka Barat masih tergolong minim. Oleh sebab itu perlu adanya upaya peningkatan oleh instansi terkait.

Adapun faktor penghambat dalam pembangunan terkait dengan urusan tanah yakni tidak jelasnya status kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kasus tanah. Pada rentang waktu 2016 hingga 2018, telah terjadi 5 kasus tanah negara. Seperti pada tahun 2016 kasus tanah negara yang terjadi sebanyak 2 kasus dengan status tidak dapat diselesaikan. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, terdapat 3 tanah negara yang terjadi dan semuanya dapat diselesaikan.



Gambar 2.41 Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2018

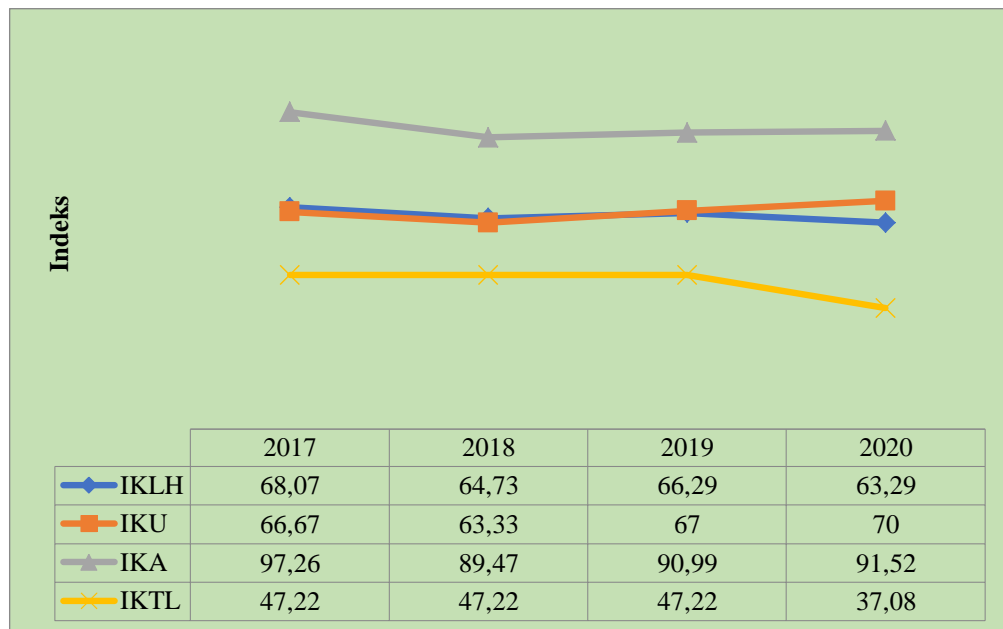
sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2020

Melihat gambar tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terdapat 4 permohonan izin lokasi dan hanya 3 izin yang dikeluarkan. Pada tahun 2017 terdapat 3 permohonan izin. Pada tahun 2018 permohonan izin lokasi mengalami penurunan, yakni menjadi sebanyak 2 permohonan izin saja. Dari semua izin yang diajukan pada tahun 2017 dan 2018 tersebut, seluruhnya mendapatkan izin lokasi sesuai dengan jumlah yang diajukan.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan tentunya tidak terlepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat nasional, tingkat pulau, maupun tingkat ekoregion. Indikator pembangunan pada urusan lingkungan hidup, antara lain indeks kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengendalian polusi, dan pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil

perhitungan dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Bangka Barat secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.42.



Gambar 2.42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan Gambar 2.42 terlihat IKLH Kabupaten Bangka Barat pada periode tahun 2017—2020 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 nilai IKLH sebesar 63,29 menurun dari tahun sebelumnya. Nilai IKLH tersebut merupakan nilai terendah selama kurun waktu empat tahun. Namun nilai IKLH tersebut masih termasuk dalam kategori cukup baik berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.16 Tahun 2020. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan target IKLH Nasional sebesar 68,71, maka IKLH Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah target IKLH Nasional.

Penurunan IKLH dipengaruhi oleh nilai IKTL yang menjadi salah satu komponen perhitungan IKLH yang mengalami penurunan yaitu dari 47,22 pada tahun 2019 menjadi 37,08 pada tahun 2020. Penyebab turunnya



nilai IKTL adalah adanya perubahan tutupan lahan akibat permukiman, perkebunan, pertambangan, dan faktor-faktor lain.

Indikator urusan lingkungan lainnya adalah pengendalian polusi. Beberapa komponen yang sangat erat dengan lingkungan hidup ini adalah terkait udara dan air. Apabila kedua komponen tersebut tercemar, maka akan menimbulkan perubahan terhadap kualitas kehidupan. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pemantauan kualitas air melalui perhitungan indeks pencemaran yang dilakukan di 10 lokasi sungai di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.62 Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Nama Sungai	Bulan	TSS	DO	BOD	COD	Posfat	Fecal -Coli	Total Colif orm	Pij	Status Mutu Air
1	Kampak Hulu	Februari	4,00	4,63	4,62	14,8	0,0398	23	170	0,54	Memenuhi
2	Kampak Tengah	Februari	6,50	4,63	2,72	13,4	0,0316	2,00	9,20	0,46	Memenuhi
3	Kampak Hilir	Februari	5,50	4,03	2,92	13,4	0,0316	2,00	11,00	0,47	Memenuhi
4	Kampak Hulu	November	2,00	4,23	2,82	14,7	0,0312	4,00	16,50	0,50	Memenuhi
5	Kampak Tengah	November	4,50	4,23	2,92	13,8	0,0312	14,00	17,00	0,48	Memenuhi
6	Kampak Hilir	November	11,50	4,43	2,92	16,8	0,0312	4,50	27,00	0,56	Memenuhi
7	Antan Hulu	Februari	3,00	4,83	2,42	9,35	0,0316	1,80	1,80	0,47	Memenuhi
8	Antan Tengah	Februari	3,00	4,83	2,62	10,5	0,0316	1,80	1,80	0,51	Memenuhi
9	Antan Hilir	Februari	3,00	4,03	2,92	12,3	0,0316	1,80	1,80	0,57	Memenuhi
10	Antan Hulu	November	5,50	4,43	2,72	13,7	0,0312	1,80	1,80	0,59	Memenuhi
11	Antan Tengah	November	15,50	4,03	2,52	15,4	0,0312	1,80	1,80	0,64	Memenuhi
12	Antan Hilir	November	9,50	4,03	2,52	16,6	0,0312	1,80	1,80	0,66	Memenuhi
13	Sukal Hulu	Februari	4,00	4,83	2,52	10,7	0,0316	1,80	1,80	0,37	Memenuhi
14	Sukal Tengah	Februari	5,50	4,43	2,82	11,9	0,0316	1,80	1,80	0,42	Memenuhi
15	Sukal Hilir	Februari	3,00	4,03	2,92	13,0	0,108	2,00	4,00	0,46	Memenuhi
16	Sukal Hulu	November	2,50	4,23	2,72	14,3	0,0312	1,80	1,80	0,47	Memenuhi
17	Sukal Tengah	November	5,50	4,43	2,92	16,2	0,0312	4,80	23,00	0,53	Memenuhi
18	Sukal Hilir	November	8,50	4,03	2,72	18,0	0,0312	47,00	1.600	0,61	Memenuhi
19	Kayu Arang Hulu	Februari	5,50	4,83	2,52	12,8	0,0316	1,80	1,80	0,57	Memenuhi
20	Kayu Arang Tengah	Februari	4,50	4,43	2,82	14,0	0,0316	1,80	1,80	0,60	Memenuhi
21	Kayu Arang Hilir	Februari	4,00	4,83	2,82	13,2	0,0316	27,00	41,00	0,58	Memenuhi
22	Kayu Arang Hulu	November	4,50	4,03	2,32	13,3	0,0312	14,00	1,80	0,58	Memenuhi
23	Kayu Arang Tengah	November	2,50	4,03	2,52	14,1	0,0312	4,00	24,00	0,60	Memenuhi
24	Kayu Arang Hilir	November	25,50	4,03	2,32	16,4	0,0312	10,00	12,5	0,66	Memenuhi
25	Sungai Babi	Februari	4,00	4,73	2,92	8,53	0,0316	1,80	1,80	0,46	Memenuhi
26	Sungai Babi	November	2,50	4,63	2,01	10,4	0,0312	1,80	1,80	0,50	Memenuhi

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.62, pada tahun 2020, parameter untuk perhitungan IKA yang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat



berdasarkan hasil pengujian didapat nilai indeks kualitas air sebesar 70,00. IKA Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sebesar 67,00. Jika dibandingkan dengan IKA Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, Indeks Kualitas Air Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan indeks sebesar 3,00 poin. Adapun kualitas udara berdasarkan uji kualitas udara ambien di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.63.

Tabel 2.63 Kualitas Udara Ambien Kabupaten Bangka Barat 2020

No	Peruntukan	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂	Rata-rata NO ₂ /Peruntukan	Rata-rata NO ₂ /Peruntukan	Rata-rata NO ₂ /Kab Kota	Rata-rata SO ₂ /Kab/ Kota	Indeks NO ₂	Indeks SO ₂	leu	IKU Kabupaten/ Kota
		µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³			
1	Transportasi	6,66	8,63	8,69	4,64	7,65	6,67	6,24	6,98	0,16	0,35	0,25	91,52
	Industri	11,14	7,09	10,43	8,77	9,12	9,60						
	Permukiman	3,34	5,09	5,88	2,71	4,22	4,30						
	Perkantoran	3,40	4,60	7,20	7,53	4,00	7,37						
	BLANK	<0,41	<0,41	<2,57	<2,57								

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Untuk perhitungan IKU, telah dilakukan pengujian atas kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pada beberapa titik pantau yaitu transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran dan didapat hasil indeks kualitas udara pada tahun 2020 sebesar 91,52. Indeks ini didapat dari rata-rata hasil pengukuran NO₂ Udara Ambien dan SO₂ udara Ambien. Jika dibandingkan dengan IKU Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan indeks sebesar 0,53 poin.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui bahwa untuk parameter NO₂ jika dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, konsentrasi NO₂ di Kabupaten Bangka Barat masih berada dibawah baku mutu. Konsentrasi NO₂ berkaitan dengan gas buang kendaraan bermotor ini terlihat dari hasil



pemantauan kualitas udara yang dihasilkan, konsentrasi NO_2 tertinggi dihasilkan dari titik lokasi transportasi.

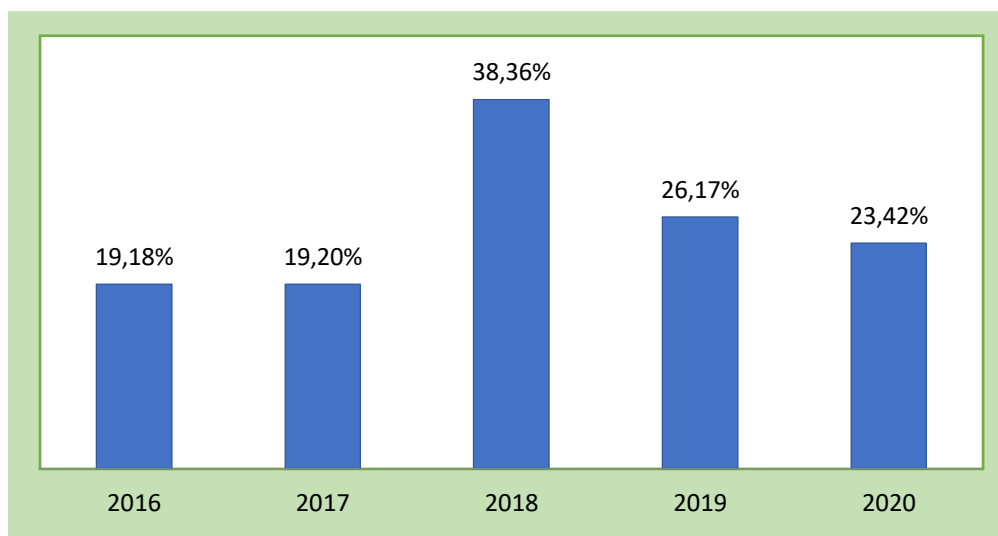
Sementara itu, konsentrasi SO_2 menunjukkan bahwa titik sampling di perumahan memiliki nilai SO_2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan titik sampling yang lain. SO_2 adalah salah satu dari gas-gas oksida sulfur (SO_x) yang merupakan salah satu unsur pembentuk hujan asam. SO_2 juga dapat bereaksi dengan komponen lainnya di udara dan membentuk PM_{10} . Untuk parameter seperti O_3 dan TSP, nilai tertinggi dihasilkan dari titik lokasi industri, sedangkan untuk parameter Pb dihasilkan dari titik lokasi perumahan. Dengan demikian, secara keseluruhan kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat dalam keadaan baik dan masih jauh berada di bawah batas yang ditentukan oleh Pemerintah.

Tingginya kualitas udara di Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara, seperti pemukiman padat penduduk, transportasi, dan sebagainya. Faktor pendukung lainnya adalah tingginya kesadaran perusahaan swasta untuk mengelola dan memantau emisi udara yang dihasilkan di samping pemantauan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2016—2018, yaitu dari 19,18% pada tahun 2016, menjadi 38,36% pada tahun 2018. Namun selama dua tahun terakhir, hal tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 26,17% pada tahun 2019, dan di tahun 2020 turun menjadi 23,42%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota



yang ditangani menurun, atau dengan kata lain bertambahnya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina serta diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dari yang tidak memiliki izin. Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaannya terhadap perizinan lingkungan dapat dilihat pada gambar 2.43.



Gambar 2.43 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2021

Adapun pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH pada tahun 2018 sebanyak 4 pengaduan, di tahun 2019 sebanyak satu pengaduan, dan pada tahun 2020 sebanyak dua pengaduan. Dari semua pengaduan tersebut, hasilnya dalam tiga tahun terakhir ini dapat terselesaikan.

Indikator penting lainnya dalam urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan. Penanganan persampahan sampai saat ini masih terfokus



pada Kawasan Perkotaan Muntok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.64 Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2016—2020

No.	Indikator	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Sampah	m ³	N/A	N/A	28.771,64 ton	28.771,64 ton	29.058,53 ton
2.	Sampah yang ditangani/diangkut	m ³	N/A	N/A	5.391,78 ton	5.103,90 ton	5.338,86 ton
3.	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aktif	Unit	N/A	1	1	1	1
4.	Tempat pembuangan sampah (TPS)	Unit	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik
5.	Pasukan Kuning	Orang	N/A	156	156	160	157

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2021

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa jumlah sampah yang ditangani di kawasan perkotaan Muntok masih sangat kecil, yakni 18,37% dari total produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau pun cakupan penanganan sampah di Kecamatan Muntok masih sangat kecil, namun tingkat kebersihan pada fasilitas umum dan publik dapat dikatakan baik. Penanganan persampahan, khususnya di Kota Muntok menjadi program strategis kedepan untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat dengan visinya yang baru. Terlebih lagi keinginan untuk menjadikan Muntok sebagai ikon pariwisata utama sebagai kota sejarah, kota tua, dan kota yang berbudaya.

Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat



ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Hal yang menjadi urusan lingkungan hidup adalah indikator pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan capaian rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2020 persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan semakin mengalami penurunan. Sesuai dengan tingkatannya, dokumen tersebut adalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), serta Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Pada tahun 2020, hanya terdapat 23,42% pelaku usaha saja yang memiliki dokumen lingkungan. Sebelumnya, pada tahun 2019 sebesar 26,27% dan pada tahun 2018 tercatat dapat mencapai 100% yang memiliki dokumen UKL/UPL; AMDAL (Andal,RKL/RPL).

Tabel 2.65 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	n/a	n/a	n/a	n/a	TKD
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	40,00%	20,00%	20,00%	100%	SS
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	41,12%	40,40%	36,40%	37,72%	SB
11.6.1.(b)	Jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	Meningkat/ada	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	TTC
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	80,312 Ton	54,137 Ton	92,668 Ton	34,358 Ton	TTT



NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
	B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	5,47 ton/tahun	5,69 ton/tahun	12,78 ton/tahun	9,86 ton/tahun (januari-Juni)	SB
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	NA
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	13,08%	13,01%	18,78%	18,79%	SS
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	N/A	70	177	127,42	SS
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	0	0	2	2	TTT

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional



kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Dua hal ini merupakan subbagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan baik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Barat terhadap identitas diri dan administrasi kependudukan pun memiliki peran penting. Kesadaran ini dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Akta Kematian. Persentase penduduk Kabupaten Bangka Barat yang memiliki administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel 2.66.

Tabel 2.66 Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Persentase				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Memiliki KTP	93,37	88,92	97,46	98,27	98,56
2.	Penduduk Berakte Kelahiran	34,45	36,96	39,80	45,55	49,93
3.	Pasangan Berakte Nikah	25,05	30,32	34,27	42,40	47,35

sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang memiliki KTP mengalami penurunan pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, sedangkan persentase penduduk yang berakte kelahiran dan pasangan yang berakte nikah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Penduduk yang memiliki akte kelahiran belum mencapai 100% dikarenakan beberapa penduduk yang berusia lanjut tidak melakukan pengurusan terhadap administrasi kependudukan tersebut.



Tabel 2.67 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Menurun	83,57%	86,90%	91,86%	93,50%	tercapai

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan selama ini dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang menerima semua program dari Pemerintah. Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara dan modal berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberi ruang untuk dipraktikkan pada paradigma baru dalam pembangunan Indonesia. Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam waktu lima tahun periode 2016—2020 diuraikan sebagai berikut.

A. Sarana prasarana perkantoran pemerintah desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa di Kabupaten Bangka Barat telah menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 60 desa dan 6 kelurahan. Jika pada tahun 2016 sebanyak 75%, kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 85% dan periode 2018—2020 sudah mencapai 100% sehingga perlu diapresiasi.

B. Kelompok Binaan PKK

Jumlah binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 sebanyak empat kelompok



kerja dengan persentase keaktifan sudah mencapai 100% sejak tahun 2016—2020.

C. Persentase Posyandu Aktif

Keaktifan posyandu juga memiliki peran penting. Hal ini karena posyandu sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan balita. Jumlah posyandu di Kabupaten Bangka Barat cenderung meningkat tetapi dilihat dari persentase posyandu yang aktif berfluktuasi dari tahun 2016—2020 berturut-turut sebesar 54,91%, 61,20%, 63,74%, 65,93%, dan 61,08%.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Oleh sebab itu, banyaknya peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Barat dapat memperlihatkan seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penekanan banyaknya kelahiran. Jumlah peserta KB aktif, Pasangan Usia Subur (PUS), dan cakupan peserta KB aktif tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.68.

Tabel 2.68 Cakupan Peserta KB Aktif
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Tahun	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
2016	32.869	40.431	81,30
2017	30.134	38.818	77,63
2018	30.939	38.792	79,76
2019	31.680	39.286	80,64
2020	30.215	38.162	79,18

sumber: DP2KBP3A Kabupaten Bangka Barat, 2021;
BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021



Pada tabel 2.68 di atas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bangka Barat, peserta KB aktif dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak senantiasa mengalami peningkatan. Selama lima tahun, peserta KB paling sedikit pada tahun 2017 dan terbanyak di tahun 2016. Kondisi peserta KB aktif di tahun 2020 menurun yang sebelumnya mencapai 31.680 peserta menjadi 30.215 peserta.

Selain itu, pada tabel tersebut dapat dilihat cakupan peserta KB di Kabupaten Bangka Barat. Cakupan peserta KB menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2016—2020 cakupan peserta KB di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif. Pada kurun waktu lima tahun terakhir tersebut cakupan peserta KB aktif paling sedikit berada pada tahun 2017, sedangkan terbanyak berada pada tahun 2016. Data peserta cakupan KB aktif pada tahun terbaru, yaitu tahun 2020 juga mengalami penurunan yang pada tahun sebelumnya dihasilkan bahwa cakupan peserta KB aktif 80,64% turun menjadi 79,18%.

2.3.1.15. Perhubungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan perhubungan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib. Dalam kurun waktu 2016—2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi sebagai salah satu hak setiap warga negara. Indikator capaian kinerja dalam urusan perhubungan meliputi:

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bangka Barat meliputi angkutan umum untuk transportasi darat dan laut. Pada transportasi darat, angkutan umum yang digunakan adalah bus/travel antarkota, sedangkan angkutan umum untuk transportasi laut berupa kapal angkut



penumpang dan kapal angkut barang. Indikator jumlah arus penumpang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang/barang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum. Rincian penumpang per jenis angkutan terlihat pada tabel 2.69.

Tabel 2.69 Jumlah Sarana Prasarana, Arus Penumpang, dan Barang Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	78	70	65	59	59
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	org	33.477	20.981	25.197	22.476	20.568
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	org	34.022	23.151	30.341	26.914	19.842
4.	Pemasangan Rambu-rambu	jumlah	778	778	778	778	778

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang buruk. Selain itu, penurunan yang terjadi khususnya di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Sebagaimana tabel 2.69 terlihat bahwa pemasangan rambu-rambu lalu lintas cenderung konstan. Hal ini mengindikasikan kurangnya optimalisasi dalam penyediaan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan serta sosialisasi tentang pentingnya keselamatan

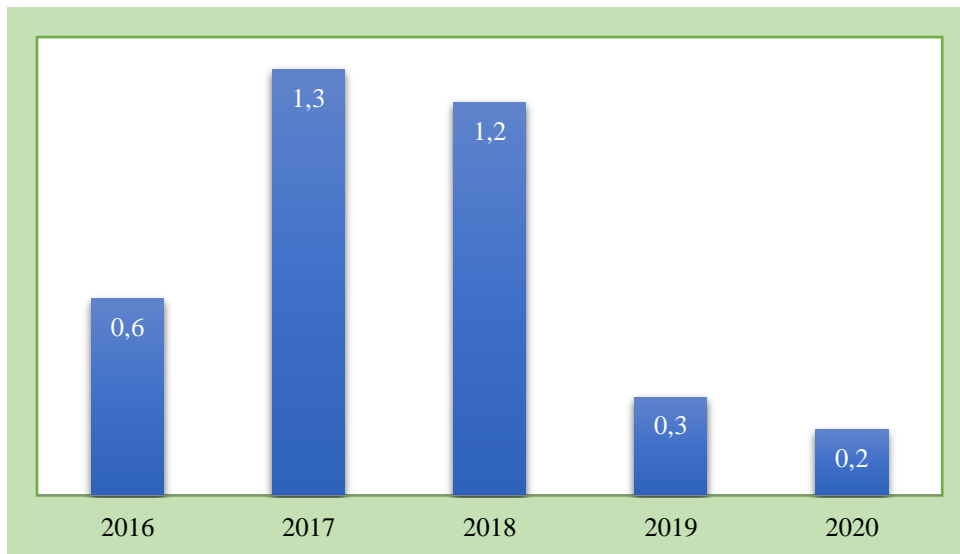


berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berlalu lintas, maka upaya pemeliharaan dan penambahan rambu-rambu perlu dilakukan.

b. Rasio Izin Trayek

Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek adalah kumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Di Kabupaten Bangka Barat, trayek antarkota dalam provinsi pada tahun 2020 berjumlah sembilan trayek, antara lain dengan trayek terminal Muntok-Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjungkalian-Pangkalpinang, Kelapa-Pangkalpinang, Kundi-Pangkalpinang, Parittiga-Pangkalpinang, Jebus-Pangkalpinang, dan Tempilang-Pangkalpinang. Sementara jumlah trayek perkotaan terdiri dari empat trayek, yaitu terminal Muntok-Pelabuhan Tanjungkalian dan Angkutan dalam Kota Muntok, sedangkan untuk trayek pedesaan terdapat lima trayek yaitu terminal Muntok-terminal Parittiga, terminal Muntok-terminal Kelapa, dan terminal Muntok-Kecamatan Tempilang, terminal Muntok-Mayang, dan terminal Muntok-Kundi. Adapun rasio izin trayek di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.44.



Gambar 2.44 Rasio Izin Trayek
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Rasio izin trayek pada tahun 2016—2020 di Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan akan tetapi dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa semakin menurunnya jumlah izin trayek yang dikeluarkan. Penurunan rasio jumlah izin trayek disebabkan karena minimnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi umum, atau hal tersebut juga bisa diartikan bahwa ada alternatif lain dalam keterhubungan transportasi antardesa.

c. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji tipe merupakan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, sedangkan uji berkala merupakan pengujian yang diwajibkan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta



tempelan yang dioperasikan di jalan. Jumlah KIR angkutan umum di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.70.

Tabel 2.70 Jumlah KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	kendaraan	1.858	1.611	1.555	1.646	1.590

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung menurun, yaitu sebanyak 1.858 kendaraan pada tahun 2016 dan sebanyak 1.590 kendaraan pada tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2019 sempat terjadi kenaikan yaitu sebanyak 1.646 kendaraan. Kabupaten Bangka Barat juga telah memiliki tempat pengujian kendaraan bermotor yang representatif dan sesuai standar. Akan tetapi, masih terkendala dengan kurangnya SDM yang terlatih serta sarpras pendukung pengujian KIR.

d. Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bus

Dilihat dari letak Kabupaten Bangka Barat yang sangat strategis, yakni diantara Selat Bangka dan Laut Cina Selatan atau Laut Natuna, Kabupaten Bangka Barat sendiri memiliki tiga pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi, dan Pelabuhan Tanjung Kalian.

Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekat ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai, sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT. Timah Tbk saja.

Pelabuhan Tanjung Kalian merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau



keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal *ferry* dan kapal *Ro-Ro*.

Selain itu, Kabupaten Bangka Barat untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, memiliki tiga buah terminal yang terletak di Kecamatan Muntok, Kecamatan Kelapa, dan Kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Namun, rute bis via terminal yang ada saat ini belum melingkupi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Adapun jumlah fasilitas perlengkapan jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 dapat dilihat padat tabel 2.71.

Tabel 2.71 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rambu-rambu lalu lintas (unit)	778	778	778	778	778
Jumlah <i>Traffic Light</i> (lokasi/unit)	4/24	4/24	5/29	5/29	5/29
Panjang Pagar pengaman jalan (m)	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
Jumlah Deliniator (unit)	542	542	542	542	542
Panjang Marka jalan (m)	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
Jumlah <i>Warning Light</i> (unit)	24	24	24	24	24
Jumlah <i>Traffic Cone</i> (unit)	156	156	156	156	156
Panjang Median jalan (m)	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dimaksudkan guna meningkatkan upaya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas. Fasilitas perlengkapan jalan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami penambahan kecuali Jumlah *Traffic Light* mengalami penambahan yaitu bertambah dari empat lokasi sebanyak 24 unit, menjadi lima lokasi sebanyak 29 unit yang merupakan hibah dari provinsi.



Tabel 2.72 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Bangka Barat Urusan perhubungan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017—2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambah 3.258 km	0	0	0	0	TKD
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	1000 Km (skala nasional)	0	0	0	0	TKD
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	1	1	1	1	TKD
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	2	2	2	2	TKD
11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Meningkat/ada	99,180 m ²	99,180 m ²	99,180 m ²	99,180 m ²	SB

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Di era modernisasi dan globalisasi berbasis teknologi saat ini, penggunaan teknologi informasi sudah tidak bisa dihindari lagi. Hal ini karena dengan menggunakan teknologi informasi dapat mempercepat komunikasi dan akses atas informasi yang tersedia, serta dapat menjadi akselerator dan infrastruktur virtual dalam meningkatkan ekonomi masyarakat saat ini. Dengan tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang baik dan berkesinambungan, maka dapat meningkatkan *e-readiness* masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat masih terdapat *blankspot* (titik buta) area per 2019, yakni area yang tidak memiliki koneksi sinyal untuk kebutuhan komunikasi dan akses internet melalui perangkat *mobile* (Kominfo Kabupaten Bangka Barat, 2021). Kondisi ini tentunya menyebabkan terjadinya hambatan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi. Masih terdapatnya *blankspot* area di beberapa wilayah Kabupaten Bangka Barat secara tidak langsung dapat berdampak terhadap ekonomi, proses belajar dan mengajar yang saat ini banyak dilaksanakan secara daring



(*online*), serta berdampak pada pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Daerah di Kabupaten Bangka Barat yang masih terdapat *blankspot* area dan beberapa wilayah hanya *tercover* dengan sinyal 2G tergambar dalam tabel 2.73.

Tabel 2.73 Daftar Desa yang Masih Terdapat Sinyal *Provider* 2G dan *Blankspot* Area di Kabupaten Bangka Barat

No.	Nama Lokasi	Titik Koordinat		Sinyal	Keterangan
		Longitude	Latitude		
1.	Simpang Tiga	105°024'54.8'	2°00'15.5'	2G	<i>Blankspot</i> di area pinggir desa
2.	Berang	105°29'06.1'	2°00'23.5'	2G	<i>Blankspot</i> di area pinggir desa
3.	Pangkal Beras	105°33'12.2'	1°4g'55.6'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
4.	Kayu Arang	105°38'27.3'	1°58'27.3'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
5.	Simpang Yul	105°44'04.2'	1°59'38.8'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
6.	Sinar Surya	105°41'52.6'	2°07'04.5'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
7.	Tanjung Niur	105°38'11.0'	2°03'01.3'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
8.	Simpang Gong	105°19'57.8'	1°54'36.1'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
9.	Rambat	105°17'12.5'	1°53'40.1'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
10.	Belar	105°21'22.7'	1°55'34.9'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area



No.	Nama Lokasi	Titik Koordinat		Sinyal	Keterangan
		Longitude	Latitude		
					desa
11.	Sungai Buluh	105°23'50.2'	1°43'51.0'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
12.	Pebuar	105°23'40.3'	1°42'06.5'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
13.	Mislak	105°27'59.3'	1°43'06.0'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
14.	Limbung	105°34'02.7'	1045'03.0'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
15.	Cupat	105°34'22.7'	1036'19.7'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
16.	Air Gantang	105°28'36.8'	1037'42.1'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
17.	Telak	105°34'25.5'	1040'58.5'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa
18.	Semulut	105°39'12.6'	1039'36.4'	x	<i>Blankspot</i> hampir diseluruh area desa

sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat dua desa yang masih mempunyai sinyal 2G yaitu Desa Simpang Tiga dan Desa Berang, selebihnya terdapat 16 desa masih dalam kondisi *blankspot* area atau tidak ada sinyal sama sekali hampir diseluruh area desa. Selain itu, agar dapat mengukur pencapaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, maka dirancang suatu indikator kinerja. Adapun indikator kinerja bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan untuk menunjang



kegiatan pemerintahan daerah dan seluruh masyarakat. Untuk lebih lanjut tentang kondisi umum capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dari tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.74.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	NA	83,33%	100%	NA	NA
2.	Cakupan layanan telekomunikasi	NA	NA	NA	0,71	NA
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,50	0,57	0,63	0,71	0,81
4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,50	0,57	0,63	0,71	0,82
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	59,93%	64,03%	64,03%	64,81%	65,12%

sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, 2021

Melihat data tersebut, terdapat proporsi rumah tangga yang tidak signifikan terhadap akses internet. Pada periode tahun 2016—2017 hanya terdapat peningkatan angka sebesar 0,07, sedangkan periode 2017—2020 terdapat peningkatan angka sebesar 0,06 sampai 0,11. Begitu juga terjadi peningkatan pada indikator proporsi rumah tangga yang memiliki komputer. Hal ini dapat dilihat periode 2016—2020 yang mengalami peningkatan dikisaran 0,06 sampai dengan 0,11. Untuk indikator persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dari tahun 2016—2020 terdapat peningkatan sebesar 5,19%.



Tabel 2.75 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat
Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	29,50%	34,18%	35,81%	47,07%	tercapai
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	59,93%	64,03%	64,81%	65,12%	tercapai
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	16,23%	19,89%	23,25%	25,54%	tercapai
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	59,93%	64,03%	64,81%	65,12%	tercapai
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	39,69%	47,52%	55,92%	57,79%	tercapai
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	76%	82%	97,85%	100%	tercapai
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0	0	0	0	tidak tercapai
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30%	6,67%	9,38%	12,50%	18,18%	tidak tercapai



No. Indikator	Indikator	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian				Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	
		populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi					
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	16,23%	18,89%	23,25%	25,54%	tidak tercapai
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	39,69%	47,52%	55,92%	57,79%	tercapai
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	30%	35%	44,79%	44,93%	tercapai

2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

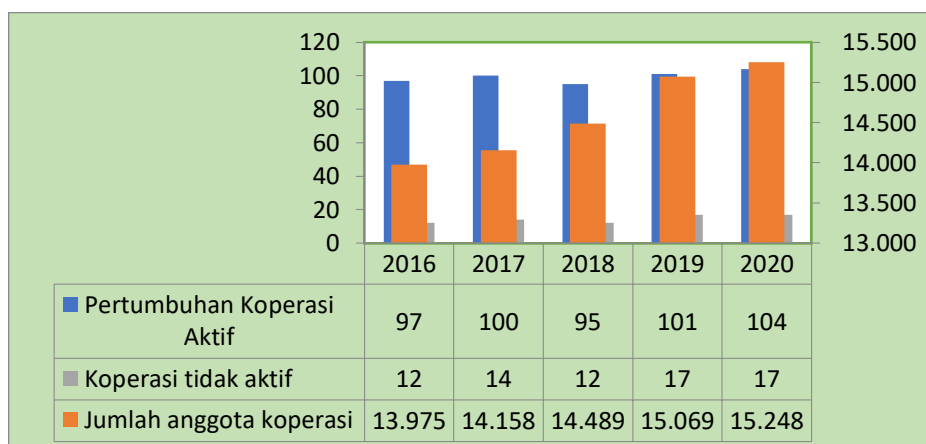
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan pelaksanaan koperasi bertujuan untuk menyesuaikan kondisi perekonomian global yang selalu dinamis dan bergerak cepat. Dapat dikatakan bahwa koperasi yang merupakan badan usaha dan memiliki badan hukum tersebut dikenal sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi dikenal sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Begitu pula dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, sehingga peran koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Di era desentralisasi daerah, koperasi memiliki peran yang besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh dan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah pedesaan.



Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber keuangan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar.

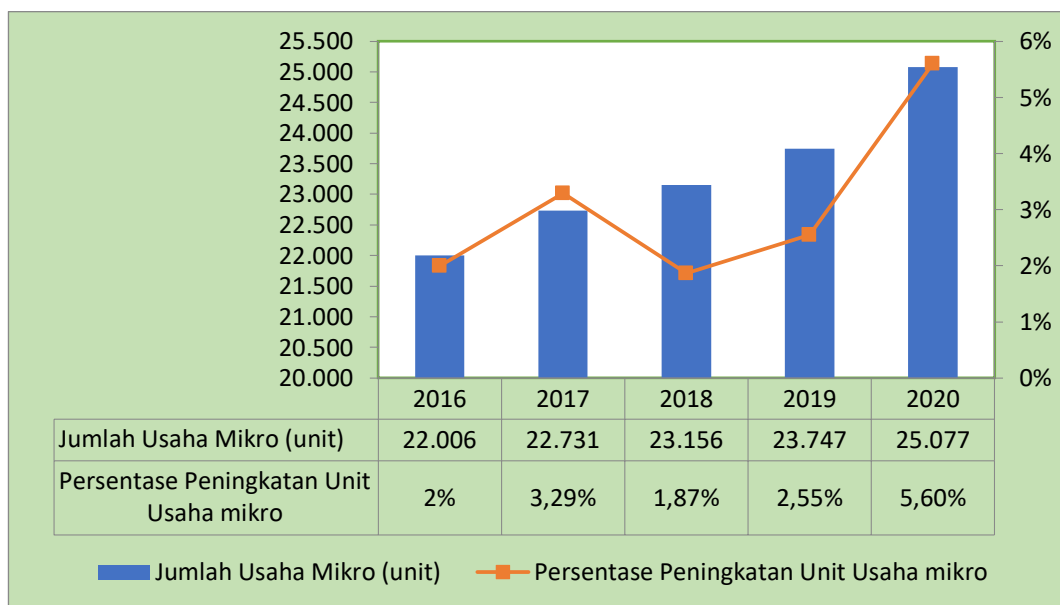
Secara kuantitas, perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan stabil. Dalam rentang lima tahun silam, penurunan jumlah unit koperasi hanya terjadi di tahun 2018 yaitu dari 100 unit menjadi 95 unit. Koperasi yang tidak aktif sejak tahun 2016 sampai 2020 tercatat dari tahun ke tahun adalah sebanyak 12 unit, 14 unit, 12 unit, dan 17 unit pada dua tahun terakhir. Dalam hal kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Barat akan pentingnya koperasi, dilihat dari jumlah anggotanya, sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Rata-rata peningkatan jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 2,15% dengan jumlah kenaikan tertinggi di tahun 2019, yaitu terdapat penambahan anggota sebanyak 580 anggota. Sampai saat ini, pada tahun 2020, tercatat telah ada 15.248 jumlah anggota koperasi di Kabupaten Bangka Barat. Data sebaran jumlah koperasi dan anggota koperasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.45.



Gambar 2.45 Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif serta Anggota Koperasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan data dari dinas Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tahun 2020, perkembangan Usaha Mikro di Bangka Barat menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada periode tahun 2018—2020, persentase unit usaha mikro naik dari 1,87% menjadi 2,55% dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 5,6%. Walaupun sempat mengalami penurunan peningkatan persentase unit usaha mikro dari tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu dari 3,29% turun menjadi 1,87%, namun rata rata jumlah usaha mikro mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan yang paling besar peningkatannya adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.330 unit.

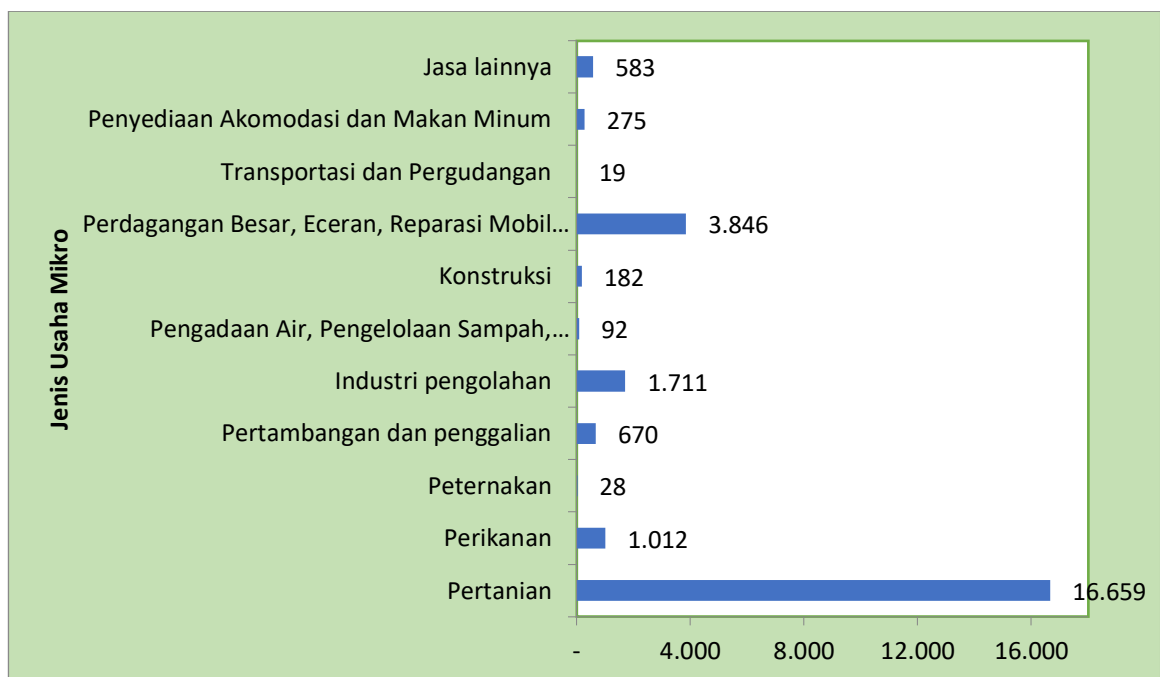


Gambar 2.46 Persentase Peningkatan Unit Usaha Mikro dan Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan kewenangannya, usaha skala menengah dan besar berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun skala kecil berada di bawah kewenangan provinsi. Selanjutnya, skala mikro menjadi kewenangan kabupaten/kota. Usaha mikro yang ada di Kabupaten Bangka Barat paling banyak berkembang di bidang pertanian

sebesar 16.659. Sampai pada tahun 2020, data pengembangan usaha mikro tertinggi terdapat di Kecamatan Kelapa sebesar 29,51% dan diikuti oleh kecamatan Tempilang sebesar 19,97%. Terkait usaha mikro yang digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, berbagai usaha inilah yang menunjang perekonomian masyarakat sebagaimana terlihat pada gambar grafik 2.47.



Gambar 2.47 Jumlah Unit Usaha Mikro dan Jenis Usaha Mikro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, 2021

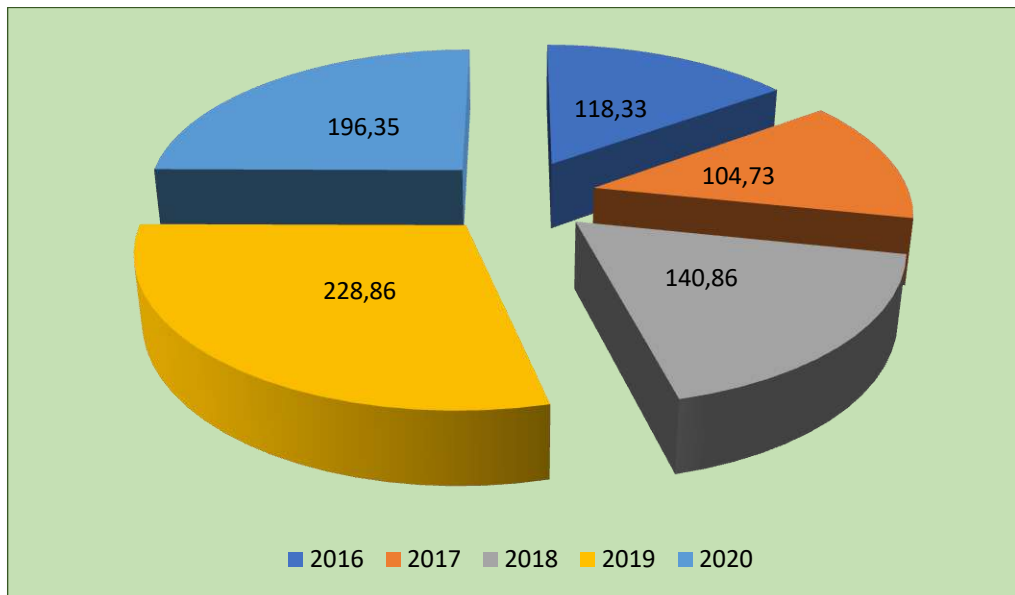
2.3.1.18. Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan



tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki berbagai kewenangan yang berkaitan dengan penanaman modal, seperti 1) koordinasi, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal; 2) melaksanakan promosi dan kerjasama penanaman modal; 3) pelaksanaan pelayanan penanaman modal yang berupa perizinan berusaha berbasis resiko (hasil transformasi dari Online Single Submission/OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021); 4) melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan; 5) mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.

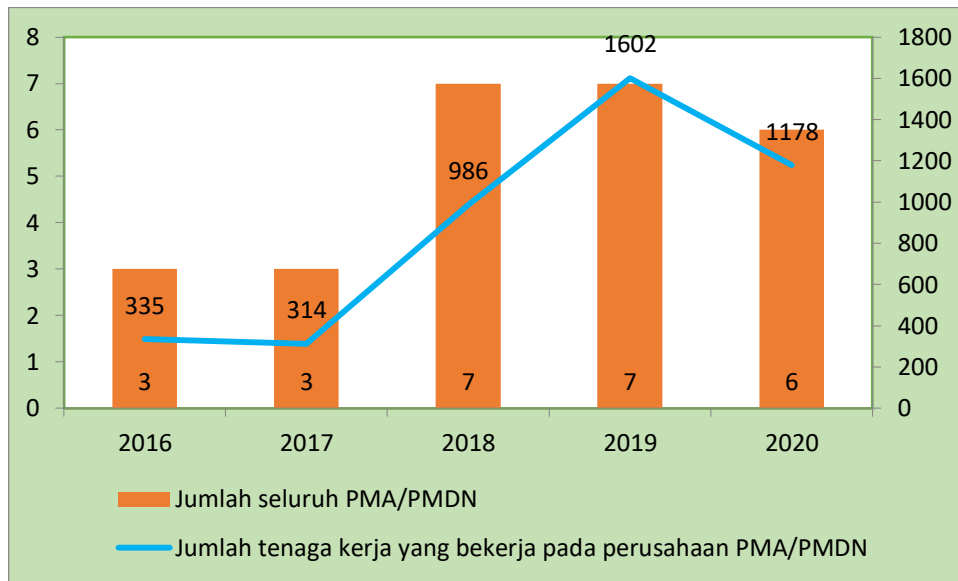
Penetapan fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki sehingga dapat mendukung sektor unggulan atau prioritas daerah. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat perlu dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Kebijakan dari pemerintah daerah dibutuhkan demi terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi. Berdasarkan data pada tahun 2016—2020, diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat fluktuatif. Secara rinci, rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat tampak pada gambar diagram 2.48.



Gambar 2.48 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
sumber: Dinas PMP2TSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Rasio ini menggambarkan daya tampung proyek investasi PMA/PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja, maka semakin besar pula daya tampung proyek investasi PMA/PMDN. Adapun di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2020, rasio daya serap tenaganya mencapai 196,35. Rasio daya serap tenaga kerja tersebut mengalami penurunan sebesar 32,51 dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti dari sisi penyerapan tenaga kerja dalam satu perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 adalah menurun.

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Perbandingan tersebut dapat terlihat pada grafik tabel 2.49.



Gambar 2.49 Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020
sumber: Dinas PMP2TSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan Kabupaten Bangka Barat, pendataan hanya dilakukan pada perusahaan yang mencantumkan tenaga kerja seperti terlihat pada tabel 2.76.

Tabel 2.76 Jumlah Sebaran Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT BUMI PERMAI LESTARI					221
2	PT MP LEIDONG WEST INDONESIA	267		519	558	
3	PT TIMAH TBK				648	
4	PT SAWINDO KENCANA					305
5	PT KENCANA AGRO JAYA				40	
6	PT GUNUNG SAWIT BINA LESTARI				167	
7	PT THEP		231	301		331
8	PT ENERGY KARYA PERSADA		54	54		
9	PT SINAR MUTIARA SEJAHTERA	57			32	
10	PT LISTRINDO KENCANA			41	20	
11	PT MEGAPOWER MAKMUR TBK	31		34		
12	PT MUKTI BERSAMA KITA					
13	PT BANGKA INDAH CEMERLANG					



NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	PT INA KARYA PRATAMA			27		
15	PT RSBT				137	137
16	PT HOKI ALAM SEMESTA JAYA					109
17	PT SWARNA NUSA SENTOSA					75
18	PT MUNTOK LISTRIK UTAMA		29			
19	PT BIC			10		
	JUMLAH	355	314	986	1602	1178

sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Pada data tersebut terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja terus meningkat dari tahun 2016 dan mengalami puncaknya terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.602 tenaga kerja di 7 perusahaan PMA/PMDN Kabupaten Bangka Barat. Jumlah tersebut meningkat sebesar 62% dari tahun sebelumnya berjumlah 986 tenaga kerja yang tersebar pada 7 perusahaan yang berbeda-beda. Namun pada tahun 2020, jumlah tersebut mengalami penurunan, terdapat pengurangan sebesar 424 tenaga kerja pada persebaran 6 perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat.

Sebagaimana diketahui bahwa potensi Kabupaten Bangka Barat merupakan gerbang masuknya wilayah, terutama dari daerah Sumatera Selatan. Oleh karena itu, fasilitas dan kemudahan dalam hal penanaman modal menjadi perhatian agar investasi yang masuk ke Kabupaten Bangka Barat dapat meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan dapat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan sebanyak 2 investor, yaitu dari 21 investor di tahun 2016 menjadi 23 investor di tahun 2020.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting investasi dapat meningkatkan akselerasi dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan rakyat. Jika dilihat dari jumlah nilai inventasi (PMA



dan PMDN), di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dan menurun di tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki kebijakan terbuka terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan nilai investasi hingga tahun 2019, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19. Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi di Kabupaten Bangka Barat tersebut dalam milyar rupiah ditunjukkan dalam tabel 2.77.

Tabel 2.77 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

TAHUN	REALISASI INVESTASI		TOTAL	KENAIKAN/ PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (MILIAR RUPIAH)
	PMA	PMDN		
2015	29.274.596.393	370.750.318.586	400.024.914.979	
2016	8.798.445.445	100.263.942.525	109.062.387.970	(270,486)
2017	4.861.679.153	132.081.307.264	136.942.986.417	31,817
2018	37.159.735.744	425.296.739.847	462.456.475.591	293,215
2019	29.315.279.977	612.922.774.396	642.238.054.373	187,626
2020	120.875.225.604	296.206.774.396	417.082.000.000	(316,716)

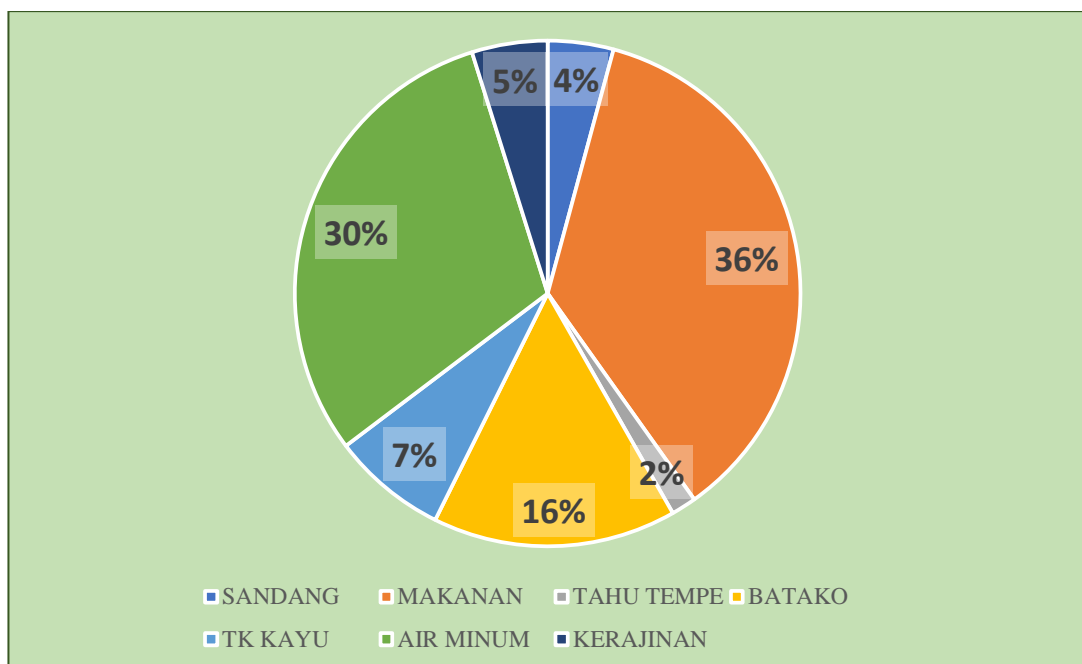
sumber: Dinas PMP2TSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.77, dapat dijelaskan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai nilai Rp417.082.000.000. Nilai ini menurun sebesar Rp225.156.054.373 atau 35% bila dibandingkan dengan capaian nilai investasi tahun 2019 sebesar, yakni Rp642.238.054.373.

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat, khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian membuka peluang untuk pengembangan investasi ke depan. Namun investasi yang banyak berkembang sampai saat ini adalah investasi pada usaha kecil dan menengah. Dari data nilai investasi industri kecil Kabupaten Bangka Barat diketahui bahwa terjadi peningkatan pada nilai investasi usaha kecilnya. Pada tahun 2019 nilai investasi tersebut meningkat sebesar 11,21% dan



pada tahun 2020 meningkat sebesar 11,69%. Adapun sektor industri kecil menengah (IKM) yang memiliki nilai investasi terbesar pada data tahun 2019 adalah pada bidang air minum, yaitu sebesar Rp4.095.000.000 dan bidang makanan sebesar Rp3.524.590.000. Sebaliknya pada tahun 2020, sektor industri kecil menengah (IKM) yang memiliki nilai investasi terbesar adalah pada bidang makanan, yaitu sebesar Rp4.887.550.000 dan bidang minuman sebesar Rp4.140.000.000.



Gambar 2.50 Persentase Investasi IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020
sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, 2021

PMA dan PMDN yang telah terealisasi di Kabupaten Bangka Barat sampai tahun 2020 sebanyak 15 perusahaan. Sebagian besar investor tersebut bergerak di bidang pertambangan bijih timah yaitu senilai Rp220.114.830.878 dan bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp115.529.098.837. Pada investasi sektor sekunder, di Kabupaten Bangka Barat hanya terdapat PMA saja, yaitu industri minyak makan, lemak nabati, dan hewani. Sebaliknya, pada investasi sektor tersier, belum terdapat PMA, namun terdapat PMDN, yaitu pada jenis investasi



ketenagalistrikan, transmisi tenaga Listrik (PLTD) Muntok, angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP)/trayek, Aktivitas penunjang pertambangan, dan penggalian lainnya.

Tabel 2.78 Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL
Investasi Sektor Primer	PMDN	Tanaman Pangan dan Perkebunan		
		PT. Swarna Nusa Sentosa	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	1.120.633.716
		Perikanan		
		PT. Hoki Alam Semesta Jaya	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	4.450.000.000
		PT. Agro Bahari Nusantara	Pembesaran crustacea laut	3.374.000.000
		PT. Agro Bahari Internasional	Pembesaran crustacea laut	4.580.000.000
		PT. Bahari Bio Makmur	Pembesaran crustacea laut	1.860.000.000
		Pertambangan		
		PT. Timah TBK	Pertambangan Bijih Timah	220.114.830.878
	JUMLAH INVESTASI SEKTOR PRIMER PMDN			235.499.464.594
	PMA	Tanaman pangan & perkebunan		
		PT. THEP	Perkebunan Kelapa Sawit	39.649.912.617
		PT. GSBL	Perkebunan Kelapa Sawit	75.879.186.220
JUMLAH INVESTASI SEKTOR PRIMER PMA			115.529.098.837	
Investasi Sektor Sekunder	JUMLAH INVESTASI SEKTOR SEKUNDER PMDN			-
	PMA	Industri Makanan		
		PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Industri minyak makan dan lemak nabati dan hewani	5.346.126.767
JUMLAH INVESTASI SEKTOR SEKUNDER PMA			5.346.126.767	
Investasi Sektor Tersier	PMDN	Listrik, Gas, dan Air		
		PT. Megapower Makmur TBK	Ketenagalistrikan	2.244.845.915
		PT. Perusahaan Listrik Negara	Transmisi Tenaga Listrik/PLTD Muntok	52.801.063.887
		Transportasi, gudang, komunikasi		
		PT. Kesatuan Jaya Abadi	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)/Trayek	250.000.000



JENIS USAHA	STATUS PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	JUMLAH TOTAL
		PT. Sampurna Putra Telak	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	1.260.000.000
		Jasa Lainnya		
		CV. Bahagia	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	901.000.000
		CV. Rifana	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	3.250.400.000
JUMLAH INVESTASI SEKTOR TERSIER PMDN				60.707.309.802
JUMLAH INVESTASI SEKTOR TERSIER PMA				-
JUMLAH KESELURUHAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2020				417.082.000.000

sumber: Dinas PMP2TSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

2.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16—30 tahun. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

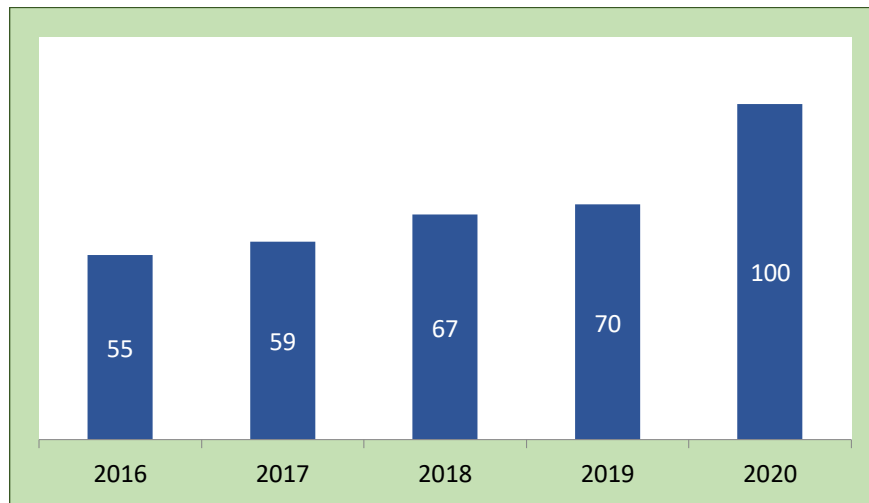
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan subbidang kepemudaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/



kota adalah: a) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota; b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. Subbidang keolahragaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota adalah: a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota; c) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. d) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja bidang kepemudaan dan keolahragaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 diuraikan sebagai berikut.

A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dapat dilihat pada gambar 2.51.



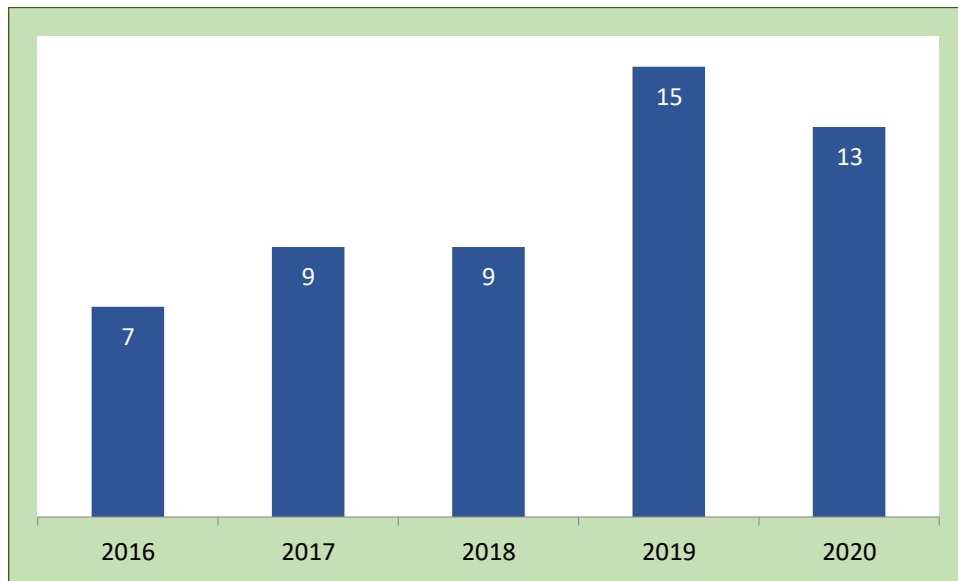
Gambar 2.51 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.51 persentase organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2016—2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketercapaian di tahun 2016 persentase organisasi yang aktif sebesar 55% hingga tahun 2020 tercapai 100% organisasi yang aktif di Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan serta organisasi sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

B. Persentase Wirausaha Muda

Wirausaha muda merupakan pengusaha muda yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis (efektif dan efisien) dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Salah satu capaian kinerja di Bangka Barat yaitu persentase wirausaha muda, dapat dilihat pada gambar 2.52.



Gambar 2.52 Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.52 persentase wirausaha muda tertinggi pada tahun 2019 sebesar 15%. Pada tahun 2020 menurun menjadi 13%. Menurunnya persentase tersebut menunjukkan minat dalam berwirausaha muda masih rendah. Persentase usaha muda per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79 Jumlah dan Persentase Wirausaha Muda per Kecamatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah	%
Jebus	3	5
Kelapa	10	18
Muntok	36	64
Parittiga	2	4
Simpangteritip	3	5
Tempilang	2	4
total	56	100

sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.79 wirausaha muda di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebanyak 56 wirausaha muda didominasi dengan persentase 64% berasal dari Kecamatan Muntok sebanyak 36 wirausaha

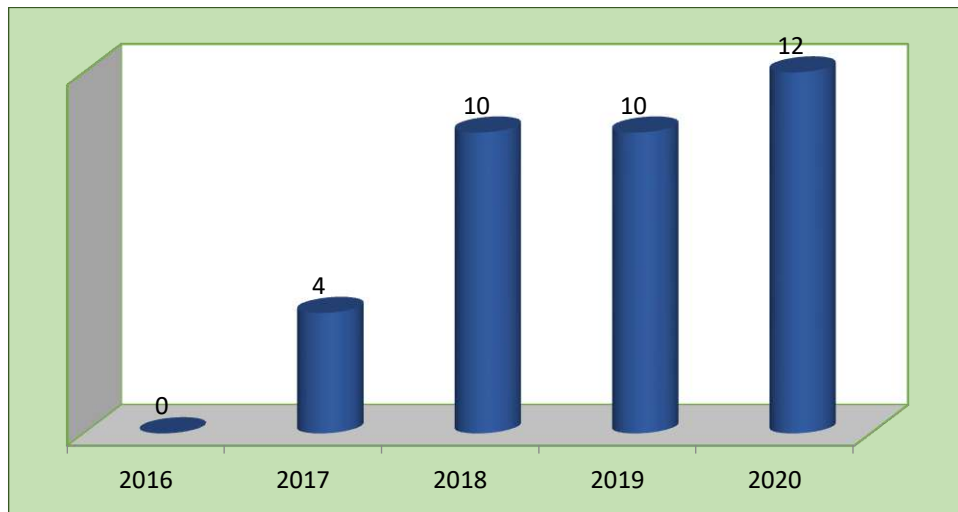


muda. Terbanyak kedua berasal dari Kecamatan Kelapa sebanyak 10 wirausaha muda atau sebesar 18%.

C. Cakupan Pembinaan Olahraga

Pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu dilaksanakan secara terus-menerus dengan membina olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif serta peningkatan kualitas organisasi olahraga baik tingkat pusat maupun daerah. Untuk membina atau melahirkan atlet yang berprestasi diperlukan suatu proses pembinaan jangka panjang yang memerlukan penanganan secara sistematis, terarah, terencana dan konsisten serta dilakukan sejak dini atau usia anak sekolah dasar dan didukung ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005).

Pembinaan olahraga di Kabupaten Bangka Barat merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Kabupaten Bangka Barat yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat. Persentase cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.53.



Gambar 2.53 Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

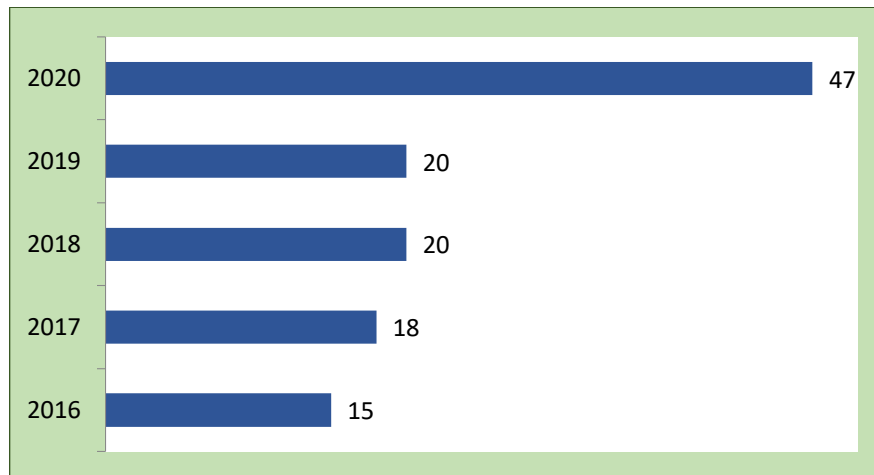
Berdasarkan gambar 2.53 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 belum adanya pembinaan olahraga di Kabupaten Bangka Barat. Tahun 2017 memiliki cakupan pembinaan olahraga sebanyak 4%, meningkat di tahun 2018 mencapai 10% cakupan pembinaan olahraga. Pada tahun 2019 sebanyak 10% cakupan pembinaan olahraga, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Bangka Barat.

D. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Pelatih adalah seseorang yang profesional yang bertugas membantu atlet atau tim dalam mencapai prestasi yang tinggi. Pelatih selain bertugas dalam membantu atlet juga berperan penting dalam membentuk watak atau tingkah laku atletnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kualitas pelatih juga menentukan kualitas lingkungan pelatihan. Para atlet tidak akan berkembang jauh tanpa para pelatih berkualitas yang dapat membuat dan mengarahkan rencana pelatihan yang cerdas.



Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mempunyai SDM pelatih yang bersertifikasi. Ketercapaian cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.54.



Gambar 2.54 Pelatih yang Bersertifikasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2016—2020 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebanyak 15 pelatih yang bersertifikasi, pada tahun 2017 meningkat menjadi 18 pelatih yang tersertifikasi, pada tahun 2018—2019 meningkat menjadi 20 pelatih yang tersertifikasi, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 47 orang pelatih yang tersertifikasi. Persentase cakupan pelatih olahraga berdasarkan level sertifikasi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.80.

Tabel 2.80 Level Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Level	Jumlah	%	Cabang Olahraga
Nasional	18	38	Catur, Sepak bola, Bola voli, dan Karate
Provinsi	17	36	Pencak silat, Sepak takraw, Bola voli, Atletik, Basket, Karate, dan Taekwondo
Kabupaten	12	26	Pencak Silat
Total	47	100	

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021



Sertifikasi pelatih mempunyai beberapa level kategori yaitu kategori Kabupaten Daerah, Nasional maupun Internasional. Jenis kategori level pelatih disesuaikan dengan aturan masing-masing pengurus besar cabang olahraga. Tabel 2.80 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 47 pelatih yang bersertifikasi yaitu level kabupaten/cabang sebanyak 12 pelatih dengan persentase 12% terdiri dari cabang olahraga pencak silat, level provinsi/daerah sebanyak 17 pelatih dengan persentase 36% terdiri dari cabang olahraga pencak silat, sepak takraw, bola voli, bola basket, atletik, karate dan taekwondo dan level Nasional sebanyak 18 pelatih dengan persentase 38% terdiri dari cabang olahraga catur, sepakbola, bola voli dan karate.

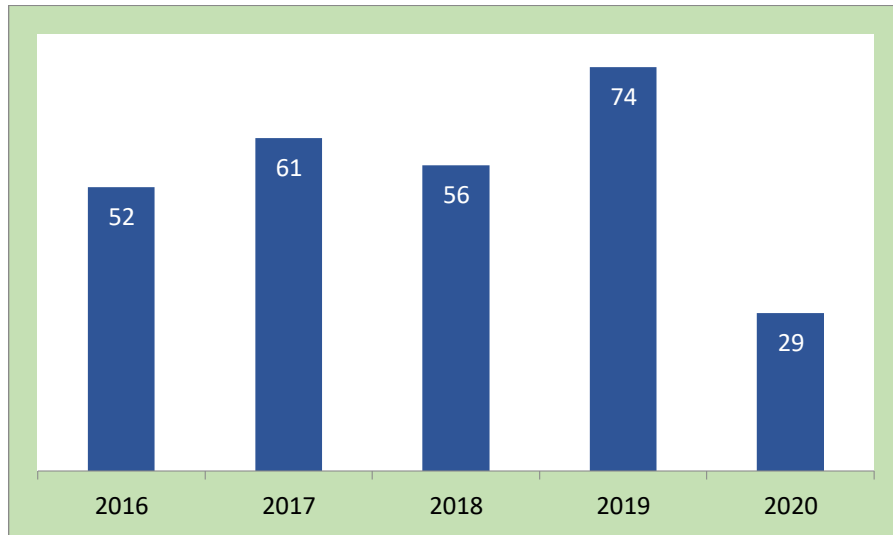
E. Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet adalah orang yang ikut serta dalam pertandingan, mengadu kekuatannya untuk mencapai suatu prestasi dan orang yang melakukan latihan-latihan agar mendapatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan keseimbangan dalam mempersiapkan diri jauh hari sebelum perlombaan dimulai. Atlet harus mengikuti serangkaian pertandingan dalam kompetisi yang terstruktur serta memiliki pembinaan dan program latihan tertentu untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, baik kemampuan fisik, kognitif, maupun kemampuan emosional mereka untuk mencapai prestasi yang diharapkan.

Atlet berprestasi di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya sejak 2016—2020 fluktuatif. Atlet terbanyak di tahun 2019 sejumlah 74 atlet berprestasi, menurun di tahun 2020 hanya memiliki 29 atlet berprestasi. Menurunnya kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak diselenggarakannya pertandingan/perlombaan *multi event*. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi penyebab menurunnya pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka



Barat dan keikutsertaan atlet yang mengikuti kompetisi. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.55.

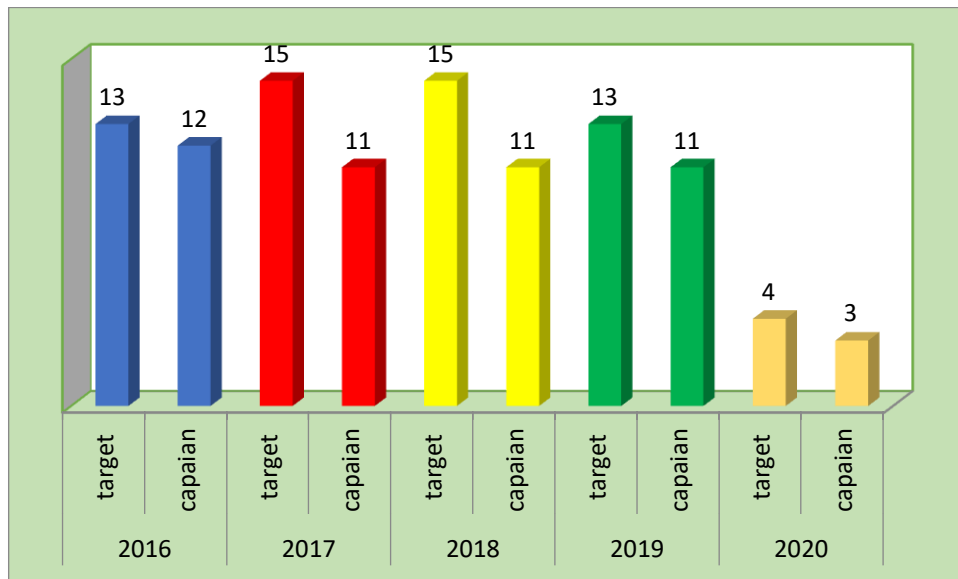


Gambar 2.55 Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

F. Jumlah Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi dalam bidang olahraga selain membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan pembinaan prestasi terutama sejak usia dini. Oleh karena itu, peningkatan prestasi di bidang olahraga menjadi bagian dari pembinaan di banyak daerah termasuk Kabupaten Bangka Barat.



Gambar 2.56 Target dan Capaian Prestasi Olahraga
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat,, 2021

Berdasarkan gambar 2.56 capaian prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 mempunyai 12 prestasi olahraga, pada tahun 2017—2019 mempunyai capaian 11 prestasi olahraga namun pada tahun 2020 jumlah prestasi olahraga menurun yang hanya berjumlah 3 prestasi olahraga. Turunnya jumlah prestasi olahraga di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terpaksa ditunda beberapa kegiatan pembinaan atlet dan *event* yang teragendakan ditunda dan dibatalkan. Perolehan peringkat kejuaraan *multi event* di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.81.

Tabel 2.81 Perolehan Peringkat Kejuaraan *Multi Event* Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016—2020

Kabupaten/Kota	Peringkat					
	POPDA 2016	KEJURDA 2017	POPDA 2018	PORPROV 2018	KEJURDA 2019	POPDA 2020
Bangka	4	5	3	1	4	2
Pangkalpinang	3	3	1	2	1	1
Bangka Tengah	2	4	6	3	5	5
Belitung	5	1	4	4	3	6
Belitung Timur	6	2	5	5	2	-

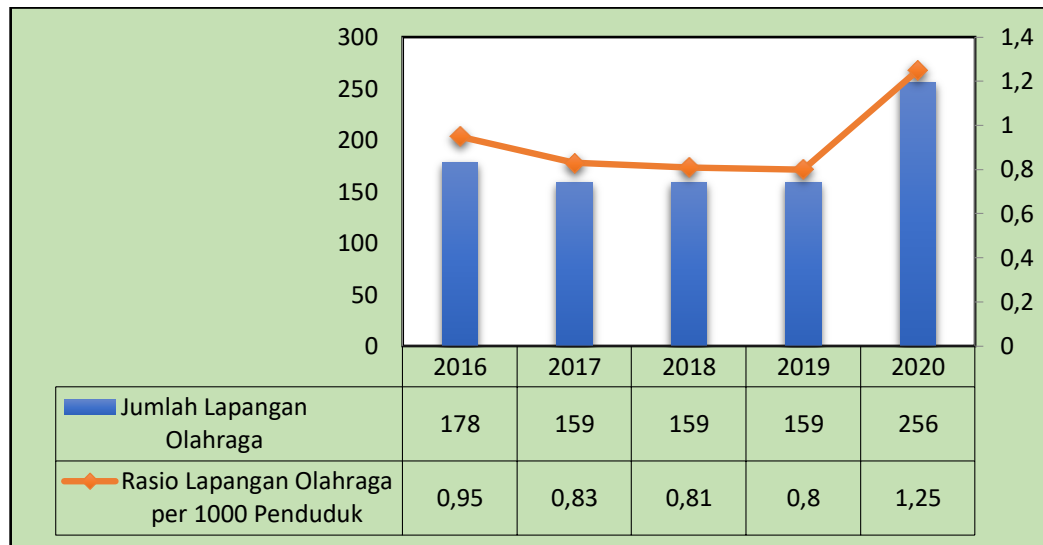


Kabupaten/Kota	Peringkat					
	POPDA 2016	KEJURDA 2017	POPDA 2018	PORPROV 2018	KEJURDA 2019	POPDA 2020
Bangka Selatan	1	7	2	6	7	4
Bangka Barat	7	6	7	7	6	3

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Jika dilihat dari prestasi olahraga melalui Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuaraan Daerah, maka dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun terakhir dari ke-3 kejuaraan tersebut, Kabupaten Bangka Barat selalu masuk dalam peringkat ke-6 atau ke-7 besar. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga pelajar maupun olahraga prestasi di Kabupaten Bangka Barat belum dapat bersaing dengan 6 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan prestasi pada kejuaraan POPDA dengan menduduki peringkat 3 dari 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memberikan hibah untuk kemajuan dunia olahraga melalui Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Barat. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menunjang bidang olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana. Jumlah lapangan olahraga dan rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk dapat dilihat pada tabel 2.57.



Gambar 2.57 Grafik Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.57 jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2020 sebanyak 256 lapangan olahraga. Grafik Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk selaras dengan jumlah lapangan olahraga, ditahun 2016 dengan rasio 0,95 mengalami penurunan di tahun 2017 rasio sebesar 0,83. Pada tahun 2018 mengalami penurunan rasio menjadi 0.81 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan rasio menjadi 0,80. Pada tahun 2020 jumlah rasio lapangan olahraga meningkat menjadi 1,25. Sebaran jumlah lapangan olahraga dan rasio jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk di Kecamatan Kabupaten Bangka Barat terlihat pada tabel 2.82.



Tabel 2.82 Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio lapangan Olahraga per 1000 Penduduk per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	Jumlah Lapangan Olahraga					Rasio Jumlah Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Jebus	27	24	24	24	30	1,31	1,14	1,11	1,1	1,33
Kelapa	29	25	25	25	21	0,89	0,75	0,74	0,73	0,6
Muntok	47	43	43	43	55	0,97	0,85	0,84	0,83	1,04
Parittiga	36	33	33	33	57	1,14	1,01	0,98	0,96	1,62
Simpangteri tip	21	20	20	20	50	0,75	0,7	0,68	0,68	1,63
Tempilang	18	14	14	14	43	0,7	0,52	0,51	5,09	1,52

sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.82 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah lapangan olahraga. Jumlah tertinggi di Kecamatan Paritritiga dengan jumlah 57 lapangan olahraga dan yang kedua tertinggi di Kecamatan Muntok. Jumlah lapangan olahraga terendah berada di Kecamatan Kelapa yang mengalami penurunan jumlah dari tahun 2019 sebanyak 25 lapangan menjadi 21 lapangan di tahun 2020. Namun, jika dilihat rasio jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk tertinggi yaitu berada di Kecamatan Simpangteritip dengan rasio 1,63 dan yang kedua tertinggi berada di Kecamatan Parittiga yaitu 1,62 dan rasio terendah berada di Kecamatan Kelapa dengan rasio 0,6.

Fasilitasi keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan lapangan olahraga dan gelanggang olahraga. Pada tahun 2020 tercatat, sebanyak 256 lapangan olahraga telah terbangun dan tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas keolahragaan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat. Jenis lapangan olahraga tersebut yaitu lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, kolam renang, Atletik, lapangan futsal, lapangan tenis, gedung olahraga,



lapangan menembak, panahan, sasana tinju, dan tempat biliar. Adapun jumlah fasilitas tersebut per kecamatan dapat dilihat tabel 2.83.

Tabel 2.83 Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Jenis Lapangan	Jebus	Kelapa	Muntok	Parittiga	Simpang Teritip	Tempilang
Lapangan Bola voli	13	11	15	23	19	23
Lapangan Bola Basket	1	1	7	10	1	1
lapangan Tenis			4			
Futsal	2	1	6	4	6	6
Atletik			1		1	
Bulutangkis	14	7	10	18	23	13
GOR			2			
Kolam renang		1	2	1		
Lapangan Tembak			3			
Panahan			1			
Sasana Tinju/beladiri			3			
Biliar			1	1		
Jumlah per Kecamatan	30	21	55	57	50	43

sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.83 menunjukkan tidak meratanya ketersediaan fasilitas olahraga di setiap kecamatan. Jenis fasilitas lapangan olahraga terlengkap berada di Kecamatan Muntok yaitu mempunyai 12 jenis lapangan olahraga dan di Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Jebus hanya mempunyai 4 jenis lapangan olahraga.

2.3.1.20. Statistik

Data statistik menjadi bagian penting karena merupakan data yang digunakan sebagai acuan bahan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Data ini digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan dan perencanaan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam upaya melakukan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Ketersediaan dokumen statistik tentunya dapat memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan potensi yang ada Kabupaten Bangka Barat secara umum dan sebagai bahan untuk evaluasi atas kinerja pembangunan daerah sebelumnya dan dapat dijadikan kebijakan untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Ketersediaan dokumen statistik berdasarkan indikator statistik Kabupaten Bangka Barat ditampilkan dalam tabel 2.84.

Tabel 2.84 Indikator Statistik Kabupaten Bangka Barat 2016—2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Bangka Barat dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kabupaten Bangka Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada

sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pada tabel 2.84 dapat dilihat bahwa dokumen statistik yang penting berupa Buku Kabupaten Bangka Barat dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Bangka Barat, keduanya tersedia setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi baru ada sejak tahun 2018. Sistem data dan statistik yang terintegrasi milik Kabupaten Bangka Barat bernama "Data *Kite*", baru ada dan dapat difungsikan sejak tahun 2018. Pada tahun 2020, aplikasi tersebut tidak dapat difungsikan namun pendataan statistik tetap dilakukan secara manual oleh operator di setiap kecamatan.

2.3.1.21. Persandian

Persandian merupakan suatu kegiatan pengamanan terhadap data atau informasi yang menggunakan ilmu kriptologi dan ilmu lain yang berhubungan dengan sistem keamanan. Tujuan persandian dalam kegiatan di pemerintah daerah menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan informasi berklasifikasi rahasia dalam konteks persandian. Adapun alur yang dilalui mulai pembuatan informasi,



pemberian label, pengiriman, dan penyimpanan. Untuk naskah dinas berklasifikasi rahasia, kerahasiaannya dilakukan dengan enkripsi.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, berkaitan erat dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, sedangkan layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.

Perangkat daerah di Kabupaten Bangka Barat yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Sistem persandian yang digunakan tersebut digunakan dengan tujuan agar dapat menjamin kerahasiaan dalam komunikasi perangkat daerah. Oleh sebab itu, sistem persandian hanya menggunakan JKS Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Pada tahun 2017—2020, persentase keamanan data tingkat keamanan informasi atau data di Kabupaten Bangka Barat terealisasi 90%. Keamanan data maupun Informasi tersebut belum mencapai 100% karena tidak adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Sandiman di Kabupaten Bangka Barat (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021).

Indikator keberhasilan dari masing—masing perangkat daerah dapat dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai dengan amanat undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian. Layanan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi. Indikator yang dapat digunakan dalam layanan ini dilihat berdasarkan jumlah aset atau fasilitas



yang harus diamankan dan dari jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi setiap bulannya, sedangkan kewenangan berkaitan dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dengan bentuk layanannya, yakni melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya bisa dilihat dari jumlah organisasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan. Lebih lanjut, kegiatan persandian yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus tetap mengikuti perkembangan daerah dan arus perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi.

2.3.1.22. Kebudayaan

Kebudayaan saat ini menjadi isu strategis dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya memunculkan bagaimana kebudayaan itu ada dan berkembang dalam masyarakat, namun sebagai modal pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, menegaskan bahwa kebudayaan memegang peran penting dalam semua lini pembangunan dan mengamanahkan agar kebudayaan diperlakukan sebaik-baiknya melalui tindakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Budaya sebagai salah satu potensi penyangga utama wisata di Kabupaten Bangka Barat berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda berbasis wisata *heritage* dan obyek wisata cagar budaya. Indikator kinerja utama urusan kebudayaan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 untuk mencapai sasaran adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.



A. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Belitung tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan keistimewaan bidang kebudayaan salah satunya penyelenggaraan festival seni dan budaya. Tahun 2017 terdapat empat kegiatan yang dilaksanakan, seperti Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN); Festival Tari Sejiran Setason; Festival Campak, Rudad, dan Rebana; dan Pagelaran Seni Lintas Budaya. Pada tahun 2018 penyelenggaraan festival seni dan budaya bertambah satu kegiatan yaitu Festival *Street Art Platform* (Pertunjukan Jalanan) Internasional di Yogyakarta sehingga terdapat lima kegiatan yang dilaksanakan. Tahun 2019, Kabupaten Bangka Barat hanya menyelenggarakan tiga kegiatan: Seleksi Gita Bahana Nusantara; Festival Tari Sejiran Setason; Festival Campak, Rudad, dan Rebana dengan alasan terdapat pengurangan dana APBD sehingga penyelenggaraan festival seni dan budaya tidak dapat diakomodasi seluruhnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, penyelenggaraan festival seni dan budaya terselenggara empat kegiatan: Seleksi Gita Bahana Nusantara; Festival Tari Sejiran Setason; Festival Campak, Rudad, dan Rebana, dan Pagelaran Seni Lintas Budaya.

Tabel 2.85 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No.	Tahun	Nama Festival Seni dan Budaya	jumlah
1.	2017	a. Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) b. Festival Tari Sejiran Setason c. Festival Campak, Rudad, dan Rebana d. Pagelaran Seni Lintas Budaya	4
2.	2018	a. Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) b. Festival Tari Sejiran Setason c. Festival Campak, Rudad, dan Rebana d. Pagelaran Seni Lintas Budaya e. Festival Street Art Platform (Pertunjukan Jalanan) Internasional di Yogyakarta	5
3.	2019	a. Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) b. Festival Tari Sejiran Setason	3

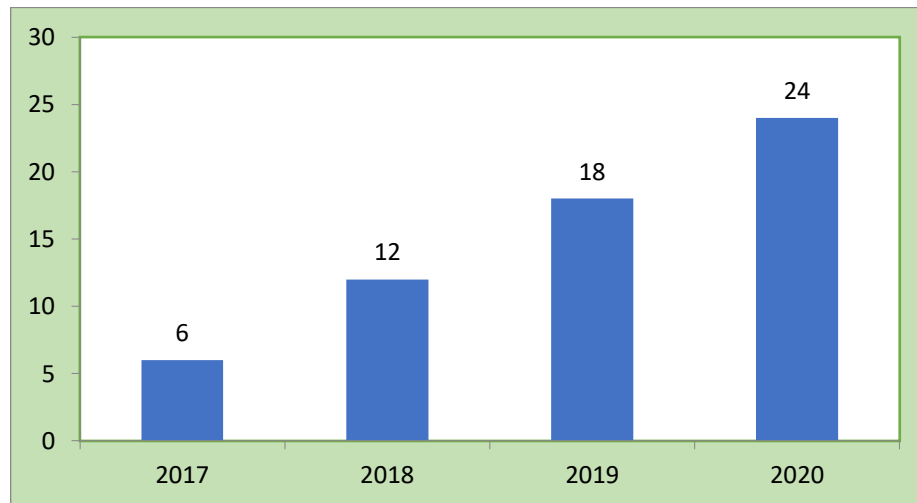


No.	Tahun	Nama Festival Seni dan Budaya	jumlah
		c. Festival Campak, Rudad, dan Rebana	
4.	2020	a. Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) b. Festival Tari Sejiran Setason c. Festival Campak, Rudad, dan Rebana d. Pagelaran Seni Lintas Budaya	4

B. Cagar Budaya yang Dilestarikan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mendefinisikan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Kabupaten Bangka Barat memiliki 60 benda, situs, kawasan cagar budaya, seni, dan kebudayaan daerah yang dilestarikan sejak tahun 2017 hingga 2020 dengan rincian: 6 cagar budaya pada tahun 2017, 12 cagar budaya pada tahun 2018, 18 cagar budaya pada tahun 2019, dan 24 cagar budaya pada tahun 2020. Artinya, setiap tahun Kabupaten Bangka Barat mengusulkan benda, situs, kawasan, struktur, dan lain-lain untuk ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga terlihat pada gambar 2.58 cagar budaya di Kabupaten Bangka Barat terus bertambah dari tahun 2017—2020.

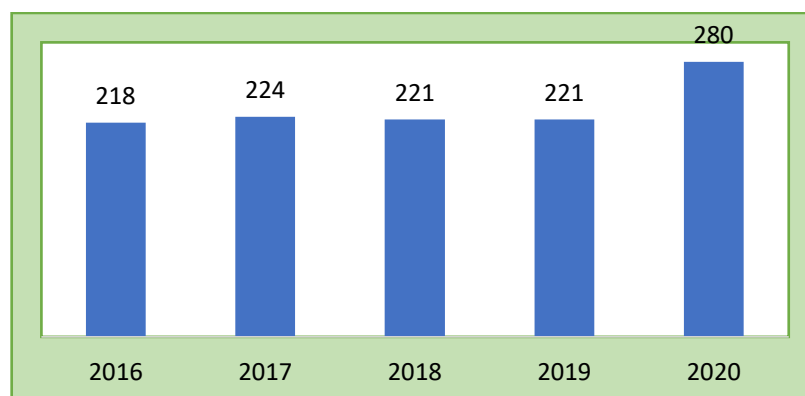


Gambar 2.58 Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Bangka Barat yang Dilestarikan Tahun 2017—2020

sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.3.1.23. Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berkaitan dengan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan (Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2020). Perpustakaan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.60.



Gambar 2.59 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, 2021



Kabupaten Bangka Barat memiliki 280 perpustakaan hingga tahun 2020 yang terdiri dari 1 perpustakaan di SLB, 46 perpustakaan di TK, 134 perpustakaan di SD, 35 perpustakaan di SMP, 15 perpustakaan di SMA, dan 49 perpustakaan desa. Selain perpustakaan, Kabupaten Bangka Barat memiliki taman bacaan masyarakat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yaitu sebanyak 12 taman bacaan.

Tabel 2.86 Aspek dan Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,33	0,56	0,14	0,26	0,05
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,44	0,42	0,41	0,41	0,41
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,17	1,16	1,12	1,11	1,12
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	69.347	93.862	20.053	43.714	9.322
5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	8.170	8.714	8.991	9.246	9.690
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2016—2020 mengalami fluktuatif. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun didapatkan dari membagi banyaknya kunjungan ke perpustakaan pertahun, dibagi banyaknya jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Pada Tahun 2016, jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,33. Pada tahun 2017, jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,56. Pada Tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,14. Artinya, jumlah pengunjung di tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. sementara itu, pada Tahun 2019,



jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,26, sedangkan pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,05. Artinya, selama tiga tahun terakhir jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bangka Barat menurun.

Selain itu, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menjadi indikator bidang perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat selama dua tahun (2016 dan 2017) menurun. Tahun 2016 sebesar 0,44 dan tahun 2017 sebesar 0,42. Sementara, sejak tahun 2018 hingga 2020, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah stabil yaitu sebesar 0,41.

Rasio perpustakaan persatuan penduduk pada periode tahun 2016—2020 mengalami fluktuasi. Rasio perpustakaan persatuan penduduk didapatkan dari hasil bagi banyaknya perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah penduduk yang dikalikan dengan 1000. Pada Tahun 2016, rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 1,17. Menurun selama tiga tahun (2017—2019) meskipun tidak signifikan, masing-masing sebesar 1,16, 1,12, dan 1,11. Sementara pada tahun 2020 rasio perpustakaan persatuan penduduk meningkat sebesar 1,12 dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah perpustakaan dan jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat.

Begitu pula halnya terjadi pada jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2020 mengalami fluktuasi. Rata-rata pengunjung tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 93.862 pengunjung, sedangkan rata-rata terkecil terjadi pada tahun 2020 sebanyak 9.322 pengunjung. Indikator pencapaian terakhir adalah pada aspek jumlah koleksi judul buku perpustakaan. Koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016—2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut salah



satunya didapatkan dari program penambahan judul buku dan buku-buku yang dihasilkan oleh putra-puteri daerah Kabupaten Bangka Barat.

2.3.1.24. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Pencapaian indikator kinerja bidang kearsipan pada tahun 2016—2020 diuraikan sebagai berikut.

A. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Persentase perangkat daerah di Kabupaten Bangka Barat yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2017, 2018, dan 2019 mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua OPD (30 OPD) telah mengelola arsip secara baku. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan secara signifikan. Kondisi tersebut terjadi karena pada tahun 2020 penerapan arsip baku sudah diserahkan kepada OPD masing-masing dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat melakukan pengawasan yang dilakukan secara bertahap terhadap pengelolaan kearsipan masing-masing OPD tersebut (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, 2021). Meskipun demikian, masih ada OPD yang pengelolaan kearsipan secara baku tetap dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada tahun 2018, terjadi penyusutan arsip sehingga pada tahun 2019 dan 2020 ada penghapusan arsip-arsip.

B. SDM pengelola kearsipan

Jumlah SDM pengelola kearsipan di Kabupaten Bangka Barat pada rentang tahun 2016—2020 mengalami penurunan di tahun 2017—2018, yaitu semula yang memiliki 4 SDM menjadi 1 SDM. Penurunan jumlah



SDM pengelola kearsipan tersebut disebabkan adanya mutasi pegawai sehingga dari tahun 2018—2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat memiliki SDM di bidang pengelolaan kearsipan yang sangat minim.

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

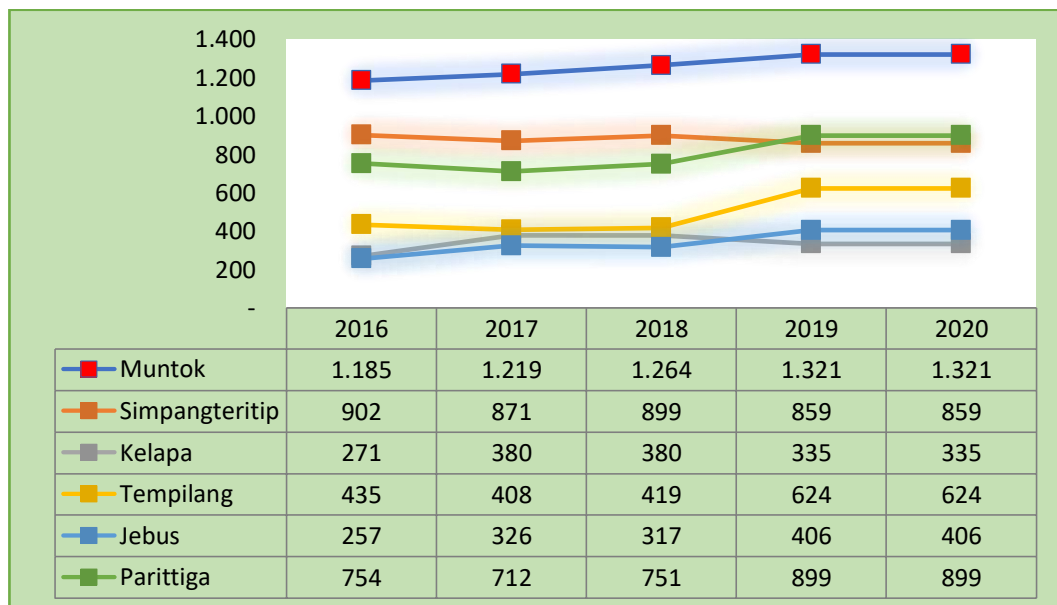
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya, dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya dan merupakan salah satu sektor yang mendukung dalam perekonomian daerah adalah sektor kelautan dan perikanan. Sektor ini, khususnya perikanan laut merupakan subsektor yang sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini tentu saja karena Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumber daya laut relatif besar untuk dikembangkan.

Komoditi perikanan, khususnya di bagian potensi tangkapan laut yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan laut, potensi



yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir. Salah satunya adalah budidaya udang.



Gambar 2.60 Jumlah Nelayan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana gambar 2.60 tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat masih tetap sama dengan tahun 2019, sehingga cukup menjelaskan bahwa subkategori perikanan cukup diminati oleh masyarakat sebagai ladang usaha. Jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, yaitu dari 3.804 orang di tahun 2016 menjadi 4.444 orang di tahun 2020 yang tersebar di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka Barat.

Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan paling banyak, diikuti oleh Kecamatan Simpangteritip dan Kecamatan Parittiga. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah nelayan paling sedikit adalah Kecamatan Kelapa sebanyak 1.701 orang. Keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di subkategori perikanan ini



tentunya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

A. Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya, ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah dan tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olahraga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Nilai produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.87.

Tabel 2.87 Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perikanan Tangkap	239.730	449.027	547.851	591.662	632.902
2.	Budidaya Air Tawar	597	635	1.697	2.290	2.747.87
3.	Budidaya Air Laut	6.548	1.990	2.314	8.599	30,534

sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.87 tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh perikanan tangkap. Hal ini terlihat dari nilai produksi perikanan tangkap yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai produksi budidaya air tawar dan nilai produksi budidaya air laut. Rendahnya produksi perikanan budidaya, baik budidaya air tawar maupun air laut di Kabupaten Bangka Barat disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan budidaya baik air tawar maupun laut. Kondisi ini berdampak pada



rendahnya usaha budidaya perikanan. Selain itu, terlihat juga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan nilai produksi dari Rp239.730 juta pada tahun 2016 menjadi Rp632.902 juta di tahun 2020. Kenaikan nilai produksi perikanan selain pada perikanan tangkap juga terjadi pada budidaya air tawar dan budidaya air laut.

2.3.1.2. Pariwisata

Aspek pariwisata memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dalam kebijakan pembangunan daerah, aspek pariwisata dapat dijadikan sebagai salah satu kebijakan prioritas. Menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu kebijakan prioritas sangat beralasan. Hal ini karena pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan dalam peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

Sebagai bagian dari provinsi kepulauan, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Berbagai jenis potensi wisata tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Potensi wisata yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.88.

Tabel 2.88 Potensi Wisata Setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak



Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
	Merah Pantai Menggris		Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpangteritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang Iyu eluk Limau

sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2021

Selain itu, terdapat wisata religi, wisata sejarah, hingga wisata pulau. Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Miao di Kecamatan Muntok merupakan bagian dari wisata religi. Sementara wisata sejarah terdapat Pesanggarahan Menumbing, Pesanggarahan Muntok atau Wisma Ranggam, Rumah Mayor, dan Museum Timah Indonesia yang berada di Kecamatan Muntok. Sedangkan Pulau Nanas yang terletak di Kecamatan Parittiga menjadi tempat strategis yang bisa dikembangkan menjadi wisata pulau. Terdapat 28 objek wisata sejarah dan *geopark* yang akan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai *geoheritage* yakni *geosite* Pantai Pasir Kuning, Bukit Penyabung, Air Terjun Bukit Tani, Wisata Alam Air Bait. Selain itu, objek wisata sejarah yang diusulkan: Bukit Menumbing, Tanjung Kalian, Bukit Nibung, Batu Belimbing, Pantai Jerangkat, dan Bukit Mentulut.



Berdasarkan laporan akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 oleh Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dipublikasi di laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jasa perjalanan wisata menunjukkan secara konsisten berkontribusi positif terhadap neraca jasa dengan nilai yang semakin meningkat. Pada tahun 2017 tercatat USD4,23 miliar, lebih tinggi dibandingkan USD3,64 pada tahun 2016. Hal ini karena nilai Ekspor yang lebih besar dari pada impor jasa perjalanan. p sebesar USD12,52 miliar dan import USD8,29 miliar artinya penerimaan jasa perjalanan dari wisatawan manca negara ke Indonesia lebih besar dari perjalanan wisatawan nasional Indonesia ke luar negeri. Dilihat dari tren neraca jasa, surplus jasa pariwisata terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, berdasarkan perolehan devisa Negara dari sektor pariwisata pada tahun 2013 sebesar 10,3%. Di tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 11,57%. Di tahun nya yakni tahun 2015 juga mengalami peningkatan menjadi 12,05% dan di tahun 2016 menjadi 12,6%. Besarnya sumbangan yang dapat dihasilkan dari kategori lapangan usaha pariwisata dalam pembangunan perekonomian tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kepala daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Optimalisasi potensi ini tentunya harus didukung dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana penunjang.

Tabel 2.89 Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

No.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Objek Wisata Budaya	n/a	34	35	41
2.	Objek Wisata Bahari	5	16	16	19
3.	Objek Wisata Cagar Alam	n/a	0	0	0
4.	Objek Wisata Pertanian	n/a	0	3	7
5.	Objek Wisata Buru	n/a	0	0	0



6.	Objek Wisata Alam	5	6	8	13
7.	Objek Wisata Sejarah	10	10	10	12
8.	Objek Wisata Religi	1	1	2	3
9.	Objek Wisata Pendidikan	n/a	0	0	0
10.	Objek Wisata Kuliner	n/a	0	0	0
11.	Objek Wisata Belanja	n/a	0	0	0
12.	Objek Wisata Buatan	n/a	0	2	5

sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2021

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan semakin membawa dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif. Data kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020.

Tabel 2.90 Jumlah Kunjungan Wisatawan
Ke Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan Wisatawan	Orang	48.644	109.174	216.256	136.252	67.648

sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2021

Melihat tabel tersebut, terlihat bahwa periode 2016—2018 terus terjadi peningkatan angka kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat. Puncak kenaikan tertingginya terjadi pada tahun 2018 sebesar 216.256 orang wisatawan. Namun angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 136.252 orang wisatawan. Tahun 2020 yang menjadi awal terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat terasa berimbas pada sektor pariwisata, khususnya juga yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menjadi 67.648 orang wisatawan.

Lamanya kunjungan para wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat pada periode 2016—2020 tersebut sama, yakni selama empat hari. Dari hasil



kunjungan wisatawan tersebut berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pariwisata. Data PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.91.

Tabel 2.91 Jumlah PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	PAD Sektor Pariwisata	%	2,63	2,77	3,89	3,53	5,12

sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2021

Persentase jumlah PAD sektor pariwisata tersebut diperoleh dari jumlah PAD sektor pariwisata dibanding dengan total PAD dikalikan 100%. Dari data tersebut terlihat peningkatan hasil PAD pada sektor pariwisata. Penurunan terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 3,53%. Namun pada tahun 2020 angka PAD sektor pariwisata tersebut meningkat menjadi 5,12%. Kondisi kenaikan ini memperlihatkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat secara perlahan mulai bangkit di tengah dampak yang timbul dari penyebaran pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*geopark*), yang dimaksud *geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), Keragaman Geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan Keragaman budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Warisan geologi di kawasan Kabupaten Bangka Barat terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan



karakteristiknya. Objek warisan geologi di kawasan ini memiliki keunikan tersendiri dilihat dari aspek geologi. Dari objek warisan geologi yang ada di kawasan ini seluruhnya berkaitan dengan proses geologi di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan hasil penilaian keragaman geologi metode Pusat Survei Geologi (2017), *geosite* yang ada di *Geopark* Bangka Barat memiliki tema keragaman geologi yang menarik. Keragaman tersebut berkaitan dengan pembentukan Endapan Timah baik batuan asal dari endapan timah berupa Granit. Proses geomorfik berupa peneplesi dan proses pengendapan seperti chanel-chanel sungai purba. Warisan geologi di kawasan Kabupaten Bangka Barat tidak lepas dari keragaman geologi yang ada. Warisan geologi yang diunggulkan dan berkelas dunia dilihat dari keunikan secara geologi dan geologi sejarahnya yaitu batuan yang berkaitan dengan *Tin Belt*.

Warisan geologi yang ada di Kabupaten Bangka Barat umumnya memiliki karakteristik berupa jenis batuan, pantai, air terjun juga morfologi khusus. Warisan geologi ini umumnya memiliki daerah yang cukup luas namun ada pula situs yang berupa titik objek. Untuk warisan geologi dengan kawasan yang luas maka dibutuhkan sistem konservasi yang menyeluruh dengan melibatkan peneliti, pemerintah dan masyarakat sekitar. Sistem konservasi ini meliputi perencanaan dan studi berkelanjutan, pelaksanaan konservasi dan sistem monitoring.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 1888.45/490/4.3.1.1/2019 tentang Kawasan *Geopark* Bangka Barat di Kabupaten Bangka Barat menetapkan kawasan *geopark* Bangka Barat terdiri atas 6 kecamatan, 6 kelurahan dan 60 desa yang dapat dilihat pada tabel 2.92.



Tabel 2.92 Kawasan *Geopark* Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2019

No	Kecamatan	Kelurahan/desa
1	Muntok	Sungai Daeng
2	Muntok	Sungai Baru
3	Muntok	Tanjung
4	Muntok	Menjelang
5	Muntok	Keranggan
6	Muntok	Air Belo
7	Muntok	Air Limau
8	Muntok	Air Putih
9	Muntok	Belo Laut
10	Simpang Teritip	Pelangas
11	Simpang Teritip	Kundi
12	Simpang Teritip	Mayang
13	Simpang Teritip	Peradong
14	Simpang Teritip	Air Nyatoh
15	Simpang Teritip	Berang
16	Simpang Teritip	Rambat
17	Simpang Teritip	Simpang Gong
18	Simpang Teritip	Simpang Tiga
19	Simpang Teritip	Ibul
20	Simpang Teritip	Pangek
21	Simpang Teritip	Bukit Terak
22	Simpang Teritip	Air Menduyung
23	Jebus	Jebus
24	Jebus	Sungai Buluh
25	Jebus	Tumbak Petar
26	Jebus	Limbung
27	Jebus	Rukam
28	Jebus	Ranggi Asam
29	Jebus	Ketap
30	Jebus	Mislak
31	Jebus	Pebuar
32	Jebus	Sinar Manik
33	Jebus	Airkuang
34	Parit Tiga	Sekar Biru
35	Parit Tiga	Telak
36	Parit Tiga	Cupat
37	Parit Tiga	Bakit
38	Parit Tiga	Puput



No	Kecamatan	Kelurahan/desa
39	Parit Tiga	Air Gantang
40	Parit Tiga	Kelabat
41	Parit Tiga	Kapit
42	Parit Tiga	Semulut
43	Parit Tiga	Teluk Limau
44	Kelapa	Mancung
45	Kelapa	Kayuarang
46	Kelapa	Pusuk
47	Kelapa	Dendang
48	Kelapa	Kacung
49	Kelapa	Sinar Sari
50	Kelapa	Beruas
51	Kelapa	Tebing
52	Kelapa	Terentang
53	Kelapa	Tuik
54	Kelapa	Tugang
55	Kelapa	Air Bulin
56	Kelapa	Pangkal Beras
57	Kelapa	Kelapa
58	Tempilang	Tempilang
59	Tempilang	Tangjung Niur
60	Tempilang	Sangku
61	Tempilang	Buyan Kelumbi
62	Tempilang	Penyampak
63	Tempilang	Benteng Kota
64	Tempilang	Air Lintang
65	Tempilang	Sinar Surya
66	Tempilang	Simpang Yul

Fakultas Geologi Universitas Padjajaran (2020)⁶ telah melakukan penelitian tentang Warisan Geologi di Kabupaten Bangka Barat. Adapun Keragaman geologi yang berpotensi menjadi *geosite* berkelas dunia, yaitu: Granit Pantai Pasir Kuning, Granit Bukit Penyabung, Granit Air Terjun Bukit Tani, Granit Wisata Alam Air Biat, Granit Bukit Menumbing, Pantai Tanjung Kalian, Granit Bukit Nibung, Granit Batu Belimbing, Pantai Jerangkat, Bukit Mentulut.

6

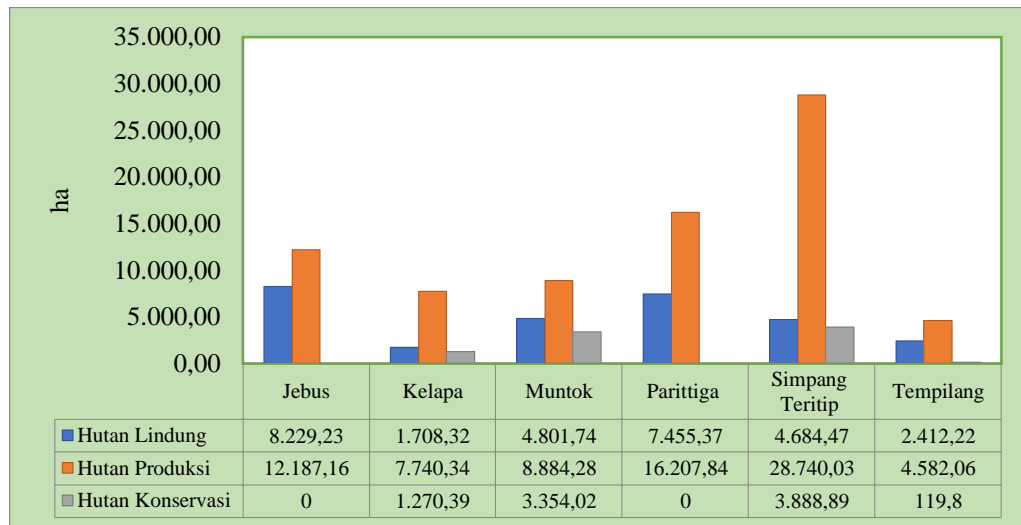


Tabel 2.93 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Urusan Pariwisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	CAPAIAN				STATUS CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Meningkat menjadi 8%	1,17	1,2	1,26	1,40	tidak tercapai
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	268	509	184	183	tidak tercapai
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	108,906	223,597	142,28	67,465	tidak tercapai

2.3.2.3. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan kawasan hutan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sama halnya pula bahwa pengelolaan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bangka Barat bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di bagian urusan kehutanan saat ini hanya difokuskan pada pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing seluas 3.333,20 ha. Namun demikian, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi kehutanan yang dapat memberikan peran relatif besar dalam pembangunan, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Kondisi kehutanan per kecamatan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar 2.61.



Gambar 2.61 Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2020

Luas keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat sekitar 116.245,33 ha. Kawasan ini terdiri dari hutan lindung seluas 29.291,35 ha, hutan produksi seluas 78.341,71 ha, dan hutan konservasi seluas 8.612,28 ha. Dari ketiga fungsi hutan yang ada di Kabupaten Bangka Barat tersebut, terdapat potensi kehutanan yang cukup besar dengan luasan hutan produksi seluas 78.341,71 ha.

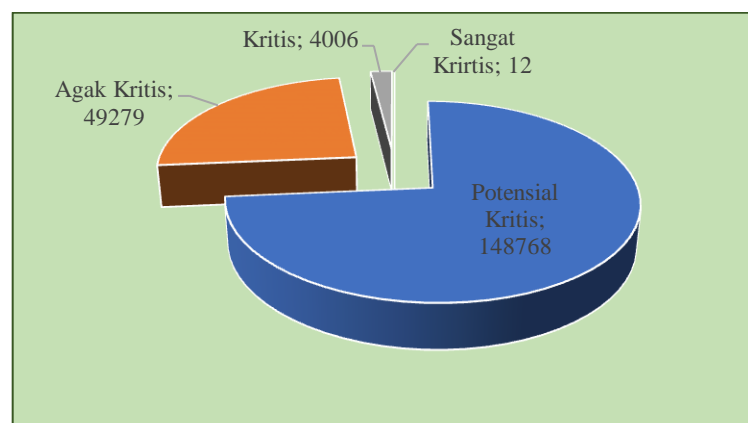
Selain itu, guna mendukung fungsi ekologi dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjaga lingkungan hidup, wilayah Kabupaten Bangka Barat juga didukung dengan keberadaan Hutan Konservasi yang di dalamnya terdiri dari Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Jering Menduyung, seluas 3.747,4 ha⁷, Kawasan Hutan Tahura Menumbing seluas 3.333,20 ha⁸, dan Taman Nasional Bukit Maras

⁷Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK.103/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tentang Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam Jering Menduyung Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung

⁸Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor: SK.577/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing Seluas 3.333,2 ha.

seluas 1.270,39 ha⁹. Namun, tingginya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat tersebut juga dibarengi tingginya laju deforestasi. Berdasarkan data dari BPKH tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki laju deforestasi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deforestasi di kawasan hutan lindung mencapai luasan 164,90 ha dan di Hutan Produksi mencapai luasan 659,90 ha.

Disisi lain, berdasarkan data dari BPDAS HL Baturusa Cerucuk, kondisi lahan kritis secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 mencapai luasan 202.065 ha. Lahan pada kategori kritis seluas 4.006 ha dan pada kategori sangat kritis seluas 12 ha. Adapun lahan yang potensial kritis seluas 148.768 ha dan agak kritis seluas 49.279 ha. Kondisi ini terjadi karena tidak sesuainya penggunaan lahan dengan kemampuan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan fisik, kimia maupun biologi. Meskipun demikian, faktor yang dominan penyebab lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berasal dari aktivitas pertambangan.



Gambar 2.62 Kondisi Lahan Kritis
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018
sumber: BPDAS HL Baturusa Cerucuk, 2021

⁹Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.576/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2016.



Adapun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya di Kabupaten Bangka Barat, maka dibentuklah sistem perhutanan sosial. Sistem perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 9 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri dari 282 KK dengan 40 izin perhutanan sosial dan luas areal 930 ha.

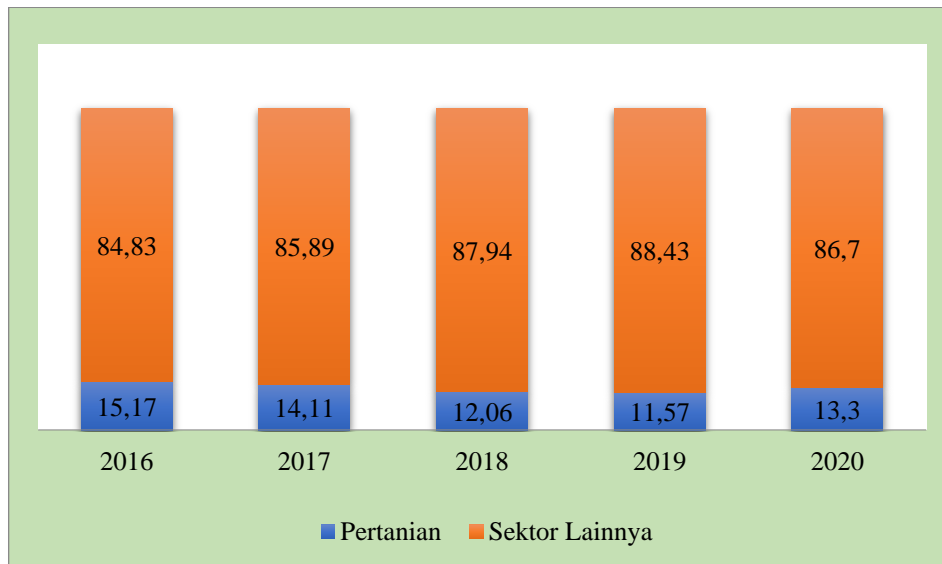
2.3.2.4. Pertanian

Tujuan pembangunan pertanian sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020—2024 adalah meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, dan terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian, dan sarana produksi. Lahan pertanian di Kabupaten Bangka Barat sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan indikator capaian kinerja dalam urusan pertanian meliputi:

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Selama lima tahun terakhir berdasarkan perkembangan nilai sektor dalam PDRB ADHB menurut lapangan usaha (juta rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020, kategori lapangan usaha pertanian telah menjadi penyumbang terbesar ketiga setelah kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Dengan demikian, proyeksi ke depan kategori lapangan usaha pertanian jika dikelola dengan tepat dan

optimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap PDRB di Kabupaten dapat dilihat pada gambar 2.63.



Gambar 2.63 Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Sebagaimana gambar 2.63, kontribusi PDRB untuk kategori lapangan usaha pertanian di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan dari tahun 2016—2019, yaitu dari 15,17% di tahun 2016 menjadi 11,57% di tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali sebesar 13,3%. Namun demikian, jika dilihat dari sisi produksi dan produktivitas, perkembangan statistik tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat, khususnya padi selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten bagi petani dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi menjadi penting karena dapat meningkatkan produktivitas padi. Selain itu, kenaikan produktivitas padi juga dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya padi, misalnya pengetahuan tentang teknologi pertanian. Selain itu, produktivitas



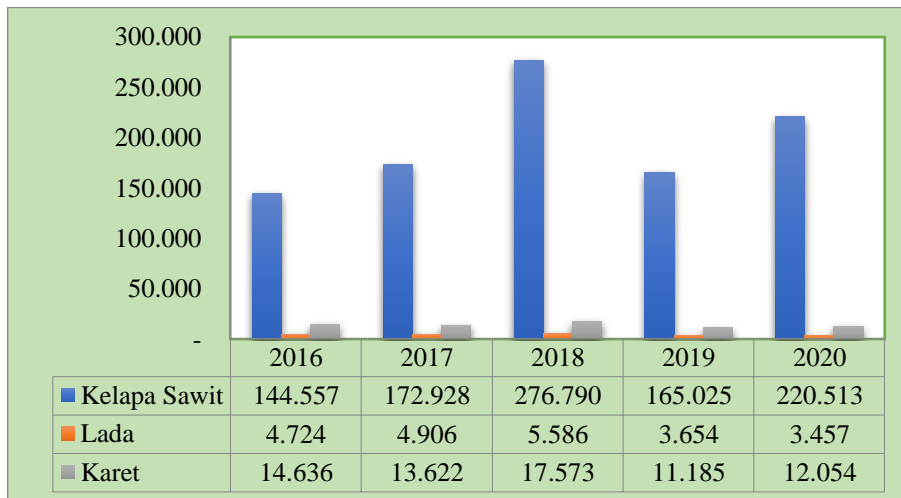
beberapa tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif walaupun tidak terlalu besar dan maksimal.

Jika dilihat dari infrastruktur pertanian, khususnya pada irigasi masih belum dapat difungsikan secara maksimal. Irigasi teknis sebagai saluran sekunder baik permanen maupun non permanen secara fungsional sudah siap dikoneksikan, akan tetapi terkendala pada saluran tersier untuk pengairan yang sampai dengan tahun 2020 masih belum berjalan secara optimal. Dari total areal pertanian seluas 4.939 ha di Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan data dari L2BP luas sawah yang telah beririgasi teknis seluas 2.701,78 ha (54,70%).

Perkembangan urusan kategori lapangan usaha pertanian tergolong lambat, di sisi lain pertanian merupakan sektor penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal dasar yang menjadi kendala pada sektor ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian karena preferensi masyarakat lebih ke kategori lapangan usaha pertambangan. Selain itu, mental masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. Minat generasi muda untuk menekuni pertanian juga sangat minim, sehingga perlu dilakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan untuk mengubah pola pikir masyarakat di Kabupaten Bangka Barat agar kegiatan pertanian dapat berkembang.

B. Perkebunan

Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi yang tinggi dalam bidang perkebunan. Komoditas perkebunan yang menjadi andalan di Kabupaten Bangka Barat adalah antara lain karet, lada, dan kelapa sawit. Produksi tiga komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Bangka Barat secara rinci terdapat pada gambar 2.64.



Gambar 2.64 Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (ton)

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan gambar 2.64, dapat diketahui bahwa dari ketiga komoditas unggulan yang banyak dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat adalah kelapa sawit. Dari gambar tersebut juga terlihat fluktuasi produksi hasil perkebunan rakyat pada komoditi unggulan. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga komoditi unggulan perkebunan tersebut yang menyebabkan turunnya produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat.

Penurunan harga pada ketiga komoditi unggulan secara terus-menerus mengakibatkan menurunnya semangat para petani. Selain itu, rendahnya produksi komoditi juga disebabkan oleh kualitas benih yang tidak baik, pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal akibat keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani, maupun karena terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke tanaman menghasilkan, umur tanaman yang sudah tua, dan pengaruh perubahan iklim dengan kondisi musim panas cukup panjang. Untuk potensi lada, meskipun Kabupaten Bangka Barat cukup terkenal dengan produk "Muntok White Pepper", namun produksi



lada masyarakat masih masuk dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan karena menurunnya minat masyarakat untuk bertanam lada.

Selain jenis unggulan, komoditi yang juga berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat adalah durian. Budidaya durian semakin berkembang, sehingga *support* terhadap penangkar bibit dan petani durian sangat diperlukan agar ke depan komoditi ini dapat menjadi jenis andalan dan berkontribusi untuk meningkatkan sektor perkebunan.

Kondisi lahan untuk perkebunan rakyat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat tahun 2014—2034 dicadangkan seluas ± 14.331 ha, dan untuk perkebunan besar seluas ± 41.860 ha. Berdasarkan data *eksisting* perkebunan besar yang telah digunakan oleh perusahaan besar kelapa sawit sampai saat ini seluas 37.111,66 ha, sehingga cadangan dalam RTRW untuk perkebunan besar hanya tersisa 4.748,34 ha. Dengan demikian, potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan besar, kecuali jika terjadi peralihan rencana/fungsi lahan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat. Alternatif lain untuk mengatasi kekurangan lahan untuk kegiatan perkebunan yaitu dengan mengolah lahan-lahan bekas tambang agar bisa produktif dan dapat dijadikan areal perkebunan tentunya dengan memperhatikan status lahannya.

C. Peternakan

Peternakan di Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi untuk dikembangkan. Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Bangka Barat meliputi sapi, kambing, kerbau, dan domba. Adapun yang dominan adalah sapi dan kambing. Populasi dan produksi ternak ruminansia Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.94.



Tabel 2.94 Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Jenis Ternak	2016		2017		2018		2019		2020	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)
1.	Sapi	1.572	145.860	1.670	182.437	1.630	251.104	1.757	303.389	1.375	246.167
2.	Kambing	287	4086	349	11.248	392	12.536	367	10.563	517	12.384
3.	Kerbau	-	-	3	-	-	-	0	0	-	-
4.	Domba	44	77	48	-	20	115	89	383	79	-
Total		2.353	161.178	2.494	205.250	2.042	263.755	2.213	314.335	1.971	258.551

sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.94 diketahui bahwa terjadi penurunan untuk sektor peternakan dalam dua tahun terakhir. Hal ini terlihat dari produksi daging ruminansia yang terdiri dari sapi, kambing, kerbau, dan domba yang menurun dari 314.335 kg dengan populasi 2.231 ekor di tahun 2019 menjadi 258.551 kg dengan populasi sebanyak 1.971 ekor di tahun 2020.

Pengembangan peternakan di Kabupaten Bangka Barat difokuskan untuk jenis ternak sapi dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari luar wilayah Kabupaten Bangka Barat. Secara umum, peternak sapi di Kabupaten Bangka Barat terbagi menjadi dua, yaitu peternak yang mulai dari pembibitan dan peternak yang fokus pada penggemukan daging.

Sebagian besar peternak yang ada di Kabupaten Bangka Barat merupakan peternak pemula, yaitu yang memulai dari pembibitan. Paradigma para peternak yang menganggap pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan, menjadikan profesi ini belum menjadi fokus utama bagi mata pencaharian. Ketergantungan peternak terhadap bantuan dari pemerintah juga masih tinggi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang budidaya ternak menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk melakukan usaha peternakan. Beberapa strategi telah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan peternakan guna mencukupi pemenuhan daging lokal, seperti melakukan program bergulir anakan sapi, program inseminasi buatan (IB), dan program layanan kesehatan hewan.



2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Energi Sumber Daya dan Mineral di Kabupaten Bangka Barat memiliki tiga indikator utama, yaitu persentase rumah tangga pengguna listrik, rasio ketersediaan daya listrik, dan persentase pertambangan tanpa izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan energi, dan sumberdaya mineral bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Meskipun demikian, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk salah satu urusan yang juga harus diperhatikan dalam rangka pembangunan daerah berkelanjutan termasuk didalamnya adalah terkait penggunaan dan ketersediaan daya listrik.

Jaringan listrik di Kabupaten Bangka Barat sudah menjangkau 100% pedesaan di Kabupaten Bangka Barat. PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN terdiri dari beberapa kategori besar, seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus. Jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Bangka Barat disajikan dalam tabel 2.95 .

Tabel 2.95 Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Total
a.	Rumah Tangga	Pelanggan	60.880
b.	Industri	Pelanggan	59
c.	Dinas/Instansi/Gedung	Pelanggan	456
d.	Badan Sosial	Pelanggan	1.503
e.	Penerangan Jalan	Pelanggan	96
f.	Bisnis	Pelanggan	2.637
g.	Layanan Khusus	Pelanggan	95
Jumlah Pelanggan			65.726

sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2021

PT. PLN Persero di Kota Muntok menyajikan listrik kepada pelanggan hanya satu generator. Daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka



Barat adalah 82.827.300 kWh selama tahun 2020. Begitu pula dengan banyaknya produksi PLN oleh PLN Muntok sebesar 108.474.685 kWh. Persentase rumah tangga pengguna listrik yang merupakan persentase dari jumlah rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat mencapai 92,62%. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat menggunakan listrik.

Sebagaimana tabel 2.95 di atas, terlihat bahwa jumlah keseluruhan pelanggan PLN di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 65.726 pelanggan. Jumlah yang berlangganan layanan penyediaan listrik terbesar porsinya adalah untuk rumah tangga yaitu 60.880 pelanggan, sedangkan proporsi yang paling kecil adalah untuk keperluan industri yaitu 59 pelanggan. Industri di Kabupaten Bangka Barat termasuk kecil.

2.3.2.6. Perindustrian

Industri menjadi salah satu aspek yang memiliki kontribusi tinggi dalam perekonomian di Kabupaten Bangkat Barat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan industri pengolahan selama lima tahun terakhir, yakni periode 2016—2020. Penurunan industri pengolahan terjadi pada tahun 2020, seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap perekonomian di berbagai daerah hingga di berbagai Negara. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.96.

Tabel 2.96 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021



Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 sebesar 3,35%. Pada periode 2017–2019, persentase pertumbuhan industri pengolahan ini mengalami peningkatan yang signifikan. Selain sebagai penopang perekonomian, industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk menjaga performa perekonomian agar terus tumbuh dan meningkat, maka pertumbuhan industri pengolahan harus dijaga agar selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan.

Kategori lapangan usaha industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kokoh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Setiap tahunnya, sektor ini terus mengalami peningkatan dengan angka yang bervariasi, yakni di antara 100–200 lebih pertahun. Pada tahun 2020 yang ditandai penyebaran Covid-19, justru meningkatkan dengan jumlah 2.754 pada tahun 2019 menjadi 2.899 industri kecil pada tahun 2020.



Gambar 2.65 Pertumbuhan Industri Kecil
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2020

sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat, 2021



2.3.2.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014). Penduduk yang melakukan transmigrasi disebut transmigran. Transmigran terdiri dari dua kelompok, yaitu transmigran lokal dan transmigran luar. Transmigran lokal berarti penduduk yang pindah merupakan penduduk asli Kabupaten Bangka Barat sedangkan transmigran luar merupakan penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Bangka Barat. Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang berfokus memecahkan masalah kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah.

Di Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Jebus merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai program transmigrasi tahun 2020. Total luas daerah yang ditetapkan sebagai lahan bagi program transmigrasi adalah ±161 ha. Penempatan transmigran di Kecamatan Jebus sebanyak 80 KK namun belum mandiri (Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2021). Dalam pengembangan transmigran, telah dilakukan pula pembangunan rumah sebanyak 80 unit dan saat ini sudah terisi semua oleh warga transmigran yang ada.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang

2.3.3.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam melaksanakan Urusan Penunjang di Bidang Perencanaan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan tingkat konsistensi perencanaan seperti pada tabel 2.97.

Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ tidak 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ tidak 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	92,50	87,92	95,50	97,31	92,76
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	98,38	95,05	99,53	97,24	98,05

sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.3.3.2. Keuangan

Kondisi keuangan di Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2020 dalam kategori yang baik mendapatkan opini WTP terhadap laporan keuangan oleh BPK. Selain itu persentase Selisih Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dari tahun 2016 hingga 2020 meskipun dinamis, terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 1,47% dari



tahun-tahun sebelumnya yang masih di atas 10%. Kemudian alokasi belanja wajib untuk bidang pendidikan dan kesehatan juga diketahui sesuai dengan kriteria minimal. Detail gambaran keuangan Kabupaten Bangka Barat terlihat pada tabel 2.98.

Tabel 2.98 Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

IKU	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
Persentase SiLPA	%	0,86	4,70	9,61	10,53	1,47
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,36	23,70	23,75	25,53	24,50
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12,94	14,91	14,97	13,20	14,89

sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Persentase belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan telah melampaui target minimal 20% per tahun, dan terus meningkat. Pada tahun 2016 mencapai 21,36%, kemudian berturut-turut 23,70% (2017), 23,75% (2018), 25,53% (2019), dan 24,50% (2020). Di bidang kesehatan telah melampaui target minimal 10% per tahun, pada tahun 2016 mencapai 12,94%, dan terus meningkat 14,91% (2017), 14,97% (2018), 13,20% (2019) dan 14,89% (2020). Dari data tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berhasil mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020, terlihat persentase belanja menurun. Anggaran difokuskan untuk penanganan masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga pelaksanaan untuk beberapa program dan kegiatan pemerintah daerah mengalami perlambatan dan beberapa di-*refocusing*.

Isu saat ini yang menjadi perhatian adalah kebijakan *refocusing* anggaran APBN maupun APBD sebagai bagian dari kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, yang secara masif terjadi di tingkat internasional,



nasional, dan daerah. Salah satu aktivitas pemerintah yang mengalami perlambatan adalah pelayanan langsung/pelayanan umum kepada masyarakat. Dengan berakhirnya status siaga Pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah mulai bergerak melalui protokol "*New Normal*" dengan maksud menggerakkan kehidupan ideal dengan tata cara yang baru, dengan mengedepankan protokol kesehatan tanpa mengurangi aktivitas perekonomian.

Relaksasi fiskal, fleksibilitas moneter serta subsidi-subsidi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat merupakan beberapa langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian. Protokol *New Normal* berupaya untuk mengelevasi sektor-sektor utama pembangunan perekonomian dan stabilitas pendidikan. Sektor-sektor utama yang menjadi perhatian yakni sektor perdagangan, ekonomi mikro, pendidikan, pariwisata, perhubungan dan pertanian.

2.3.3.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD). BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis kepegawaian.

BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat sebagai pengelola pelayanan kepegawaian daerah memiliki peran strategis untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan kepegawaian nasional dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam menciptakan aparatur daerah yang profesional. Pendayagunaan aparatur daerah pada badan kepegawaian



dan pengembangan sumber daya manusia daerah pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* yang sejalan dengan kebijakan reformasi di bidang kepegawaian daerah yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, penataan sistem kepegawaian, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas, serta sistem pengawasan aparatur.

Indikator Kinerja Utama sasaran strategis tersebut adalah Indeks Profesionalitas ASN. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sehingga pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Pengukuran indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.99.

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,65	77,84	50	51,55	64,17

sumber: BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, 2021



Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2016 dan 2017 dilakukan dengan perhitungan mandiri, sedangkan mulai tahun 2018 hingga saat ini, perhitungan Indeks Profesionalitas ASN merujuk pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.100.

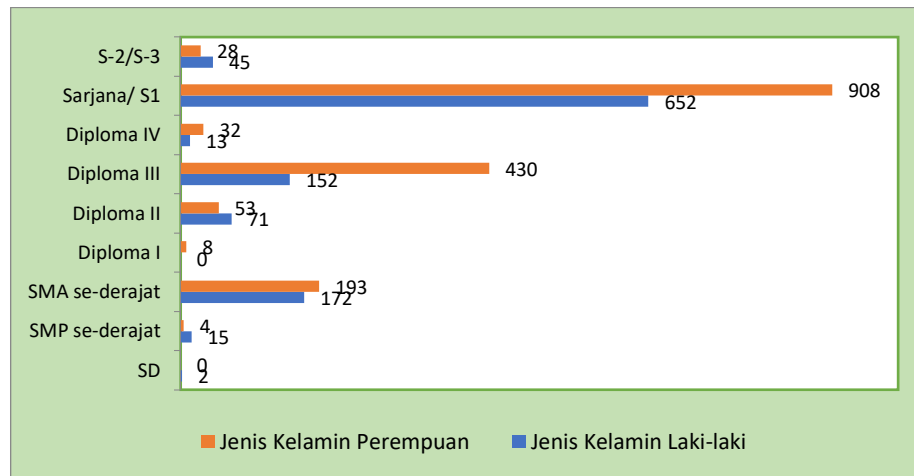
Tabel 2.100 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Hasil Pengukuran	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	12,86	51,44%
2.	Kompetensi	40	21,20	53,00%
3.	Kinerja	30	25,13	83,77%
4.	Disiplin	5	4,98	99,60%
Total		100	64,17 (rendah)	

sumber: BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.100 menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian Indeks Profesional ASN Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan nilai yang masih rendah, yaitu dengan total poin 64,17 atau mencapai 79,49% dari target yang telah ditetapkan tahun 2020 lalu, yaitu sebesar 80,73. Berdasarkan empat dimensi yang digunakan dalam perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi yang belum mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan dimensi kualifikasi, Kabupaten Bangka Barat saat ini memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.778 orang yang terdiri dari 1.122 orang laki-laki dan 1.656 orang perempuan, seperti tampak pada gambar 2.66.



Gambar 2.66 Jumlah ASN Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020
sumber: BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tampak pada gambar 2.66 ASN Kabupaten Bangka Barat didominasi tamatan SD sampai dengan D3, yaitu sebanyak 1.100 orang. Semakin banyak ASN yang berpendidikan tinggi, maka pembangunan manusia di daerah semakin baik. Dalam penilaian, dimensi kualifikasi yang dicapai 51,44%.

Tugas belajar bersumber dari APBD, sedangkan izin belajar dari masing-masing ASN (swadana). Hingga tahun 2020, jumlah pendaftar izin belajar di Kabupaten Barat sangat minim. Yang mengikuti tugas belajar adalah dokter-dokter spesialis atau dari Dinas Kesehatan. Selain dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi juga belum mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan penilaian, dimensi kompetensi pada perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 memperoleh nilai 21,20% dengan capaian 53%. Indikator yang digunakan dalam pengukuran dimensi kompetensi, yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar/ *workshop*/magang/kursus/sejenisnya.

Permasalahan rendahnya hasil penilaian dimensi kompetensi satu di antaranya dikarenakan adanya *refocusing* dana Covid-19. Hingga tahun



2020, sebanyak 47% yang belum mengikuti diklat-diklat. Selain itu, adanya regulasi tentang penilaian jabatan fungsional sehingga BKPSDM melakukan seleksi penyelenggara agar kegiatan yang diikuti ASN dapat diakui dalam penilaian.

2.3.3.4. Sekretariat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat menyatakan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan bagian dari kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat. Dalam pelaksanaan tugasnya sekretariat daerah bertugas membantu bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka fungsi sekretariat daerah antara lain terkait pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat terdiri dari tujuh bagian yaitu Bagian Sosial dan Kemasyarakatan; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Ekonomi dan Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Hukum; Bagian Umum, Perlengkapan dan Protokol; dan Bagian Organisasi.

Urusan Pelaksanaan Sekretariat Daerah menentukan 2 indikator sebagai parameter keberhasilan yakni Nilai Reformasi Birokrasi (RB), dan



Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik. Capaian nilai indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 2.101.

Tabel 2.101 Indikator Urusan Pelaksanaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Reformasi Birokrasi	63,37	60,65	74,87	45,24	45,94
2.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	79,75	81,02	81,32	78,62	80,92

sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pada tahun 2016—2018 penilaian terhadap reformasi birokrasi Kabupaten Bangka Barat dilakukan secara mandiri sedangkan di tahun 2019 dan 2020 telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Selain penilaian terhadap reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik. Secara garis besar hasil survei sejak tahun 2016—2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 mencapai 79,75 meningkat menjadi 81,02 di tahun 2017 dan 81,32 di tahun 2018. Hasil survei kepuasan masyarakat menurun menjadi 78,62 di tahun 2019 dan meningkat kembali menjadi 80,92 di tahun 2020.

2.3.3.5. Penelitian dan Pengembangan

Dalam melaksanakan Urusan Penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat memiliki tugas pokok menyusun dokumen rencana induk penelitian dan pengembangan. Selain itu, Sistem Inovasi Daerah (SIDa) juga dilaksanakan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat. Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan kurun waktu lima tahun (2016—2020) terlihat dalam tabel 2.102.



Tabel 2.102 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	n.a.	75	66,67	83,33	50
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	n.a.	n.a.	n.a.	3,33	3,33

sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.3.3.6. Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Inspektorat Kabupaten Bangka Barat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017. Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat periode 2016—2020 digambarkan pada tabel 2.103.

Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tindak lanjut temuan	%	100	100	100	100	-
2.	Jumlah temuan BPK	temuan	14	24	16	33	12
3.	Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2

sumber: Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Tindak Lanjut Temuan atau Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (THLP) baik internal maupun eksternal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2016—2019 dengan realisasi 100%.



Urusan Pengawasan sangat terkait dengan upaya untuk mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan, serta menjaga stabilitas pemerintah daerah yang disiplin dan taat terhadap undang-undang. Salah satu implementasi kinerja urusan pengawasan daerah dilaksanakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel 2.104.

Tabel 2.104 Nilai SAKIP Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai SAKIP daerah	60,24	65,44	68,65	69,24	69,82

sumber: Kemen PAN RB, 2021

Hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat untuk penilaian tahun 2020 mendapat nilai 69,82 dengan predikat "B" (Baik). Predikat "B" berarti akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Pencapaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dimana target yang ditetapkan terkait nilai SAKIP daerah tahun 2020 adalah 67. Dengan capaian di tahun 2020, maka hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun mendapat predikat "B" (Baik).

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya pencapaian hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 mengalami peningkatan. Secara rinci, perbandingan pencapaian hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018, 2019 dan 2020 berdasarkan komponen penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel 2.105.



Tabel 2.105 Komponen Hasil Evaluasi SAKIP
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020

Komponen	Bobot	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	23,12	23,26	23,55
Pengukuran Kinerja	25	15,74	15,80	16,07
Pelaporan Kinerja	15	11,04	11,14	11,20
Evaluasi Internal	10	6,88	7,00	7,12
Capaian Kinerja	20	11,88	12,04	11,88
Nilai hasil evaluasi	100	68,65	69,24	69,82

sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.3.3.7. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tupoksi DPRD, menyediakan, dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak, tugas, dan fungsi sesuai kebutuhan. Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya membantu fungsi DPRD, memberikan dukungan dalam penyusunan dokumen yaitu: (1) Dokumen Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Barat tentang Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat; (2) Dokumen Rencana Lima Tahunan RPJMD dan Rencana Tahunan (RKPD); dan (3) Dokumen perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD. Adapun pencapaian indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.106.



Tabel 2.106 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase raperda yang disetujui menjadi perda	85%	70%	133,33%	78,57%	100%

sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan tabel 2.106 dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 semua dokumen tersedia untuk indikator ketersediaan rencana kerja tahunan, tersusun dan terintegrasinya program—program DPRD pada RPJMD dan RKP, serta terintegrasinya program-program DPRD pada perencanaan dan anggaran Sekretariat DPRD.

Pada indikator persentase raperda yang disetujui menjadi perda mengalami fluktuatif. Walaupun tingkat pencapaian indikator ini tidak konsisten atau naik turun di beberapa tahun terakhir, Sekretariat DPRD terus melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan dan kendala yang selama ini dihadapi. Pada Tahun 2020, 14 Raperda yang disampaikan, telah dibahas 6 Raperda sedangkan 8 Raperda belum selesai dibahas. Dari 6 raperda yang dibahas, seluruh raperda telah disetujui menjadi perda. Raperda tersebut merupakan raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).



2.3.3.8 Pemerintahan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan dan kewenangan yang luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kreativitas masing-masing. Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat.

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah manajemen pemerintahan dalam mendukung keterpaduan tugas dan fungsi pemerintahan, khususnya keterpaduan tugas dan fungsi Pemerintah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan urusan pemerintahan umum meliputi: a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman



Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintahan berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Capaian kinerja urusan pemerintahan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016—2020 dapat dilihat pada tabel 2.107.

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016—2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi dalam pemilukada	%	-	62,50	-	82	74,4
2.	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Pelanggaran Administrasi sesuai Peraturan PerundangUndangan	%	0	-	0	0	0
4.	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan	%	100	100	100	100	100
5.	Terselenggaranya seminar, talk shwow, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100

sumber: Kantor Kesatuan, Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat, 2021



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah untuk bersaing secara terbuka, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional guna mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri atas kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga perkapita

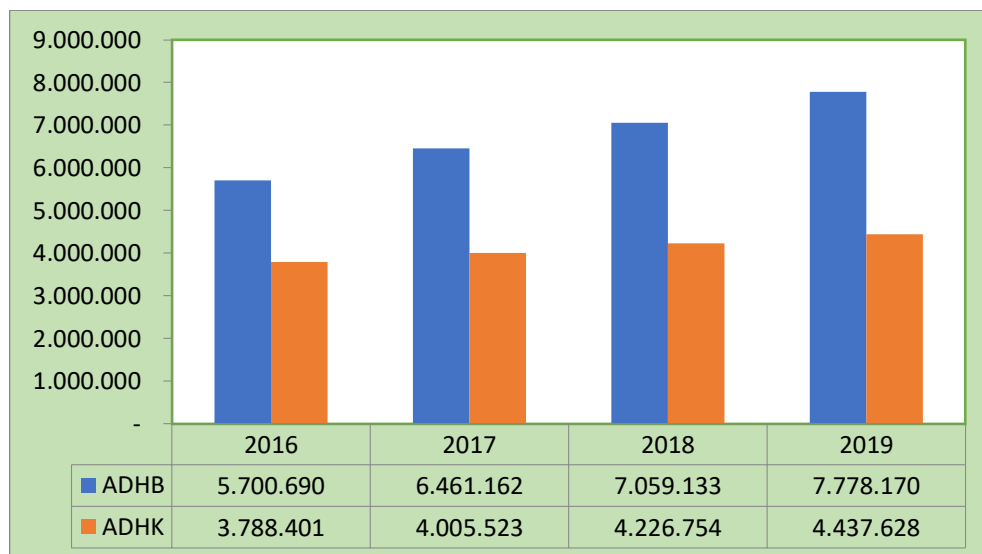
Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan tingkat atraktif pengeluaran konsumsi rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, maka akan semakin baik bagi peningkatan ekonomi daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, semakin meningkat jumlah penduduk maka akan semakin tinggi pula konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun non makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi maupun pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut



pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Selama tahun 2016—2019, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, baik dalam nominal maupun riil. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya akan mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2016—2019, baik ADHB maupun ADHK menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya seperti tampak pada gambar 2.67.



Gambar 2.67 Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2019 (juta rupiah)

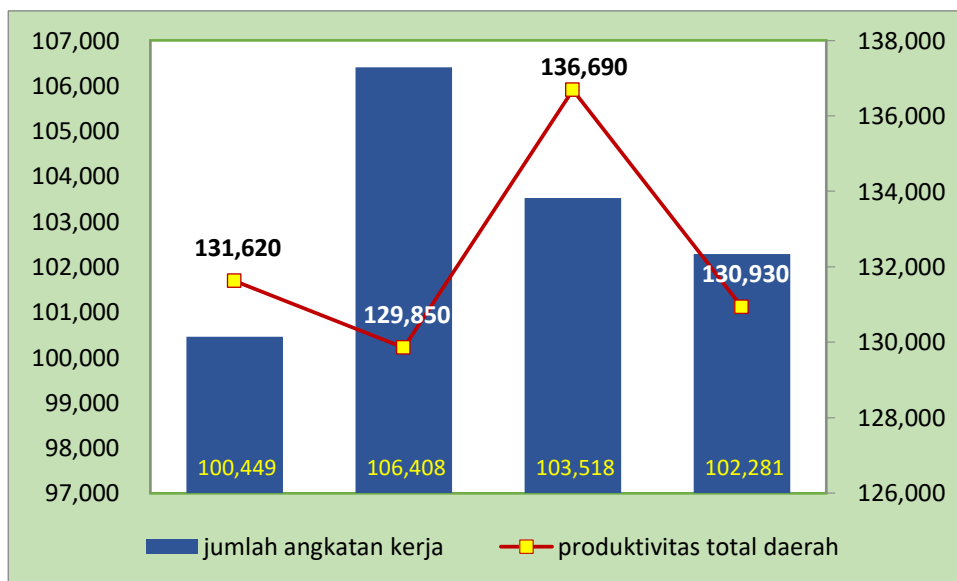
sumber: Bangka Barat Dalam Angka 2021

Secara nominal, pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHB dan ADHK dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHB sebesar Rp5.700,69 juta dan pengeluaran rumah tangga ADHK sebesar Rp3.788,40 juta. Tahun 2017, pengeluaran rumah tangga ADHB dan ADHK meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019.

b. Produktivitas Total Daerah

Secara konsep, produktivitas adalah tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal, manusia, dan teknologinya untuk menghasilkan *output* (Cusolito & Malaney, 2018)¹⁰. Produktivitas adalah konsep yang penting dalam analisa pembangunan ekonomi. Hal ini karena selain penambahan input produksi, pertumbuhan pendapatan dapat terjadi akibat peningkatan produktivitas.

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas total daerah Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan data yang berfluktuatif. Hal tersebut sesuai dengan berfluktuasinya jumlah angkatan kerja di setiap tahunnya.



Gambar 2.68 Produktivitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017—2020

sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2021

¹⁰https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Konsep_Produktivitas_dalam_Ekonomi_Produktif.



c. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Kesejahteraan suatu negara dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonominya. Di saat pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, pandemi Covid-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Pandemi Covid-19 memberikan implikasi dalam segala aspek terutama kesehatan dan perekonomian negara. Pada awal pemerintah mengumumkan keberadaan Covid-19 di Indonesia, kemudian diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah provinsi sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Namun, di sisi lain PSBB menyebabkan perubahan pola perilaku masyarakat, pergerakan masyarakat terbatas sehingga perekonomian pun melambat.

Perekonomian Indonesia secara historis tumbuh antara 5 sampai 6%. Namun setelah adanya wabah virus corona, menurut data BPS pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97% dan pada kuartal kedua tumbuh minus 5,3%. Pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar minus 3,49%. Pada kuartal IV minus 2,19%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif atau sepanjang tahun 2020 adalah minus 2,07%. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami resesi. Para pencari kerja akan kesulitan mencari lapangan pekerjaan, pendapatan korporasi, dan pelaku usaha juga akan menurun karena menurunnya daya beli masyarakat.

Pada aspek konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, sebagian besar masyarakat akan sangat berhati-hati mengatur pengeluarannya karena ketidakpastian keuangan di tengah pandemi ini.¹¹ Salah satu dampaknya adalah jumlah penduduk miskin akan bertambah. Secara makro, pada triwulan IV tahun 2020 pemulihan ekonomi Provinsi

¹¹Pakpahan, A. K, 2020. *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.



Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,04%. Hal ini menandakan bahwa terjadi perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 4,37%. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan implementasi protokol Covid-19 sebagai bagian dari tatanan kehidupan baru.

Data BPS menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengalami penurunan pada tahun 2018 ke tahun 2019, jauh sebelum wabah Covid-19 terjadi. Pada tahun 2018, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,68%. Pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 3,95 dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengeluaran Perkapita Menurut Pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel 2.108.

Tabel 2.108 Rata-rata Pengeluaran perkapita perbulan Menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020 (%)

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kelompok Makanan	52	52	51,63	52,08	53,43
2.	Kelompok Bukan Makanan	48	48	48,71	47,92	46,57
3.	Jumlah	100	100	100	100	100

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.108 menjelaskan bahwa pengeluaran perkapita menurut pengeluaran kelompok makanan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 52% hingga tahun 2020 sebesar 53,43%, meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebesar 51,63%, sedangkan untuk pengeluaran perkapita menurut pengeluaran kelompok bukan makanan menurun selama kurun waktu 2016—2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebesar 48% dan di tahun 2020 sebesar 46,57%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa masyarakat Kabupaten



Bangka Barat lebih banyak pengeluarannya untuk membelanjakan makanan dari pada non makanan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tabel 2.109 Persentase Rata-Rata perkapita perbulan Menurut Kelompok Non Pangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 –2020

Kelompok Non Pangan	Persentase Rata-rata perkapita Sebulan Menurut Kelompok Non-Pangan (Rupiah)	
	2019	2020
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	353.669	344.918
Aneka barang dan jasa	123.996	129.235
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	37.674	33.838
Barang yang tahan lama	62.670	34.604
Pajak, pungutan, dan asuransi	31.924	32.408
Keperluan pesta dan upacara	20.303	10.053
Jumlah	630.236	585.056

sumber: BPS Kabupaten Bangka Barat, 2021; Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Maret, 2021

Berdasarkan tabel 2.109, pengeluaran non pangan perkapita masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang tercatat di tahun 2019 dan 2020 didominasi oleh kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air serta aneka barang dan jasa. Pengeluaran non pangan yang terlihat pada tabel tersebut merupakan kebutuhan pokok atau utama. Masyarakat membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Masyarakat membutuhkan bahan bakar untuk transportasi, memasak, penerangan, dan masyarakat memerlukan air untuk kehidupan sehari-hari. Pengeluaran non pangan terendah atau jarang diperlukan oleh masyarakat adalah keperluan pesta dan upacara.

2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur didasarkan atas indikator-indikator sebagai berikut.



a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalan. Hal ini dikarenakan belum diperhitungkannya bobot perbedaan jenis kendaraan. Jalan merupakan aksesibilitas utama guna menunjang pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun non perekonomian. Jarak tempuh yang jauh terkadang tidak menjadi persoalan yang utama, jika infrastruktur terpenuhi dengan kualitas yang baik.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dan wajib yang harus dimiliki pada setiap wilayah dengan tipe jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan, antara lain jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil (mobil penumpang, bus, truk) dan sepeda motor.

Tabel 2.110 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jalan Total (km)	700,92	700,92	700,92	700,92	700,92
2.	Jumlah motor* (unit)	21.271	120.526	128.184	131.740	155.165
3.	Jumlah Mobil* (unit)	4.933	10.956	11.589	11.991	7.144
4.	Jumlah Kendaraan* (unit)	26.204	131.482	139.773	143.731	162.309
	Rasio Keseluruhan	1:37	1:188	1:199	1:205	1:232

sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2021

*)data yang membayar pajak

Jika dilihat dari nilai rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan masih terlihat normal. Hingga tahun 2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan yaitu 1:232. Secara rata-rata dari lima tahun terakhir



setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan 172 kendaraan. Namun demikian masih belum terlihat adanya kemacetan, walau di daerah perkotaan dan pada jam sibuk. Apalagi dari data jumlah kendaraan yang ada, masih didominasi oleh kendaraan roda dua, yaitu berjumlah di atas 95,6%.

Pelengkap aksesibilitas daerah yang penting dimiliki oleh daerah lainnya yaitu adanya sarana dan prasarana untuk angkutan umum, menjadikan sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki satu pelabuhan penumpang, dua pelabuhan non penumpang, dan tiga buah terminal dengan sembilan jumlah trayek antarkota dalam provinsi. Melalui sarana angkutan umum tersebut, mobilitas penumpang dan barang terjadi yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Kabupaten Bangka Barat.

Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pada sektor transportasi dilakukan untuk memperlancar mobilitas antarkecamatan, antarkota dalam provinsi maupun antarpulau seperti Bangka—Palembang. Pergerakan penumpang lewat jalur bus mengalami peningkatan, baik yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Bangka Barat.

1) Sarana dan Prasarana Pendukung

a) Fasilitas Bank

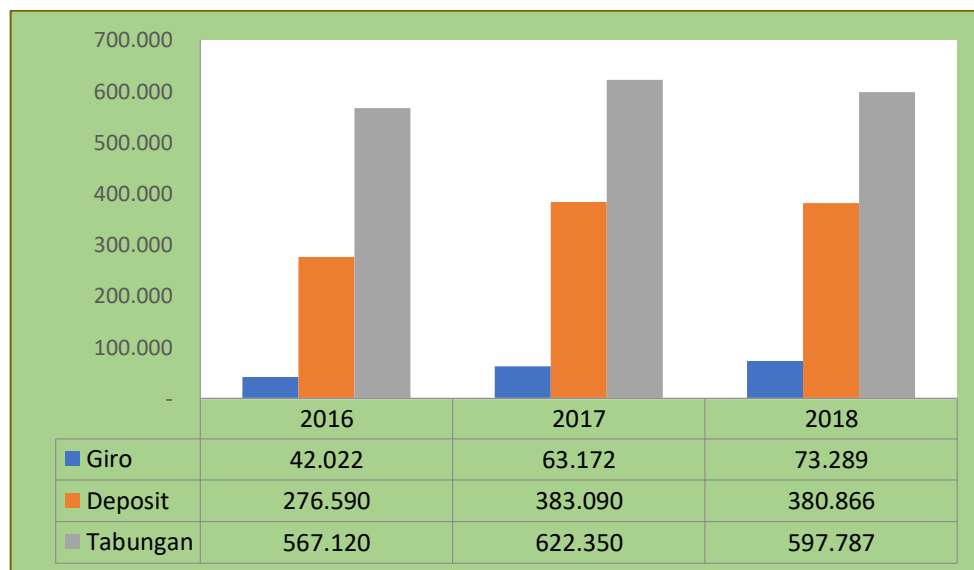
Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan. Hal ini karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

Tabel 2.111 Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

No.	Kecamatan	Bank	ATM
1.	Muntok	10	25
2.	Simpangteritip	2	3
3.	Jebus	2	2
4.	Parittiga	6	11
5.	Kelapa	4	4
6.	Tempilang	2	2
	Jumlah	24	31

sumber: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2020

Banyaknya jumlah bank pada suatu daerah menunjukkan perputaran uang yang ada di daerah tersebut, maka semakin banyak perputaran uang yang ada di daerah tersebut. Dari tiga jenis tabungan yang ada, jenis tabungan merupakan yang paling dominan yaitu selalu diatas 60% dalam empat tahun terakhir.



Gambar 2.69 Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2018 (juta rupiah)

sumber: Kantor Perwakilan BI Kepulauan Bangka Belitung dalam BPS, 2019

b) Ketersediaan Hotel dan Penginapan

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan, walaupun terjadi kenaikan yang belum optimal. Dari sisi sebaran, usaha penginapan dan



hotel di Kabupaten Bangka Barat masih terfokus di Kecamatan Muntok sebagai ibukota kabupaten. Selama lima tahun terakhir, di Kabupaten Bangka Barat juga belum terjadi peningkatan jumlah hotel dan penginapan.

Saat ini di Kabupaten Bangka Barat hanya terdapat yaitu 10 hotel dan 24 penginapan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Dalam rangka menunjang kepariwisataan, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki *homestay* sebagai alternatif tempat penginapan bagi para wisatawan selain hotel dan penginapan. Pada tahun 2020, terdapat enam *homestay* yang masih aktif digunakan sebagai penginapan, sehingga terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah 7 *homestay*.

Tabel 2.112 Jumlah Penginapan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017—2020

No	Jenis Penginapan	2017	2018	2019	2020
1	*Hotel				
	Hotel Melati	12	12	12	10
2	Penginapan				
	a. Motel	12	0	0	0
	b. Bungalow	4	4	4	4
	c. Mess	13	13	13	13
	d. Home Stay	27	7	7	6
	e. Guest House	14	2	2	1
	Jumlah	82	38	38	34

sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

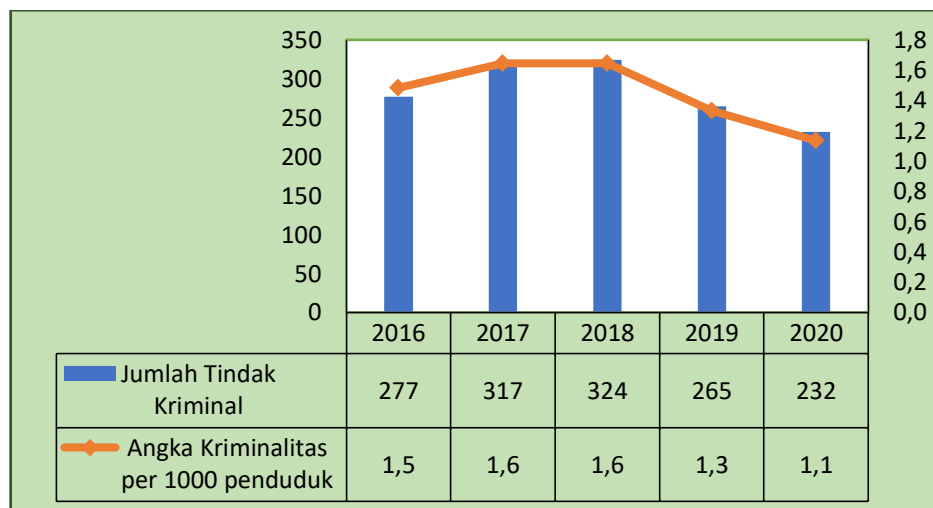
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah serta sekaligus dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Selain dari perhitungan secara bisnis, masuknya investor asing ke suatu wilayah juga sangat tergantung dari kondisi keamanan, ketertiban, dan politik dalam



wilayah tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat dari indikator kinerja:

a. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran, dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Selama kurun waktu 2016—2020, angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi dan cenderung meningkat namun menurun di tahun 2020. Total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat memperlihatkan adanya penurunan sebesar 22% atau 59 perkara, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 2.70 Perkembangan Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Polres Bangka Barat, 2021; data diolah

Sebagaimana data tersebut, angka kriminalitas pada tahun 2016—2018 cenderung mengalami kenaikan namun pada tahun 2019—2020 mengalami penurunan kasus kriminalitas. Pada tahun 2020 mengalami



penurunan dari tahun 2019 sebanyak 33 kasus dan rasio kriminalitas per 1000 penduduk turun sebesar 0,2.

b. Perizinan

Perizinan juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan daya saing investasi daerah, khususnya terkait kemudahan dalam proses administrasi perizinan. Dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan, telah dibentuk Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai instansi pelayanan perizinan satu atap di Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan tahun 2019, jenis perizinan yang ditangani sebanyak 137 perizinan dan 22 jenis non perizinan. Lama pengurusan, jumlah persyaratan, dan biaya yang bervariasi sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio tingkat ketergantungan dan kualitas tenaga kerja.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S-1, S-2, dan S-3. Kabupaten Bangka Barat memiliki SDM yang berkualifikasi S-1, S-2, dan S-3 sebanyak 4.414 orang yang terdiri dari 4.306 orang berkualifikasi S-1, 103 orang berkualifikasi S-2, dan 5 orang berkualifikasi S-3 hingga



tahun 2020. Jika dilihat persentase minimal SDM yang berkualifikasi S-1/S-2/S-3 dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruhnya, Kabupaten Bangka Barat masih tergolong rendah yang memiliki SD/tenaga kerja berkualifikasi >S-1. Tabel 2.112 menunjukkan SDM di Kabupaten Bangka Barat yang lulus pendidikan S-1/S-2/S-3 setiap tahunnya bertambah, meskipun di tahun 2017 pernah menurun. Jumlah SDM yang berkualifikasi S-1, S-2, dan S-3 di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel 2.113.

Tabel 2.113 Jumlah SDM di Kabupaten Bangka Barat yang Berkualifikasi S-1, S-2, dan S-3 Tahun 2016—2020

Jenjang	2016	2017	2018	2019	2020
S1/DIV	3.468	3.360	3.875	3.945	4.306
S2	84	85	88	90	103
S3	2	3	3	3	5
Persentase minimal S1	1,9	1,79	2,01	2,03	2,16

sumber: Bangka Barat Dalam Angka Tahun 2021

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Penduduk usia 15—64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan



semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016 - 2019 sebesar 48,91 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) menanggung \pm 50 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk lebih detail terkait data rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel 2.114.

Tabel 2.114 Tingkat Ketergantungan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
0-14 Tahun	54.836	51.064	56.245	57.665	57.074
65 Tahun keatas	8.011	8.850	8.641	9.048	9.536
Penduduk Usia Tidak Produktif	62.847	59.914	64.886	66.713	66.610
Penduduk Usia Produktif	124.124	132.712	132.180	131.375	137.917
Rasio Ketergantungan	50,63	45,15	49,09	50,78	48,30
< 15 Tahun	44,18	38,48	42,55	43,89	41,38
> 65 Tahun	6,45	6,67	6,54	6,89	6,91

sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Bangka Barat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Pertumbuhan ekonomi	%	4,8	5,26	5,2	7,13	-5,43	5,05
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08	72,23
	Persentase Penduduk Miskin	%	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70	2,85
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	-	4,23	3,11	2,85	4,12	5,65
	PDRB Perkapita	Ribu rupiah	61.038	64.565	66.108	66.378	61.617	70.428
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Urusan Pendidikan							
	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung (SD)	Peringkat	7	7	7	-	-	1
	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung (SMP)		6	6	6	-	-	1
	Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	Tahun	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22	8,26
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,48	11,49	11,50	11,52	11,53	13,35
	Kesehatan							
	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,52	69,56	69,73	69,99	70,06	69,99
	Pekerjaan umum dan penataan ruang							
	Persentase desa/kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	%	-	62,86	68,57	80	91,67	100
	Persentase ruang terbuka hijau	%	0,11	0,11	0,11	0,11	4	2,90
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman							
	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	%	82,68	82,66	86,94	93,79	94,61	95

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	112,07	67,24	26,32	31,58	63,16	84,85
	Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,04	68,07	64,73	66,29	67,34	68
	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan	%	N/A	9,38	10,94	12,5	15,2	11
	Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	unit	6	8	9	10	11	12
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	%	19,18	19,18	38,36	28,04	23,42	70
	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	%	7,8	7,81	7,81	7,81	10,61	19
	Persentase luas lahan kritis Yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	%	-	-	-	-	1	2
	Persentase sumber air yang telah di konservasi	%	16,26	26,02	26,02	33,33	39,02	28
	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	%	70,59	73,68	99,09	12	44,44	100
	Kepemudaan & Olahraga							
	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat	7 (POPDA)	6 (Kejurda)	7 (POPDA)	6 (Kejurda)	3 (POPDA)	3 (POPDA) 3 (Kejurda)
	Peringkat olahraga prestasi di tingkat Provinsi	Peringkat	7 (POPDA)	6 (Kejurda)	7 (Porprov) 7 (POPDA)	6 (Kejurda)	3 (POPDA)	3 (POPDA)
	Sekretariat Daerah							
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,37	60,65	74,87	45,24	45,94	70
	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	-	-	90,27	77,93	92,59	80

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Nilai	80,36	81,02	81,32	78,62	80,98	85
	Keuangan							
	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	%	6,30	9,40	10,15	7,39	7,77	9,00
	Opini BPK terhadap Laporan keuangan	Opini	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	84,65	77,84	50	51,55	64,17	82,73
	Pengawasan							
	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	60,24	65,44	68,65	69,24	69,82	70
	Pekerjaan umum dan penataan ruang							
	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	%	9,13	23,39	37,89	51,35	51,35	94,76
	Perhubungan							
	Indeks konektivitas kabupaten	Indeks	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25
	Penanaman Modal							
	Peningkatan Jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	milyar	117,115	120,782	462,456	642,238	417,08	600
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Persentase peningkatan unit usaha mikro	%	-	3,29	1,87	2,55	5,60	24,782
	Persentase peningkatan unit industri kecil dan menengah	%	12,87	7,83	6,14	5,52	5,27	2,718
	Peningkatan Skala usaha Umi	%	-	-	86,74	7,07	0,04	2,50
	Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan (industri makanan olahan/kuliner)	Ton / tahun	3.121,08	3.133,75	3.161,96	3.244,49	2.133,29	3.152,18
	Kapasitas usaha industri kecil dan menengah unggulan (industri kerajinan)	Unit/thn	191.940	192.852	198.029	203.721	99.556,00	222,492
	Jumlah ragam usaha / produk Umi	unit	86	100	120	137	151	150
	Jumlah ragam usaha Industri kecil dan menengah	unit	46	46	48	50	51	54
	Jangkauan pasar produk UMi	%	DK=100	DK=99,62 AK=0,04 AP=0,34	DK=98,66 AK=1,19 AP=0,15	DK=86,46 AK=13,10 AP=0,44	DK=84,69 AK=14,76 AP=0,55	DK = 98,5

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Jangkauan pasar produk unggulan industri kecil dan menengah	%	DK=100	DK=95,41 AK=0,43 AP=4,16	DK=95,86 AK=1,07 AP=3,07	DK=95,9 AK=1,16 AP=2,94	DK=96,03 AK=1,21 AP=2,76	DK=98
	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	%	8,87	9,26	9,33	9,95	-	9,78
	Kebudayaan							
	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintergrasi dengan program pariwisata	%	28,16	33,64	44,23	50,00	35,58	42
	Kelautan dan Perikanan							
	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta rupiah	239.730	449.027	547.851	591.662	632.902	633.269
	Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	Juta rupiah	597	635	1.697	2.290	2.747	7.520
	Nilai produksi perikanan budidaya air laut	Juta rupiah	6.548	1.990	2.314	8.599	30.534	7.982
	Pariwisata							
	Kunjungan wisata	Orang	48.644	109.174	216.256	136.252	61.087	104
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,17	1,17	1,20	1,26	1,24	1,80
	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	2,63	2,77	3,89	3,53	5,12	20
	Pertanian							
	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Juta rupiah	0,61	0,64	0,66	1,02	1,4	2
	Nilai Produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Miliar rupiah	940	620	657	394	592	4.069
	Nilai Produksi ternak ruminansia	Juta rupiah	12.894	18.227	31.651	37.720	32.264	35.525
	Nilai produksi ternak unggas	Juta rupiah	9.772	21.731	33.659	32.213	47.417	22.934
	Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	%	13,72	11,61	15,85	11,55	N/A	4,5
	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	%	20.000 unit usaha	6,39	8,62	1,44	5,94	1,45

Tabel 2.116 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)						
	PDRB HK	Milyar Rupiah	9.190.201	9.673.709	10.177.199	10.897.397	10.306.008
	PDRB HB	Milyar Rupiah	12.249.433	13.221.427	13.817.299	14.149.513	13.380.887
	LPE	persen	4,8	5,26	5,2	7,08	-5,43
B	PDRB Perkapita						
	PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha (Ribu rupiah) ADHB	Ribu Rupiah	61.038	64.565	66.108	66.378,80	61.617,20
	PDRB Perkapita Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha (Ribu rupiah) HK	Ribu Rupiah	45.794,40	47.240,00	48.692,20	51.122,40	47.420,60
C	Inflasi						
	Laju Inflasi	persen	7,78	2,66	3,45	2,31	1,09
D	Angka Kemiskinan						
	Garis Kemiskinan	Rupiah/kapita/bulan	440.850	497.567	520.642	549.496	589.894
	Jumlah penduduk miskin	angka	5.460	6.060	6.350	5.650	5.830
	Persentase Penduduk Miskin	persen	2,74	2,98	3,05	2,67	2,7
	Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	persen	97,26	97,02	96,95	97,33	97,3
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	indeks	0,34	0,16	0,34	0,31	0,23
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	indeks	0,07	0,01	0,05	0,07	0,04
E	Tingkat Pengangguran						
	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen		4,23	3,11	2,85	4,12
F	Kategori Unggulan Daerah (Location Quotient)	angka	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
G	Angka Kriminalitas						
	Jumlah tindak Kriminal	Jumlah kasus	277	317	324	265	232
	Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	angka	1,5	1,6	1,6	1,3	1,1
II	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A	Indeks Pembangunan Masyarakat	indeks	67,60	67,94	68,68	69,05	69,08
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	69,52	69,56	69,73	69,99	70,06
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	6,89	7,06	7,18	7,21	7,22
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	11,49	11,5	11,51	11,52	11,53
	Pengeluaran perkapita	Rupiah	11.303	11.394	12.011	12.275	12.233
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
II.1	Fokus Pelayanan Urusan Wajib						
A.	Pendidikan						
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (APK)	Angka	80,73	61,69	62,17	79,16	87,55
	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah						
	APK SD/MI/Paket A	Angka	108,32	108,78	108,86	103,74	103,94
	APM SD/MI/Paket A	Angka	94,35	94,35	95,46	93,13	94,37
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Angka	0,57	0,3	0,28	0,34	0,17
	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	73,98	85,26	86,19	82,38	82,67
	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	104,63	94,49	95,84	91,38	91,43
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Paket B	Angka	0,92	1,32	1,37	1,44	1,43
	Sekolah Dasar/MI Terakreditasi A	Angka	25	30	31	29	25
	Sekolah Dasar/MI Terakreditasi B	Angka	87	90	92	93	95
	Sekolah Dasar/MI Terakreditasi C	Angka	18	13	9	14	16
	Sekolah Dasar/MI Belum Terakreditasi	Angka	8	5	6	3	3
	SMP/MTs Terakreditasi A	Angka	19	20	20	19	19
	SMP/MTs Terakreditasi B	Angka	16	17	18	20	20
	SMP/MTs Terakreditasi C	Angka	2	3	4	4	4
	SMP/MTs Belum Terakreditasi	Angka	8	6	4	3	3
B	Kesehatan						
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100
	Cakupan pembantu puskesmas	%	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69
	Rasio dokter per satuan penduduk	Angka	0,22	0,33	0,39	0,39	0,43
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Angka	0,27	0,38	0,44	0,45	0,46
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Angka	112,36	112,33	101,71	118,8	108,47
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Angka	96,74	98,36	96,93	96,96	97,3
	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Angka	100	100	100	100	92,19
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	persen	71,74	81,65	85,66	101,97	76,57
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	100	100	100	100	100
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	59,15	52,83	59,49	64,44	57,14
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani	Angka	3.435	2.732	3.405	2.332	2.132
	Angka kejadian Malaria	Angka	112	75	154	91	131
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	N/A	0,72	0,45	0,59	0,48
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Angka	N/A	21.723	41.497	38.519	39.249
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Angka	N/A	4.809	3.315	3.636	3.977
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	Angka	N/A	318	437	462	493

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	yang terlayani kesehatan						
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Persentase panjang jalan kondisi baik (%)	%	78,71	77,5	78,71	49,53	56,87
	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Sedang (%)	%	4,76	5,04	4,76	25,63	22,42
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak (%)	%	8,59	8,51	8,59	24,84	20,71
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Rusak Berat (%)	%	7,95	8,95	7,95	0	0
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Angka	0,79	0,77	0,79	0,5	0,57
	Persentase bangunan ber-IMB	%	3,72	4,45	4,97	5,29	5,87
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Persentase Rumah Layak Huni	%	N/A	86,6	88,05	89,39	91,26
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	N/A	0,03	0,029	0,025	0,025
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	N/A	24,99	23,05	6,55	6,55
	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	N/A	88,82	90,84	90,4	91,78
	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	%	N/A	82,68	86,94	93,79	94,61
2.3.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	145,67	79,33	79,33	85,83	84,17
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	N/A	N/A	95,78	95,78	95,78
	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	N/A	83,54	70,88	42,71
	Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Petugas Satpol PP PNS	Orang	10	10	10	10	10
	Jumlah Petugas Satpol PP I Non PNS	Orang	89	95	118	118	116
2.3.1.6.	Sosial						
	Penduduk yang Menyandang Masalah Sosial	Jiwa	18.204	16.049	56.240	8.680	39.099
	Jumlah WKSMB Aktif	Angka	4	4	4	3	3
	Jumlah WKSMB Tertangani	orang	2.174	80	2.873	298	431
	Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Orang	223	151	256	269	345
2.3.1.7.	Tenaga Kerja						
	Jumlah Investor	Angka	21	22	22	22	23
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	118,33	104,73	140,86	228,86	196,35
	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	Angka	355	314	986	1602	1178

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	Angka	3	3	7	7	6
2.3.1.8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Angka	N/A	N/A	10	12	24
2.3.1.9.	Pangan						
	Skor PPH	Angka	87,2	87,5	87,9	82,2	85,9
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	28,57	0	3,08	6,67	4,76
2.3.1.10.	Pertanahan						
2.3.1.11.	Lingkungan Hidup						
	IKLH	Angka	N/A	68,07	64,73	66,29	63,29
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan	%	19,18	19,2	38,36	26,17	23,42
	Sampah yang ditangani/ diangkut	m3	N/A	N/A	5.391,78 ton	5.103,90 ton	5.338,86 ton
	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aktif	Unit	N/A	1	1	1	1
	Tempat pembuangan sampah (TPS)	Unit	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik
2.3.1.12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Penduduk Memiliki KTP	%	93,37	88,92	97,46	98,27	98,56
	Penduduk Berakte Kelahiran	%	34,45	36,96	39,80	45,55	49,93
	Pasangan Berakte Nikah	%	25,05	30,32	34,27	42,40	47,35
2.3.1.13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Peserta KB Aktif	Orang	32869	30134	30939	31680	30215
	Pasangan Usaha Subur	Orang	40431	38818	38792	39286	38162
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	81,3	77,63	79,76	80,64	79,18
2.3.1.15.	Perhubungan						
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Angka	78	70	65	59	59
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	org	33.477	20.981	25.197	22.476	20.568
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	org	34.022	23.151	30.341	26.914	19.842
	Pemasangan Rambu-rambu	jumlah	778	778	778	778	778
	Rasio Izin Trayek	Angka	0,6	1,3	1,2	0,3	0,2
	Jumlah uji KIR angkutan umum	kendaraan	1858	1611	1555	1646	1590
	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	Unit	778	778	778	778	778
	Jumlah <i>Traffic Light</i>	Lokasi/Unit	4/24	4/24	5/29	5/29	5/29
	Panjang Pagar pengaman jalan	M	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	Jumlah Deliniator	Unit	542	542	542	542	542
	Panjang Marka jalan	m	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah <i>Warning Light</i>	Unit	24	24	24	24	24
	Jumlah <i>Traffic Cone</i>	Unit	156	156	156	156	156
	Panjang Median jalan	m	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83
2.3.1.16	Komunikasi dan Informatika						
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	persen	NA	83,33%	100%	NA	NA
	Cakupan layanan telekomunikasi	Angka	NA	NA	NA	0,71	NA
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Angka	0,5	0,57	0,63	0,71	0,81
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Angka	0,5	0,57	0,63	0,71	0,82
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	59,93%	64,03%	64,03%	64,81%	65,12%
2.3.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
	Pertumbuhan Koperasi Aktif	Unit	97	100	95	101	104
	Koperasi Tidak Aktif	Unit	12	14	12	17	17
	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	13975	14158	14489	15069	15248
	Jumlah Usaha Mikro (Unit)	Unit	22006	22731	23156	23747	25077
	Persentase Peningkatan Unit Usaha Mikro	%	2	3,29	1,87	2,55	5,6
1.3.1.18	Penanaman Modal						
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	118,33	104,73	140,86	228,86	196,35
	Jumlah seluruh PMA/PMDN	Angka	3	3	7	7	6
	Jumlah Sebaran Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN	Orang	355	314	986	1602	1178
	Realisasi Investasi PMA	Rupiah	8.798.445.445	4.861.679.153	37.159.735.744	29.315.279.977	120.875.225.604
	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	100.263.942.525	132.081.307.264	425.296.739.847	612.922.774.396	296.206.774.396
1.3.1.19	Kepemudaan dan Olahraga						
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persentase	55	59	67	70	100
	Persentase Wirausaha Muda	persentase	7	9	9	15	13
	Cakupan Pembinaan Olahraga	persentase	0	4	10	10	12
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Angka	15	18	20	20	47
	Jumlah Atlet Berprestasi	Angka	52	61	56	74	29
	Target Prestasi Olahraga	Angka	13	15	15	13	4
	Capaian Prestasi Olahraga	Angka	12	11	11	11	3
	Jumlah Lapangan Olahraga	Angka	178	159	159	159	256
	Rasio Jumlah Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	Angka	0,95	0,83	0,81	0,8	1,25
1.3.1.20	Statistik						
	Buku Bangka Barat dalam Angka	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku PDRB Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dokumen	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada
1.3.1.20	Kebudayaan						
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Angka	N/A	4	5	3	4

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Cagar Budaya Kabupaten Barat yang Dilestarikan	Angka	N/A	6	12	18	24
1.3.1.21	Perpustakaan						
	Jumlah Perpustakaan	Angka	218	224	221	221	280
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Angka	0,33	0,56	0,14	0,26	0,05
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Angka	0,44	0,42	0,41	0,41	0,41
	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Angka	1,17	1,16	1,12	1,11	1,12
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Angka	69,347	93,862	20,053	43,714	9,322
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Angka	8,17	8,714	8,991	9,246	9,69
1.3.2	Fokus Pelayanan Urusan Pilihan						
1.3.2.1	Kelautan dan Perikanan						
	Perikanan Tangkap	Juta Rupiah	239.730,422	449,027	547,851	591,662	632,902
	Budidaya Air Tawar	Juta Rupiah	597,84	635,06	1,697	2.290,14	2.747,87
	Budidaya Air Laut	Juta Rupiah	6,548	1.990,64	2,314	8.599,61	30,534,70
1.3.2.2	Pariwisata						
	Kunjungan Wisatawan	Orang	48,644	109,174	216,256	136,252	67,648
	PAD Sektor Pariwisata	persen	2,63	2,77	3,89	3,53	5,12
1.3.2.4	Pertanian						
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persentase	15,17	14,11	12,06	11,57	13,3
	Kelapa sawit	ton	144.556,56	172.927,93	276.789,88	165.024,89	220.512,82
	Lada	ton	4.724,17	4.905,94	5.586,09	3.654,18	3.456,92
	Karet	ton	14.636,27	13.621,54	17.572,63	11.185,06	12.053,93
	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia	ekor/kg	2.353/161.178	2.494/205.250	2.042/263.755	2.213/314.335	1.971/258.551
1.3.2.7	Perindustrian						
	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
1.3.2.8	Transmigrasi						
1.3.3	Fokus Layanan Urusan Penunjang						
1.3.3.1	Perencanaan Pembangunan						
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ tidak 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ tidak 1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	92,50	87,92	95,50	97,31	92,76
	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	%	98,38	95,05	99,53	97,24	98,05
1.3.3.2	Keuangan						
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	opini	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
	Persentase SILPA	%	0,86%	4,70%	9,61%	10,53%	1,47%
	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,36%	23,70%	23,75%	25,53%	24,50%
	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	12,94%	14,91%	14,97%	13,20%	14,89%
1.3.3.3	Kepegawaian, Serta Pendidikan, dan Pelatihan						
	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	84,65	77,84	50	51,55	64,17
1.3.3.4	Sekretariat Daerah						
	Reformasi Birokrasi	indeks	63,37	60,65	74,87	45,24	45,94
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Pelayanan Publik	Angka	79,75	81,02	81,32	78,62	80,92
1.3.3.5	Penelitian dan Pengembangan						
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100	100	100	100	100
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	n.a.	75	66,67	83,33	50
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	n.a.	n.a.	n.a.	3,33	3,33
1.3.3.6	Pengawasan						
	Tindak lanjut temuan	persen	100	100	100	100	100
	Jumlah temuan BPK	temuan	14	24	16	33	12
	Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	-
	Nilai SAKIP daerah	Nilai	60,24	65,44	68,65	69,24	69,82
1.3.3.7	Sekretaris Dewan						
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase raperda yang disetujui menjadi perda	Persen	85	70	133,33	78,57	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
A	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
	Rata-rata Pengeluaran perkapita non makanan perbulan Menurut Kelompok Komoditas (%)	Persen	48	48	48,71	47,92	46,57
B	Fokus Wilayah/Infrastruktur						
	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan		1:37	1:88	1:199	1:205	1:232
C	Fokus Iklim Berinvestasi						
	Perkembangan Angka Kriminalitas per 1000 Penduduk						
	Jumah Tindak Kriminal	Angka	277	317	324	265	232
	Angka Kriminalitas per 1000 penduduk	Angka	1,5	1,6	1,6	1,3	1,1
D	Fokus Sumber Daya Manusia						
	Jumlah SDM di Kabupaten Bangka Barat yang Berkualifikasi S-1, S-2, dan S-3						
	Persentase minimal S1	Persen	1,9	1,79	2,01	2,03	2,16
	Tingkat Ketergantungan						
	Rasio Ketergantungan	Angka	50,63	45,15	49,09	50,78	48,30



pesona
Indonesia



#ayokebangkabar



BAB III

KONDISI EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH





3.1 Ekonomi

3.1.1 Ekonomi Global

Pandemi Covid-19 berdampak sangat luar biasa (*extraordinary*) terhadap kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Dikatakan sangat luar biasa karena dampaknya terhadap kemandekan mobilitas manusia dan aktivitas perekonomian dunia. Bahkan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dunia dan di banyak negara, kepanikan dan ketidakpastian pasar keuangan, serta banyaknya penduduk jatuh dalam kemiskinan. Selain itu, makna mendalam sangat luar biasa, karena kompleksitas permasalahan yang memerlukan respons kebijakan yang demikian sulit, baik dari sisi kesehatan, stimulus fiskal, stimulus moneter, dan juga sektor keuangan. Pandemi Covid-19 yang menyerang mobilitas manusia, dan karenanya mobilitas ekonomi, sehingga berdampak pada resesi ekonomi dan kemudian berimbas ke sektor moneter dan keuangan.

Berbagai kebijakan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya pula aktivitas perekonomian, khususnya pada triwulan II-2020. Penjualan ritel menurun dan karenanya berdampak pada menurunnya konsumsi, produksi, dan investasi volume perdagangan internasional juga menurun karena terganggunya mata rantai produksi global (*global supply chains*), yang selama ini didominasi oleh Tiongkok. Aktivitas ekonomi kemudian



berangsur-angsur membaik sejak triwulan III-2020 seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia, meskipun masih perlu waktu untuk pulih seperti pada kondisi sebelum Covid-19. Kinerja perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan, dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2021. Setelah kontraksi pada triwulan II- 2020, aktivitas perekonomian dunia mulai meningkat meskipun masih dibayangi risiko gelombang kedua (*second wave*) pandemi Covid-19.

Perbaikan ekonomi berbeda dari satu negara ke negara lain, tergantung pada besarnya stimulus fiskal dan moneter, serta kesuksesan penanganan Covid-19 dan meningkatnya mobilitas manusia. Pemulihan ekonomi global terlihat pada peningkatan beberapa indikator dini bulan Oktober 2020, seperti mobilitas masyarakat global, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur dan Jasa di beberapa negara, serta keyakinan konsumen di AS dan Eropa. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga meningkat. Ke depan, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut dengan pertumbuhan 5,0% pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8% pada tahun 2020 seperti tampak pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ekonomi Global: Pertumbuhan, Volume Perdagangan dan Harga Komoditas

	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi Dunia	3,6	2,8	-3,8	5,0
Negara Maju	2,2	1,6	-4,9	4,0
Amerika Serikat	2,9	2,2	-3,8	4,3
Euro Area	1,9	1,3	-7,2	5,0
Jepang	0,3	0,7	-5,7	2,5
Negara Berkembang	4,5	3,7	-2,9	5,6
Tiongkok	6,7	6,1	2,1	7,8
India	6,1	4,2	-8,8	8,2
Amerika Latin	1,1	0,0	-7,5	3,1
Volume Perdagangan Dunia	3,8	-0,4	-6,3	4,4
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-2,8	-3,0	-5,8	4,0

sumber: *World Economic Outlook Database Oktober 2020, Proyeksi Bank Indonesia*



3.1.2 Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 juga berdampak luar biasa pada kesehatan, ekonomi, dan keuangan Indonesia, terutama pada triwulan II-2020. Pertumbuhan ekonomi nasional membaik sejak triwulan III-2020 dan akan meningkat tinggi pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi sejalan dengan realisasi stimulus fiskal, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan membaiknya permintaan global.

Ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 tumbuh sebesar 5,05% (q-to-q) dari kontraksi 4,19% (q-to-q), atau kontraksi pertumbuhan menurun menjadi 3,49% (y-on-y) dari 5,32% (y-on-y) pada triwulan sebelumnya. Realisasi stimulus Pemerintah meningkat terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global terutama dari AS dan Tiongkok, tercatat pada sejumlah komoditas seperti besi dan baja, *pulp* dan *waste paper*, serta tekstil dan produk tekstil.

Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,7%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan IV-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19% (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan



terdalam sebesar 7,21%. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 27,15%.

Pemulihan perekonomian global yang mulai terlihat pada triwulan IV 2020 diperkirakan berlanjut dan semakin baik pada 2021. Sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, seperti mobilitas masyarakat, penjualan eceran nonmakanan dan *online*, Indeks Kinerja Manufaktur, serta pendapatan masyarakat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Secara keseluruhan tahun 2021, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8%.¹

Ekonomi Indonesia di triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,12%. Sementara itu dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi non profit yang melayani rumah tangga menjadi komponen yang mengalami kontraksi sebesar 4,35%.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07% (y-on-y). Dari sisi produksi,

¹ Bank Indonesia, 2020, Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2020.



Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Dengan demikian Indonesia berhasil membawa ke zona positif pertumbuhan, setelah berada dalam tekanan resesi akibat dampak Covid-19. Salah satu strategi yang cukup berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga.

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Nasional Tahun 2020—2024

Berdasarkan RPJMN 2020—2024, perekonomian Indonesia tahun 2020—2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut.

a. Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6% dan 3,8% per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa.

b. Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3% per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada



kisaran 5,0%. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara *peers*.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah²: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

c. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Digital teknologi juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui *distance learning*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *fin-tech*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Studi dari Mckinsey memperkirakan 60% jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi³.

Di Indonesia diperkirakan 51,8% potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis

²Narasi RPJMN IV 2020—2024.

³Narasi RPJMN IV 2020—2024.



online belum dibarengi dengan upaya pengoptimalan penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat lintas negara.

d. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

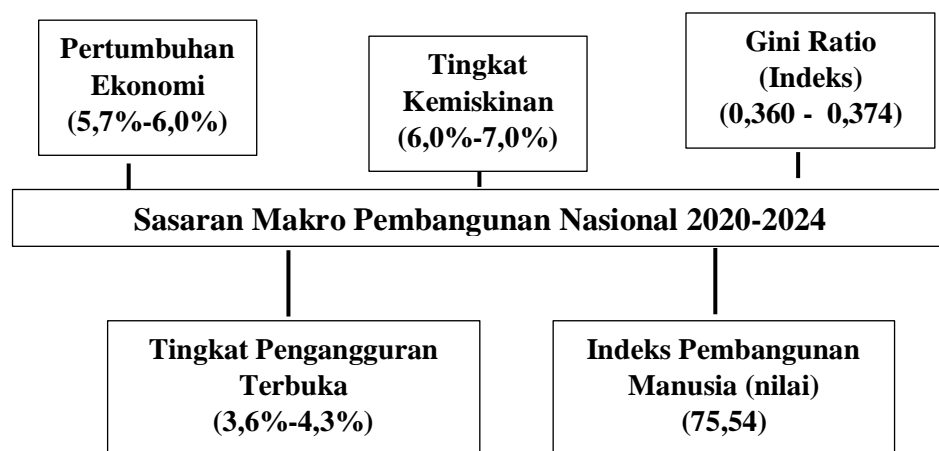
Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0% pada tahun 2000 menjadi 21% pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3% PDB, sementara beberapa negara *peers* sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

3.1.2.2 Sasaran Perekonomian Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020—2024, Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.



Kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan perbaikan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 6,0–7,0% dan 3,6-4,3% pada tahun 2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374 pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.



Gambar 3.1 Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024
sumber: RPJMN 2020–2024

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan LNPRT) diharapkan akan tumbuh rata-rata 5,4–5,6% per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi pemerintah akan tumbuh rata-rata 4,7-4,9% per



tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020—2024 terutama akan didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 6,6–7,0% per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) akan didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan EoDB Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2018 menjadi menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4% PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan dorongan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,7–14,8% PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7–12,7% PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Adapun, kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan



insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Dorongan stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara akan mencapai rata-rata 15,8-16,8% PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 9,9 – 10,3% PDB per tahun dan TKDD sebesar 6,0–6,5% PDB. Defisit akan dijaga di bawah batas yang diperbolehkan undang-undang menjadi rata-rata (2,2) – (2,0)% PDB per tahun dengan keseimbangan primer yang mendekati nol, sebesar rata-rata (0,3) – (0,2)% PDB per tahun. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30% PDB.

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah. Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) Meningkatkan produktivitas terutama pasca panen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional, serta menurunkan disparitas harga antarwaktu; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) Meningkatkan kualitas statistik.

Sepanjang 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan kebijakan moneter *pre-emptive* dan *ahead the curve* oleh bank sentral serta sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah diharapkan berjalan beriringan



dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di tiap wilayah diharapkan dapat selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan permasalahan yang unik dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada Jawa dan Sumatera. Wilayah di luar Jawa dan Sumatera diperkirakan sudah dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7–6,0% per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp36.595,6–37.447,6 triliun sepanjang tahun 2020–2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6–13,8% dan 7,6–7,9%, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Untuk membiayai kebutuhan investasi tahun 2020–2024, dibutuhkan upaya pendalaman pasar keuangan, terutama non perbankan, peningkatan akses jasa keuangan (inklusi keuangan), dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Regional Sumatera target pembangunan Wilayah tahun 2024 adalah 6,0 lebih tinggi dari target yang ditetapkan untuk wilayah Jawa-Bali, sedangkan untuk (*share*) ekonomi Regional (% per PDRB) 2024 untuk wilayah Sumatera mencapai 20,9 tertinggi kedua setelah Jawa-Bali. Kebutuhan investasi ditargetkan 251,1 Triliun Rupiah pada tahun 2024, tertinggi nomor dua setelah Jawa-



Bali, dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Target tingkat kemiskinan pada tahun 2024 untuk wilayah Sumatera adalah 7,1%. Adapun untuk Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 ditargetkan 3,6%.

3.1.3 Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,30%, turun dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,32%. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT).

Adanya pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama lebih dari satu tahun telah mempengaruhi perekonomian dalam skala lokal, nasional maupun global. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah satu tahun lebih masa pandemi masyarakat sudah mulai terbiasa menerapkan adaptasi kebiasaan baru sehingga secara umum membuat perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bergeliat. Pada tahun 2021 berdasarkan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di triwulan I dan II menunjukkan kenaikan yang signifikan dari beberapa indikator makro, yakni laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I sebesar 0,97% yang merupakan provinsi di wilayah Sumatera yang tumbuh positif.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan II-2021 dibandingkan triwulan II-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,85%, meningkat bila dibandingkan capaian triwulan II-2020 yang berkontraksi sebesar 4,95%. Dari sisi produksi, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, dimana lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Transportasi dan



Pergudangan. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri.

Pada September 2020, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,89% naik sebesar 0,36% dibandingkan kondisi Maret 2020 yang sebesar 4,53%⁴. Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,90%, naik sebesar 0,01 poin persen dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 4,89%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 3,43% naik menjadi 3,57% pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 6,75% mengalami penurunan menjadi 6,63% pada Maret 2021.

Selama periode September 2020–Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 1,50 ribu orang (dari 28,38 ribu orang pada September 2020 menjadi 29,84 ribu orang pada Maret 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,8 ribu orang (dari 43,67 ribu orang pada September 2020 menjadi 42,87 ribu orang pada Maret 2021).

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kepulauan Bangka Belitung yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,257. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan *Gini Ratio* Maret 2020 yaitu 0,262 atau turun sebesar 0,005 poin. Pada Maret 2021, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 25,19%. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 24,64%, sementara untuk daerah

⁴Profil Kemiskinan Kepulauan Bangka Belitung September 2020 No. 14/2/21/Th. XIV, 15 Februari 2021.



perdesaan sebesar 27,05%, yang berarti baik di perkotaan maupun di perdesaan masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung secara rata-rata mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020, IPM Kepulauan Bangka Belitung mencapai 71,47. Angka ini meningkat sebesar 0,17 poin atau tumbuh 0,24%. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang mampu tumbuh sebesar 0,89%, capaian pembangunan manusia pada tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup signifikan.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 756.874 orang, naik 18.237 orang dibanding Agustus 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,10% poin. Tingkat Pengangguran Terbuka bulan Februari 2021 sebesar 5,0% turun 0,21% poin dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 718.693 orang, meningkat sebanyak 18.812 orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan (2,78% poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,91% poin). Sebanyak 364.628 orang (50,73%) bekerja pada kegiatan informal, turun 2,20% poin dibanding Agustus 2020. Sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sasaran Makro Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021, 2022, dan 2025

Makro	Tahun		
	2021*	2022*	2025**
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,55	6,5
Angka Kemiskinan	5	5	N/A
TPT	5,5	5,6	N/A
Gini Ratio	0,278	0,28	0,21

sumber: *Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022;

**Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005–2025



3.1.2 Ekonomi Kabupaten Bangka Barat

Proyeksi kerangka ekonomi sangat diperlukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan proyeksi ekonomi makro ditetapkan berdasarkan perilaku 5 tahun sebelumnya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian saat ini maupun prediksinya 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam memproyeksikan angka-angka tersebut, selain berdasarkan kondisi ekonomi Kabupaten Bangka Barat sebelumnya di tahun 2016-2020 yang telah di bahas pada BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah, juga berdasarkan kondisi Global, Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Proyeksi pertumbuhan nilai PDRB ADHK

Produk domestik Bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris disebut *Gross Domestic Product*, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, sedangkan untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi/Kabupaten digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Domestic Regional Product*).

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit), indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.



Berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK lima tahun sebelumnya, maka ditetapkan proyeksi nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 seperti tabel 3.3.

Tabel 3.3 Proyeksi Nilai PDRB ADHK
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

No	Kategori	Proyeksi PDRB ADHK (juta rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian	1.369.385	1.395.393	1.421.402	1.447.410	1.473.419	1.499.427
B	Pertambangan dan Penggalian	1.067.391	1.081.984	1.096.576	1.111.169	1.125.762	1.140.355
C	Industri Pengolahan	5.267.679	5.590.532	5.913.384	6.236.237	6.559.090	6.881.943
D	Listrik, dan gas	5.787	6.096	6.404	6.712	7.020	7.329
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	741	766	790	815	840	865
F	Konstruksi	639.335	674.783	710.232	745.680	781.129	816.577
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.256.706	1.322.533	1.388.359	1.454.185	1.520.011	1.585.838
H	Transportasi dan Pergudangan	83.809	88.587	93.364	98.141	102.918	107.696
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114.695	119.625	124.554	129.484	134.414	139.344
J	Informasi dan Komunikasi	51.273	54.522	57.770	61.018	64.266	67.515
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41.208	42.967	44.726	46.485	48.244	50.003
L	Real Esta	217.454	226.223	234.991	243.760	252.529	261.298
M,N	Jasa Perusahaan	12.683	13.092	13.500	13.909	14.318	14.727
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425.655	450.581	475.508	500.434	525.361	550.287
P	Jasa Pendidikan	172.102	183.449	194.795	206.142	217.489	228.836
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.103	87.137	92.170	97.203	102.236	107.270
R,S,T,U	Jasa lainnya	29.942	31.621	33.299	34.977	36.655	38.334
PDRB		10.837.946	11.369.885	11.901.823	12.433.761	12.965.699	13.497.638

sumber : data diolah, 2021

Tabel di atas merupakan proyeksi nilai PDRB ADHK 2021-2026. Nilai PDRB menunjukkan gambaran perkembangan produksi riil barang



dan jasa oleh kegiatan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat, yang diprediksi akan diperoleh mulai tahun 2021-2026. Proyeksi pertumbuhan PDRB ADHK atau Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

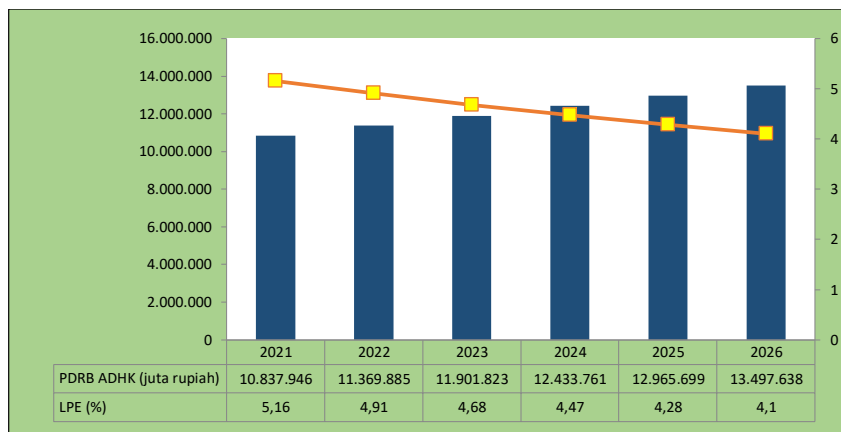
No	Kategori	Proyeksi Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80	1,77
B	Pertambangan dan Penggalian	1,39	1,37	1,35	1,33	1,31	1,30
C	Industri Pengolahan	6,53	6,13	5,77	5,46	5,18	4,92
D	Listrik, dan gas	5,63	5,33	5,06	4,81	4,59	4,39
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,46	3,34	3,23	3,13	3,04	2,95
F	Konstruksi	5,87	5,54	5,25	4,99	4,75	4,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	5,24	4,98	4,74	4,53	4,33
H	Transportasi dan Pergudangan	6,04	5,70	5,39	5,12	4,87	4,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	4,30	4,12	3,96	3,81	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	6,76	6,34	5,96	5,62	5,32	5,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	4,27	4,09	3,93	3,78	3,65
L	Real Esta	4,20	4,03	3,88	3,73	3,60	3,47
M,N	Jasa Perusahaan	3,33	3,22	3,12	3,03	2,94	2,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,22	5,86	5,53	5,24	4,98	4,74
P	Jasa Pendidikan	7,06	6,59	6,19	5,82	5,50	5,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,13	5,78	5,46	5,18	4,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,94	5,60	5,31	5,04	4,80	4,58
PDRB		5,16	4,91	4,68	4,47	4,28	4,10

sumber : data diolah, 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 diproyeksikan dari sisi nilai akan terus mengalami peningkatan walaupun dari sisi persentase mengalami penurunan. Tahun 2021 diperkirakan mencapai 5,16% dengan nilai Rp10.837.948. Selanjutnya di tahun 2022 pertumbuhan



ekonomi mencapai 4,91% dengan nilai yang meningkat Rp11.369.885,-. Tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,68% dengan nilai Rp11.901.823,-, di tahun 2024 mencapai pertumbuhan ekonomi 4,47% dengan nilai Rp12.433.761,- disusul tahun 2025 mencapai 4,28% dengan nilai Rp12.965.699,- dan di akhir tahun RPJMD berada pada angka pertumbuhan ekonomi 4,1% dengan nilai 13.497.638,-. Walaupun proyeksi angka pertumbuhan dari tahun 2021-2026 mengalami penurunan tetapi nilainya tetap meningkat hal ini dapat dilihat pada Tabel Proyeksi Pertumbuhan Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026.



Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Nilai PDRB ADHK dan LPE
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

Sumber : data diolah, 2021

b. Proyeksi Pertumbuhan Nilai PDRB ADHB

PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan peranan sektor ekonomi dalam suatu daerah, sektor-sektor yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Dengan demikian PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Jika dilihat dari proyeksi PDRB ADHB menunjukkan bahwa kategori Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi



Mobil dan Sepeda Motor, serta Konstruksi ke depan akan tetap menjadi sektor unggulan di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 3.5 Proyeksi Nilai PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat 2021—2026

No	Kategori	Proyeksi Nilai PDRB ADHB (juta rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Pertanian	1.873.667	1.976.719	2.095.322	2.231.518	2.387.724	2.566.804
B	Pertambangan dan Penggalian	967.908	929.698	891.489	853.279	815.070	776.860
C	Industri Pengolahan	6.082.654	6.429.064	6.775.473	7.121.882	7.468.291	7.814.701
D	Listrik, dan gas	12.734	13.865	14.995	16.126	17.257	18.388
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.230	1.289	1.347	1.406	1.465	1.524
F	Konstruksi	1.147.089	1.241.656	1.336.223	1.430.790	1.525.357	1.619.924
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.019.576	2.157.513	2.295.451	2.433.388	2.571.326	2.709.263
H	Transportasi dan Pergudangan	133.767	142.804	151.841	160.878	169.915	178.952
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	200.223	212.849	225.475	238.101	250.727	263.353
J	Informasi dan Komunikasi	65.516	70.016	74.515	79.015	83.515	88.015
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	67.677	72.235	76.792	81.349	85.906	90.464
L	Real Esta	333.760	351.475	369.189	386.903	404.617	422.332
M,N	Jasa Perusahaan	21.476	22.637	23.797	24.957	26.117	27.278
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	740.578	787.233	833.889	880.544	927.200	973.855
P	Jasa Pendidikan	303.994	325.480	346.965	368.451	389.937	411.423
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.135	141.778	151.422	161.065	170.709	180.352
R,S,T,U	Jasa lainnya	49.611	53.322	57.032	60.743	64.454	68.165
PDRB		14.153.593	14.929.628	15.721.215	16.530.395	17.359.585	18.211.648

sumber : data diolah, 2021

Peningkatan nilai PDRB ADHB akan ditopang oleh industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri pengolahan timah, sedangkan untuk industri pengolahan non timah diprediksi masih dari pengolahan CPO. Kategori pertanian juga diproyeksikan akan meningkat. Hal ini dikarenakan adanya investasi udang vaname, pembibitan udang vaname dan juga sektor peternakan sapi yang telah menjadi *cluster* terpilih dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Selanjutnya untuk kategori industri pengolahan dan konstruksi yang mampu mendorong peningkatan nilai PDRB ADHB yaitu dengan dioperasikannya Kawasan Industri Tanjung Ular di Bangka Barat akan meningkatkan investasi di industri pengolahan dan konstruksi yang selanjutnya akan mampu meningkatkan produksinya. Luas kawasan ini sebesar 588,25 ha diharapkan mampu meningkatkan kategori konstruksi dan memberikan *multiplier effect* kepada sektor-sektor lainnya.

Tabel 3.6 Master Plan Rencana Pembagian Kapling Lahan
Kawasan Industri Tanjung Ular

No	Penggunaan Ruang	Luas	No	Penggunaan Ruang	Luas
1.	RDTC	8,1262 Ha	14.	Stockpile	22,0801 Ha
2.	Pergudangan	15,4560 Ha	15.	PLTU	8,4720 Ha
3.	Pelabuhan	8,8206 Ha	16.	IPAL & WTP	4,2374
4.	Pusat Perkantoran pengelola	11,9946 Ha	17.	Gues House	2,4060 Ha
5.	Pusat komersial dan Jasa	15,909 Ha	18.	Rumah Susun	2,0861 Ha
6.	Fasilitas Umum	24,6317 Ha	19.	Perumahan umum	8,0604 Ha
7.	Fasilitas Sosial	5,7217 Ha	20.	Perumahan karyawan	5,0168 Ha
8.	Industri Kecil Menengah (IKM)	7,3338 Ha	21.	Folder	0,0201 Ha
9.	Industri Logam Timah	20,1905 Ha	22.	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	17,8183 Ha
10.	Industri Hilirisasi Karet	21,1852 Ha	23.	Pemukiman Masyarakat	45,4082 ha
11.	Industri Hilirisasi CPO	29,1736 Ha	24.	Perkebunan	39,4022Ha
12.	Industri Perikanan	23,9652 Ha	25.	Kawasan Industri kimia Timah	41,2373 Ha
13.	Kawasan Pengembangan Industri	203,4324 Ha	Jumlah Luas Kawasan Industri		588,2500 Ha

sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat, 2021

Proyeksi pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat 2021-2026, diperoleh dengan melihat rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2016-2019 ditambah dengan pertumbuhan di tahun 2020. Untuk kategori Pertanian tahun 2021 proyeksi pertumbuhannya 5,00% kemudian di tahun 2022 menjadi 5,50% terus bertumbuh di tahun 2023 6,00%. Tahun 2021 6,50%, tahun 2025 menjadi 7,00% dan 2026 menjadi 7,50%.



Peningkatan yang signifikan dari kategori Pertanian menjadi salah satu kategori unggulan di Bangka Barat, dimana dari sub kategori perikanan budidaya yaitu udang vaname diharapkan mampu meningkatkan produksinya karena investasi di kategori ini diprediksi akan meningkat.

Berdasarkan data proyeksi tersebut, kategori Industri Pengolahan tetap akan menjadi primadona yang menopang perekonomian Kabupaten Bangka Barat dengan angka 42,98% pada tahun 2021 dan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Setelah itu, kontribusi terbesar selanjutnya adalah di Sektor Tersier yaitu Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Angka kontribusinya di tahun 2021 diproyeksikan mencapai 14,27% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2026 mencapai 14,88%. Adapun kontributor yang ketiga terbesar adalah Sektor Primer yaitu kategori Pertanian, dengan angka proyeksi mulai tahun 2021 sebesar 13,24% dan semakin meningkat hingga tahun 2026 mencapai 14,08%.

Tabel 3.7 Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

No	Kategori	Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sektor Primer							
A	Pertanian	13,24	13,24	13,33	13,50	13,75	14,09
B	Pertambangan dan Penggalian	6,84	6,23	5,67	5,16	4,70	4,27
Sektor Sekunder							
C	Industri Pengolahan	42,98	43,06	43,10	43,08	43,02	43,91
D	Listrik, dan gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,10	8,32	8,50	8,66	8,79	8,89
Sektor Tersier							
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,27	14,45	14,60	14,72	14,81	14,88
H	Transportasi dan Pergudangan	0,95	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98



No	Kategori	Proyeksi Kontribusi PDRB ADHB (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,43	1,43	1,44	1,44	1,45
J	Informasi dan Komunikasi	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49	0,50
L	Real Esta	2,36	2,35	2,35	2,34	2,33	2,32
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan SosialWajib	5,23	5,27	5,30	5,33	5,34	5,35
P	Jasa Pendidikan	2,15	2,18	2,21	2,23	2,25	2,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
R,S, T,U	Jasainnya/	0,35	0,36	0,36	0,37	0,37	0,37
PDRB		100	100	100	100	100	100

sumber : data diolah, 2021

c. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sangat penting dalam sebuah perekonomian karena mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Selain mengurangi pendapatan baik pendapatan individu maupun pendapatan daerah dari sektor pajak, selain itu juga mengurangi daya beli masyarakat sehingga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang masuk dalam golongan usia kerja atau produktif (16-64 tahun) baik yang telah mempunyai pekerjaan, dalam proses mencari kerja ataupun sedang menyiapkan usaha baru. Apabila golongan usia kerja mengalami kenaikan maka jumlah angkatan kerja juga akan meningkat. Angkatan kerja yang banyak diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.



Jumlah angkatan kerja yang tinggi tidak selalu memberi dampak positif terhadap kesejahteraan. Jika jumlah angkatan kerja terus bertambah, sementara ketersediaan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, maka akan memicu peningkatan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu memperluas lapangan pekerjaan dengan investasi.

Angkatan Kerja setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebanyak 103.753 orang, tahun 2022 sebanyak 105.224 orang, tahun 2023 sebanyak 106.696 orang, tahun 2024 sebanyak 108.167 orang, tahun 2025 sebanyak 109.639 orang dan pada tahun 2026 sebanyak 111.111 orang.

Jumlah pengangguran setiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2021 sebanyak 4.177 orang, tahun 2022 sebanyak 4.144 orang, tahun 2023 sebanyak 4.110 orang, tahun 2024 sebanyak 4.077 orang, tahun 2025 sebanyak 4.044 orang dan pada tahun 2026 sebanyak 4.011 orang.

Seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi, diharapkan tingkat pengangguran akan semakin menurun. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan makin membaiknya investasi dan membuka lapangan kerja. Pada tahun 2020 angka TPT di Kabupaten Bangka Barat sebesar 4.12, sehingga diproyeksikan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 4.03%, pada tahun 2022 menjadi 3,94 %. Pada tahun 2023 akan mengalami penurunan sebesar 3.85%, 2024 mencapai 3,77%, 2025 menjadi 3,69% dan pada akhir tahun RPJMD 3,61%.



Tabel 3.8 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

Uraian	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	3,94	3,85	3,77	3,69	3,61
Angkatan kerja (orang)	103.753	105.224	106.696	108.167	109.639	111.111
Jumlah pengangguran (orang)	4.177	4.144	4.110	4.077	4.044	4.011

sumber : data diolah (2021)

3.2 Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah menjadi faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menerangkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;



- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Konsep dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan mengadopsi kepada peraturan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni Undang-Undang Nomor 33



Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Materi keuangan daerah meliputi kinerja keuangan masa lalu, analisis keuangan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan, dan sensitivitas keuangan daerah.

3.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa lalu

3.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016—2020

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat, meliputi: pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diuraikan dalam tabel 3.8. Pada periode 2016—2020, total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,25%, dari Rp835,80 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp805,05 miliar pada tahun 2020, sedangkan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 3,05%, dari Rp864,70 miliar pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp890,60 miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata belanja yang lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata pendapatan menunjukkan kemampuan mendanai mengalami penurunan.

Pada Tabel 3.8 dapat dilihat terdapat defisit anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp28,89 miliar dan ditutup defisit anggaran dengan surplus pembiayaan sebesar Rp37,01 miliar sehingga terdapat SiLPA tahun anggaran berkenaan sebesar Rp8,1 miliar. Di tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengalami surplus anggaran sebesar Rp32,32 miliar dan surplus pembiayaan sebesar Rp9,09 miliar sehingga terdapat SiLPA tahun anggaran berkenaan sebesar Rp41,42 miliar.

Begitu juga pada tahun 2018 dan 2019, terdapat surplus anggaran, yakni Rp46,79 miliar dan Rp19,01 miliar. Sementara untuk pembiayaan juga



terdapat surplus ditahun 2018 dan 2019, yakni Rp38,72 miliar dan Rp83,86 miliar, sehingga pada tahun 2018 dan 2019 terdapat SiLPA Tahun Anggaran Berkenan sebesar Rp86,52 miliar dan Rp102,87 miliar. Sementara itu, pada tahun 2020 kembali mengalami defisit anggaran yakni sebesar Rp85,54 miliar namun defisit ini dapat ditutup dengan surplus pembiayaan di tahun 2020 sebesar Rp100,04 miliar sehingga pada tahun 2020 masih terdapat SiLPA Tahun Anggaran Berkenan sebesar Rp14,49 miliar.

Tabel 3.9 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	PENDAPATAN	835.806.983.032	835.319.418.526	866.847.770.185	914.271.309.355	805.055.766.521	2,25%
04.01	Pendapatan Asli Daerah	52.662.192.020	78.486.881.529	69.765.373.035	67.746.468.419	51.908.135.042	1,04%
04.02	Dana Perimbangan	688.312.640.298	615.426.059.715	655.801.168.744	702.774.160.567	599.326.297.108	1,13%
04.03	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	94.832.150.714	141.406.477.282	141.281.228.406	143.750.680.369	153.821.334.371	14,44%
5	BELANJA	864.700.678.743	802.993.544.722	820.048.919.890	895.255.933.704	890.604.104.278	3,05%
05.01	Belanja Tidak Langsung	403.409.444.114	375.098.866.445	384.715.404.919	424.144.218.409	454.668.214.399	5,12%
05.02	Belanja Langsung	461.291.234.629	427.894.678.277	435.333.514.971	471.111.715.295	435.935.889.879	1,20%
	Surplus (Defisit)	-28.893.695.711	32.325.873.805	46.798.850.295	19.015.375.651	-85.548.337.756	
6	PEMBIAYAAN						
06.01	Penerimaan Daerah	38.513.604.650	10.595.302.015	42.721.283.064	86.864.125.424	103.046.051.213	88,17%
06.02	Pengeluaran Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	25,00%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	37.013.604.650	9.095.302.015	39.721.283.064	83.864.125.424	100.046.051.213	97,93%
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAN	8.119.908.939	41.421.175.819	86.520.133.359	102.879.501.075	14.497.713.457	

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021



a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, semua kelompok pendapatan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan total pendapatan daerah. Uraian pertumbuhan pada masing-masing kelompok pendapatan daerah selama periode tahun 2016—2020 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) PAD mengalami pertumbuhan sebesar 1,04% pertahun. Pada pos PAD ini terlihat adanya pertumbuhan yang sangat tinggi pada rata-rata pertumbuhan pajak daerah yang mencapai sebesar 13,88% pertahun, kemudian retribusi meningkat rata-rata pertumbuhan sebesar 4,91% pertahun dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69% pertahun, sementara untuk Lain-lain PAD yang sah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1,11%;
- 2) Dana perimbangan mengalami pertumbuhan moderat sebesar 1,13% selama periode 2016—2020, Bagi Hasil Pajak mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,27%, DAU mengalami pertumbuhan sebesar 0,16%, dan DAK mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar -10,44%;
- 3) Lain-lain Pendapatan daerah meningkat rata-rata pertumbuhan menjadi 12,71% pertahun, Pada pos ini seluruh komponen pendapatannya mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif, terutama pada pos Pendapatan Dana Hibah yang mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan hingga mencapai 41.396,59% diikuti dengan pos Dana Bagi Hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya yang mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 50,30%, sementara untuk Dana Penyesuaian dan Otonomi



Khusus mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan hingga 19,40% dan terakhir untuk pos Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya terdapat peningkatan rata-rata pertumbuhan sebesar 29,84%.

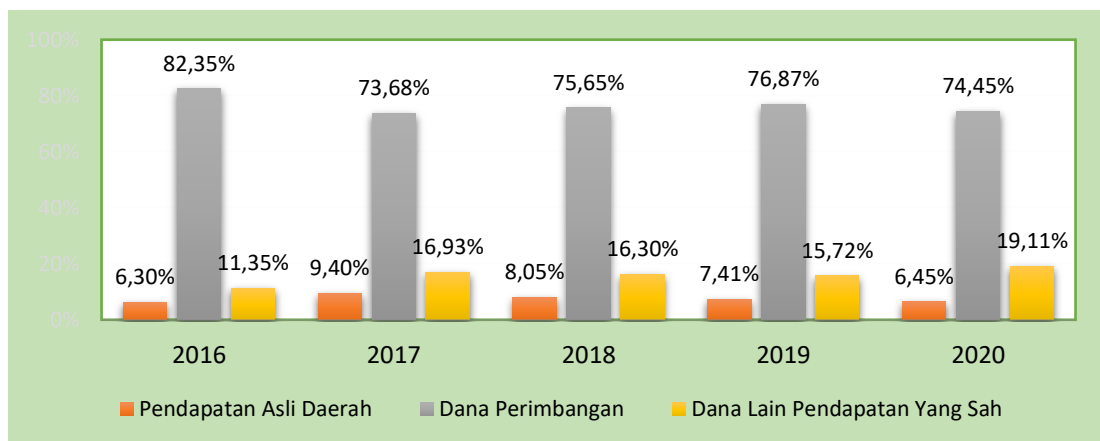
Tabel 3.10 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016—2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan	835.806.983.032	835.319.418.528	866.847.772.257	914.271.309.356	805.055.766.521	2,25%
01:01	Pendapatan Asli Daerah	52.662.192.020	78.486.881.529	69.765.373.035	67.746.468.419	51.908.135.042	1,04%
01:01:01	Pajak Daerah	13.482.175.394	17.582.166.054	27.367.198.725	21.936.235.354	20.587.992.764	13,88%
01:01:02	Retribusi Daerah	5.249.958.771	3.119.060.973	3.833.809.842	4.385.901.940	5.346.696.788	4,91%
01:01:03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	3.770.083.503	3.480.796.346	3.252.700.037	3.760.378.245	3.994.903.753	4,69%
01:01:04	Lain - lain PAD yang Sah	30.159.974.352	54.304.858.156	35.311.664.431	37.663.952.880	21.978.541.738	-1,11%
01:02	Dana Perimbangan	688.312.640.298	615.426.059.715	655.801.168.745	702.774.160.567	599.326.297.107	1,13%
01:02:01	Dana Bagi hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak	70.906.582.156	47.014.756.162	84.801.981.768	110.783.510.577	64.239.176.268	-1,27%
01:02:02	Dana Alokasi Umum	441.988.897.000	438.389.939.000	445.168.706.000	466.440.075.000	425.158.892.000	0,16%
01:02:03	Dana Alokasi Khusus	175.417.161.142	130.021.364.553	125.830.480.976	125.550.574.990	109.928.228.840	-10,44%
01:03	Lain-Lain Pendapatan yang sah	94.832.150.714	141.406.477.284	141.281.230.477	143.750.680.369	153.821.334.371	12,71%
01:03:01	Pendapatan Dana Hibah	20.595.500	11.900.000	24.659.942.332	28.794.461.500	19.943.600.000	41396,59%
01:03:02	Dana Darurat	0	0	0	0	0	
01:03:03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.547.357.274	41.604.177.282	33.788.811.537	52.419.427.529	36.879.667.371	50,30%
01:03:04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	44.254.113.000	95.300.840.000	72.929.073.537	55.781.378.000	81.638.267.000	19,40%
01:03:05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.010.084.940	4.489.560.000	9.903.401.000	6.755.413.340	15.359.800.000	29,48%

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021



Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat masih tergantung pada dana perimbangan. Namun demikian, PAD secara perlahan mengalami peningkatan dari angka 6,30% di tahun 2016 menjadi 9,40% di tahun 2017, kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 8,05%, di akhir tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 7,41%. Pada akhir tahun 2020 PAD juga turun menjadi sebesar 6,45%. Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat disajikan dalam gambar 3. berikut.



Gambar 3.3 Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020
sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016–2020 (Data Diolah)

Selama periode tahun 2016—2020, pendapatan daerah yang telah dianggarkan pada saat penyusunan APBD hampir mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang ada selama lima tahun yaitu pada tahun 2016—2020. Dalam lima tahun terakhir realisasi pendapatan jika dirata-ratakan sebesar 96,19%. Data target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 secara rinci disajikan dalam tabel 3.11.



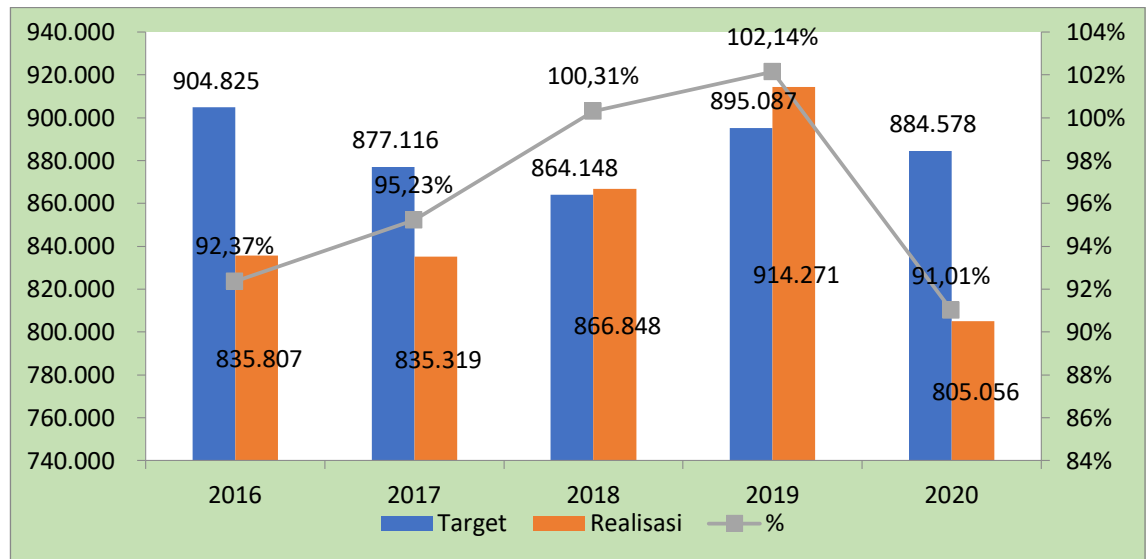
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016–2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Selisih (Rp)
1	2016	904.824.818.925,23	835.806.983.032,44	92,37%	-69.017.835.892,79
2	2017	877.115.990.239,70	835.319.418.527,80	95,23%	-41.796.571.711,90
3	2018	864.148.066.888,00	866.847.772.257,36	100,31%	2.699.705.369,36
4	2019	895.086.616.033,00	914.271.309.355,93	102,14%	19.184.693.322,93
5	2020	884.577.846.626,50	805.055.766.521,03	91,01%	-79.522.080.105,47
Total		4.425.753.338.712,43	4.257.301.249.694,56	96,19%	-168.452.089.017,87

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Fluktuasi pencapaian target pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan anggaran tahun 2016, anggaran pendapatan ditetapkan pada angka yang sangat optimis, karena dari lima tahun terakhir, anggaran pendapatan tahun 2016 adalah yang tertinggi dibanding tahun-tahun berikutnya, yakni sebesar Rp904,82 miliar, sementara pada tahun 2017 ditetapkan menjadi Rp877,11 miliar. Hal ini menunjukkan koreksi yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 ditetapkan dengan nilai sebesar Rp864,14 miliar dan ini merupakan anggaran pendapatan daerah terendah di periode 2016—2020. Seiring dengan membaiknya kinerja pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 2019 anggaran pendapatan ditetapkan menjadi Rp895,08 miliar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dan ditetapkan sebesar Rp884,57 miliar.

Perencanaan anggaran pendapatan secara keseluruhan menunjukkan pendekatan yang tepat, sehingga dalam pelaksanaan realisasi anggaran tidak meleset terlalu jauh dari anggaran yang diajukan. Hal ini terlihat dari realisasi serapan anggaran pendapatan yang mencapai rata-rata sebesar 96,19%.



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Serapan Anggaran Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Dari tabel 3.11 dan gambar 3.4 dapat dilihat pada tahun 2016, target pendapatan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan rendahnya pencairan Dana Alokasi Khusus, minimnya bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan target anggaran bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang tidak tercapai. Sementara pada tahun 2017, target pendapatan tidak tercapai disebabkan oleh minimnya hasil retribusi daerah serta rendahnya realisasi bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, rendahnya pencairan Dana Alokasi Khusus dan minimnya dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, sedangkan pada tahun 2020 realisasi pendapatan hanya tercapai sebesar 91% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi khusus akibat Pandemi Covid-19, hampir semua pos pendapatan tidak memenuhi target, kecuali pos Hasil retribusi daerah yang mendapatkan hasil positif melebihi target anggaran sebesar 102%, kondisi ini tidak terlepas dari meningkatnya retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan jasa untuk pemeriksaan Covid-19 terus meningkat.



b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara umum dari tahun 2016—2020, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Tabel 3.12 berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Jumlah nominal belanja daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2016 mencapai Rp864,70 miliar yang kemudian berkembang menjadi Rp890,60 miliar pada tahun 2020. Selama periode tersebut belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,05% pertahun.

Jika dilihat dari distribusi pertumbuhan belanja daerah terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada kedua pos belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 5,12%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,30% pertahun.

Seluruh pos belanja tidak langsung dalam periode tahun 2016—2020 mengalami peningkatan. Pos belanja pegawai mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,72% pertahun, hal ini perlu menjadi perhatian karena pada tahun 2017 terjadi penurunan belanja pegawai disebabkan oleh adanya pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berimplikasi terhadap pemindahan belanja pegawai guru SMA ke pemerintah provinsi. Namun, sejak tahun 2018—2020 terjadi tren peningkatan belanja pegawai



yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp45,91 miliar atau 17,70%. Untuk belanja hibah selama periode 2016—2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 61,45%, diikuti dengan belanja bantuan sosial yang mengalami pertumbuhan signifikan selama periode 2016–2020, yakni sebesar 206,62%.

Proporsi belanja untuk pelaksanaan kegiatan terlihat mengalami penurunan, dikarenakan adanya pemotongan anggaran belanja untuk lebih difokuskan kepada penanganan bencana Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan yang minus yaitu $-1,7\%$ pada pos belanja barang dan jasa, juga terjadi hal yang sama terhadap pos belanja modal mengalami tingkat pertumbuhan minus yaitu $-8,3\%$. Namun, terjadi peningkatan pertumbuhan pada pos belanja pegawai yang menembus hingga angka dua digit, yaitu sebesar 23,2%.

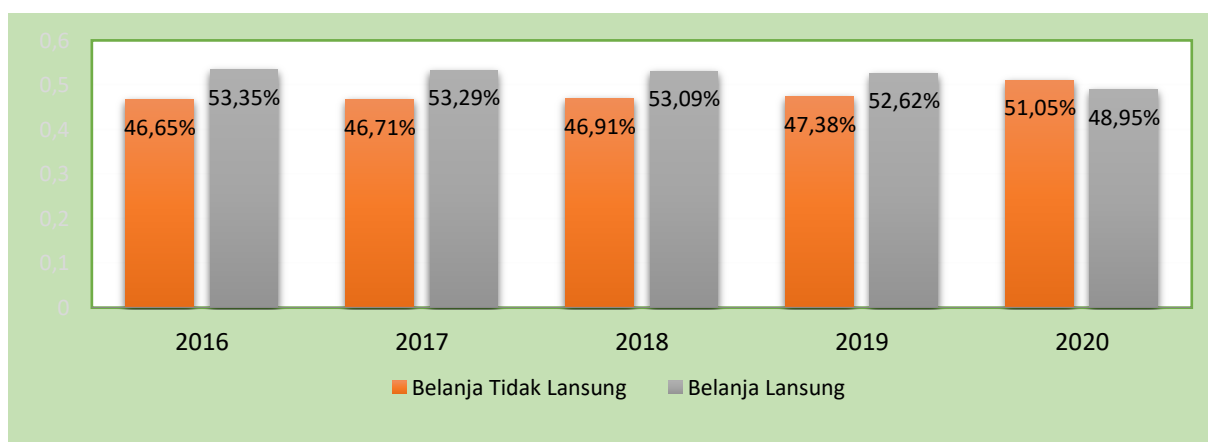
Tabel 3.12 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016—2020

No	Uraian	Realisasi					RATA-RATA
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA.2019	TA.2020	
0.0	BELANJA	864.700.678.742,92	802.993.544.723,88	820.048.919.899,50	895.255.933.705,14	890.604.104.280,22	3,05%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	403.409.444.113,45	375.098.866.447,32	384.715.404.928,70	424.144.218.409,65	454.668.214.401,36	5,12%
1.1	Belanja Pegawai	276.701.875.237,00	259.426.876.848,25	268.858.188.288,00	297.182.187.453,00	305.343.462.521,00	3,72%
1.2	Belanja Hibah	25.647.277.000,00	6.692.281.800,00	8.609.000.000,00	8.125.500.000,00	36.264.574.617,00	61,45%
1.3	Belanja Bantuan Sosial	51.425.000,00	189.664.500,00	1.990.255.000,00	2.058.632.000,00	117.368.000,00	206,62%
1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	1.995.372.175,00	2.220.000.000,00	2.149.999.999,00	3.125.000.000,00	2.632.212.275,00	9,71%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	98.175.286.701,80	105.283.743.297,00	102.294.322.431,94	113.652.898.956,00	110.301.902.764,00	8,33%
1.6	Belanja Tidak Terduga	838.208.000,00	1.286.300.000,00	813.639.200,00	0,00	8.694.222,00	
2	BELANJA LANGSUNG	461.291.234.629,47	427.894.678.276,56	435.333.514.970,80	471.111.715.295,49	435.935.889.878,86	1,30%
2.1	Belanja Pegawai	56.451.003.558,00	78.773.125.100,00	88.288.997.160,00	99.729.455.259,00	124.422.754.847,00	23,20%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	187.908.145.099,17	205.680.931.956,76	199.913.609.765,92	198.031.286.490,01	175.401.394.577,43	-1,70%
2.3	Belanja Modal	216.932.085.972,30	143.440.621.219,80	147.130.908.044,88	173.350.973.546,48	136.111.740.454,43	-8,30%

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021



Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja maka terlihat masih besarnya belanja daerah yang teralokasi pada belanja langsung. Selama periode 2016 sampai 2020, peranan belanja langsung mencapai kisaran angka sebesar 49% sampai dengan 53%, sedangkan proporsi belanja tidak langsung mencapai kisaran angka 47% sampai dengan 51%. Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2020 belanja tidak langsung lebih besar dibanding dengan belanja langsung, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran pada pos transfer pusat ke daerah khususnya dana alokasi umum kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan *refocusing* terkait dengan kejadian Covid-19.

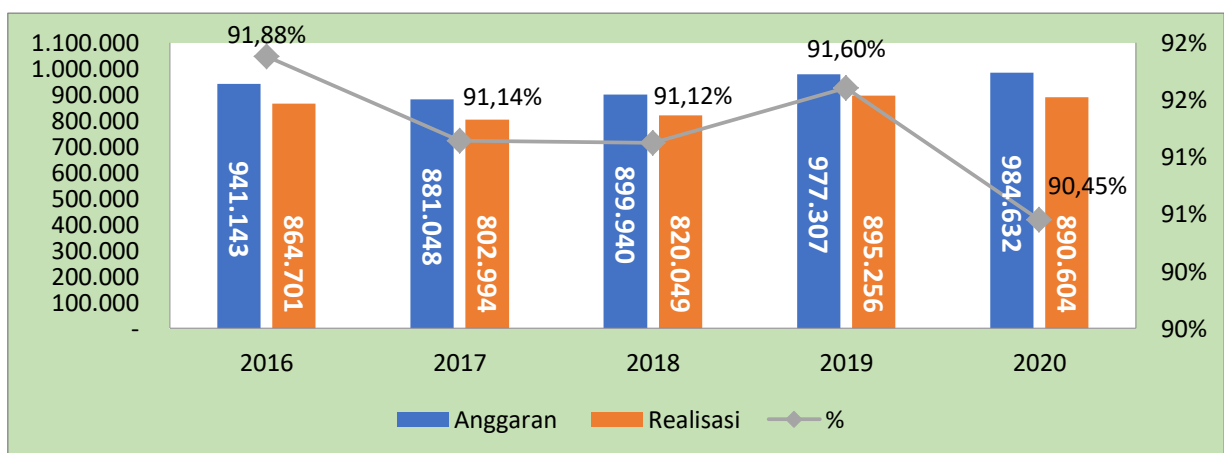


Gambar 3.5 Komposisi Belanja Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016—2020

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Selama periode tahun 2016—2020, rata-rata penyerapan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat sebesar 91,24%, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja daerah pada tahun 2016 sebesar Rp864 miliar atau 91,88% yang merupakan penyerapan anggaran belanja dalam lima tahun terakhir (2016-2020), pada tahun 2017

penyerapan anggaran belanja daerah sebesar Rp802 miliar atau 91,14%, di tahun 2018 penyerapan anggaran belanja daerah sebesar Rp820 miliar atau 91,12%, sementara tahun 2019 penyerapan mencapai Rp895 miliar atau mengalami kontraksi menjadi 91,60% dan pada tahun 2020 penyerapan anggaran belanja daerah Rp890 miliar atau sebesar 90,45% yang merupakan penyerapan anggaran terendah dalam lima tahun (2016—2020) sebagaimana pada gambar 3.6.



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Tabel 3.13 menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Barat sebagian besar bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terkait penyertaan modal daerah.



Tabel 3.13 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Penerimaan Pembiayaan:	38.513.604.650	10.595.302.015	42.721.283.064	86.864.125.424	103.046.051.213
1	Tahun anggaran sebelumnya	37.447.889.626	9.642.224.870	41.420.288.319	86.520.133.359	102.853.751.075
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.065.715.024	953.077.145	1.300.994.745	343.992.065	192.300.138
B	Pengeluaran Pembiayaan:	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
A-B	Pembiayaan Netto	37.013.604.650	9.095.302.015	39.721.283.064	83.864.125.424	100.046.051.213

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

3.2.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Bangka Barat pada periode tahun 2016—2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun



2016, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp1,45 triliun yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp1,28 triliun pada tahun 2017. Pada tahun 2018, nilai total aset kembali meningkat menjadi sebesar Rp1,41 triliun sementara pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,50 triliun dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1,39 triliun.

Faktor utama penyebab turunnya nilai total aset daerah pada tahun 2017 adalah pemberlakuan basis akrual akuntansi keuangan daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah, juga terdapat perubahan kebijakan yang menempatkan provinsi sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah menengah umum, sementara di tahun 2020 penyebab turunnya nilai total aset daerah disebabkan oleh jumlah PAD pada tahun 2020 yang minim, sehingga pos aset lancar khususnya Kas mengalami kontraksi dari Rp82,88 miliar di tahun 2019 turun menjadi Rp11,65 miliar di tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Fluktuasi nilai kewajiban dengan pihak ketiga dapat dilihat sebagai hal



yang wajar selama manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin profesional dan digunakan secara tepat untuk program yang relevan.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2016-2020 kecuali pada tahun 2017, nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Penurunan nilai ekuitas pada tahun 2017 disebabkan pemberlakuan basis akrual akuntansi keuangan daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah. Pada tahun 2020 nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terjadi defisit pelaksanaan operasional dan non operasional sebesar Rp75,27 M dan terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4,96 M (BPKAD, Laporan Keuangan 2020 *Unaudited*).

Tabel 3.14 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(DALAM JUTA RUPIAH)							
1.	ASET	1.456.326	1.282.167	1.411.226	1.508.975	1.397.709	-0,82%
1.1.	ASET LANCAR	91.940	110.084	197.242	245.580	91.717	-0,05%
1.1.1.	Kas	10.062	41.446	86.522	102.909	11.658	2,99%
1.1.2.	Piutang	37.268	29.187	63.727	82.887	18.131	-13,42%
1.1.3.	Persediaan	44.610	39.450	46.993	59.784	61.928	6,78%
1.2.	INVESTASI	44.641	44.112	44.987	46.654	49.008	1,88%
1.3.	ASET TETAP	1.033.243	1.075.664	1.114.037	1.163.019	1.203.272	3,09%
1.3.1.	Tanah	140.544	140.159	140.160	141.784	142.577	0,29%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	223.062	241.036	245.889	274.980	319.532	7,45%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	448.790	470.974	490.427	517.364	543.117	3,89%
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.148.220	1.244.585	1.365.796	1.473.671	1.522.429	5,80%
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	11.292	11.875	12.182	12.759	13.599	3,79%
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	3.404	4.085	3.828	4.438	50.939	71,79%
	Akumulasi Penyusutan	-942.068	-1.037.050	-1.144.244	-1.261.977	-1.388.921	8,07%
1.4.	ASET LAINNYA	286.502	52.308	54.960	53.722	53.712	-28,45%



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.4.1.	Aset tak Berwujud	1.263	847	486	326	3.270	20,97%
1.4.2.	Aset Lain lain	285.105	51.460	54.474	53.396	50.441	-29,28%
1.4.3.	Kas yang dibatasi Penggunaannya	134	-	-	-	-	-100,00%
2.	KEWAJIBAN	22.844	8.976	7.553	12.491	22.901	0,05%
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.844	8.976	7.553	12.491	22.901	0,05%
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21	4	1	29	329	73,63%
2.1.2.	Utang Belanja/Utang kepada Pihak Ketiga	21.013	2.874	137	2.594	16.590	-4,62%
2.1.3.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.451	5.978	7.315	9.763	5.842	32,13%
	Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya	134	-	-	-	-	-100,00%
	Pendapatan diterima dimuka	225	120	99	104	140	-9,02%
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
2.2.1.	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	-	-	-			0,00%
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	-	-	-			0,00%
2.2.3.	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-			0,00%
3.	EKUITAS	1.433.482	12.731.901	1.403.673	1.496.484	1.374.808	-0,83%
3.1.	EKUITAS	1.433.482	1.273.191	1.403.673	1.496.484	1.374.808	-0,83%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.456.327	1.282.167	1.411.226	1.508.975	1.397.709	-0,82%

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan



pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.15 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Rasio Lancar	4,02	12,26	26,11	19,66	4,00
2	Rasio Cepat	2,07	7,87	19,89	14,87	1,30
3	Rasio Kas	0,44	4,62	11,46	8,24	0,51
4	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02
5	Rasio Total Hutang terhadap Total Modal	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02

sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2016—2020 relatif tinggi, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam



kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Rasio cepat lebih akurat dibandingkan rasio lancar karena telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan seperti tampak dalam Tabel Analisis Rasio Neraca Daerah, diperoleh nilai rasio cepat neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang fluktuatif.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 dan tahun 2020 sebesar 0,02% artinya sebesar Rp0,02 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, sisanya dari modal sendiri (ekuitas) sementara pada tahun 2017–2019 rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,01%.



3.2.2 Analisis Keuangan Daerah

3.2.2.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, dan belanja tertentu. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat (*earmarked*; ditentukan penggunaannya). Semakin besar Kapasitas Fiskal Daerah maka semakin besar dana yang masih bisa digunakan untuk melaksanakan inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara teknis, kapasitas fiskal dapat dihitung menggunakan formula berikut ini.

Kapasitas Fiskal	= [Penerimaan Umum APBD] - [Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya + Belanja]
Penerimaan Umum APBD	= Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan
Pendapatan Mengikat	= DAK + Pendapatan Hibah + Dana Darurat + Dana Penyesuaian/otsus
Belanja Mengikat	= Belanja Pegawai + Belanja Bunga + Belanja Bagi Hasil + Belanja langsung terkait dengan Rutin OPD
Belanja Wajib	= Belanja Urusan Pendidikan + Belanja Urusan Kesehatan + Belanja Wajib Lainnya

Berdasarkan hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten Bangka Barat tahun 2016—2020 menunjukkan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh



Daerah Kabupaten Bangka Barat sangat terbatas. Tabel berikut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016—2020, kapasitas fiskal daerah yang tercipta cukup kecil dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Hal ini diakibatkan oleh tingginya kebutuhan anggaran belanja mengikat dan belanja wajib daerah sehingga pada akhirnya berimplikasi pada terbatasnya kesediaan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis daerah.

Tabel 3.16 Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
PENERIMAAN	874.320.587.683	845.914.720.541	909.569.053.249	1.001.135.434.779	908.101.817.734
PENDAPATAN MENGIKAT	219.691.869.642	225.334.104.553	223.419.496.845	210.126.414.490	211.510.095.840
DAK	175.417.161.142	130.021.364.553	125.830.480.976	125.550.574.990	109.928.228.840
Hibah	20.595.500	11.900.000	24.659.942.332	28.794.461.500	19.943.600.000
Dana Penyesuaian	44.254.113.000	95.300.840.000	72.929.073.537	55.781.378.000	81.638.267.000
BELANJA MENGIKAT	341.872.534.114	331.930.620.145	338.302.510.719	378.960.086.409	383.277.577.560
Belanja Pegawai	241.701.875.237	224.426.876.848	233.858.188.288	262.182.187.453	270.343.462.521
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Bagi Hasil	1.995.372.175	2.220.000.000	2.149.999.999	3.125.000.000	2.632.212.275
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	98.175.286.702	105.283.743.297	102.294.322.432	113.652.898.956	110.301.902.764
BELANJA WAJIB	157.185.782.118	171.068.587.198	189.403.660.119	208.717.058.027	191.832.219.283
Belanja Pendidikan	37.765.408.491	65.778.373.678	65.998.068.757	75.462.056.651	53.720.017.753
Belanja Kesehatan	63.995.762.905	66.896.481.370	60.236.863.303	44.075.233.821	54.945.886.076
Belanja Infrastruktur	55.424.610.722	38.393.732.150	63.168.728.060	89.179.767.555	83.166.315.454
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	718.750.185.874	728.333.311.897	751.125.667.683	797.803.558.926	786.619.892.683
KAPASITAS FISKAL	155.570.401.809	117.581.408.644	158.443.385.566	203.331.875.853	121.481.925.051
Persentase	18%	14%	17%	20%	13%

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021



3.2.2.2 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Sesuai dengan kebutuhan perhitungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Keuangan RI menyusun peta kapasitas fiskal daerah yang merupakan gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD). Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah sebelum tahun 2017 mengacu pada formula berikut ini.

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + OTSUS + Transfer\ prov + LP) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$$

Keterangan

- KF = Kapasitas Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- Transfer Prov = Transfer= Pemerintah Provinsi ke Kabupaten /Kota (bernilai positif untuk Kabupaten /Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
- LP= Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- BP= Belanja Pegawai

Berdasarkan Permenkeu No. 37/PMK.07/2016, IKFD kabupaten/kota dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori Kapasitas Fiskal Daerah, dimana kategori tersebut terdiri dari:

- a. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks 2) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sangat tinggi;



- b. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi;
- c. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal sedang; dan
- d. daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($\text{indeks} < 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal rendah.

sedangkan mulai tahun 2017, formula yang digunakan dalam menghitung kapasitas fiskal daerah adalah ditampilkan sebagai berikut.

$KFDi = [\text{Penerimaan Umum APBD}] - [\text{Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya} + \text{Belanja}]$

$KFDi = [\text{PAD} + \text{BHP} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{Otsus} + \text{TPG/Tamsil}] - [\text{DTK} + \text{PR TDP} + \text{DBH DR TDP} + \text{DBH CHT TDP} + \text{BBH} + \text{BH DOB} + \text{DD} + \text{ADD} + \text{Otsus} + \text{BP} + \text{BB}]$

$$IKFDi = \frac{KFDi}{(\sum FDi)/n}$$

Keterangan:

- KFD = Kapasitas Fiskal Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BHP = Bagi Hasil Provinsi
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- Otsus = Dana Otonomi Khusus
- DTK = Dana Transfer Khusus
- TPG/Tamsil = Tunjangan Penghasilan Guru /Tambahan Penghasilan
- DBHDR TDP = DEB Dana Reboisasi yang Telah Ditentukan Penggunaannya



- DBHCHT TDP = DEB Cukai Basil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
- BBH = Belanja Bagi Hasil
- BH DOB = Bagi Hasil untuk daerah otonom baru
- DD = Dana Desa
- ADD = Alokasi Dana Desa
- BP = Belanja Pegawai
- BB = Belanja Bunga
- n = jumlah pemerintah daerah
- IKFDi = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Berdasarkan Permenkeu No. 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, IKFD kabupaten/kota dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, dimana kategori tersebut terdiri dari :

- 1) Daerah dengan IKFD lebih dari atau sama dengan 2,145 (dua koma seratus empat puluh lima) ($IKFD \geq 2,145$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
- 2) Daerah dengan IKFD antara lebih dari atau sama dengan 1,168 (satu koma seratus enam puluh delapan) sampai kurang dari 2,145 (dua koma seratus empat puluh lima) ($1,168 \leq IKFD < 2,145$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tinggi;
- 3) Daerah dengan IKFD antara lebih dari atau sama dengan 0,747 (nol koma tujuh ratus empat puluh tujuh) sampai kurang dari 1,168 (satu koma seratus enam puluh delapan) ($0,747 \leq IKFD < 1,168$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah Sedang;
- 4) Daerah dengan IKFD antara lebih dari atau sama dengan 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) sampai kurang dari 0,747 (nol koma tujuh ratus empat puluh tujuh) ($0,517 \leq IKFD < 0,747$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan



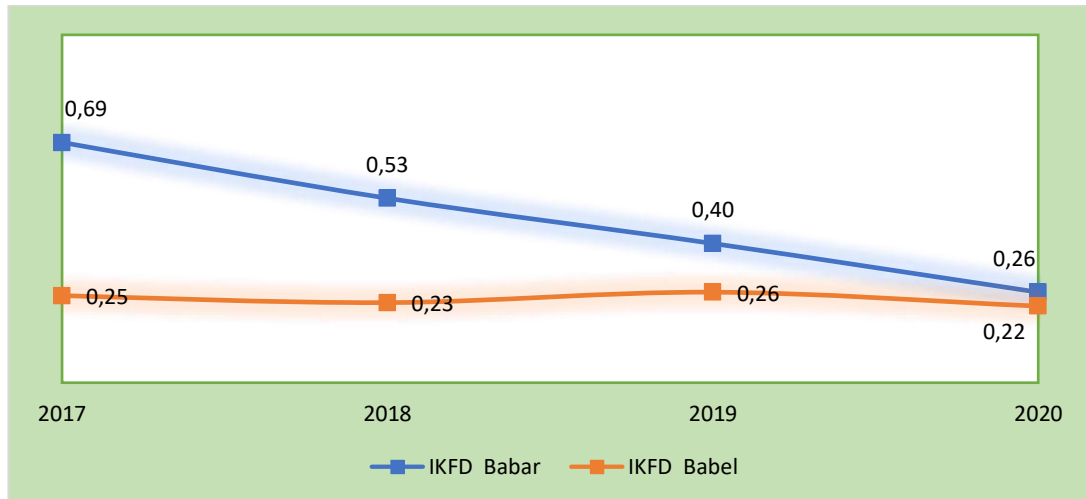
5) Daerah dengan IKFD kurang dari 0,517 (nol koma lima ratus tujuh belas) ($IKFD < 0,517$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas fiskal daerah yang dihitung oleh Kementerian Keuangan RI setiap tahunnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka dapat dikemukakan secara umum Nilai IKFD Kabupaten Bangka Barat masih berada diatas Nilai IKFD Provinsi Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat pada grafik gambar 3.5.

Pada tahun 2016, IKFD menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang terlihat melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan perimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin, setelah dilakukan perhitungan oleh kementerian keuangan nilai IKFD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menunjukkan nilai sebesar 2,57 atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Sementara itu, pada tahun 2017 hingga tahun 2020, IKFD menggambarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, yakni belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai, sehingga setelah dilakukan perhitungan oleh Kementerian Keuangan RI, diperoleh nilai IKFD pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga mencapai 0,69 dan di tahun 2018, turun menjadi 0,57. Pada tahun 2019 terus menurun mencapai 0,40 dan terakhir di tahun 2020 nilai IKFD Kabupaten Bangka Barat mencapai 0,26 hingga masuk ke dalam kategori sangat rendah, dan nilai rata-rata IKFD Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017 hingga



tahun 2020 sebesar 0,47 artinya secara rata-rata Kabupaten Bangka Barat masih termasuk ke dalam kategori daerah yang IKFD-nya sangat rendah.



Gambar 3.7 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017—2020

3.2.2.3. Kemampuan Mendanai Pengeluaran Daerah

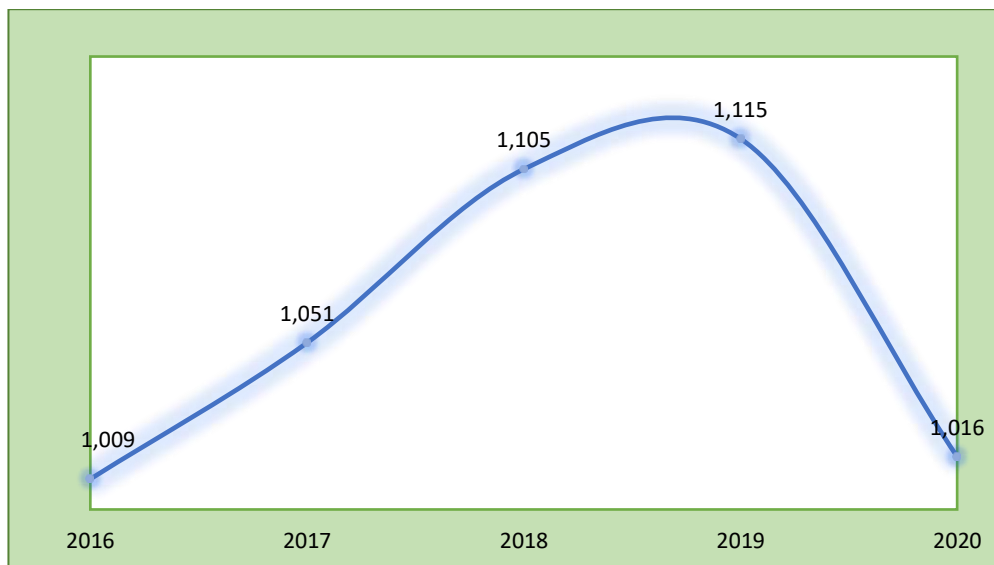
Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

Secara umum kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bangka Barat selama periode tahun 2016—2020 sudah cukup baik yang ditandai dengan angka kemampuan mendanai belanja daerah selama periode tersebut selalu berada di atas angka 1, berarti total penerimaan daerah selalu melebihi total pengeluaran daerah. Namun demikian, patut dicermati adanya pola penurunan kemampuan mendanai



belanja daerah, dari sebesar 1,007 pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,124 pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 1,016 pada tahun 2020.

Penurunan yang terjadi di tahun 2020 dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan *refocusing* anggaran. *Refocusing* dilakukan untuk memprioritaskan pada program penanggulangan Covid-19 yang terjadi di beberapa negara yang ada di seluruh dunia.



Gambar 3.8 Rasio Kemampuan Mendanai Pengeluaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

3.2.2.4. Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicerminkan dengan peran pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah maupun belanja daerah. Daerah-daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 3.9 menunjukkan perbandingan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat dengan daerah lain di Provinsi Kepulauan



Bangka Belitung dan nasional tahun 2016—2020. Selama periode tersebut peran PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat mencapai kisaran angka 6,30% sampai dengan 9,40%. Terlihat kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja Kabupaten Bangka Barat masih berada jauh di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga masih berada jauh di bawah capaian nasional yang mencapai kisaran angka 11,7% sampai dengan 16,4%.

Tabel 3.17 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio PAD Terhadap Pendapatan			Rasio PAD Terhadap Belanja		
	Bangka Barat	Rata-rata Babel	Rata-rata Nasional	Bangka Barat	Rata-rata Babel	Rata-rata Nasional
2016	6,30%	29,45%	11,70%	6,09%	27,74%	11,60%
2017	9,40%	31,53%	13,90%	9,77%	30,09%	14,10%
2018	8,05%	33,26%	12,70%	8,51%	35,97%	12,10%
2019	7,41%	30,89%	12,90%	7,57%	29,89%	12,40%
2020	6,45%	28,51%	16,43%	5,83%	27,17%	14,45%

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

3.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bangka Barat pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.



a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Secara umum, proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi yang mencapai rata-rata sebesar 90,40% pertahun selama periode tahun 2016-2020. Jika diperbandingkan proporsi realisasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat adanya proporsi realisasi lebih tinggi pada kelompok belanja tidak langsung yang mencapai rata-rata sebesar 94,28%, sedangkan belanja langsung mencapai rata-rata sebesar 88,61%.

Tabel 3.18 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					RATA-RATA
		TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	95,85%	91,59%	91,95%	94,75%	97,26%	94,28%
1.1	Belanja Pegawai	94,76%	89,89%	90,59%	93,60%	96,25%	93,02%
1.2	Belanja Hibah	95,64%	65,51%	72,81%	83,95%	98,42%	83,27%
1.3	Belanja Bantuan Sosial	7,50%	29,23%	87,06%	95,46%	46,46%	53,14%
1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	100,00%	99,02%	99,94%	99,54%	99,99%	99,70%
1.6	Belanja Tidak Terduga	69,85%	84,07%	27,43%	0,00%	4,35%	37,14%
2	BELANJA LANGSUNG	88,66%	90,75%	90,40%	88,92%	84,30%	88,61%
2.1	Belanja Pegawai	89,34%	97,54%	93,17%	88,92%	88,53%	91,50%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	86,20%	88,41%	87,71%	87,38%	79,34%	85,81%
2.3	Belanja Modal	90,74%	90,73%	92,61%	90,82%	87,51%	90,48%

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021



b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bangka Barat tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Belanja (Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	2016	276.701.875.237	866.200.678.743	32%
2	2017	259.426.876.848	804.493.544.722	32%
3	2018	268.858.188.288	823.048.919.890	33%
4	2019	297.182.187.453	898.255.933.704	33%
5	2020	305.343.462.521	890.604.104.278	34%

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

3.2.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah dan ditutup dengan jumlah pembiayaan netto, realisasi selisih lebih pembiayaan tahun berkenan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu tahun 2016—2020 disajikan dalam tabel 3.20.



Tabel 3.20 Realisasi Selisih Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016—2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	835.806.983.032	835.319.418.526	866.847.770.185	914.271.309.355	805.055.766.521
2	Dikurangi Realisasi Belanja Daerah	864.700.678.743	802.993.544.722	820.048.919.890	895.255.933.704	890.604.104.278
A1	Surplus/(Defisi) Anggaran	-28.893.695.711	32.325.873.804	46.798.850.295	19.015.375.651	-85.548.337.757
3	Penerimaan Pembiayaan	38.513.604.650	10.595.302.015	42.721.283.064	86.864.125.424	103.046.051.213
	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	37.013.604.650	9.095.302.015	39.721.283.064	83.864.125.424	100.046.051.213
A2	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	8.119.908.939	41.421.175.819	86.520.133.359	102.879.501.075	14.497.713.456

sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat, 2021

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas dapat disimpulkan:

1. Penganggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan



program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.2.4. Kerangka Pendanaan

3.2.4.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Proyeksi APBD pada dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat tahun 2021—2026 dilakukan dengan teknik justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut sebagai berikut.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5-7% pertahun.
2. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:
 - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
 - b. Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan mobilisasi pendapatan daerah oleh OPD terkait;
 - c. Pemantapan kerangka regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- d. Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi mobilisasi pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
 - f. Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - g. Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain
3. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
 4. Dana transfer provinsi diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan pada:

1. Prioritas I: Belanja wajib dan mengikat.
2. Prioritas II: Belanja untuk program yang sesuai Visi Misi Pimpinan Daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Prioritas III: Belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya.

C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi ruang fiskal daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penambahan penyertaan modal pada bank daerah dan BUMD.

Tabel 3.21 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
4	Pendapatan	827.576.489.688	762.487.645.830	796.813.174.613	828.635.768.384	857.289.458.467	886.445.573.889	1,32%
04.01	Pendapatan Asli Daerah	74.134.746.118	67.648.925.830	73.474.454.613	77.797.048.384	80.450.738.467	83.606.853.889	9,68%
1.1.1	Pajak Daerah	27.797.500.000	22.181.946.758	23.277.840.557	24.414.665.328	25.025.031.961	25.650.657.760	3,99%
1.1.2	Retribusi Daerah	4.815.914.056	5.137.920.112	4.815.914.056	4.815.914.056	4.815.914.056	4.815.914.056	-1,90%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	4.650.000.000	5.115.000.000	5.524.200.000	5.910.894.000	6.206.438.700	6.516.760.635	9,28%
1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah	36.871.332.062	35.214.058.960	39.856.500.000	42.655.575.000	44.403.353.750	46.623.521.438	17,51%
04.02	Pendapatan Transfer	728.603.023.570	670.000.000.000	698.500.000.000	726.000.000.000	752.000.000.000	778.000.000.000	2,68%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	663.835.532.000	630.000.000.000	656.500.000.000	681.000.000.000	705.000.000.000	729.000.000.000	3,17%
04.02.01.01	Dana Perimbangan	583.835.532.000	555.000.000.000	581.500.000.000	606.000.000.000	630.000.000.000	654.000.000.000	1,20%
	Dana Bagi hasil Pajak / Bagi hasil Bukan Pajak	77.364.650.000	79.000.000.000	82.500.000.000	87.000.000.000	91.000.000.000	95.000.000.000	7,41%
	Dana Alokasi Umum	470.000.000.000	443.000.000.000	466.000.000.000	486.000.000.000	506.000.000.000	526.000.000.000	3,57%
	Dana Alokasi Khusus	36.470.882.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	-14,36%
04.02.01.02	DID	20.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-12,44%
04.02.01.03	Dana Desa	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	0,00%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.767.491.570	40.000.000.000	42.000.000.000	45.000.000.000	47.000.000.000	49.000.000.000	-2,59%
	Pendapatan Bagi Hasil	64.767.491.570	40.000.000.000	42.000.000.000	45.000.000.000	47.000.000.000	49.000.000.000	-2,59%
04.03	Lain-Lain Pendapatan yang sah	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	-16,77%
04.03.01	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	0,00%

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5	Belanja	885.378.908.843	780.587.645.830	814.913.174.613	846.735.768.384	875.389.458.467	904.545.573.889	3,10%
05.01	Belanja Operasi	669.766.507.668	590.494.596.443	616.460.981.351	640.533.959.917	662.209.743.863	684.265.599.733	0,64%
	Belanja Pegawai	350.896.510.009	333.800.000.000	348.800.000.000	358.800.000.000	368.800.000.000	378.800.000.000	1,60%
	Belanja Barang dan Jasa	281.797.113.551	224.009.567.422	233.538.662.219	246.279.154.412	256.755.141.389	267.590.162.565	-0,46%
	Belanja Hibah	31.151.615.608	27.464.587.250	28.672.313.871	29.791.975.972	30.800.141.776	31.825.985.164	0,64%
	Belanja Bantuan Sosial	5.921.268.500	5.220.441.771	5.450.005.261	5.662.829.533	5.854.460.699	6.049.452.003	0,64%
05.02	Belanja Modal	90.774.154.770	74.161.062.700	76.492.817.801	81.678.750.529	86.195.620.002	90.833.316.974	0,51%
05.03	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-15,88%
05.04	Belanja Transfer	119.988.246.405	114.931.986.687	120.959.375.461	123.523.057.938	125.984.094.602	128.446.657.182	1,42%
	Belanja Bagi Hasil	3.261.341.405	2.731.986.687	2.809.375.461	2.923.057.938	2.984.094.602	3.046.657.182	-1,03%
	Belanja Bantuan Keuangan	116.726.905.000	112.200.000.000	118.150.000.000	120.600.000.000	123.000.000.000	125.400.000.000	1,49%
	Surplus (Defisit)	-57.802.419.155	-18.100.000.000	-18.100.000.000	-18.100.000.000	-18.100.000.000	-18.100.000.000	1,74%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	57.802.419.155	18.100.000.000	18.100.000.000	18.100.000.000	18.100.000.000	18.100.000.000	-17,60%
06.01	Penerimaan Pembiayaan	63.802.419.155	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000	25.100.000.000	-15,65%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	63.702.419.155	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-15,68%
	Penerimaan Piutang Daerah	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00%
06.02	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	4,17%
	Penyertaan Modal	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	4,17%
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	

sumber : Data Diolah, 2021



Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026. Pendapatan daerah diperkirakan rata-rata tumbuh sebesar 1,32% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat diperkirakan hanya mencapai sebesar Rp770,07 miliar, karena dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap seluruh sektor ekonomi daerah. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, namun demikian dampak Covid 19 masih berpengaruh terhadap total pendapatan daerah, hiingga diperkirakan untuk tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar Rp762,48 miliar dan meningkat menjadi Rp886,44 miliar pada tahun 2026.

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 3,10%. Pada tahun 2021, belanja daerah diperkirakan masih sangat terpengaruh oleh dampak Pandemi Covid-19 dan hanya akan mencapai nilai nominal sebesar Rp694,45 miliar yang kemudian diperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp713,22 miliar pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp808,59 miliar pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 3,46% atau masih berada di bawah kisaran angka pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan tidak akan mengalami pertumbuhan.

Selanjutnya, berdasarkan perimbangan pendapatan dan belanja daerah maka dapat ditemukan selisih defisit APBD Kabupaten Bangka Barat yang akan ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Selama periode



tahun 2021-2026, diperkirakan defisit anggaran sebesar Rp106,06 miliar pada tahun 2021 dan seterusnya tahun 2022-2026 diperkirakan defisit anggaran mencapai rata rata sebesar Rp18,10 miliar pertahun dan angka defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan netto.

3.2.4.2. Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2021–2026

Perhitungan kapasitas fiskal diperlukan untuk mengukur fleksibilitas Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk dialokasi pada berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam menghitung ruang fiskal daerah adalah :

- 1. Langkah pertama:** menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- 2. Langkah kedua:** menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiliki daerah yaitu pendapatan Dana Alokasi Khusus dan Dana penyesuaian. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tersedia.
- 3. Langkah Ketiga:** Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji, tunjangan pegawai dan belanja transfer.

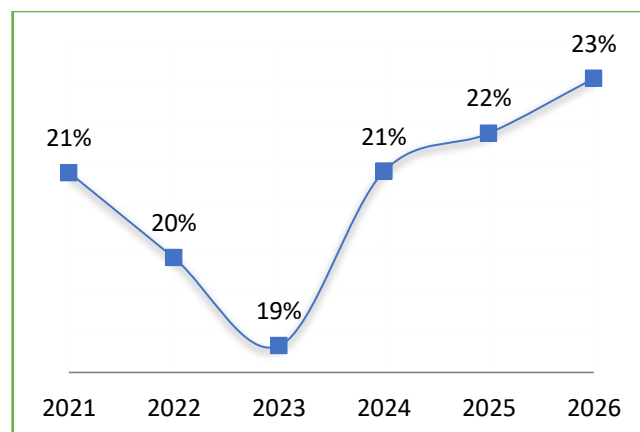
Tabel 3.22 Perhitungan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENERIMAAN	837.095.078.946	787.487.645.830	821.813.174.613	853.635.768.384	882.289.458.467	911.445.573.889
PENDAPATAN MENGIKAT	118.737.398.000	117.838.720.000	117.838.720.000	117.838.720.000	117.838.720.000	117.838.720.000
DAK	33.898.678.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000	33.000.000.000
Hibah	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000
Dana Desa	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
BELANJA MENGIKAT	363.619.821.972	355.731.986.687	376.759.375.461	389.323.057.938	401.784.094.602	414.246.657.182
Belanja Pegawai	311.101.322.000	300.800.000.000	315.800.000.000	325.800.000.000	335.800.000.000	345.800.000.000
Belanja ADD	49.872.816.200	52.200.000.000	58.150.000.000	60.600.000.000	63.000.000.000	65.400.000.000
Belanja Bagi Hasil	2.645.683.772	2.731.986.687	2.809.375.461	2.923.057.938	2.984.094.602	3.046.657.182
BELANJA WAJIB	175.561.919.054	153.420.000.000	168.420.000.000	163.600.000.000	169.600.000.000	173.900.000.000
Belanja Pendidikan	40.271.182.332	40.150.000.000	40.150.000.000	41.150.000.000	43.300.000.000	45.300.000.000
Belanja Kesehatan	84.991.632.484	81.150.000.000	81.150.000.000	83.600.000.000	86.650.000.000	88.650.000.000
Belanja Infrastruktur	50.299.104.238	32.120.000.000	47.120.000.000	38.850.000.000	39.650.000.000	39.950.000.000
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA MENGIKAT SERTA BELANJA WAJIB	657.919.139.026	626.990.706.687	663.018.095.461	670.761.777.938	689.222.814.602	705.985.377.182
KAPASITAS FISKAL	179.175.939.920	160.496.939.143	158.795.079.152	182.873.990.446	193.066.643.865	205.460.196.707
Persentase	21%	20%	19%	21%	22%	23%

sumber : Data Diolah, 2021



Proyeksi kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026 menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, dari Rp.179,17 miliar menjadi Rp.160,49 miliar pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh kebutuhan belanja meningkat lebih cepat dari pada pemulihan pendapatan daerah pasca pandemi covid-19. Selanjutnya pada tahun 2023—2025, kapasitas fiskal daerah diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan asumsi adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai.



Gambar 3.9 Grafik Proyeksi Persentase Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

sumber : Data Diolah, 2021

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas fiskal ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas, seperti data pada tabel 3.15. Kebijakan alokasi belanja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terdiri dari 3 (tiga) kebijakan, antara lain:

1. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;



2. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
3. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.23 Perhitungan Proyeksi Belanja Prioritas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Total Proyeksi Belanja Prioritas	885.378.908.843	780.587.645.830	814.913.174.613	846.735.768.384	875.389.458.467	904.545.573.889
1	Prioritas I	471.157.219.972	473.570.706.687	494.598.095.461	507.161.777.938	519.622.814.602	532.085.377.182
	Belanja Pegawai (gaji+tunjangan)	333.800.000.000	333.800.000.000	348.800.000.000	358.800.000.000	368.800.000.000	378.800.000.000
	Belanja dana desa	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
	Belanja add	49.872.816.200	52.200.000.000	58.150.000.000	60.600.000.000	63.000.000.000	65.400.000.000
	Belanja bagi hasil pajak & ret	2.645.683.772	2.731.986.687	2.809.375.461	2.923.057.938	2.984.094.602	3.046.657.182
	Belanja Dana Bos	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000	24.838.720.000
2	Prioritas II	241.949.146.141	170.146.280.000	182.766.280.000	185.976.280.000	192.396.280.000	197.696.280.000
	Visi Misi Bupati	241.949.146.141	170.146.280.000	182.766.280.000	185.976.280.000	192.396.280.000	197.696.280.000
3	Prioritas III	172.272.542.730	136.870.659.143	137.548.799.151	153.597.710.445	163.370.363.865	174.763.916.707
	Belanja Rutin	111.443.742.222	80.000.000.000	80.000.000.000	90.000.000.000	100.000.000.000	110.000.000.000
	Program Strategis OPD Penunjang	60.828.800.508	56.870.659.143	57.548.799.151	63.597.710.445	63.370.363.865	64.763.916.707

sumber: data diolah, 2021



Mengacu pada tabel 3.23, kepala daerah diharapkan dapat memimpin rasionalitas alokasi anggaran yang dapat mendorong kebangkitan ekonomi serta memutuskan mana yang benar-benar menjadi skala prioritas. Termasuk dalam hal ini adalah mengupayakan pendanaan yang bersumber dari selain pendapatan asli daerah, apakah itu dari pemerintah pusat/BUMN atau mengoptimalkan peran swasta, dalam pelaksanaan implementasi anggaran diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai tingkat ketercapaian, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

a. Ketergantungan Fiskal Daerah

Potensi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan sebagian besar masih bergantung pada dana perimbangan atau transfer pusat. Pendapatan transfer pusat pada tahun 2021 berkontribusi sekitar 80,21% terhadap total pendapatan APBD. Demikian juga pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan ketergantungan menjadi 82,62%. Ketergantungan pada pendapatan transfer pusat diperkirakan hingga tahun 2026 mencapai 82,24%.

Kontribusi PAD Kabupaten Bangka Barat diproyeksikan hingga tahun 2026 belum dapat mencapai 10%, namun angka ketergantungan terus menurun. Secara keseluruhan potensi PAD memiliki kontribusi sebesar 8,96% pada tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 8,87%, dan terus meningkat sampai tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai 9,43%. Proyeksi kontribusi PAD, pendapatan transfer terhadap total pendapatan seperti tabel 3.24.



Tabel 3.24 Proyeksi Kontribusi PAD, Pendapatan transfer dan Pendapatan Transfer Pusat Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

URAIAN	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PAD	8,96	8,87	9,22	9,39	9,38	9,43
Pendapatan Transfer	88,04	87,87	87,66	87,61	87,72	87,77
Pendapatan Transfer Pusat	80,21	82,62	82,39	82,18	82,24	82,24

sumber: data diolah, 2021

Upaya nyata dan optimal secara terus-menerus perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mengurangi ketergantungan dengan cara mengoptimalkan penerimaan PAD, potensi penerimaan pajak dan non pajak lainnya. Optimalisasi juga perlu dilakukan terhadap belanja yang diperoleh dari dana perimbangan pada pos-pos produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menghasilkan *multiplier* berjangka panjang. Selain itu, peran BUMN dan swasta dalam membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian perlu dioptimalkan.

3.2.5 Sensitivitas Keuangan Daerah

Sensitivitas adalah kepekaan sesuatu dalam menyikapi perubahan yang terjadi (negatif maupun positif). Sensitivitas keuangan daerah adalah ketanggapan pemerintah daerah dalam menyikapi perubahan yang terjadi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah baik negatif maupun positif. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan analisis sensitivitas keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui besarnya dampak perubahan dan langkah strategis pemerintah daerah dalam menyikapi perubahan yang terjadi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam membiayai pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. Dengan



melakukan analisis sensitivitas maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Dalam studi ini ditinjau tiga keadaan yang saling terpisah dan menggambarkan kemungkinan perubahan tersebut yaitu:

- a. Berkaitan dengan perubahan penurunan proyeksi pendapatan transfer pusat, khususnya pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) pada tingkat penurunan sebesar 10%;
- b. Berkaitan dengan perubahan penurunan proyeksi pendapatan transfer pusat, khususnya pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) pada tingkat penurunan sebesar 20%; serta
- c. Berkaitan dengan perubahan penurunan proyeksi pendapatan transfer pusat, khususnya pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) pada tingkat penurunan sebesar 30%.

Tabel 3.25 Skenario Penurunan Proyeksi Dana Perimbangan Pemerintah Pusat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BERKURANG 10% (Rp)	% PERUBAHAN (Rp)	BERKURANG 20% (Rp)	% PERUBAHAN (Rp)	BERKURANG 30% (Rp)	% PERUBAHAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022	522.000.000.000	469.800.000.000	-52.200.000.000	417.600.000.000	-104.400.000.000	365.400.000.000	-156.600.000.000
2023	548.500.000.000	493.650.000.000	-54.850.000.000	438.800.000.000	-109.700.000.000	383.950.000.000	-164.550.000.000
2024	573.000.000.000	515.700.000.000	-57.300.000.000	458.400.000.000	-114.600.000.000	401.100.000.000	-171.900.000.000
2025	597.000.000.000	537.300.000.000	-59.700.000.000	477.600.000.000	-119.400.000.000	417.900.000.000	-179.100.000.000
2026	621.000.000.000	558.900.000.000	-62.100.000.000	496.800.000.000	-124.200.000.000	434.700.000.000	-186.300.000.000

sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3.25 tampak bahwa ketika dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 10%, maka potensi pendapatan secara keseluruhan akan mengalami penurunan sebesar Rp52.200.000.000 pada tahun 2022, sebesar Rp54.850.000.000 pada tahun 2023, sebesar Rp57.300.000.000



pada tahun 2024, sebesar Rp59.700.000.000 pada tahun 2025, dan sebesar Rp62.100.000.000 pada tahun 2026. Demikian juga, ketika skenario penerimaan transfer pusat mengalami penurunan sebesar 20% dan 30%, maka potensi pendapatan secara keseluruhan akan mengalami penurunan.

Analisis sensitivitas keuangan daerah pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 menunjukkan perkiraan perubahan besaran-besaran komponen jika terjadi perubahan potensi penerimaan transfer pusat. Perubahan indikator asumsi dana transfer pusat tersebut tentu akan memiliki pengaruh dan berinteraksi dengan perubahan indikator asumsi belanja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, khususnya belanja yang telah direncanakan pada program yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat. Angka tersebut merupakan asumsi yang cukup *prudent* dengan mempertimbangkan deviasi tekanan keuangan ketika keadaan pemerintah pusat mengambil kebijakan keuangan yang cukup sulit terhadap dana perimbangan. Namun demikian, angka sensitivitas tersebut berguna untuk memberikan indikasi dampak perubahan atas berbagai indikator keuangan dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan perencanaan tahunan (RKPD) serta penyusunan Rancangan APBD tahun 2022 sampai dengan 2026 sehingga dapat dilakukan berbagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi.

Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut menimbulkan risiko goncangan (*shock*) terhadap berbagai asumsi perencanaan pembangunan termasuk RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026, yang pada akhirnya menimbulkan perubahan terhadap asumsi pendapatan dan belanja daerah yang diproyeksikan sampai pada tahun 2026. Ketika krisis ini terus berlanjut mutlak pilihan strategi adalah bagaimana pemulihan kesehatan dan membangkitkan ekonomi, menegasikan salah satunya



adalah pilihan yang cukup sulit dilakukan. Dengan demikian, beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dan belanja khususnya pada rentang RPJMD Tahun 2021—2026 adalah sebagai berikut.

Rekomendasi

1. Ketika terjadi perubahan dengan berkurangnya dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) sebesar 10%, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat mengurangi pos belanja program penunjang urusan pemerintahan serta dapat mengurangi program strategis Perangkat Daerah Penunjang yang tidak langsung menunjang pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang terdapat pada prioritas III;
2. Ketika terjadi perubahan dengan berkurangnya dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) sebesar 20%, selain mengurangi pos belanja program penunjang urusan pemerintahan serta mengurangi program strategis Perangkat Daerah Penunjang yang tidak secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat meminimalisasi pos belanja barang dan jasa pada belanja operasi serta mempertimbangkan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang tidak secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
3. Ketika terjadi perubahan dengan berkurangnya dana perimbangan oleh pemerintah pusat (DAU, DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak) sebesar 30%, selain mengurangi pos belanja program penunjang urusan pemerintahan dan mengurangi program strategis Perangkat Daerah Penunjang yang tidak secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi serta meminimalisasi pos belanja barang dan jasa pada belanja operasi dan mempertimbangkan hibah/bantuan sosial kepada



masyarakat/kelompok masyarakat yang tidak secara langsung mendukung pencapaian visi dan misi, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan pengurangan terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap seluruh ASN sesuai jenjang kepangkatan pada prioritas I serta dapat melakukan rasionalisasi terhadap program program pendukung (bukan pogram inti) terhadap pencapaian Visi Misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan target tujuan dan sasaran pembangunan pada prioritas II.



pesona
indonesia



#ayokebangkabarat



BAB IV

PERMASALAHAN DAN

ISU STRATEGIS





Bab ini menguraikan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat dan merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Perumusan permasalahan pembangunan menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2016—2021, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (3) analisis hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perangkat daerah. Selain itu, identifikasi permasalahan daerah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu: (1) cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan; (2) permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akan datang dan berdampak negatif; dan (3) memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.



Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan secara spesifik diuraikan sebagai berikut.

4.1.1. Permasalahan Daerah

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat mengalami tren pertumbuhan yang cukup baik sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada interval tahun tersebut, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,59% setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 7,13%. Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diproyeksi mampu tumbuh pada angka 4,98%. Namun, dalam berjalannya pelaksanaan pembangunan, tepatnya pada awal Maret tahun 2020 pandemi Covid-19 mulai menyebar di Indonesia dan berdampak besar terhadap banyak hal, khususnya di bidang ekonomi. Memperhatikan kondisi yang ada, dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 diproyeksikan tumbuh sebesar -7,01%.

Berdasarkan data BPS yang rilis pada bulan Februari Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami resesi sebesar 5,43%. Realisasi tersebut memang sudah diproyeksi sebelumnya, mengingat penopang perekonomian terbesar di Kabupaten Bangka Barat ada pada kategori industri pengolahan (>40%). Diharapkan di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat akan tumbuh positif, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara nasional dan berhasilnya Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19. Namun, Kabupaten Bangka Barat harus tetap serius dalam menjalankan beberapa kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya terkait penanganan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.



Secara umum kondisi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,30% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,32%. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap sektor perekonomian informal dan jasa. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat lebih rendah jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi di level provinsi.

Selain itu, berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat menempati posisi terakhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menggambarkan, bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat mengalami kontraksi yang cukup besar akibat terjadinya pandemi Covid-19. Beberapa sektor unggulan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yang tajam antara lain sektor primer pada kategori pertambangan dan penggalan sebesar -13,63%; sektor tersier pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar -13,37%; dan sektor tersier pada kategori penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar -13,37%; sektor sekunder pada kategori industri pengolahan sebesar -7,18%.

Terjadinya pandemi Covid-19 telah menyebabkan efek domino di berbagai bidang kehidupan ekonomi masyarakat. Namun, fenomena ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka Barat melainkan hampir terjadi di seluruh dunia. Laju pertumbuhan ekonomi dunia juga mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19, termasuk laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,07% pada tahun 2020. Upaya dan komitmen perbaikan laju pertumbuhan ekonomi menjadi syarat wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk



menjaga agar laju pertumbuhan ekonomi tidak terus mengalami defisit, meskipun saat ini kondisi perekonomian dunia masih belum stabil.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting yang berkontribusi terhadap pilar 8 tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Terkait dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif ditargetkan pada tahun 2030 laju pertumbuhan PDB rill per kapita sebesar 5,4%. Peran UMKM juga perlu diperkuat dengan target pada tahun 2030 sebesar 41,60% UMKM dapat mengakses layanan keuangan. Oleh sebab itu, selain komitmen kuat perlu dibarengi berbagai program-program inovasi di bidang perekonomian, paling tidak pada jangka pendek dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi agar tidak terus defisit dan perlahan dapat kembali positif dan mengalami peningkatan.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu:

1. Industri pengolahan yang didominasi pengolahan timah mengalami kontraksi di tahun 2020;
2. Belum optimalnya sektor pertanian;
3. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata;
4. Koperasi dan UMKM yang belum berdaya saing;
5. Iklim usaha dan peningkatan investasi yang belum optimal.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase sebesar 4,12%. Pada tahun 2017 capaian TPT sebesar 4,23%. Selanjutnya, mengalami penurunan menjadi 3,11% pada tahun 2018, kemudian menjadi 2,85% pada tahun 2018. Namun, TPT di Kabupaten



Bangka Barat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 menjadi 4,12%. Kondisi ini sebagai indikasi bahwa tingkat pengangguran masih merupakan tema yang menjadi fokus penanganan ke depan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan banyaknya usia produktif di Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, kondisi perekonomian yang belum stabil jika tidak diantisipasi secara bijak akan memperparah meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat.

Jika melihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai 2019, maka laju pertumbuhan tersebut berkorelasi positif terhadap pengurangan TPT. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Barat.

Adanya kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19 untuk membatasi aktivitas masyarakat juga menyebabkan berbagai tenaga kerja di sektor informal dan jasa juga mengalami pengurangan. Berdasarkan TPT pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat masih tergolong cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu meningkatkan inovasi untuk mencegah semakin tingginya TPT. Hal ini perlu didorong dengan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat padat karya agar TPT di Kabupaten Bangka Barat tidak semakin tinggi.

Capaian TPT ini menjadi sumbangsih penting terhadap tujuan 8 TPB khususnya pada target ke-3 dan target ke-5. Target ke-3 yaitu mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan UMKM, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan. Selain



itu, pada target ke-5 yaitu di tahun 2030, dapat mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda, orang dengan disabilitas, dan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama.

TPT Kabupaten Bangka Barat ditargetkan sebesar 3,8% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan beberapa intervensi. Pada tahun 2020—2024, strategi yang digunakan adalah berfokus pada peningkatan keahlian tenaga kerja untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing.

Capaian indikator TPT Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi oleh beberapa permasalahan selain kondisi perekonomian yang terjadi yaitu:

- (1) Keterbatasan lapangan kerja; dan
- (2) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.

C. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat mengalami jumlah yang berfluktuasi sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,74% kemudian mengalami kenaikan menjadi 2,98% pada tahun 2017 dan kembali naik menjadi 3,05% pada tahun 2018. Selanjutnya, jumlah persentase penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 2,67% sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 2,70%.

Persentase jumlah penduduk miskin ini masih belum menggambarkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat secara nyata. Sebab, masih harus melihat berbagai aspek lain yang berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Hal ini juga menjadi catatan menarik, bahwa persentase jumlah kemiskinan penduduk di Kabupaten Bangka Barat berkorelasi



negatif dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2016 sampai 2019 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami kenaikan sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Artinya masih diperlukan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus mendorong adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, integratif, dan holistik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan serta upaya berkelanjutan. Jika melihat garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebesar Rp589.894,-, jumlah tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp440.850,-. Hal ini menandakan bahwa kemampuan harga kebutuhan baik makanan dan non-makanan di Kabupaten Bangka Barat juga mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Namun, terjadinya pandemi covid-19 berdampak langsung terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harga kebutuhan baik makanan maupun non makanan masih konstan, sehingga menyebabkan naiknya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat dan pendapatan perkapita masyarakat masih tergolong lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disinyalir bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Barat secara umum masih perlu terus ditingkatkan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga harus mempersiapkan potensi lapangan kerja dengan permintaan industri terhadap sumber daya manusia, sehingga perlu diupayakan kebijakan penyiapan tenaga kerja yang dapat berkorelasi dengan kebutuhan industri



agar ke depan tidak menjadi pengangguran terdidik dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Selain itu minat berusaha masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Capaian angka kemiskinan ini menjadi sumbangsih utama pencapaian tujuan 1 TPB yaitu mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk. Berdasarkan Peta Jalan SDG's Indonesia Menuju 2030, bahwa kemiskinan nasional ditargetkan sebesar 4,33% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, strategi yang digunakan berfokus pada tiga hal: perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas; penguatan tata kelola kelembagaan yang sinergis; dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Selain berkontribusi penting pada tujuan 1, capaian angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat juga berpengaruh terhadap tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Oleh karenanya, perlu upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu, integratif, holistik, dan partisipatif serta dapat mendorong terjadinya kemandirian di masyarakat.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selain terkait kondisi perekonomian juga dipengaruhi oleh:

- (1) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin; dan
- (2) Keterbatasan akses dan minimnya ketersediaan pangan.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebesar 69,08. Capaian ini mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 69,05 dan tahun 2018 sebesar 68,68, meskipun terus mengalami peningkatan namun angkanya tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, capaian IPM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 71,32. Di sisi



lainnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga masih harus bekerja keras untuk memenuhi target akhir RPJMD pada tahun 2021 yaitu sebesar 72,23. Artinya, berdasarkan capaian saat ini masih perlu meningkatkan kurang lebih 3 poin untuk memenuhi target pada tahun 2021.

Capaian IPM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 masih di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 71,47. Capaian IPM Kabupaten Bangka Barat masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 66,90.

Komponen penyusun IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2020, capaian AHH Kabupaten Bangka sebesar 70,06 tahun, RLS sebesar 7,22 tahun, dan AHLIS sebesar 11,53 tahun. Dari capaian tersebut, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bangka Barat masih perlu perhatian lebih karena sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat rata-rata menamatkan pendidikannya di kelas VII.

Berdasarkan tren peningkatan IPM Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2020 hanya naik 0,03 poin. Artinya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah berusaha secara optimal dalam upaya peningkatan IPM, namun terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan berbagai kebijakan dan program tersebut terhambat. Bidang pendidikan menjadi salah satu komponen penting dalam IPM, terlebih hal tersebut juga menjadi salah satu TPB nomor 4 yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Namun, pandemi Covid-19 berakibat pada terganggunya proses belajar-mengajar secara langsung dan menggunakan metode pembelajaran *online*. Hal ini juga menjadi permasalahan baru terkait kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran



secara dalam jaringan (*online*). Selain sarana dan prasarana, faktor kesiapan sumber daya manusia terhadap pembelajaran online juga masih belum optimal.

Selain itu, angka HLS Kabupaten Bangka Barat juga masih tergolong rendah, dengan capaian 11,53 tahun. Angka ini masih belum mencapai program wajib belajar nasional 12 tahun. Artinya, rata-rata HLS penduduk di Kabupaten Bangka Barat sampai kelas XI SMA, meskipun sejak tahun 2016 angka HLS penduduk Kabupaten Bangka Barat terus mengalami kenaikan. Diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam upaya mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui bidang pendidikan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat potensi lapangan kerja di Kabupaten Bangka Barat dari industri cukup besar, sehingga harus sejalan dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten.

Terkait AHH, capaian Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 70,64 tahun. Selain itu, capaian pada tahun 2020 masih menempati urutan kedua terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. AHH juga menjadi salah satu indikator penting terkait TPB nomor 3 yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Oleh karenanya, diperlukan sinergitas yang kuat antar-OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat agar IPM dapat terus meningkat.

Permasalahan belum optimalnya pencapaian IPM di Kabupaten Bangka Barat dipengaruhi oleh:

1. Masih rendahnya capaian RLS dan HLS;
2. Belum optimalnya capaian AHH; dan
3. Pengeluaran perkapita masih relatif rendah.



E. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan bidang penting yang memfasilitasi berbagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial daerah. Pembangunan infrastruktur yang baik dan optimal diharapkan mampu untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih, dan infrastruktur sistem drainase. Ketersediaan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Bangka Barat masih perlu ditingkatkan terutama terkait peningkatan jaringan irigasi, peningkatan jaringan jalan, pengendalian banjir, dan rumah tangga bersanitasi. Berdasarkan capaian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020, bahwa luas irigasi Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016-2020 sebesar 2.404 ha. Capaian luas tersebut sejatinya telah memenuhi target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 yaitu seluas 2.386 ha. Namun, capaian ini masih perlu ditingkatkan kembali, terlebih terkait operasionalisasi jaringan irigasi tersebut yang masih terkendala. Selain itu, konektivitas jaringan irigasi juga masih perlu diperhatikan, sehingga dapat menjadi aspek kunci dalam mewujudkan upaya pemerintah daerah untuk mendorong diversifikasi pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian.

Selanjutnya, terkait dengan jaringan jalan, Kabupaten Bangka Barat memiliki panjang jalan provinsi sepanjang 108,61 km di tahun 2020 dan jalan kabupaten sepanjang 700,92 km. Dari jalan tersebut, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah. Selain upaya perbaikan kondisi jalan dan penambahan panjang jaringan jalan, permasalahan konektivitas terhadap kawasan strategis, pesisir, dan



kabupaten lainnya masih perlu diperkuat. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, membuat berbagai perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk optimalisasi konektivitas sedikit terhambat akibat realokasi anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus terus mengoptimalkan upaya perbaikan infrastruktur dengan upaya yang lebih efisien dan efektif. Terlebih, dengan adanya realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diharapkan mampu mengoptimalkan anggaran yang ada secara efektif dan efisien. Terlebih aspek infrastruktur ini berkaitan erat dengan upaya pencapaian TPB nomor 9 yaitu membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi. Selanjutnya, aspek infrastruktur juga menjadi bagian penting dari TPB nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan, dimana terdapat target 68,06% terkait proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Beberapa permasalahan bidang infrastruktur Kabupaten Bangka Barat yaitu:

1. Jaringan irigasi, jalan, dan penanganan banjir belum optimal;
2. keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi belum optimal;
3. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak masih rendah; dan
4. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.

F. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebesar 63,29. Capaian IKLH di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada tahun 2017, capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat sebesar 68,07. Kemudian, turun menjadi 64,73 pada tahun 2018. Selanjutnya, mengalami kenaikan



menjadi 66,29 pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 63,29. Angka tersebut tidak berhasil mencapai target IKLH pada tahun 2020 sebesar 68 dan target akhir RPJMD pada tahun 2021 sebesar 70. Capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 merupakan yang terendah dalam kurung waktu 4 tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, sebab aspek lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.

IKLH dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020, IKU Kabupaten Bangka Barat sebesar 70, IKA sebesar 91,52, dan IKTL sebesar 37,08. Dari masing-masing indeks tersebut, Indeks kualitas udara dan kualitas air di Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan jika dibandingkan dari tahun 2019. Namun, terkait dengan indeks tutupan lahan mengalami penurunan yang signifikan dari 47,22 pada tahun 2019 menjadi 37,08 pada tahun 2020.

Dari ketiga indeks di atas, tutupan lahan menjadi salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian serius. Artinya, upaya konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan belum cukup optimal pada tahun 2020. Masifnya perubahan fungsi lahan dan terjadinya degradasi lahan akibat aktivitas pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sebab utama menurunnya tutupan lahan. Selain itu, pengetatan pengawasan dan perijinan penggunaan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga perlu ditingkatkan dalam rangka mendorong konservasi lingkungan dan rehabilitasi lahan bekas galian, agar keseimbangan aspek antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diwujudkan.

Percepatan pengembangan infrastruktur tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan TPB nomor 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” yang salah satu targetnya



adalah mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Dalam konteks pengelolaan semua jenis limbah yang ramah lingkungan dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, menjadi salah satu sasaran dari TPB nomor 12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Isu keberlanjutan lingkungan hidup juga menaungi TPB nomor 13, 14 dan 15 berkenaan dengan perubahan iklim; kelestarian sumber daya kelautan; serta pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Permasalahan utama bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat yaitu:

- (1) Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup; dan
- (2) Pengelolaan persampahan yang belum ditangani secara optimal.

G. Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang dicerminkan dengan peran PAD terhadap total pendapatan daerah. Daerah yang memiliki peran PAD yang tinggi cenderung lebih mandiri dalam memanfaatkan anggarannya secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Selama periode 2015-2020, peran PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Bangka Barat mencapai kisaran angka 6,30% sampai dengan 9,40%. Angka ini masih berada jauh di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan kondisi di nasional, capaian tersebut masih berada jauh dibawah capaian nasional yang mencapai kisaran



angka 11,7% sampai dengan 16,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bangka Barat masih relatif rendah, dan ketergantungan dengan dana perimbangan cukup tinggi, yaitu mencapai 74,45% di tahun 2020.

Beberapa permasalahan pada kondisi keuangan daerah di Kabupaten Bangka Barat yaitu:

- (1) Kemandirian daerah masih sangat rendah;
- (2) Kapasitas fiskal masih sangat rendah; dan
- (3) Minimnya transfer pusat di luar Dana Alokasi Umum.

H. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 yang dilakukan oleh KemenPAN RB sesuai Nomor B/224/RB.06/2020 menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 adalah 45,94 dengan kategori "C". Angka ini masih tergolong belum cukup baik.

Berdasarkan hasil evaluasi, hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di Kabupaten Bangka Barat adalah:

- 1) Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;



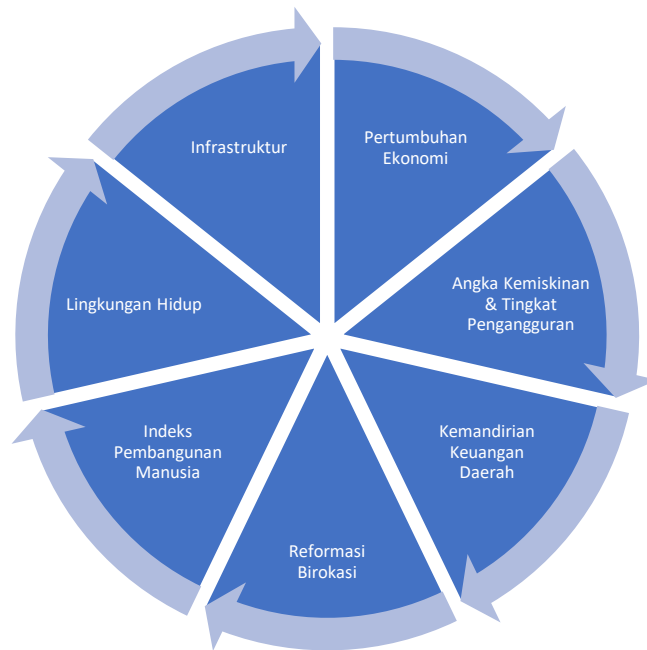
- 2) Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- 3) Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah;
- 4) Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
- 5) Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
- 6) Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya rancangan induk pengembangan aplikasi antarperangkat daerah, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;
- 7) Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382—393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh;



- 8) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOP antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan;
- 9) Implementasi sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *rewards and punishment*;
- 10) Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
- 11) Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar perangkat daerah. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka reformasi birokrasi merupakan permasalahan daerah yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 8 permasalahan utama daerah seperti tampak pada gambar 4.1. berikut.



Gambar 4.1 Permasalahan Daerah Kabupaten Bangka Barat

4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan

Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama daerah.

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Masih rendahnya capaian RLS dan HLS, di antaranya disebabkan oleh: (1) Masih rendahnya rata-rata ketersediaan prasarana pendidikan dasar dan menengah belum sesuai dengan standar yang ditentukan; (2) Jarak tempuh peserta didik menuju lokasi sekolah yang cukup jauh; dan (3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih rendah.



2. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik. Masih terdapat 1.834 guru yang belum bersertifikasi, dan masih minimnya guru berprestasi atau mendapatkan penghargaan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Dari 3.429 PTK, sebanyak 1.030 PTK belum ber-NUPTK. Selain itu, masih terbatasnya tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan penyusunan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
3. Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal, di antaranya kebutuhan kepala sekolah yang meningkat dikarenakan banyaknya kepala sekolah yang akan pensiun. Adapun jumlah total kebutuhan kepala sekolah dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 yaitu sebanyak 69 kepala sekolah.

B. Kesehatan

Masih belum optimalnya capaian AHH yang disebabkan oleh:

1. Program kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat yang belum optimal, dikarenakan masih adanya angka kematian ibu, angka kematian neonatus, bayi dan balita; status gizi masyarakat (*stunting, wasting*); dan pemberdayaan masyarakat masih belum optimal;
2. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal;
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat belum optimal;
4. Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan kurang optimal;
5. Tenaga kesehatan masih minim dan kompetensi sesuai standar belum optimal;
6. Pembiayaan kesehatan (BPJS) untuk masyarakat belum terakomodir secara keseluruhan;



7. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya saluran irigasi primer dan sekunder dengan saluran irigasi tersier yang dikelola oleh instansi terkait;
2. Rendahnya konektivitas menuju kawasan strategis kabupaten dan wilayah pesisir. Salah satu penyebabnya adalah proses penyediaan lahan yang memerlukan waktu lama dan masih rendahnya koordinasi antara pihak terkait dalam penyediaan lahan baru;
3. Pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir yang belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS;
4. Belum adanya perencanaan dan regulasi pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai kabupaten;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang belum optimal, hal ini menyebabkan:
 - a. Kecilnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - b. Belum banyaknya wilayah yang kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaannya telah ditingkatkan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. Kecilnya proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM, sehingga menyebabkan rendahnya jumlah persentase rumah



- tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan kecilnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan;
7. Belum optimalnya layanan sanitasi layak dan berkelanjutan bagi rumah tangga;
 8. Penyelenggaraan bangunan gedung yang belum maksimal;
 9. Penataan bangunan dan lingkungan yang belum optimal, dikarenakan belum sesuai penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan dokumen rujukan, dan belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 10. Belum tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur kawasan permukiman;
 11. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan lingkungan.
 12. Belum optimalnya penataan ruang yang disebabkan oleh:
 - a) Masih rendahnya jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 - b) RTRW kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, karena Perda RDTR yang merupakan produk turunan RTRW belum ditetapkan, dan rendahnya kualitas dan kuantitas SDM.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih terdapat rumah tidak layak huni yang disebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun atau disediakan dan prasarana dasar yang ada.



2. Kelengkapan data-data perumahan yang belum valid atau berubah-ubah.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
3. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan bidang pemadam kebakaran yang handal dan efektif;
5. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan, hal ini disebabkan:
 - a. Belum banyaknya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah;
 - b. Rendahnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana);
 - c. Belum tersedianya dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah;
 - d. Tidak banyaknya jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang ada.



F. Sosial

1. Ketersediaan data penduduk miskin yang valid dan *up to date* masih terbatas;
2. Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
4. Belum optimalnya pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan;
5. Belum optimalnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin;
6. Rendahnya jumlah pelaksanaan kegiatan pendampingan psikososial korban bencana sosial;
7. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Keterbatasan lapangan kerja, yang disebabkan oleh:
 - a. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja;
 - b. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja;
 - c. Minimnya variasi lapangan pekerjaan;
 - d. Belum optimalnya peran pemerintah dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja;
 - e. Rendahnya minat kewirausahaan masyarakat, terutama para pemuda.
2. Minimnya kualitas tenaga kerja, yang disebabkan oleh:



- a. Masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja;
- b. Belum optimalnya program magang dan pembinaan kewirausahaan untuk calon tenaga kerja;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan BLK;
- d. Belum optimalnya perencanaan terpadu terkait ketenagakerjaan;
- e. Masih rendahnya proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih terjadinya kasus kekerasan perempuan dan anak, hal ini disebabkan oleh:
 - a. Belum optimalnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pra nikah dan pendidikan seksual dini;
 - b. Belum optimalnya peran UPT PPA;
 - c. Adanya faktor perekonomian keluarga.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender, sehingga Kabupaten Bangka Barat belum mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
3. Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak (PHA). Kabupaten Bangka Barat belum mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dikarenakan:
 - a. Belum optimalnya komitmen terhadap pemenuhan hak anak sebagai bahan mendapatkan KLA;
 - b. Eksistensi keberadaan Forum Anak di tingkat kecamatan dan desa belum optimal, dan belum optimalnya peran dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (Pusapaga).

C. Pangan

1. Kurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat miskin untuk pemenuhan pangan;



2. Masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya;
3. Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat;
4. Kecenderungan masyarakat terhadap pangan pokok beras yang tinggi;
5. Masih adanya daerah rawan pangan;
6. Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan tingkat konsumsi ikan;
7. Masih rendahnya kualitas produk olahan pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat;
8. Keamanan pangan perlu ditingkatkan.

D. Pertanahan

1. Penyelesaian pembebasan lahan yang memerlukan waktu yang cukup panjang;
2. Masih lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat;
3. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat;
5. Pengadaan tanah untuk fasilitas publik.

E. Lingkungan Hidup

1. Terjadinya perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh permukiman, perkebunan, pertambangan dan faktor-faktor lain;
2. Luas areal lahan kritis cukup tinggi;
3. Lokasi pemulihan terbatas yang disebabkan lokasi untuk pemulihan yang berada di areal pengguna lainnya milik masyarakat dan IUP PT Timah;



4. Pengelolaan persampahan belum optimal dikarenakan:
 - a. Manajemen pengelolaan sampah masih belum optimal;
 - b. Lokasi TPA hampir penuh dan belum terdapat lokasi pengganti/perluasan. Perluasan dan pengembangan TPA terhambat alih fungsi lahan dikarenakan lahan Produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan masyarakat;
 - c. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan perlu dioptimalkan;
 - d. Cakupan pelayanan sampah masih terbatas dan baru terfokus pada ibukota kabupaten;
 - e. Pengolahan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) di TPA masih belum optimal.
5. Pengelolaan limbah belum optimal, disebabkan oleh:
 - a. Meningkatnya limbah medis akibat pandemi menuntut penambahan jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan;
 - b. Tidak banyaknya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Rendahnya partisipasi pengurusan administrasi kependudukan, terutama akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Kualitas pelayanan belum optimal, diantaranya dipengaruhi oleh:
 - a. Ketersediaan SDM, baik secara kuantitas maupun kualitas;
 - b. Sarana dan prasarana layanan;
 - c. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Ketersediaan data yang valid dan *up to date* belum optimal;
2. Belum optimalnya strategi promosi/KIE kepada masyarakat. Pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media belum optimal karena promosi yang dilakukan masih menggunakan media bersifat konvensional dan koordinasi yang kurang optimal dengan *stakeholders*, semisal MoU dan bentuk kerja sama lainnya;
3. Kualitas dan ketahanan keluarga belum optimal. Penerapan 8 fungsi keluarga belum maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait kualitas dan ketahanan keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), *Stunting*, serta belum optimalnya peran serta *stakeholders* dalam pemberdayaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang belum optimal, yang dipengaruhi oleh: Mitos MKJP, tidak semua bidan yang memiliki sertifikat Inseri CTU IUD/*implant*, belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pelayanan KB MKJP (MOW, MOP) sehingga setiap ada pelayanan tersebut harus dilakukan di FKRTL (Faskes Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan).

H. Perhubungan

1. Konektivitas antarwilayah baik di dalam maupun keluar Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya penyediaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antarwilayah baik di dalam maupun keluar Kabupaten Bangka Barat;
2. Kurang optimalnya penyediaan, penataan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan (LPJU, Rambu, *Guardrail*, Marka Jalan dan lain-lain).



I. Komunikasi dan Informatika

1. Masih adanya wilayah *blank spot* yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi;
2. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi layanan informasi;
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di dalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha;
4. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi;
5. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

J. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal disebabkan:
 - a. Masih banyaknya koperasi yang belum berbadan hukum.
 - b. Rendahnya tingkat kesehatan usaha koperasi.
2. Tingkat pemasaran produk UMKM masih terbatas disebabkan:
 - a. Penerapan teknologi dalam proses produksi UMKM masih rendah.
 - b. Kualitas produk dan jasa UMKM perlu ditingkatkan.
3. Masih banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi halal;
4. Masih banyak produk UMKM yang belum mendaftarkan produknya seperti PIRT, dan laik *hygine*;
5. Terbatasnya ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pasar (kontinuitas produksi);
6. Belum optimalnya upaya untuk mempromosikan produk UMKM.
 - a. Rendahnya pemanfaatan digital marketing;
 - b. Pengembangan kompetensi pelaku UMKM belum optimal.



K. Penanaman Modal

1. Belum adanya peta potensi investasi di Kabupaten Bangka Barat;
 - a. Pengembangan iklim penanaman modal dan promosi belum optimal.
2. Terbatasnya regulasi investasi/penanaman modal daerah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha;
3. Terbatasnya informasi penanaman modal;
 - a. Kurangnya *responsibility* perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
 - b. Belum adanya sistem informasi berbasis geospasial yang berfungsi menyediakan informasi investasi daerah.

L. Kepemudaan dan Olahraga

1. Rendahnya prestasi olahraga;
 - a. Minimnya prestasi olahraga Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet, kurangnya perhatian kepada atlet berprestasi, serta minimnya SDM olahraga berlesensi dan *support* anggaran;
 - b. Belum terpenuhinya sarana olahraga yang berstandar nasional karena minimnya anggaran untuk peningkatan sarana olahraga.
2. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik;
3. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat;
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan olah raga dan kepemudaan.



M. Statistik

1. Pemutakhiran data sektoral belum optimal;
 - a. Data sektoral tidak mutakhir sehingga data tidak menggambarkan kondisi terkini serta kebijakan yang diambil tidak efektif dan efisien.
2. Data sektoral belum sinkron;
 - a. Data sektoral tidak sinkron/bertentangan antarperangkat daerah karena ada perbedaan data yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berbeda, serta data yang ada keterkaitan menunjukkan adanya pertentangan.
3. Meta data sektoral belum sesuai kebutuhan;
 - a. Tidak ada meta data sektoral terstruktur, sehingga validasi data sulit dilakukan serta data yang dikeluarkan tidak ada pendukungnya.
4. Belum optimalnya koordinasi dan pemberian *reward* atau *punishment* didalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan daerah.

N. Persandian

Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah serta pengelolaan keamanan informasi, yaitu:

1. Belum bisa membaca berita kriptogram, sehingga pembacaan berita kriptogram terlambat disampaikan dan kerahasiaan berita tidak terjamin;
2. Belum bisa melakukan sinyal *jamming*, sehingga acara penting terganggu sinyal HP dan rapat rahasia bocor melalui komunikasi seluler;
3. Belum mampu melakukan pelayanan kontra *sensing* terhadap pejabat penting/obyek vital, terutama penyadapan informasi



terhadap pejabat penting sehingga rawan bocornya informasi sensitif;

4. Belum menerapkan sertifikat elektronik sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE, sehingga waktu pelayanan lebih lama, otoritas dokumen hasil pelayanan SPBE berkurang, terjadinya penyangkalan oleh penandatanganan dokumen, serta kerugian transaksi elektronik dalam pelayanan SPBE;
5. Masih terbatasnya SDM bidang persandian.

O. Kebudayaan

1. Masih belum optimalnya dukungan kebudayaan dalam mengembangkan sektor pariwisata.
2. Kekayaan budaya lokal yang belum dilestarikan secara optimal.
3. Kurangnya wadah insan seni untuk berekspresi karena minimnya penyelenggaraan kegiatan kesenian.
4. Banyaknya cagar budaya yang terbengkalai karena kurang optimalnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di daerah.

P. Perpustakaan

1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca masih belum optimal karena belum maksimalnya upaya promosi literasi dan gemar membaca, kurangnya keragaman koleksi bahan pustaka dan pelestarian koleksi warisan budaya daerah dan bangsa di perpustakaan daerah termasuk koleksi bahan pustaka digital, serta keterbatasan sarana dan prasarana;
2. Belum meratanya pertumbuhan perpustakaan umum dan khusus di daerah karena kurangnya dukungan dan komitmen pemerintah



- daerah terhadap pembangunan perpustakaan dalam upaya untuk meningkatkan budaya baca;
3. Masih banyak perpustakaan umum dan khusus yang belum berstandar nasional karena ketersediaan anggaran yang terbatas;
 4. Belum terpenuhinya layanan digitalisasi perpustakaan di perpustakaan daerah karena kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas;
 5. Belum solidnya sinergisitas program dan kegiatan karena masih belum solidnya koordinasi, baik internal maupun eksternal;
 6. Kurangnya sosialisasi terkait penyerahan naskah kuno sehingga sosialisasi kepada masyarakat terkait tatacara penyerahan naskah kuno/sejarah untuk menjadi koleksi perpustakaan.

Q. Kearsipan

1. Belum optimalnya pengelolaan arsip karena banyaknya arsip dinamis inaktif perangkat daerah dan desa yang tidak tertata sesuai dengan standar arsip baku, banyaknya arsip kacau yang tidak terkelola dengan baik, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya arsip dan penyimpanan arsip statis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran yang terbatas;
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi arsip daerah karena penggunaan aplikasi arsip yang baru sebatas *entry* data arsip fisik, kurangnya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap upaya perbaikan sistem kearsipan daerah, serta kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas.
3. Dinamisnya regulasi terkait digitalisasi arsip karena kebijakan pemerintah pusat (ANRI) dan pemerintah provinsi yang terus berubah dan tidak terkoordinasi terkait dengan digitalisasi arsip.



4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan perikanan

1. Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
 - a. Tata niaga hasil perikanan tangkap masih belum menguntungkan nelayan.
2. Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha.
 - a. Masih rendahnya posisi tawar pelaku usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum meratanya pemanfaatan dalam akses permodalan.
3. Tingginya tingkat NPL (*Non Performing Loan*) pada pinjaman ke nelayan;
4. Terjadinya konflik kepentingan antarsektor, contoh sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan khususnya di wilayah laut dan pesisir;
 - a. Masih rendahnya tingkat pemahaman pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir karena kurangnya sosialisasi tentang regulasi pemanfaatan ruang yang berada di laut dan pesisir.
5. Masih maraknya kegiatan *illegal unregulated and unreported fishing* di wilayah perairan Kabupaten Bangka Barat;
6. Masih terbatasnya budidaya pembibitan produk perikanan khas Kabupaten Bangka Barat (kerang darah);
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan;
 - a. Belum terbangunnya fasilitas pelabuhan perikanan karena koordinasi dan sinergitas program yang masih rendah antar *stakeholder*.
 - b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum memadai untuk mendukung pengelolaan hasil tangkapan.



8. Belum adanya regulasi terkait tata kelola perikanan daerah;
9. Daya saing produk Teknologi Pengolahan Hasil (TPH) yang masih rendah.
 - a. Produksi yang tidak kontinu disebabkan jaminan pasar yang tidak ada kepastian.
 - b. Mutu produk yang belum standar yang disebabkan agro industri pengolah berbasis TPH yang belum dibidik.

B. Pariwisata

1. Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan;
 - a. Lemahnya pengelolaan destinasi wisata.
 - b. Kurang optimalnya promosi pariwisata.
 - c. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang pariwisata.
2. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata baru seperti *Geopark*, dan pengembangan kota tua Muntok;
3. Minimnya usaha yang mendukung sektor pariwisata (kerajinan tangan, travel, perhotelan, restoran, dan *Event Organizer*);
4. Belum terwujudnya pengelolaan pariwisata secara terpadu;
 - a. Kekayaan sejarah, adat istiadat, seni dan budaya lokal yang belum dikembangkan secara optimal.
 - b. Kurang optimalnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di daerah secara terpadu.

C. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

1. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
 - a. Petani belum semuanya menggunakan bibit tanaman yang unggul, legal dan bersertifikat.
 - b. Pemupukan belum sesuai dengan standar baku sesuai kebutuhan tanaman (pupuk seimbang).



- c. Adanya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dikarenakan rendahnya pengetahuan petani terhadap OPT.
 - d. Rendahnya mutu produk.
2. Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian;
 - a. Ketergantungan terhadap harga pasaran dunia karena penjualan dalam bentuk bahan baku belum ada produk turunan serta lemahnya kelembagaan petani.
 - b. Masih terbatasnya diversifikasi pasar produk pertanian.
 3. Terbatasnya lahan pertanian;
 4. Lemahnya SDM di bidang pertanian;
 5. Terbatasnya akses permodalan;
 - a. Kurangnya sosialisasi dari perbankan mengakibatkan rendahnya kemampuan manajemen petani, kurangnya kesadaran petani untuk mengurus legalitas lahan dan usahanya, serta produksi dan produktivitas yang masih rendah sehingga mempengaruhi krisis kepercayaan dari pemodal kepada pengusaha tani.
 6. Lemahnya pengembangan komoditas tanaman alternatif selain komoditas utama khususnya yang bernilai ekonomi tinggi;
 - a. Banyak petani mulai mengembangkan komoditas tanaman di luar komoditas utama yang memerlukan dukungan kebijakan pemerintah. Untuk itu perlu diversifikasi komoditas tanaman untukantisipasi adanya fluktuasi harga guna menjaga ketahanan ekonomi petani. Adapun banyak petani mencoba budidaya serai wangi, nilam, pinang dan cabe jawa.
 7. Rendahnya kuantitas produksi ternak di tingkat lokal;
 - a. Program pembibitan ternak sapi lebih dominan dikembangkan untuk peningkatan populasi dibandingkan program penggemukan sapi potong, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah masih tinggi.



- b. Masih rendahnya minat masyarakat dalam beternak dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang budidaya ternak.
- c. Kurang optimalnya penanganan penyakit hewan menular.

D. Kehutanan

1. Rendahnya pengelolaan kawasan Tahura.
 - a. Minimnya SDM dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan Tahura, dikarenakan anggaran belum mendukung.
 - b. Aturan untuk kerja sama dalam pengelolaan dengan pihak ketiga masih menunggu kejelasan. Hal ini disebabkan tata batas luar kawasan Tahura masih belum jelas, perlu dilakukan rekonstruksi ulang, tata batas merupakan wewenang Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

E. Perdagangan

1. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas penunjang serta promosi perdagangan luar negeri;
2. Belum maksimalnya kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok;
3. Belum semua pelaku usaha memiliki izin usaha;
4. Belum tercapainya target ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
5. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;
6. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar.



F. Perindustrian

1. Belum optimalnya dorongan kebijakan dari pemerintah daerah terkait industri pengolahan non timah;
2. Kurangnya kemampuan modal, peralatan, SDM, kemitraan dan literasi digital industri kecil menengah;
3. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor belum optimal.

4.1.2.4 Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1. Penerapan SAKIP sebagai implementasi dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya mampu menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran jika dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan:
 - a. Perumusan sasaran strategis pada RPJMD maupun Renstra perangkat daerah belum sepenuhnya dapat menggambarkan kinerja yang diharapkan akan dicapai;
 - b. Belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriteria kualitas indikator kinerja yang baik, terutama keterukuran dan relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur;
 - c. Belum seluruh program dan kegiatan berkolerasi langsung terhadap capaian sasaran strategis;
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-SAKIP sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja;
 - e. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu memicu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Perencanaan berbasis tematik holistik, integratif, dan spasial belum berjalan dengan baik;



- a. *cascading* rencana pembangunan belum saling bersinergi mencapai tema dan sasaran pembangunan dikarenakan kemampuan perencana di Kabupaten Bangka Barat masih lemah.
- b. basis data belum dibangun dengan baik karena pemenuhan data belum terlalu diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan sistem terkait penyusunan data belum dibangun.
- c. data berbasis spasial sangat rendah dikarenakan perangkat daerah belum familiar menyusun data berbasis spasial.
- d. belum selaras antara dokumen perencanaan karena hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan yang disusun tidak ditindaklanjuti.

B. Keuangan

1. Belum maksimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. BUMD belum berkontribusi terhadap PAD;
3. Penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum optimal;
4. Kompetensi pengelola pajak dan retribusi yang masih harus ditingkatkan;
5. Efektivitas PAD masih rendah;
6. Pendapatan belanja mengikat cukup tinggi;
7. Belanja mengikat cukup tinggi;
8. Belum optimalnya ikhtiar untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus.
9. Belum maksimalnya kemampuan daerah memperoleh Dana Insentif Daerah.



C. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

1. Rendahnya kualifikasi ASN;
 - a. Masih banyaknya ASN di Kabupaten Bangka Barat yang berlatar belakang pendidikan di bawah S-1.
 - b. minimnya pengembangan sumber daya ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan baik dalam bentuk izin belajar dan tugas belajar.
2. Kurangnya pemerataan peningkatan kompetensi ASN karena masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan diklat teknis dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya guna peningkatan sumberdaya ASN. Selain itu, karena adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan dengan pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN.

D. Sekretariat Daerah

1. Masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarperangkat daerah terkait;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
4. Belum optimalnya kerja sama baik antarperangkat daerah maupun dengan mitra lembaga lainnya dalam pembangunan daerah.



E. Penelitian dan Pengembangan

1. Indeks inovasi yang masih rendah;
 - a. Iklim inovasi yang belum tercipta dengan baik.

Belum dilaksanakannya kegiatan SIDA; rendahnya dukungan dan motivasi terhadap inovasi yang muncul baik dalam bentuk penghargaan maupun dukungan anggaran; tidak adanya dukungan anggaran untuk pengembangan inovasi; rendahnya komitmen stakeholder untuk melakukan inovasi; kegiatan yang dilakukan perangkat daerah masih bersifat rutinitas, belum mengarah pada munculnya inovasi; belum adanya aturan tertulis yang mewajibkan perangkat daerah untuk melakukan inovasi; kurangnya dokumentasi dan publikasi kegiatan inovasi; kegiatan inovasi yang ada tidak didukung dengan munculnya regulasi pendukung inovasi, baik oleh kepala perangkat daerah maupun oleh kepala daerah; kurangnya kegiatan inovasi yang berbasis teknologi.
 - b. Program inovasi di masing-masing perangkat daerah masih rendah.
 - c. Setiap perangkat daerah masih kurang dalam melaksanakan program inovasi daerah karena perumusan kegiatan belum sepenuhnya dapat diintegrasikan pada kegiatan inovasi.
 - d. Dalam pengumpulan data dan bahan untuk mengikuti *Innovation Government Awards* (IGA) 2020 mengalami kendala kelengkapan berkas.
2. Kegiatan inovasi tidak dianggarkan secara berkala; kegiatan inovasi masih banyak tidak disahkan oleh kepala daerah; kegiatan inovasi belum berbasis teknologi; kurangnya dokumentasi dan publikasi kegiatan inovasi.
3. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan;



- a. Belum tersusunnya Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
- b. Belum optimalnya pengawalan terhadap perencanaan kegiatan yang berbasis penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah.
- c. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah belum terinventarisasi dengan optimal sehingga berakibat pada database kelitbangan yang tidak memadai.
- d. Penelitian dan pengembangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kelitbangan belum menjadi lini sektor untuk seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- e. Kegiatan di perangkat daerah yang telah dilakukan kajian/penelitian masih belum terkoordinasi dengan baik untuk dilanjutkan pada kegiatan perangkat daerah yang membidangi. Dalam merumuskan kegiatan di perangkat daerah masih ditemukan tanpa melalui kajian dan penelitian terlebih dahulu, sehingga antara perumus kegiatan di perangkat daerah dan litbang tidak sinkron. Kegiatan yang telah melalui proses kajian/penelitian sering ditemukan tidak dapat dilanjutkan karena belum mendapatkan posisi prioritas.

F. Pengawasan

1. Nilai maturitas SPIP masih di level 2;
Masih terdapat nilai yang rendah pada masing-masing unsur analisis resiko (Penilaian tahun 2017) dikarenakan perangkat daerah belum mengerti dan memahami tentang SPIP.
2. Kapabilitas APIP masih di level 2;



APIP belum melakukan internal *quality assesment* untuk menilai kesesuaian penugasan pengawasan internal dengan standar, pedoman, kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya SDM pengawas (Jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional PPUPD) dan tidak semua auditor mengikuti diklat tertentu.

G. Sekretariat Dewan

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dewan.

H. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Bangka Barat yang disebabkan:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial di Kabupaten Bangka Barat;
2. Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di Kabupaten Bangka Barat;
3. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Bangka Barat;



4. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

4.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

A. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

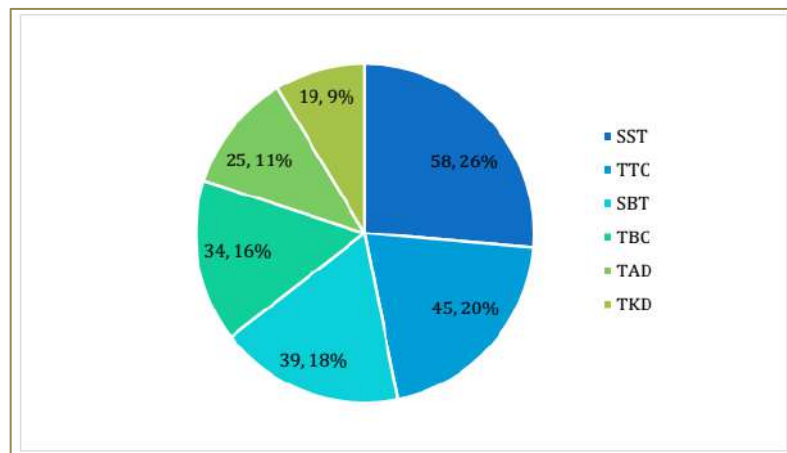
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB.

Pada Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021—2026 menyatakan bahwa perumusan permasalahan mengacu pada pencapaian TPB sebagai bentuk bagian pelaksanaan dan komitmen dari Rencana Aksi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan TPB berbentuk program pembangunan, disusun dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Adapun jumlah indikator pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan klasifikasi kriteria pencapaian TPB sebagai berikut.

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 58 indikator.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) sejumlah 40 indikator.
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) sejumlah 45 indikator.
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) sejumlah 34 indikator.
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 24 indikator.
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 19 indikator.

Adapun rekapitulasi jumlah indikator dan persentase TPB menurut kriteria dapat dilihat pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Rekapitulasi Jumlah Indikator dan Persentase TPB menurut Kriteria

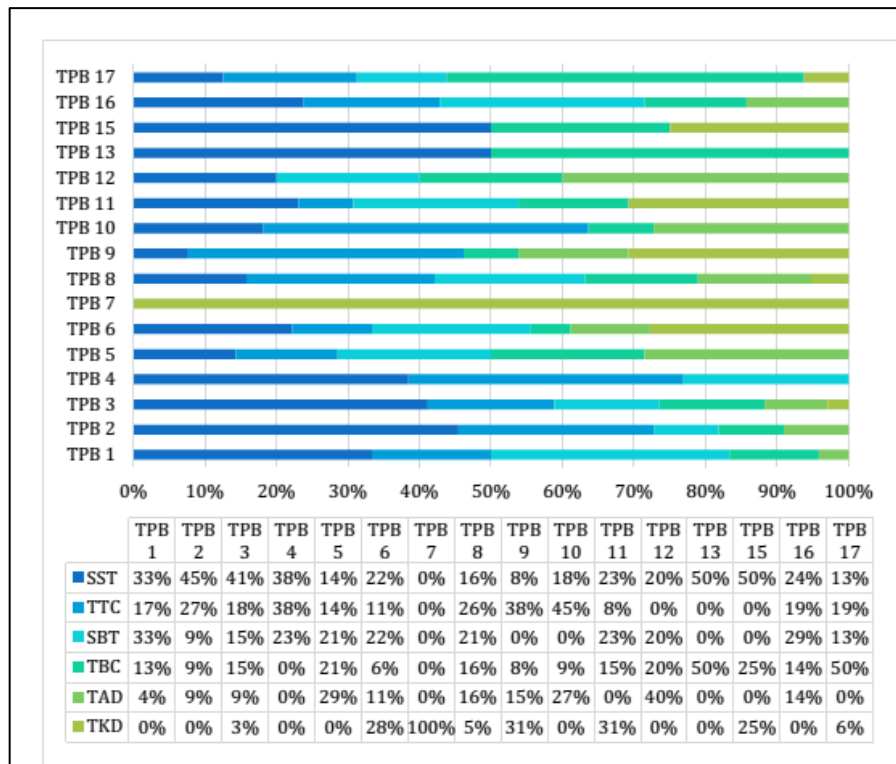
sumber: KLHS RPJMD Bangka Barat Tahun 2021–2026

Adapun kondisi pencapaian TPB berdasarkan tujuan sebagai berikut.

1. Kriteria SST berjumlah 58 indikator yang didominasi oleh TPB 3 sebanyak 14 indikator.
2. Kriteria SBT berjumlah 40 indikator yang didominasi oleh TPB 1 sebanyak 8 indikator.



3. Kriteria TTC berjumlah 45 indikator yang didominasi oleh TPB 3 sebanyak 6 indikator.
4. Kriteria TBC berjumlah 34 indikator yang didominasi oleh TPB 17 sebanyak 8 indikator.
5. Kriteria TAD berjumlah 24 indikator yang didominasi oleh TPB 5 sebanyak 4 indikator.
6. Kriteria TKD berjumlah 19 indikator yang didominasi oleh TPB 6 sebanyak 5 indikator.



Gambar 4.3 Rekapitulasi Pencapaian TPB Menurut Tujuan
sumber: Dokumen KLHS RPJMD Bangka Barat tahun 2021-2026

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, isu strategis TPB Kabupaten Bangka Barat meliputi:

1. **Pilar ekonomi:** pengembangan ekonomi lokal.
2. **Pilar lingkungan:** (a) penurunan kualitas lingkungan hidup; (b) kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; (c) infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi.



3. **pilar sosial:** (a) kemiskinan dan ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja); (b) rendahnya tingkat dan pelayanan kesehatan; (c) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (d) kualitas pendidikan yang belum merata; (e) ketahanan pangan.
4. **Pilar hukum dan tata kelola:** tata kelola pemerintahan.

B. *Regional Comprehensive Economics Partnership*

Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2020. Perjanjian mencakup China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, dan 10 negara ASEAN termasuk Indonesia. RCEP menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ditinjau dari cakupan dunia untuk total Produk Domestik Bruto (PDB) 30,2%, investasi asing langsung (FDI) 29,8%, penduduk 29,6%, dan perdagangan 27,4% yang sedikit di bawah EU-27 yang tercatat 29,8%.

RCEP diprediksi akan menguntungkan bagi Indonesia dari aspek penyerapan tenaga kerja. Sedangkan bagi ASEAN, RCEP meningkatkan integrasi kawasan, terutama dalam hal integrasi ekonomi yang menguntungkan Indonesia. Seperti, adanya proyeksi kenaikan jumlah ekspor Indonesia sebesar 7.2% melalui skema global *supply chain* atau rantai pasok global. Dalam skema ini perusahaan Indonesia menghasilkan sebuah produk yang bisa dipakai sebagai bahan baku di negara lain dengan bantuan bea masuk yang semakin minim. Misalnya, baterai mobil buatan Indonesia dipakai di perakitan mobil di negara lain. Bahkan, Kementerian Perdagangan memperkirakan angka ekspor naik sebesar 8-11% dan investasi meningkat sampai 22% dalam 5 tahun setelah disahkan.



Selain itu, Indonesia mengunggulkan murahnya tenaga kerja, rata-rata tenaga kerja di Indonesia belum mempunyai kapasitas dan daya saing yang mumpuni karena produktivitasnya dinilai masih kurang, setidaknya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih perlu mengejar efisiensi. Dilansir dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, RCEP bakal mewajibkan negara anggotanya untuk mengurangi tarif hingga 92%. Artinya, skema rantai pasokan global dapat berubah, seperti adanya potensi perusahaan multinasional yang berencana untuk merelokasi pabriknya, termasuk ke Indonesia.

Dampak negatif yang perlu diperhatikan Pemerintah Indonesia sebagai negara yang sebagian besarnya masih sangat konsumtif, lambat laun China akan mendominasi serta membuat negara anggota termasuk Indonesia ketergantungan terhadap Cina dan melemahnya UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.

C. Pandemi Covid-19

Penyakit *Coronavirus* 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei Negara Tiongkok. Sejak saat itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi atau wabah bagi kehidupan dunia internasional termasuk Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *Coronavirus* 2019 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PKEIC) pada 30 Januari tahun 2020 dan pandemi pada 11 Maret tahun 2020. Pandemi Covid-19 telah berhasil mengganggu kehidupan ekonomi hingga sosial masyarakat seakan membawa kehidupan manusia pada pola yang baru.



Jumlah terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada data terbaru, 11 Maret 2021 Pukul 14.58 WIB sebanyak 1.398.578 jiwa, meninggal dunia sebanyak 37.932 jiwa dan dinyatakan sembuh sebanyak 1.216.433 jiwa. Terkonfirmasi Covid-19 secara keseluruhan di semua negara secara global sebanyak 117.997.454 jiwa, meninggal dunia sebanyak 2.618.490 jiwa dan dinyatakan sembuh sebanyak 66.824.908 jiwa.

Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun, hal inilah yang menjadikan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga tersendat hingga terhenti beberapa saat. Secara nasional, gejala ekonomi akibat Covid-19 menjadi momen yang paling bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan perubahan APBN sebanyak dua kali dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, tekanan juga berimplikasi pada penerimaan pajak hingga semester I tahun 2020 hanya mencapai Rp513,65 triliun atau 44,02% dari target berdasarkan Perpres 72 Tahun 2020 Rp1.198,8 triliun. Angka tersebut berkontraksi sampai 12,01% dibanding tahun sebelumnya yaitu Rp604,3 triliun.

Jumlah paparan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per-tanggal 09 Maret 2021 pukul 21.00 WIB sebanyak 7.766 jiwa terkonfirmasi dengan klasifikasi 497 jiwa di rawat, 7.151 jiwa selesai diisolasi, dan 118 jiwa meninggal dunia. Selain data di atas, terdapat 5.871 kasus suspek, 15 kasus *probable*, 19.518 kontak erat, dan 17 kasus meninggal *probable*.

Di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Covid-19 membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I tahun



2020. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat sejak Januari 2021—Mei 2021 kasus terkonfirmasi penularan Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.022 jiwa, meninggal dunia 21 jiwa, dan sembuh 1.475 jiwa. Secara rinci kasus terkonfirmasi Covid-19, sembuh, dan meninggal dunia selama lima bulan terakhir diuraikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Data Kasus Covid-19 Kabupaten Bangka Barat
(Periode Januari 2021—Mei 2021)

No.	Bulan	Terkonfirmasi (jiwa)	Sembuh (jiwa)	Meninggal Dunia (jiwa)
1.	Januari	105	102	3
2.	Februari	114	109	2
3.	Maret	103	100	3
4.	April	827	816	11
5.	Mei	873	348	2
	Jumlah	2.022	1.475	21

sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Juni 2021

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti menjaga jarak, menghindari keramaian hingga pembatasan sosial dalam berbagai skala berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan penurunan daya beli, yang mengakibatkan melambatnya perputaran mata uang di masyarakat. Selain itu, pembatasan ekspor komoditas termasuk hasil perkebunan dapat mengganggu stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama Kabupaten Bangka Barat.



4.2.2 Isu Nasional

A. RPJMN tahun 2020-2024

Dari tingkat nasional hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020—2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Visi misi presiden dalam RPJMN 2020—2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah “terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia



Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;



3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Gambaran resiko dan tantangan perekonomian pada tahun 2022 berdasarkan analisis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas untuk pemulihan ekonomi nasional adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian Pandemi Covid-19. Jumlah kasus masih terus meningkat, sementara vaksinasi diperkirakan baru selesai awal tahun 2022.
2. Pemulihan aktivitas ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat didorong oleh distribusi vaksin dan stimulus yang besar. Namun, masih sangat bergantung pada keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.
3. Perubahan harga komoditas global. Peningkatan harga komoditas ekspor utama Indonesia (batu bara dan CPO) akan relatif terbatas. Permintaan akan kedua komoditas berpotensi menurun seiring dengan semangat *Green Recovery* paska Covid-19.
4. Pemulihan dunia usaha. Sebagian dunia usaha tutup permanen atau bangkrut, menyebabkan luka permanen bagi perekonomian. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan.
5. Pemulihan konsumsi domestik. Sebagian masyarakat masih menganggur dan mengalami penurunan pendapatan. Tingkat



keyakinan konsumen, terutama kelas menengah masih pada tingkat pesimis.

6. Ruang terbatas stimulus fiskal dan moneter. Dari sisi kebijakan fiskal, lebarnya defisit akan berdampak pada keberlanjutan utang, sementara pada tahun 2023 defisit dituntut untuk kembali pada 3 persen PDB. Dari sisi kebijakan moneter, melimpahnya likuiditas dan permintaan agregat yang meningkat akan membatasi ruang bagi kebijakan.

Lebih lanjut menurut Bappenas, investasi dan ekspor akan menjadi kunci pemulihan, karena investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang sempat turun karena dampak krisis Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif terjadi melalui peningkatan stok kapital dan produktivitas. Kategori lapangan usaha industri pengolahan akan menjadi motor pertumbuhan hal ini dikarenakan kategori industri mampu pulih karena didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan positif beberapa subkategori esensial selama pandemi, seperti farmasi, kategori lapangan usaha pertanian sebagai salah satu lapangan usaha yang esensial, tetap akan mampu bertahan dan tumbuh positif. Kategori lapangan usaha konstruksi diperkirakan mampu pulih ke level sebelum pandemi didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, dan kategori lapangan usaha pertambangan akan pulih, di antaranya didorong oleh operasionalisasi smelter nikel dan alumina.

Kategori lapangan usaha yang terkena dampak besar dari Covid-19 akan mengalami akselerasi seperti perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, dan transportasi. Kategori lapangan usaha perdagangan akan pulih dengan berangsur-angsur pulihnya pasar ekspor. Kategori lapangan usaha akomodasi dan makanan minuman baru akan pulih pada 2022, perekonomian baru akan relatif bebas dari Covid-19. Kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi sebagai lapangan usaha yang esensial dalam memenuhi kebutuhan



masyarakat selama pandemi mampu bertahan dan tumbuh positif. Kategori lapangan usaha transportasi baru akan pulih pada 2022, perekonomian baru akan relatif bebas dari Covid-19.

Peran Pemerintah masih dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan tahun 2022 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing. Strategi kebijakan diarahkan untuk tidak hanya kembali ke tingkat sebelum krisis, tetapi tumbuh lebih baik. Tema ini menjadi isu besar dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang digaungkan oleh pemerintah pusat.

B. Bonus Demografi

Bonus Demografi atau *Demographic Dividend* berdasarkan istilah dari Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, proporsi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun). Bonus demografi dapat diukur dengan menurunnya rasio ketergantungan di suatu negara, artinya proporsi usia produktif di negara tersebut meningkat. Kondisi seperti ini terjadi ketika angka kelahiran dan angka kematian menurun, menyebabkan usia non-produktif (0-14 tahun) menurun dan penduduk usia kerja dapat hidup lebih lama untuk menghasilkan potensi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut.

UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda.



Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik.

Hasil sensus penduduk tahun 2020 (SP20) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta, melonjak 32,56 juta dibanding hasil Sensus Penduduk 2010. Data jumlah penduduk tiga bulan terakhir, Oktober-Desember 2020, diperoleh BPS dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Hasil sinkronisasi kedua institusi menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia per Desember 2020 sebanyak 271,35 juta.

SP2020 mengungkapkan sejumlah fakta yang menebar ancaman. Selama dekade 2010—2020, laju pertumbuhan penduduk kategori sedang, yakni 1,25%. Pelambatan terlalu tipis dibandingkan dekade sebelumnya, 1,49%. Selama dekade 2000—2010, jumlah penduduk bertambah 31,37 juta atau 3,14 juta per tahun, sedangkan selama 2010—2020, jumlah penduduk meningkat 33,72 juta atau 3,37 juta setiap tahun. Dalam jumlah, penduduk Indonesia terus meningkat signifikan.

Apabila suatu negara tidak siap dalam menghadapi bonus demografi, maka yang terjadi justru adalah bencana demografi sebagai ancaman saat adanya ketidakmampuan dalam mengelola peluang. Salah satu contoh, angka pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan potensi konflik sosial yang meruncingkan angka kriminal. Negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, saat ini sedang berada dalam era bonus demografi. Era bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah di setiap negara dan suatu bangsa.



4.2.3 Isu Strategis Provinsi

Beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana terdapat dalam Perubahan RPJMD tahun 2017—2022 adalah sebagai berikut.

- (1) Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan;
- (2) Masih lambatnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat;
- (3) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat;
- (4) Masih rendahnya indeks reformasi birokrasi;
- (5) Menurunnya Indeks Domokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- (6) Degradasi kualitas lingkungan hidup.

Rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri meliputi:

- (1) Reprioritas jenis proyek, mengingat keterbatasan anggaran yang akan berdampak pada kemampuan fiskal daerah di masa mendatang.
- (2) Memperkuat infrastruktur pelayanan dasar, terutama bidang kesehatan dan penunjang kesehatan (sanitasi dan air minum layak), selain itu infrastruktur penunjang ekonomi (energi dan telekomunikasi), serta infrastruktur pedesaan (penunjang ketahanan pangan).
- (3) Pembangunan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang memiliki *backward-forward linkage* yang luas, sekaligus merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan seperti pariwisata, UMKM, perdagangan, kelautan dan perikanan.
- (4) Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan informasi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik, serta terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
- (5) Pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal.



Selain arahan di atas, arah penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada tiga kebijakan utama yakni Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Belanja Infrastruktur Daerah, dan Sinergi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan K/L dalam *Human Capital Development*.

Berdasarkan kajian dari Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kedeputian Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19 yang mengakibatkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi baik pada perekonomian Nasional maupun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kontraksi terjadi disebabkan melemahnya daya beli seiring dengan meningkatnya pengangguran, penurunan kinerja sektor utama, yaitu industri pengolahan logam dasar dan pertambangan timah, dan peralihan tenaga kerja ke sektor dengan produktivitas yang lebih rendah.

Prospek tahun 2022 dan sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2022, dilakukan dengan menggunakan skenario asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%–5,2% untuk mendukung sasaran pencapaian ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 5,4%–6,0%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut hasil kajian Bappenas didorong oleh:

- (1) Pembangunan KEK Tanjung Kelayang dan Kawasan Industri Sadai yang dapat mendorong kinerja investasi.
- (2) Peningkatan ekspor produk timah dan olahannya beserta CPO; – Konstruksi *smelter ausmelt furnace* di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga awal 2022.
- (3) Meningkatnya tren digitalisasi.
- (4) Rencana kerja sama negara Kepulauan Seychelles di bidang pariwisata dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



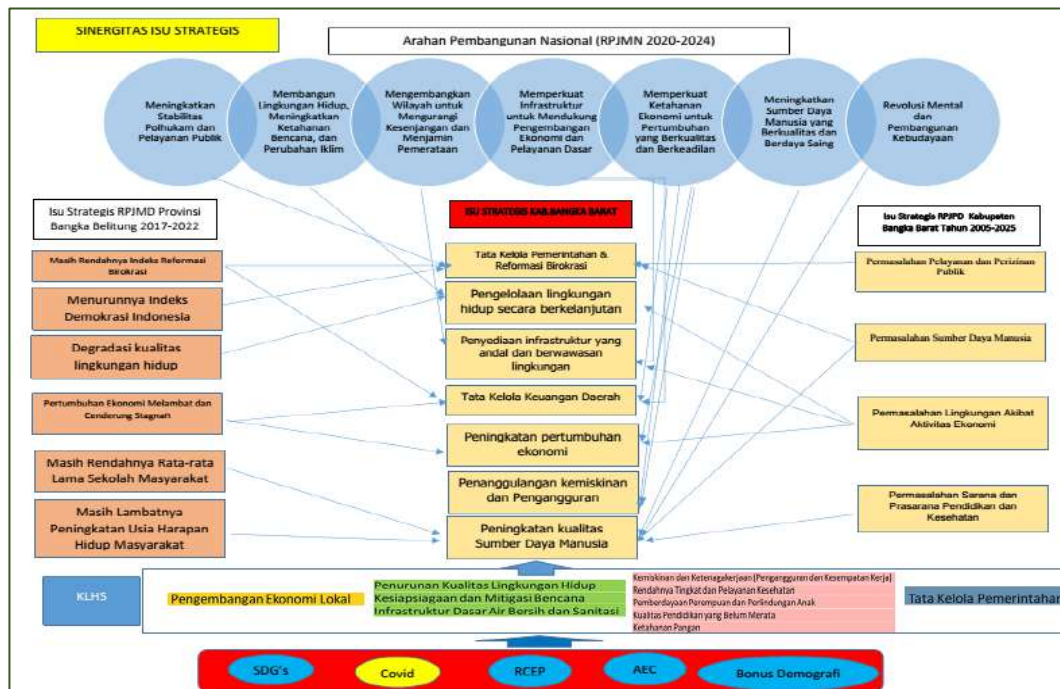
Dalam melakukan perencanaan perlu adanya keselarasan dengan target nasional, sehingga diharapkan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkesinambungan dengan pembangunan nasional.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan hasil telaah capaian kinerja RPJMD tahun lalu, prediksi permasalahan yang akan datang, isu global, isu nasional, isu regional, dapat teridentifikasi sebanyak 7 isu strategis jangka menengah Kabupaten Bangka Barat, meliputi:

- (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (5) Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi;
- (6) Tata kelola keuangan daerah;
- (7) Penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan.

Adapun keterkaitan isu strategis Kabupaten Bangka Barat dengan isu strategis lainnya, baik tataran internasional, nasional, dan regional ditampilkan pada gambar 4.4.



Gambar 4.4 Sinergitas Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat

Keterkaitan antarisu merupakan bagian yang penting untuk dipahami, sebab terkadang dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program kerja dalam setiap perangkat daerah sering terjadi tumpang tindih. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu program kerja sangat menentukan terlaksananya kegiatan pada suatu perangkat daerah atau antarperangkat daerah, namun hal tersebut terkadang sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat perlu adanya analisis keterkaitan antarisu strategis, sehingga keberlanjutan pembangunan dapat terealisasi. Skema keterkaitan antar isu strategis tersaji pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Skema Keterkaitan Antarisu Strategis

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa, maka pertumbuhan ekonomi menjadi isu yang tidak bisa dilepaskan untuk mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan masyarakat. Berlandaskan dasar pemikiran tersebut maka penguatan terhadap sektor ekonomi di Kabupaten Bangka Barat dibutuhkan pemikiran yang serius. Pandemi Covid-19 saat ini perlu disiasati untuk dapat menjaga iklim ekonomi yang mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi menurun secara agregat. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai -5.43%. Adanya kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melakukan upaya akseleratif dan terarah di antaranya dengan mengoptimalkan pemberdayaan industri pengolahan, pariwisata, dan



UMKM dengan tetap meningkatkan sektor primer yaitu sektor pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat secara rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung, namun di tahun 2020 mengalami peningkatan. Kebijakan secara internasional, nasional, maupun provinsi menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang harus terus ditangani. Hadirnya negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi spirit untuk menjawab tantangan terkait permasalahan kemiskinan masyarakat. Kemiskinan sebagai isu global menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Perhatian serius tersebut tercantum dalam TPB. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran juga dirasakan oleh Kabupaten Bangka Barat yang angkanya mengalami peningkatan di tahun 2020. Seiring dengan dinamika sosial ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk, kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus untuk ditangani ke depan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat saat ini masih mengalami beberapa kendala, di antaranya masih ditemukannya ketidaksinkronan data kemiskinan antarperangkat daerah, permasalahan data ini berimbas terhadap ketepatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang ada, sehingga diperlukan untuk memilah data kemiskinan terkait dengan kebutuhannya masing-masing untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Pemilahan data menjadi penting karena nantinya dapat berfungsi untuk menentukan skala prioritas masyarakat yang harus didahulukan karena memang kondisinya sudah mendesak untuk mendapatkan pertolongan.



3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM sangat erat kaitannya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Janji Negara terkait pendidikan yang dituangkan dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pendidikan itu hak segenap anak bangsa dan sekaligus menjadi amanah penting bagi negara untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapat pendidikan yang baik. Berdasarkan kewenangannya, Kabupaten Bangka Barat menjalankan pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah pertama.

Pendidikan menjadi isu penting di Kabupaten Bangka Barat dikarenakan masih rendahnya capaian Angka RLS dan HLS. Kedua indikator ini merupakan ukuran keberhasilan dari kualitas pendidikan di suatu daerah. Di bidang kesehatan, AHH di Kabupaten Bangka Barat juga masih belum optimal dan kenaikannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kualitas pendidikan sebagai arti penting dalam membangun kualitas SDM di Indonesia dan Kabupaten Bangka Barat pada khususnya harus dilaksanakan secara komprehensif dan kolaborasi antarpihak sehingga permasalahan pendidikan tidak berdiri sendiri. Pemenuhan akan pendidikan diharapkan dapat mengubah kehidupan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemenuhan akan derajat kesehatan bagi masyarakat merupakan bagian utama dalam membangun masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan secara komprehensif dengan terminologi kesehatan yang holistik, tidak hanya sehat secara fisik tetapi mental dan rohani juga harus sehat. Pendekatan kesehatan ini dilakukan dengan cara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.



4. Penyediaan Infrastruktur yang Andal dan Berwawasan Lingkungan

Bertumbuhnya sebuah daerah membawa konsekuensi logis akan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang diharapkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan infrastruktur tersebut meliputi penyediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi. Ketersediaan infrastruktur tersebut, selain mempercepat pembangunan perekonomian daerah namun di sisi lain pembangunannya harus terencana dan terintegrasi serta memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini sesuai konsep pembangunan berkelanjutan atau inklusif.

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan yang komprehensif bukan sebagai pilihan dalam membangun kawasan suatu daerah tetapi sebuah kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Perkembangan daerah yang baik tentu disertai lingkungan yang sehat, nyaman dan bertumbuh dalam keselarasan. Dalam banyak contoh yang terjadi malah sebaliknya, daerah yang tumbuh mengenyampingkan pengelolaan lingkungan yang baik. Isu ini menjadi bagian penting karena berdasarkan dari permasalahan yang terjadi termasuk di Kabupaten Bangka Barat. Kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terintegrasi merupakan tantangan bagi Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Muara dari semua permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tata kelola pemerintahannya. Tata kelola ini merupakan bagian yang fundamental dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Tata kelola yang baik akan dapat dilihat dari cara pemerintah merespons maupun menangani tuntutan masyarakat. Terkait



tata kelola pemerintahan, kinerja Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang belum optimal. Secara lebih terperinci, capaian SAKIP yang belum optimal. Selain itu, indeks profesionalitas ASN juga perlu ditingkatkan pencapaiannya. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik perlu diwujudkan. Adanya pemerintahan yang baik diharapkan akan lebih inovatif dalam pembangunan daerah di saat kondisi keuangan daerah yang terbatas. Di samping itu, pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) mutlak untuk dilakukan. Hal ini dapat dicapai apabila ada sinergitas yang baik antar-pihak dan perangkat daerah, serta SDM aparatur yang profesional.

7. Tata Kelola Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan pemerintah daerah menjadi isu strategis bagi Kabupaten Bangka Barat dikarenakan ujung tombak pembangunan suatu daerah adalah kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Saat ini, kemandirian keuangan Bangka Barat cukup rendah, dengan proporsi dana perimbangan pada struktur APBD mencapai 74,45% di tahun 2020. Apalagi kondisi saat ini dan tantangan ke depan, menuntut Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara akseleratif dan inovatif. Selain mengoptimalkan PAD, Pemerintah Daerah perlu bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* di antaranya adalah peningkatan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).



pesona
indonesia 

#ayokebangkabarat



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN





5.1. Visi dan Misi

5.1.1. Visi

Visi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan, wawasan yang tampak dalam khayal, penglihatan atau pengamatan. Menurut Lembaga Administrasi Negara, visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi dalam *Dictionary Of Language and Culture* dimaknai kemampuan memandang dan kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu. Dalam bahasa Inggris visi disebutkan dengan kalimat "*what is the institution want be*" (apa yang dicita-citakan sebuah organisasi).

Dalam konteks pembangunan daerah, visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (*clarity of direction*), menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah, sehingga mampu menjawab permasalahan—permasalahan yang dihadapi oleh daerah dan diselesaikan dalam jangka waktu menengah. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang telah tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005—2025, permasalahan yang ada di tengah masyarakat dan isu-isu



strategis yang dihadapi, maka Visi Kabupaten Bangka Barat tahun 2021—2026 yaitu

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut.

MASYARAKAT BANGKA BARAT

Individu-individu yang hidup secara berdampingan dan membentuk perkumpulan di seluruh desa dan kelurahan, terdiri dari berbagai etnis yang meliputi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Bangka Barat dalam batas-batas tertentu, yang hidup dalam tatanan hukum negara dan agama, memiliki semangat serta etos kerja yang tinggi untuk membangun daerah di Kabupaten Bangka Barat agar dapat menjadi daerah yang maju, sejahtera dan bermartabat.

MAJU

Dengan capaian pembangunan yang diperoleh hingga saat ini, Kabupaten Bangka Barat berusaha untuk melakukan peningkatan di segala sektor sehingga mengalami kemajuan dan terdepan dalam upaya peningkatan ekonomi yang menjadikan industri pengolahan sebagai *leading* sektor untuk menggerakkan sektor lainnya agar dapat lebih memberikan dampak kemajuan bagi peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing melalui pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan Infrastruktur dan tata kota, serta kemandirian desa dengan tata kelola birokrasi yang berkeadaban (*good governance*).

SEJAHTERA

Kesejahteraan dimaknai terpenuhinya rasa aman sentosa dan makmur, bagi masyarakat Bangka Barat. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan lahir dan batin yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar memperkuat tatanan sosial. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang



merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Bangka Barat untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga terwujud masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang maju dan berkeadaban.

BERMARTABAT

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang bermartabat yaitu masyarakat yang beriman, demokratis dan beradab, berbudaya, menghargai hak asasi manusia, masyarakat tertib dan sadar hukum, kreatif, mandiri dan percaya diri. Para ahli psikolog meletakkan karakter bermartabat sebagai dasar kepribadian yang utuh untuk berperilaku yang kuat dan ulet dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, bahagia lahir batin di dunia dan akhirat.

Dengan demikian visi Kabupaten Bangka Barat “Terwujudnya masyarakat Bangka Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat” bermakna “Peningkatan kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat di wilayah Bangka Barat, sehingga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam hal pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik. Pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan diri pada setiap warga masyarakat Bangka Barat, menjadikan warga sebagai masyarakat yang bermartabat, tercermin dalam kehidupan keseharian, lebih mengedepankan moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dengan landasan nilai-nilai spiritualitas”.



5.1.2. Misi

Misi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, patriotisme, dan sebagainya. Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dalam *Webster Third New International Dictionary* tertulis Misi merupakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang (*specific task a person or group is charged*).

Rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan (*the chosen track*) berupa langkah—langkah taktis yang dilaksanakan untuk mewujudkan apa yang telah tertuang di dalam visi telah ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan untuk pelaksanaan visi adalah sebagai berikut.

1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

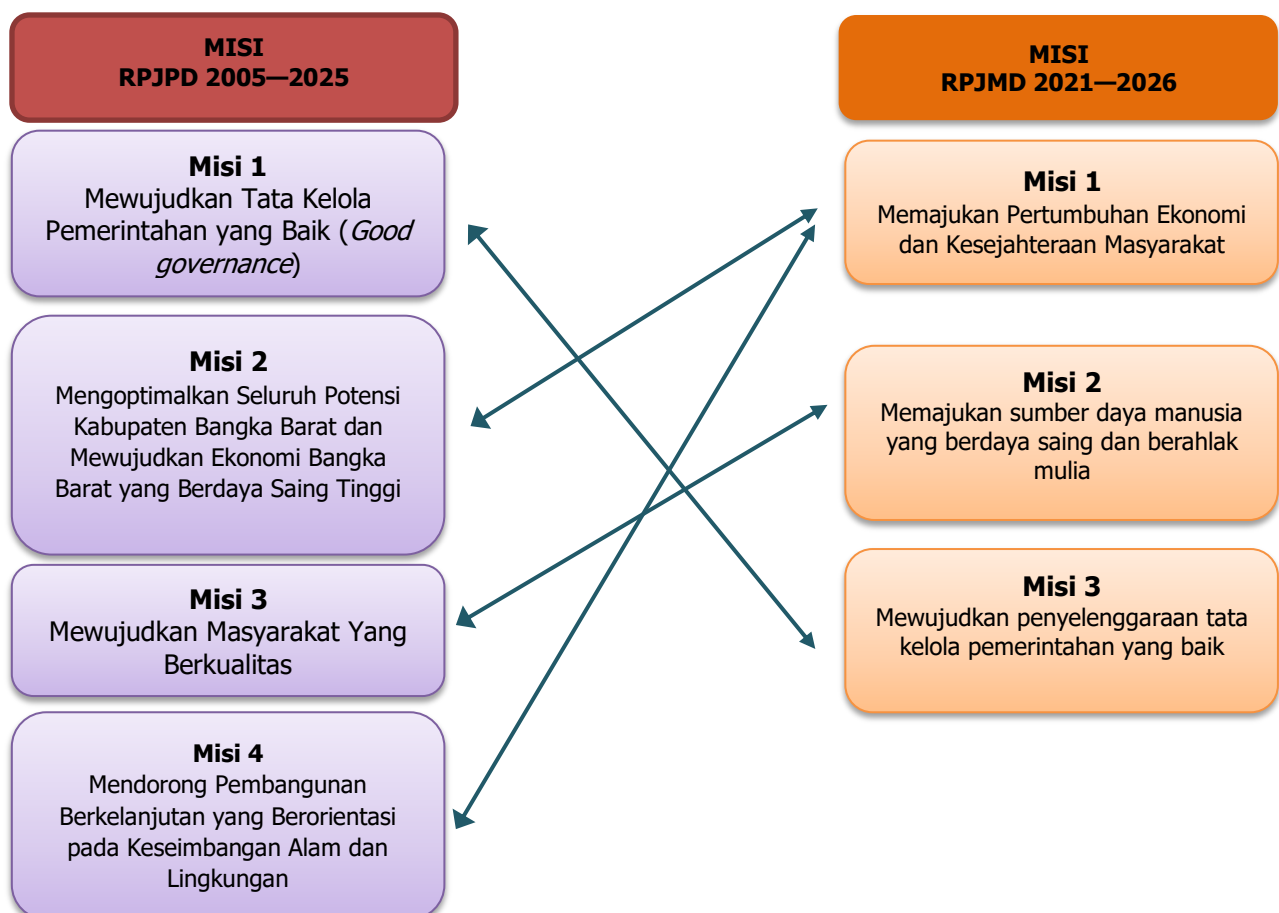
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu yang berdaya saing dalam bidang pendidikan, kesehatan yang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan berahlak mulia.



3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memaksimal kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan meningkatkan kemampuan keuangan Daerah. Pencapaian kualitas perencanaan yang berkelanjutan pada pembangunan di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras terutama dengan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005—2025. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada gambar 5.1.



Gambar 5.1 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005—2025 dengan Misi RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026



5.2. Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan di Kabupaten Bangka Barat. Tujuan dan sasaran menjadi instrumen strategis yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan disusun berdasarkan dua hal yaitu identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pemerintah.

Berdasarkan konsep dasarnya, tujuan terkait dengan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menggapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Proses penentuan tujuan meliputi empat kriteria berikut.

1. Tujuan harus sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
2. Tujuan idealnya menggambarkan kondisi yang hendak diwujudkan pada periode jangka menengah;
3. Tujuan harus dapat diwujudkan dengan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah; dan
4. Tujuan dapat menjadi *guidence* perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Adapun sasaran adalah hasil yang diinginkan dari suatu tujuan yang disusun secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Proses penentuan sasaran meliputi empat kriteria berikut.

1. Sasaran strategis pemerintah daerah yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan;



2. Sasaran strategis memiliki fungsi *outcomes* dari semua program yang disusun oleh pemerintah daerah;
3. Sasaran strategis pemerintah daerah dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
4. Sasaran strategis pemerintah daerah harus dilengkapi dengan target kinerja.

Kriteria acuan terhadap target kinerja sasaran strategis disusun dengan mempertimbangkan sejumlah aspek penting, yaitu:

1. *Specific*, sifat dan tingkat kinerja dapat diuraikan dengan bahasa yang jelas;
2. *Measurable*, target kinerja disusun dengan jelas dan terukur;
3. *Achievable*, target kinerja dapat untuk dicapai dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki;
4. *Relevant*, menggambarkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond*, perumusan waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Mengacu pada pemahaman dasar yang dijelaskan, penentuan tujuan dan sasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai acuan awal dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi pijakan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026, dapat dilihat pada tabel 5.1.



Tabel 5.1 Keselarasan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Sasaran
1. Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)
	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)
	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)
1.1.2 Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal
1.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas
	Indeks Bangunan Gedung
1.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan
	Indeks Resiko Bencana
1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita
1.2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
1.2.2 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berahlak mulia	
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia
2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
	Harapan Lama Sekolah
	Persentase Sekolah Terakreditasi A
2.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
	Prevalensi <i>Stunting</i>
2.1.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender
	Status Kabupaten Layak Anak
2.1.4 Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	
3.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi
3.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP
	Opini BPK
	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	Indeks Profesionalitas ASN
3.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat
3.2 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
3.2.1 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah



Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terdapat tujuh isu strategis dijadikan perumusan tujuan dan sasaran beserta dengan indikatornya masing-masing selama lima tahun ke depan yakni 1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; 2) penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 3) pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 4) peningkatan sumberdaya manusia; 5) tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi; 6) tata kelola keuangan daerah; 7) penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan. Dari setiap isu strategis tersebut kemudian dijabarkan secara lebih spesifik dalam tujuan, sasaran, dan indikator. Penjabaran ini bertujuan agar setiap isu strategis nantinya memiliki tolak ukur yang jelas dan memastikan adanya keterkaitan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Misi 1 “Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”

Misi pertama dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan kristalisasi dari empat isu strategis Kabupaten Bangka Barat yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan agar tercapainya peningkatan kesejahteraan yang merata dan adil kepada setiap masyarakat. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah konsep pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian.



Terdapat dua tujuan yang akan dicapai dari **misi 1** ini. *Pertama*, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan ini, terdapat empat sasaran, yaitu meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah, meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah, meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah memiliki indikator tujuan/sasaran yang terdiri dari pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHB); pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB); kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB); dan kontribusi sektor perdagangan serta jasa terhadap PDRB (ADHB).

Selain itu, sasaran daerah meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah memiliki indikator pertumbuhan realisasi penanaman modal. Di sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah dapat dilihat indikator sasarannya yakni indeks konektivitas dan indeks bangunan gedung.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup, persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan, dan indeks risiko bencana. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil perhitungan dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sedangkan indeks risiko bencana dilihat dari rumus dasar umum untuk analisis risiko yang dituangkan dalam Pedoman Perencanaan Mitigasi Risiko Bencana (Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008) adalah sebagai berikut.



$$\text{Resiko (R)} = \text{bahaya(H)} \times \frac{\text{Kerentanan (V)}}{\text{Kapasitas (C)}}$$

Keterangan:

Bahaya = Jumlah jenis bencana

Kerentanan = Jumlah desa rawan bencana

Kapasitas = Jumlah desa tangguh bencana

Tujuan kedua dari misi 1 ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yakni: menurunnya angka kemiskinan dengan indikator angka kemiskinan dan menurunnya angka pengangguran dengan indikator angka pengangguran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sedangkan menurunnya angka pengangguran dilihat dari indikator kinerja persentase angka pengangguran. Persentase angka pengangguran terbuka dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), yakni suatu indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran.

Misi 2 “Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia”

Pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Kemampuan daerah untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Daya saing yang tinggi akan menjadikan masyarakat siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing masyarakat, pembangunan juga harus diperkuat dengan masyarakat yang berakhlak mulia. Manifestasi keterwujudan akhlak mulia akan tercermin dari perilaku



manusia yang berhubungan terhadap lingkungan secara fisik maupun sosial yang selalu mengindahkan aturan dan norma.

Isu strategis secara global yang terkait sumber daya manusia dalam mencapai Visi Kabupaten Bangka Barat lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, jasmani dan rohani. Untuk mencapai visi tersebut, misi kedua yang akan dilakukan adalah memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat dengan indikator tujuannya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Untuk mewujudkan IPM yang meningkat, maka ditetapkan empat sasaran dan delapan indikator sasaran. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan persentase sekolah terakreditasi A. Sasaran kedua adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup dan prevalensi *stunting*. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan secara umum menjadi sasaran ketiga dalam pengembangan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini tertuang dalam sasaran ketiga yaitu meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan status Kabupaten Layak Anak. Terakhir, sasaran keempat adalah meningkatnya kesalehan sosial masyarakat dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Kesalehan sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah (akhlak) di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Nilai kesalehan sosial masyarakat dapat dilihat dari dimensi kepedulian antarsesama, kepedulian terhadap lingkungan, dan masyarakat sadar hukum.



Sasaran-sasaran tersebut digunakan karena sangat relevan dalam mengukur kinerja urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta sosial. Begitu pula indikator-indikator tersebut memiliki variabel pengukuran yang komprehensif. Salah satu indikator yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam sasaran-sasaran di atas adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran keberhasilan pembangunan yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) berupa IPM.

Misi 3 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu wujud terselenggaranya daerah yang menjunjung kepentingan rakyat dengan menganut prinsip partisipasi setiap warga, aturan hukum yang dijamin oleh pemerintah, kebijakan publik yang transparan, semua lembaga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada pilihan-pilihan terbaik, adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, pembuat keputusan bertanggung jawab kepada publik, dan para pemimpin memiliki strategi ke depan. Oleh sebab itu, tata kelola pemerintahan yang baik sebaiknya diselenggarakan di setiap daerah. Tata Kelola pemerintahan yang baik difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel serta peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah.

Isu-isu strategis yang dihadapi lima tahun ke depan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang baik adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan. Isu-isu tersebut menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui misi ketiganya



“mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan yakni: 1) mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi; dan 2) meningkatkan kemampuan keuangan daerah dengan indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD). Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu (Permenkeu RI Nomor 107/PMK.07/2018).

Sasaran untuk mencapai tujuan pertama dalam misi ini terbagi menjadi 2, yaitu: a) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan indikator sasaran berupa: nilai SAKIP, opini BPK, maturitas SPIP, indeks SPBE, dan Indeks Profesionalitas ASN; b) meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP yang merupakan indikator pencapaian sasaran pertama, menjadi tanggung jawab semua perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat, karena semua perangkat daerah memiliki kewajiban melaporkan hasil kinerjanya. Namun, terdapat beberapa urusan yang menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan nilai SAKIP. Beberapa urusan tersebut adalah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, statistik, persandian, kearsipan, dan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Urusan perencanaan boleh melaksanakan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah sedangkan urusan pendidikan dan pelatihan dapat melaksanakan program kepegawaian daerah untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN yang juga merupakan sasaran untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel.



Pencapaian sasaran kedua dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, yaitu opini BPK. Melalui seluruh perangkat daerah, opini BPK dapat menggambarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memastikan setiap anggaran yang sudah dialokasikan tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Opini BPK dapat dijadikan acuan untuk mengukur kesesuaian antara manfaat dari pelaksanaan program atau kegiatan dengan penggunaan anggaran. Pencapaian sasaran ketiga adalah maturitas SPIP yang menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Bagian ini juga menjadi dasar perumusan rekomendasi peningkatan kematangan penyelenggaraan SPIP. Pencapaian sasaran keempat adalah Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di suatu daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai Indeks SPBE dapat dijadikan acuan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang sesuai dengan zaman.

Pencapaian sasaran terakhir yaitu indeks profesionalitas ASN. Indeks ini dipakai untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya hasil dari indeks ini dapat digunakan sebagai penilaian dan evaluasi dalam pengembangan profesionalisme ASN, sehingga diharapkan dengan profesionalitas ASN yang meningkat maka kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bangka Barat juga ikut mengalami perbaikan.



Sasaran kedua untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah. Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah dapat dilihat berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah. Enam aspek yang dapat dijadikan acuan pengukuran, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Dari keenam aspek dapat diukur sejauh mana pencapaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Bukan hanya tata Kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kemandirian keuangan daerah menjadi tujuan kedua dalam rangka pencapaian misi ke-3 Kabupaten Bangka Barat melalui sasarannya meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, alat ukurnya adalah derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal daerah diukur dengan menggunakan *administrative dependent ratio* yaitu perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Pada tahun 2020, PAD Kabupaten Bangka Barat sebesar 6,45% dari total pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Semakin tinggi dan besar rasio PAD Kabupaten Bangka Barat terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah. APBD menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah.



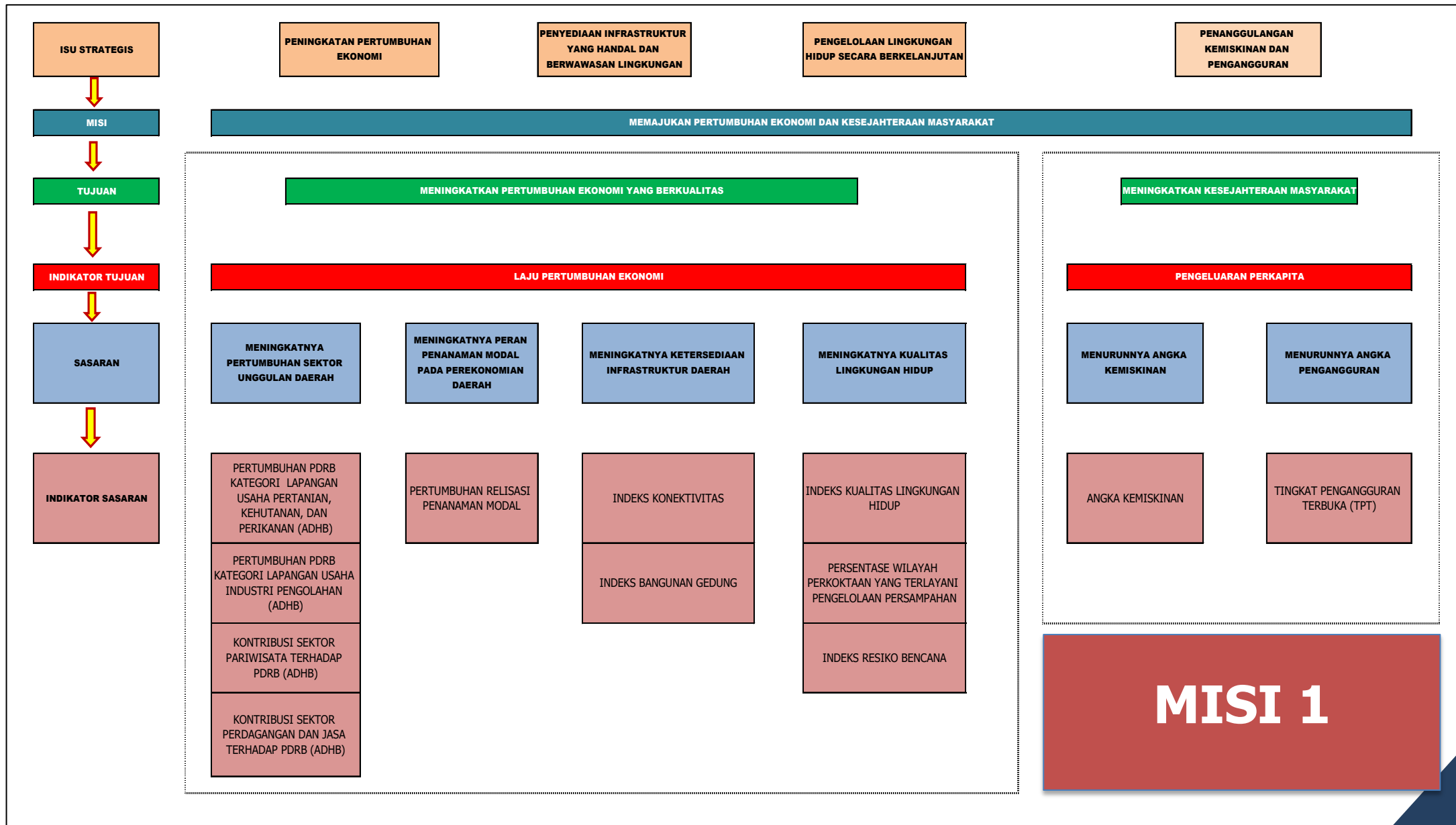
Tabel 5.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2021—2026

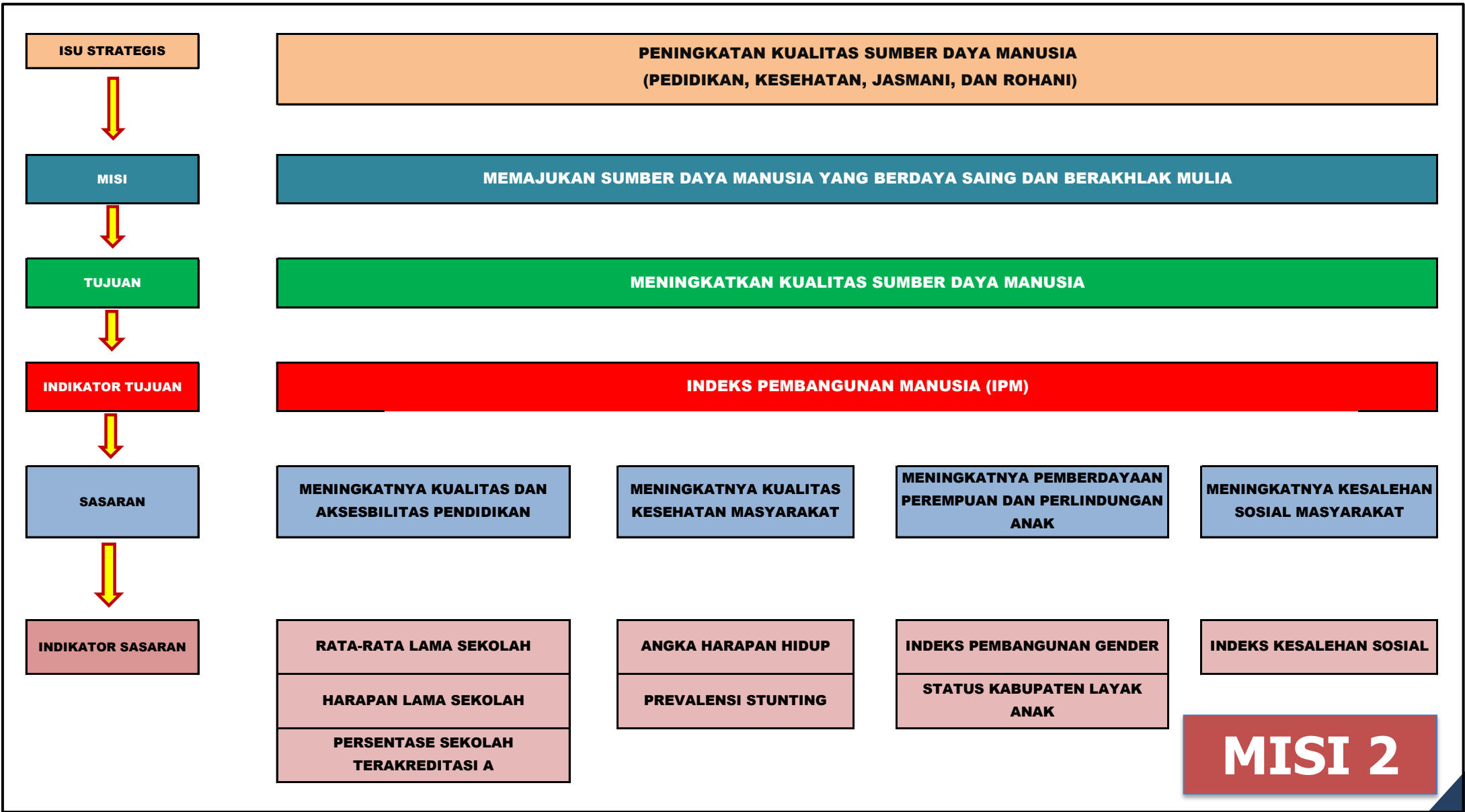
Misi/Tujuan/ Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat									
1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas									
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,43	5,16	4,91	4,68	4,47	4,28	4,10	4,10
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah									
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	9,04	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	-10,6	6,04	5,70	5,39	5,11	4,86	4,64	4,64
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,33	2,36	2,38	2,40	2,41	2,42	2,43	2,43
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	26,95	26,56	27,03	27,46	27,86	28,22	28,56	28,56
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah									
Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	417	532	805	917	1.029	1.141	1.253	1.253
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah									
Indeks konektivitas	Nilai	0,68	0,68	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup									
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,29	70,39	70,91	71,43	71,94	71,94	71,94	71,94
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	41,18	41,18	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	64,71
Indeks Resiko Bencana	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
1.2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat									
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12.233	12.419	12.605	12.791	12.977	13.163	13.349	15.245
Menurunnya angka kemiskinan									
Angka kemiskinan	%	2,70	2,77	2,70	2,63	2,56	2,50	2,43	2,43
Menurunnya angka pengangguran									
Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,12	4,03	3,94	3,85	3,77	3,69	3,61	3,61
2. Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia									
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia									
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,08	69,31	69,57	69,86	70,09	70,35	70,6	70,6
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan									
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,22	7,23	7,25	7,31	7,32	7,35	7,38	7,38
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,53	11,53	11,54	11,55	11,56	11,57	11,58	11,58
Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	23,8	23,8	24,32	24,86	25,51	25,95	26,49	26,49
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat									
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,23	70,41	70,56	70,70	70,88	71,03	71,03
Prevalensi <i>Stunting</i>	%	12,38	10,36	8,75	7,46	6,40	5,52	4,79	4,79
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,03	90,50	90,67	90,82	91,06	91,33	91,50	91,50
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat									
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	N/A	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

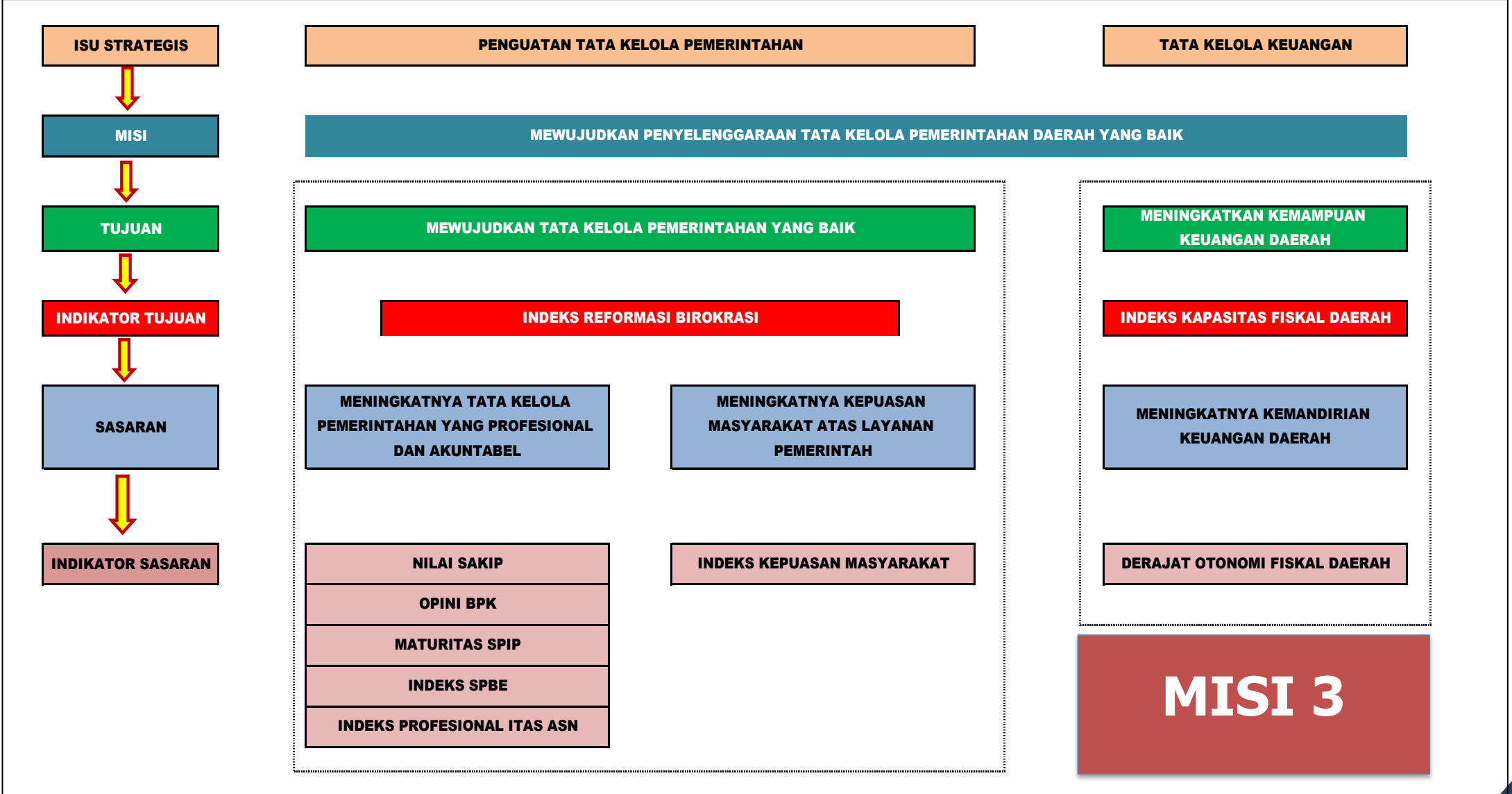


Misi/Tujuan/ Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik									
3.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik									
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Buruk	Buruk	Kurang	Kurang	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel									
Nilai SAKIP	Nilai	69,82	70,00	70,98	71,56	72,14	72,72	73,3	73,3
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi
Indeks SPBE	kategori	cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	64,37	64,60	64,84	65,07	65,30	65,53	65,53
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah									
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,92	81,22	81,52	81,82	82,12	82,42	82,72	82,72
3.2 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah									
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah									
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,45	8,96	8,87	9,22	9,39	9,38	9,43	9,43

Untuk menjalankan ketiga misi Kabupaten Bangka Barat tersebut, diperlukan kerja sama antarperangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya. Adapun kerangka keterkaitan isu strategis dengan indikator sasaran dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut.









pesona
indonesia



#ayokebangkabar



BAB VI

STRATEGI,

ARAH KEBIJAKAN,

DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH





Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks pembangunan daerah, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan rancangan induk perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Bangka Barat memperhatikan kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020—2024 dan kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perubahan Tahun 2017—2022.



Strategi pembangunan dalam RPJMD ini telah didahului proses analisis atas kondisi makro ekonomi nasional, kondisi ekonomi makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kondisi mikro di daerah (kecamatan dan desa) se-Kabupaten Bangka Barat. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat, dengan menggunakan analisis *logic model* atau model logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

Logic model membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, *output* pada urusan teknis atau perangkat daerah.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis dengan pendekatan model logika dapat ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021–2026 untuk mewujudkan visi dan misi lima tahun ke depan dapat terlihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021–2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas	1.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	a. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan) dan perikanan; b. Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi; c. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian; d. Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis potensi daerah; e. Peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan, serta literasi digital usaha mikro;



Tujuan	Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penguatan kelembagaan dan peran koperasi; g. Meningkatkan infrastruktur destinasi pariwisata terpadu; h. Meningkatkan promosi pariwisata yang inovatif berbasis teknologi informasi melalui pendekatan penta helix; i. Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif; j. Meningkatkan pelestarian kekayaan sejarah, adat istiadat, seni dan budaya lokal; k. Mengoptimalkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; l. Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura); m. Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan, distribusi perdagangan serta pengembangan potensi pasar; n. Meningkatkan perlindungan konsumen.
	1.2 Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan ketersediaan data yang berkualitas serta penyusunan regulasi investasi untuk fasilitasi kemudahan usaha dan investasi; b. Peningkatan iklim investasi daerah; c. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
	1.3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan jaringan dan perlengkapan jalan; b. Percepatan penatagunaan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan; c. Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung negara.
	1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan; b. Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu; c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.1 Menurunnya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan perlindungan sosial; b. Mengembangkan dan meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan miskin; c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan kelurahan; d. Peningkatan akses dan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau; e. Menyediakan akses perumahan dan pemukiman



Tujuan	Sasaran	Strategi
		yang layak, serta meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perumahan.
	1.2 Menurunnya angka pengangguran	a. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan, dan kemitraan; b. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial.
Misi 2: Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	a. Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan; b. Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu; c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah.
	1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat; b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga Kesehatan; c. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat; d. Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan e. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera.
	1.3 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, keikutsertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak; b. Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak.
	1.4 Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	a. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama (Kepedulian sosial); b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; c. Meningkatkan masyarakat sadar hukum; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kemajemukan (kebhinekaan).
Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik		
1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	a. Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan daerah; b. Penguatan penerapan kebijakan satu data; c. Memperkuat tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah; d. Memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;



Tujuan	Sasaran	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> e. Peningkatan implementasi pengamanan informasi; f. Optimalisasi penerapan SPBE; g. Meningkatkan tertib kearsipan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan; h. Mengembangkan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; i. Memperkuat implementasi manajemen ASN.
	1.2 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas; b. Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien; c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.
2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	1.1 Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; b. Meningkatkan peran BUMD dan BUMDes.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

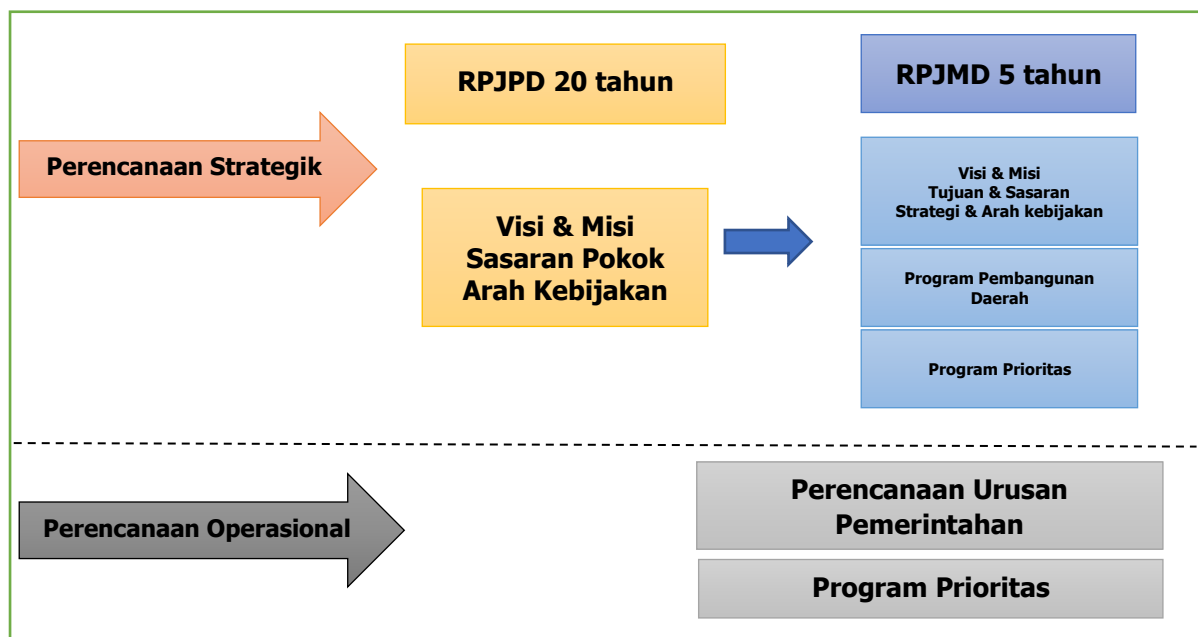
Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Lebih lanjut arah kebijakan adalah keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan berisi rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Secara normatif perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut.

- a) Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b) Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam gambar 6.1.



Gambar 6.1. Bagan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat 2005—2025, dan harus memperhatikan arah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang



Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005—2025 pada tahap ketiga (2017—2022) dan tahap keempat (2022—2025) dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2025

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
1. Meningkatnya perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja; b. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan; c. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing; d. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah; e. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan SDA; f. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi; g. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral; h. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah; i. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan; j. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global; k. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan; l. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; m. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian; n. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan industri pariwisata; o. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata; p. Peningkatan Nilai tambah atas pemanfaatan SDA berbasis kehutanan



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing; b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat; c. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan; d. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan iklim demokrasi yang kondusif melalui pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri serta penguatan ketahanan masyarakat; b. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah perlu dilakukan melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi kebijakan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah melalui penataan dan pemberdayaan birokrasi yang bersih, responsif dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean government didukung dengan pendataan dan perencanaan komprehensif, peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas sumber daya aparatur; pembangunan fasilitas-fasilitas publik dan penempatan aparatur hingga ke daerahdaerah dan pulau-pulau terpencil dan sulit dijangkau dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat; serta menekantingkat penyalahgunaan wewenang pada semua lapisan birokrasi; b. Meningkatkan Rasio Belanja Publik terhadap Belanja Aparatur yang mengarahkan kebijakan keuangan pada upaya untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, demokratis, responsif, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis; mendorong terciptanya kemandirian fiskal dengan mendorong pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah untuk sebesar mungkin kemakmuran masyarakat.
Menurunnya disparitas pembangunan antarwilayah dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa;



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	<ul style="list-style-type: none"> b. Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang tertinggal, Strategis cepat tumbuh, perbatasan serta daerah potensial lainnya; c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur; d. Peningkatan akses informasi, pemasaran, permodalan, kesempatan kerja dan teknologi; e. Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi; f. Pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW; g. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas; h. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik; i. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan; j. Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; k. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olah raga; l. Pembangunan budaya lokal diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul; m. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG); n. Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang; b. Menyeimbangkan upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air agar terwujud



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh rakyat baik pada generasi sekarang maupun akan datang.

sumber: RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005–2025

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini serta prediksi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka prioritas pembangunan dibagi menjadi 4 tahap pembangunan lima tahunan berdasarkan pendekatan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Adapun Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017–2022) dan Tahap IV (2022–2025) dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3 Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahap III (2017–2022) dan Tahap IV (2022–2025)

Sasaran Pokok	Prioritas Lima Tahun	
	2017–2022	2022–2025
Meningkatnya ekonomi daerah	I	I
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	II	II
Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	V	IV
Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	IV	III
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	III	V
Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	VI	VI

sumber: RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dirumuskanlah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan strategi untuk mencapai sasaran daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021–2026 yang tercantum dalam tabel 6.4.



Tabel. 6.4 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan) dan perikanan	Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah
		Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi	
		Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian	
		Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis potensi daerah	
		Peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan, serta literasi digital usaha mikro	
		Penguatan kelembagaan dan peran koperasi	
		Meningkatkan infrastruktur destinasi pariwisata terpadu	
		Meningkatkan promosi pariwisata yang inovatif berbasis teknologi informasi melalui pendekatan penta helix	
		Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		Meningkatkan pelestarian kekayaan sejarah, adat istiadat, seni dan budaya lokal	
		Mengoptimalkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	
		Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura)	
		Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan, distribusi perdagangan serta pengembangan potensi pasar	
		Meningkatkan perlindungan konsumen	
Meningkatnya peran penanaman modal pada	Meningkatnya peran penanaman modal pada	Penguatan ketersediaan data yang berkualitas serta penyusunan regulasi investasi	Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	perekonomian daerah	untuk fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	iklim dan layanan investasi
		Peningkatan iklim investasi daerah	
		Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Meningkatkan ketersediaan jaringan dan perlengkapan jalan	Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
		Percepatan penatagunaan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan	
		Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung Negara	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah
		Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu	
		Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan perlindungan sosial	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan
		Mengembangkan dan meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan miskin	
		Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan kelurahan	
		Peningkatan akses dan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau	
		Menyediakan akses perumahan dan pemukiman yang layak, serta meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perumahan	
	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan, dan kemitraan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan	
		Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu		
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah		
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat		
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan		
		Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat		
		Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan		
		Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, keikutsertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak.		Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat
		Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak		
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial)		
		Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian Lingkungan hidup		
		Meningkatkan masyarakat sadar hukum		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemajemukan (kebhinekaan)	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
		Penguatan penerapan kebijakan satu data	
		Menguatkan tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	
		Menguatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
		Peningkatan implementasi pengamanan informasi	
		Optimalisasi penerapan SPBE	
		Meningkatkan tertib kearsipan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	
		Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	
		Menguatkan implementasi manajemen ASN	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital			
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah
		Meningkatkan peran BUMD Dan BUMDes	

Berdasarkan perumusan arah kebijakan pembangunan daerah pada tabel 6.4, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun mendatang yang tampak dalam tabel 6.5.



Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2022—2026

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan Pembangunan				
	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah				
Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah	Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi				
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah			Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah				
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan				
Menurunnya angka pengangguran					
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan				
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat					
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat				
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat					
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien				
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah					
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah				

Dalam rangka menentukan fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan guna mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berdasarkan analisis terhadap beberapa capaian dalam pelaksanaan



program-program pembangunan yang dilaksanakan periode sebelumnya, dan strategi pencapaian sasaran pembangunan daerah 5 tahun ke depan, maka ditetapkan fokus pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026, yang tertuang pada tabel 6.6 berikut.

Tabel 6.6 Fokus Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

Fokus Pembangunan				
2022	2023	2024	2025	2026
Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan	Kesehatan
Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
Perekonomian sektor unggulan	Perekonomian sektor unggulan	Perekonomian sektor unggulan	Perekonomian sektor unggulan	Perekonomian sektor unggulan
Penanaman modal (investasi)	Penanaman modal (investasi)	Penanaman modal (investasi)	Penanaman modal (investasi)	Penanaman modal (investasi)
Lingkungan hidup	Lingkungan hidup	Infrastruktur	Infrastruktur	Infrastruktur
Penurunan angka kemiskinan	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Lingkungan hidup	Lingkungan hidup	Lingkungan hidup
Penurunan tingkat pengangguran	Penurunan tingkat pengangguran	Penurunan tingkat kemiskinan	Penurunan tingkat kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penurunan Tingkat Pengangguran	Penurunan Tingkat Pengangguran	Penurunan tingkat pengangguran
Kesalehan sosial masyarakat	Kesalehan sosial masyarakat	Kesalehan sosial masyarakat	Tata kelola pemerintahan	Kemandirian keuangan
Tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kemandirian keuangan	
Pelayanan publik	Pelayanan publik	Tata kelola pemerintahan		

Dari fokus pembangunan maka disusunlah tema pembangunan setiap tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, sebagaimana tabel 6.7.



Tabel 6.7 Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

NO	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2022	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat yang bermartabat melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, pembangunan sumberdaya manusia yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien (reformasi birokrasi)
2	2023	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat yang bermartabat melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
3	2024	Memantapkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat yang bermartabat melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi, perbaikan kualitas infrastruktur yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
4	2025	Memantapkan kualitas pelayanan dasar, kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan peningkatan kemandirian keuangan daerah menuju masyarakat Bangka Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.
5	2026	Memantapkan kemajuan infrastuktur yang berwawasan lingkungan, dan kemandirian keuangan daerah, serta terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2022—2026 adalah untuk menjawab tujuh isu strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya program pembangunan daerah juga diarahkan untuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Selain urusan pemerintah wajib yang berkaitan pelayanan dasar, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala



daerah yang telah disampaikan pada proses politik (kampanye pilkada). Berikut program unggulan kepala daerah yang perlu diakomodir dalam penyusunan program pembangunan daerah seperti pada tabel 6.8.

Tabel 6.8 Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat

Bidang	Program Unggulan
Petani	Mewujudkan masyarakat petani sejahtera yang kuat dari sisi ekonomi dengan sistem tata kelola perkebunan, pertanian, dan peternakan yang unggul dan terintegrasi.
UMKM	Mendorong kekuatan ekonomi masyarakat melalui kekuatan UMKM yang modern dan maju dengan fasilitas sistem pemasaran terpadu.
<i>Enterpreneurship</i>	Memperkuat Enterpreneur yang sudah ada dan mendorong calon pengusaha baru dengan sistem regulasi pemerintahan yang berpihak pada masyarakat Bangka Barat
Kesejahteraan Pelayanan Publik	Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelayan publik agar dapat lebih maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
BUMD	Mewujudkan BUMD yang handal, terintegrasi dengan BUMDes dan koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi kemasyarakatan
Nelayan	Mewujudkan nelayan yang handal, tangguh, dan sejahtera dengan ditopang oleh teknologi yang tepat guna
Pendidikan	Mewujudkan pendidikan yang religius, bermutu, berkualitas, dan gratis
Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas, ramah, dan melayani serta berbasiskan teknologi
ASN	Membentuk ASN yang kuat, cerdas, berkualitas dan kompak dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat
Seni dan Budaya	Memberi ruang dan tempat bagi pelaku seni dan budaya serta kaum milenial untuk berkreasi dan melakukan inovasi demi kemajuan Bangka Barat
Program Keummatan	Memperkuat landasan keagamaan ditengahaengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan harmoni dengan pemahaman agama yang benar
Olahraga dan Pemuda	Memberikan perhatian khusus buat dunia oleh raga untuk masyarakat umum khusus penghargaan bagi atletatlit yang berprestasi



Bidang	Program Unggulan
<i>Good Governance</i>	Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang religius, humanis dan berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan benar
Pelayanan Publik	Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani yang berbasis teknologi sampai ketingkat pedesaan
Muntok	Mengembalikan kejayaan Muntok sebagai kota pelabuhan dan perdagangan
Pariwisata	Mewujudkan Bangka Barat sebagai tujuan wisata dengan berbasiskan sejarah, kebudayaan, religius, kuliner dan keindahan alam serta masyarakat
Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas dan tempat sasaran
Penataan Kota dan Desa	Penataan kota dan desa yang indah, nyaman dan ramah lingkungan

Janji politik kepala daerah yang menjadi prioritas untuk dijadikan program pembangunan daerah adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pelayanan Kesehatan dengan memberikan jaminan pelayanan kesehatan (berobat gratis) bagi semua penduduk Bangka Barat, dan bidang pendidikan memberikan pembiayaan pendidikan secara gratis untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (SD/SMP) bagi semua masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Selain itu, program mengembalikan kejayaan muntok sebagai kota pelabuhan dan perdagangan menjadi unggulan untuk dilaksanakan. Program pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026 dengan target capaian yang disertai pagu indikatif tergambar dalam tabel 6.9.

Tabel 6.9 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1. Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat																
1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas																
1.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah																
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	40	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	500.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	70	2.500.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	40	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	51	4.000.000.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	92,59	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	550.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	20	20	20	100.000.000	25	100.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	1.100.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	160.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.260.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemuahan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	34,40	38,43	38,43	500.000.000	42	500.000.000	46	1.000.000.000	50	1.000.000.000	54	1.000.000.000	54	4.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	19.341	23.210	33.422	200.000.000	40.107	200.000.000	48.128	400.000.000	57.754	500.000.000	57.754	500.000.000	57.754	1.800.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	105,81	126,97	182,84	100.000.000	219,41	100.000.000	263,29	250.000.000	315,95	250.000.000	315,95	350.000.000	315,95	1.050.000.000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan yang berlaku	%	0	0	50	100.000.000	70	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	0	1,82	3,64	20.000.000	5,45	20.000.000	7,27	20.000.000	9,09	20.000.000	10,91	20.000.000	10,91	100.000.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	20	20	20	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	40	160.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4,57	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	120.000.000	4	200.000.000	4	300.000.000	4	660.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,28	3,45	3,45	200.000.000	3,45	200.000.000	3,45	500.000.000	3,45	500.000.000	3,45	500.000.000	3,45	1.900.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19,23	19,23	19,23	20.000.000	19,23	20.000.000	19,23	100.000.000	75	150.000.000	100	150.000.000	100	440.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	49,18	49,18	50	20.000.000	50,82	20.000.000	51,64	50.000.000	52,46	50.000.000	53,28	50.000.000	53,28	190.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	57,69	57,69	58,65	550.000.000	59,62	550.000.000	60,58	550.000.000	61,54	550.000.000	62,50	550.000.000	62,50	2.750.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	sentra	9	9	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	14	800.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	N/A	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPII, IUKI dan IPKI	%	4 perusahaan	4 perusahaan	50	50.000.000	50	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	30 perusahaan	400.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	10	10	15	100.000.000	18	100.000.000	20	200.000.000	23	300.000.000	25	400.000.000	25	1.100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pemuatan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	550.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW	DTW	5	5	6	1.200.000.000	7	1.200.000.000	8	2.000.000.000	9	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	8.400.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	67.648	50.000	50.000	400.000.000	100.000	400.000.000	100.000	500.000.000	100.000	600.000.000	100.000	800.000.000	567.468	2.700.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	20	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.050.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HakI	%	-	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.050.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	13,16	13,16	13,16	500.000.000	15,13	500.000.000	15,13	1.000.000.000	15,13	1.200.000.000	15,13	1.200.000.000	15,13	4.400.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	1	1	150.000.000	4	150.000.000	4	250.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	4	1.300.000.000
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	1	2	150.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	1.000.000.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	54,17	350.000.000	50	350.000.000	46,88	850.000.000	44,44	1.000.000.000	42,50	1.000.000.000	42,50	3.550.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	-	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	350.000.000
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	50.000.000	4	100.000.000	0	100.000.000	4	290.000.000
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	0	0	0	500.000.000	4	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	8	500.000.000	24	2.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	16,67	16,67	33,33	20.000.000	50	20.000.000	66,67	100.000.000	83,33	100.000.000	100	100.000.000	100	340.000.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	3,9	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	500.000.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	N/A	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	160.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	N/A	N/A	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	N/A	N/A	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	340.000.000
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000
1.1.2 Meningkatkan Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah																
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	173 investor	9,83	8,95	100.000.000	8,21	100.000.000	7,59	100.000.000	7,05	100.000.000	6,59	100.000.000	275 investor	500.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	80	80	81	100.000.000	81	100.000.000	82	150.000.000	82	150.000.000	83	150.000.000	83	650.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	10	15	17,5	20.000.000	21	20.000.000	24	50.000.000	27	50.000.000	30	50.000.000	30	190.000.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	N/A	N/A	65	300.000.000	70	300.000.000	72	500.000.000	74	800.000.000	76	800.000.000	76	2.700.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	14,28	14,28	14,28	300.000.000	28,57	300.000.000	42,85	400.000.000	57,14	600.000.000	71,42	600.000.000	71,42	2.200.000.000
1.1.3 Meningkatkan Ketersediaannya Infrastruktur Wilayah																
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	79,29	81,37	81,77	12.000.000.000	82,17	12.000.000.000	82,57	25.000.000.000	82,97	25.000.000.000	83,37	25.000.000.000	83,37	99.000.000.000
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	89,29	89,93	94,55		95,28		95,82		96,28		97,37			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	16,94	16,94	21,36	1.200.000.000	25,77	1.200.000.000	30,19	1.800.000.000	34,60	2.000.000.000	39,02	2.000.000.000	39,02	8.200.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	%	N/A	N/A	100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Santunan Tanah untuk Pembangunan															
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	N/A	20	40	40.000.000	50	40.000.000	67	80.000.000	84	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	N/A	N/A	12	40.000.000	24	40.000.000	49	80.000.000	75	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	%	N/A	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	85,49	85,49	86	14.800.000.000	87	29.800.000.000	87	4.800.000.000	88	4.800.000.000	89	4.800.000.000	89	59.000.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	0	0	30	300.000.000	35,71	300.000.000	37,50	500.000.000	43,75	500.000.000	50	500.000.000	50	2.100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	186 orang	0	21,51	100.000.000	22,12	100.000.000	18,12	200.000.000	15,34	200.000.000	13,30	200.000.000	426 orang	800.000.000
1.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	9	18	36	200.000.000	55	200.000.000	73	200.000.000	91	200.000.000	100	600.000.000	100	1.400.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	0	0	13	30.000.000	33	30.000.000	53	30.000.000	73	30.000.000	100	30.000.000	100	150.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL- UPL)	%	46	100	100	100.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	440.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	100	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	60.000.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	0	16	16	40.000.000	16	40.000.000	16	40.000.000	22	60.000.000	22	60.000.000	22	240.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	-	-	33,33	25.000.000	41,67	25.000.000	50,00	25.000.000	58,33	25.000.000	66,67	25.000.000	66,67	125.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif												
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.103,90	5.338,86	5.157,29	8.000.000.000	5.208,86	6.000.000.000	5.260,95	7.000.000.000	5.313,56	7.000.000.000	5.366,70	7.000.000.000	5.366,70	35.000.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	14,29	14,29	14,29	100.000.000	28,57	100.000.000	42,86	200.000.000	57,14	300.000.000	71,43	300.000.000	71,43	1.000.000.000	
ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	6	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.200.000.000	
	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	9	100	100		100		100		100		100		100		100
	Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	6	100	100		100		100		100		100		100		100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	16	16	16	300.000.000	32	300.000.000	48	500.000.000	64	600.000.000	80	600.000.000	80	2.300.000.000	
	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	0	0	0		25		50		75		100		100		
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	42,22	46	50	1.000.000.000	54	1.000.000.000	58	1.500.000.000	62	1.500.000.000	66	1.500.000.000	66	6.500.000.000	
1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																	
1.2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan																	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	100	100	2.300.000.000	100	2.300.000.000	100	2.500.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	12.700.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.700.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.200.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	N/A	100	100	4.800.000.000	100	4.800.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	24.600.000.000	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	33	50	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	100	600.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif														
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.202	2.100	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	400.000.000			
	tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	67,53	57	57		57		57		57		57		57		57	57	57
	Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/hr	1.129	1.186	1.245		1.307		1.372		1.440		1.656		1.656		1.656	1.656	1.656
	Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	57,10	58,00	59,00		60,00		61,00		62,00		63,00		63,00		63,00	63,00	63,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	40	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	160.000.000			
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	350.000.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	840.000.000			
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	3.613 RTLH	5,67	11,74	200.000.000	13,30	200.000.000	15,34	400.000.000	18,12	500.000.000	22,12	800.000.000	1.408 RTLH	2.100.000.000			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	167 RTLH	4,19	3,13	400.000.000	3,23	400.000.000	3,33	400.000.000	3,45	400.000.000	3,57	400.000.000	135 RTLH	2.000.000.000			
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	0	8,3	8,3	250.000.000	16,7	250.000.000	16,7	500.000.000	25	800.000.000	25	800.000.000	25	2.600.000.000			
1.2.2 Menurunnya Angka Pengangguran																			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	25	30	35	400.000.000	40	400.000.000	45	400.000.000	50	400.000.000	55	400.000.000	55	2.000.000.000			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	31	33	35	20.000.000	35	20.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	36	100.000.000			
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000			
2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia																			
2.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan																			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,09	95,35	95,60	40.050.000.000	95,85	40.050.000.000	96,15	41.050.000.000	96,40	43.100.000.000	96,75	45.100.000.000	96,75	209.350.000.000			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	94,37	94,62	94,87		95,12		95,32		95,57		95,82						
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	5,01	95,04	95,09		95,14		95,20		95,25		95,30						
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68	69,68	70,54	50.000.000	70,85	50.000.000	71,25	50.000.000	71,25	100.000.000	71,25	100.000.000	71,25	350.000.000			

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	-	50.000.000	35	50.000.000	45	50.000.000	65	100.000.000	75	100.000.000	75	350.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	15,16	28,08	38,89	200.000.000	46,84	200.000.000	54,80	200.000.000	65,61	400.000.000	75,67	400.000.000	75,67	1.400.000.000
	Akreditasi perpustakaan daerah	nilai	-	-	-		-		A		A		A			
	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	3,85	5,77	11,54		15,38		21,15		26,92		32,69			
	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	5,40	1,01	10,43		10,43		10,43		10,43		10,43			
2.1.2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat																
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	91,50	91,80	92	75.000.000.000	93	75.000.000.000	95	77.000.000.000	97	80.000.000.000	100	82.000.000.000	100	389.000.000.000
	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	79,50	79,80	80		80,50		81		81,50		82			
	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	76,80	76,90	77		78		79		80		81			
	Persentase baduta stunting	%	9,70	9,60	9,50		9		8,50		8		7,5			
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	72	73	75	100.000.000	80	100.000.000	85	500.000.000	88	500.000.000	90	500.000.000	90	1.700.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	N/A	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	-	50.000.000	1	50.000.000	4	220.000.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	79,18	79,48	79,78	500.000.000	80,08	500.000.000	80,38	500.000.000	80,68	600.000.000	80,98	600.000.000	80,98	2.700.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	39,40	39,60	40	50.000.000	45	50.000.000	50	100.000.000	55	150.000.000	60	150.000.000	60	500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	30.000.000.000
	Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	50	55	60		65		70		75		80			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	200.000.000	17,78	200.000.000	23,70	1.000.000.000	25,68	1.000.000.000	27,66	1.000.000.000	27,66	3.400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	500.000.000	3,59	500.000.000	4,72	800.000.000	5,83	800.000.000	6,91	800.000.000	6,91	3.400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	80,85	80,85	81,66	200.000.000	82,47	200.000.000	83,28	200.000.000	84,09	200.000.000	84,90	200.000.000	84,90	1.000.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
SISTEM DRAINASE																
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	27	27	27	8.000.000.000	28	8.500.000.000	29	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	24.000.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	78,28	78,5	78,7	200.000.000	79	200.000.000	79,4	400.000.000	79,7	500.000.000	80	500.000.000	80	1.800.000.000
		%	65	70	75		80		83		87		90		90	
2.1.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	N/A	20	30	100.000.000	40	100.000.000	50	100.000.000	65	150.000.000	80	200.000.000	80	650.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	N/A	50	55	20.000.000	60	20.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	90	190.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	800.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	60	65	70	150.000.000	75	150.000.000	80	350.000.000	85	500.000.000	90	500.000.000	90	1.650.000.000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	55	60	70	50.000.000	75	50.000.000	80	100.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	90	500.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	650.000.000
2.1.4 Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat																
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	6.800.000.000	100	6.800.000.000	100	7.300.000.000	100	8.300.000.000	100	8.300.000.000	100	37.500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	3	5	5	300.000.000	5	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	10	300.000.000	44	1.500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25	30	35	700.000.000	40	700.000.000	45	700.000.000	50	700.000.000	55	700.000.000	55	3.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	jumlah	14	14	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	19	160.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	100	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	8.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	26.500.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000.000
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	800.000.000	100	800.000.000	100	2.300.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.900.000.000
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	290.000.000
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	500.000.000
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	100	100	420.000.000	100	420.000.000	100	480.000.000	100	540.000.000	100	600.000.000	100	2.460.000.000
3.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik																
3.1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	100	100	413.800.000.000	100	428.800.000.000	100	448.800.000.000	100	468.800.000.000	100	488.800.000.000	100	2.249.000.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	80,18	74,09	100	750.000.000	100	750.000.000	100	1.500.000.000	100	1.200.000.000	100	1.500.000.000	100	5.700.000.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,47	82,76	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	11.700.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	65,15	59,02	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	71,43	65,79	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	66,67	90	500.000.000	90	500.000.000	90	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.400.000.000
	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	0	0	5		2		3		2		3		15	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	50	60	65	250.000.000	70	250.000.000	75	400.000.000	80	400.000.000	85	400.000.000	85	1.700.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	100	100	117.122.645.830	100	123.028.174.613	100	125.610.768.384	100	128.004.458.467	100	130.500.573.889	100	624.266.621.182
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	3.000.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	Indeks	1,41	1,50	1,60	2.500.000.000	1,70	2.500.000.000	1,80	2.700.000.000	1,90	2.700.000.000	2	2.700.000.000	2	13.100.000.000
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	-	-	1		1,1		1,2		1,3		1,4		1,4	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APiP	level	2+	2+	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	1.500.000.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	28.000.000.000	Ada	28.800.000.000	Ada	30.000.000.000	Ada	30.500.000.000	Ada	31.000.000.000	Ada	148.300.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	3,3	3,3	20	100.000.000	40	100.000.000	60	200.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	N/A	-	1	80.000.000	-	80.000.000	1	180.000.000	-	180.000.000	1	180.000.000	3	700.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	N/A	-	1		-		1		-		1		3	
	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	N/A	4,55	4,76		5		5,26		5,26		5,88		5,88	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	10,34	10,34	30		50		70		83,33		90		90	
	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	18,18	5,56	5,88	50.000.000	6,25	50.000.000	6,67	140.000.000	7,69	140.000.000	8,33	140.000.000	8,33	520.000.000
	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	N/A	-	100		100		100		100		100		100	
	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	N/A	-	100		100		100		100		100		100	
PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	N/A	2	4	20.000.000	7	20.000.000	9	30.000.000	12	30.000.000	14	30.000.000	48	130.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	9	14	20	1.200.000.000	40	1.200.000.000	60	1.500.000.000	80	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	6.900.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	500	600	720	2.000.000.000	840	2.000.000.000	960	2.200.000.000	1.080	2.200.000.000	1.200	2.200.000.000	5.900	10.600.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	55,12	62,68	68,11		74,43		80,17		85,47		88,47		88,47	
	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	390	405	420	1.000.000.000	435	1.000.000.000	450	1.500.000.000	465	1.500.000.000	480	1.500.000.000	480	6.500.000.000
	Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1.242	1.392	1.592		1.742		1.942		2.092		2.242		2.242	
PROGRAM	Persentase PNS yang	%	94,46	94,72	95,02	1.500.000.000	95,42	1.500.000.000	95,42	1.500.000.000	95,42	1.500.000.000	96,22	1.500.000.000	96,22	7.500.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
KEPEGAWAIAN DAERAH	memiliki nilai kinerja ≥76															
	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	41	40	38		37		35		33		30		30	
	Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	73	74	75		77		78		82		83		83	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.000.000.000
	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000
3.1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah																
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	74,55	75,70	79,50	300.000.000	83,30	300.000.000	87,10	500.000.000	90,90	500.000.000	94,70	500.000.000	94,70	2.100.000.000
PROGAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sijil	%	63,045	64,544	66,01	50.000.000	67,51	50.000.000	68,95	100.000.000	70,43	100.000.000	71,95	100.000.000	71,95	400.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	33,33	33,33	46,67	50.000.000	66,67	50.000.000	80	70.000.000	93,33	80.000.000	100	80.000.000	100	330.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	100	100	360.000.000	100	360.000.000	100	480.000.000	100	540.000.000	100	540.000.000	100	2.280.000.000
PROGRAM EMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	50	65	70	800.000.000	75	800.000.000	80	900.000.000	85	900.000.000	90	900.000.000	90	4.300.000.000
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	420.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	33	50	100	1.300.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	3.100.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	5	1.300.000.000

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Capaian dan Pagu Indikatif											
			2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
3.2 Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah																
3.2.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah																
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Rp20.610. 403.491	Rp27.797. 500.000	3,96	1.200.000.000	3,80	1.200.000.000	3,67	1.300.000.000	3,54	1.300.000.000	3,42	1.300.000.000	Rp33.294.959.469	6.300.000.000
	Persentase peningkatan retribusi daerah	%	Rp5.346.6 96.788	Rp5.081.7 44.580	3,21		3,11		3,02		2,93		2,84		Rp5.897.366.051	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	3.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	10	25	28,33	50.000.000	31,67	50.000.000	35	50.000.000	38,33	50.000.000	43,33	50.000.000	43,33	250.000.000



pesona
indonesia

#ayokeborgabarat



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM DAERAH





7.1 Kerangka Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melaksanakan amanat sesuai dengan Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 berisi tentang alokasi urusan Pendidikan minimal 20% dari belanja daerah, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 berkenaan tentang alokasi kesehatan minimal 10% dari belanja langsung, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 893.5/9039/SJ yang mengamankan bahwa alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan ASN dalam APBD harus dianggarkan sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah.

Gambaran kapasitas kerangka pendanaan kegiatan pembangunan dan program dapat diperoleh dari analisis pendanaan. Selain itu, gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat prioritas utama dan wajib dapat diperoleh juga melalui analisis pendanaan ini. Analisis pendanaan dilakukan dengan melibatkan proyeksi selama lima tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Pada tabel 7.1 disajikan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022—2026.

Tabel 7.1 Proyeksi Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
	BELANJA	780.587.645.830	814.913.174.613	846.735.768.384	875.389.458.467	904.545.573.889
	BELANJA OPERASI	590.494.596.443	616.460.981.351	640.533.959.917	662.209.743.863	684.265.599.733
	Belanja Pegawai	333.800.000.000	348.800.000.000	358.800.000.000	368.800.000.000	378.800.000.000
	Belanja Barang dan Jasa	224.009.567.422	233.538.662.219	246.279.154.412	256.755.141.389	267.590.162.565
	Belanja Hibah	27.464.587.250	28.672.313.871	29.791.975.972	30.800.141.776	31.825.985.164
	Belanja Bantuan Sosial	5.220.441.771	5.450.005.261	5.662.829.533	5.854.460.699	6.049.452.003
	BELANJA MODAL	74.161.062.700	76.492.817.801	81.678.750.529	86.195.620.002	90.833.316.974
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	BELANJA TRANSFER	114.931.986.687	120.959.375.461	123.523.057.938	125.984.094.602	128.446.657.182
	Belanja Bagi Hasil	2.731.986.687	2.809.375.461	2.923.057.938	2.984.094.602	3.046.657.182
	Belanja Bantuan Keuangan	112.200.000.000	118.150.000.000	120.600.000.000	123.000.000.000	125.400.000.000

7.2 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan daerah dan indikator kinerja, capaian kinerja awal dan akhir RPJMD disesuaikan berdasarkan urusan masing-masing dari perangkat daerah. Rekapitulasi program perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat beserta pagu anggarannya pada setiap indikator disajikan pada tabel 7.2.

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Non Urusan																			
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	100	100	413.800.000.000	100	428.800.000.000	100	448.800.000.000	100	468.800.000.000	100	488.800.000.000	100	2.249.000.000.000	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,09	95,35	95,60		95,85		96,15		96,40		96,75		96,75	209.350.000.000	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	94,37	94,62	94,87	40.050.000.000	95,12	40.050.000.000	95,32	41.050.000.000	95,57	43.100.000.000	95,82	45.100.000.000		95,82
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	5,01	95,04	95,09		95,14		95,20		95,25		95,30			95,30
	2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68	69,68	70,54	50.000.000	70,85	50.000.000	71,25	50.000.000	71,25	100.000.000	71,25	100.000.000	71,25	350.000.000	
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	-	50.000.000	35	50.000.000	45	50.000.000	65	100.000.000	75	100.000.000	75	350.000.000	
	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	91,50	91,80	92		93		95		97		100		100	389.000.000.000	
				Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	79,50	79,80	80	75.000.000.000	80,50	75.000.000.000	81	77.000.000.000	81,50	80.000.000.000	82	82.000.000.000		82
				Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	nilai	76,80	76,90	77		78		79		80		81			81
				Persentase baduta <i>Stunting</i>	%	9,70	9,60	9,50		9		8,50		8		7,5			7,5
	2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	72	73	75	100.000.000	80	100.000.000	85	500.000.000	88	500.000.000	90	500.000.000	90	1.700.000.000	
	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	30.000.000.000	
				Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standard	%	50	55	60		65		70		75		80			80
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	39,40	39,60	40	50.000.000	45	50.000.000	50	100.000.000	55	150.000.000	60	150.000.000	60	500.000.000	
	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	14,28	14,28	14,28	300.000.000	28,57	300.000.000	42,85	400.000.000	57,14	600.000.000	71,42	600.000.000	71,42	2.200.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	79,29	81,37	81,77	12.000.000.000	82,17	12.000.000.000	82,57	25.000.000.000	82,97	25.000.000.000	83,37	25.000.000.000	83,37	99.000.000.000	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	89,29	89,93	94,55		95,28		95,82		96,28		97,37		97,37		
	3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	42,22	46	50	1.000.000.000	54	1.000.000.000	58	1.500.000.000	62	1.500.000.000	66	1.500.000.000	66	6.500.000.000	
			Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	34,40	38,43	38,43	500.000.000	42	500.000.000	46	1.000.000.000	50	1.000.000.000	54	1.000.000.000	54	4.000.000.000	
	4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	85,49	85,49	86	14.800.000.000	87	29.800.000.000	87	4.800.000.000	88	4.800.000.000	89	4.800.000.000	89	59.000.000.000	
	5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	0	0	30	300.000.000	35,71	300.000.000	37,50	500.000.000	43,75	500.000.000	50	500.000.000	50	2.100.000.000	
	6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	186 orang	0	21,51	100.000.000	22,12	100.000.000	18,12	200.000.000	15,34	200.000.000	13,30	200.000.000	426 orang	800.000.000	
	7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	80,85	80,85	81,66	200.000.000	82,47	200.000.000	83,28	200.000.000	84,09	200.000.000	84,90	200.000.000	84,90	1.000.000.000	
	8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	200.000.000	17,78	200.000.000	23,70	1.000.000.000	25,68	1.000.000.000	27,66	1.000.000.000	27,66	3.400.000.000	
	9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	500.000.000	3,59	500.000.000	4,72	800.000.000	5,83	800.000.000	6,91	800.000.000	6,91	3.400.000.000	
	10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	14,29	14,29	14,29	100.000.000	28,57	100.000.000	42,86	200.000.000	57,14	300.000.000	71,43	300.000.000	71,43	1.000.000.000	
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	120.000.000	100	120.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	840.000.000	
	2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	3.613 RTLH	5,67	11,74	200.000.000	13,30	200.000.000	15,34	400.000.000	18,12	500.000.000	22,12	800.000.000	1.408 RTLH	2.100.000.000	
	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	167 RTLH	4,19	3,13	400.000.000	3,23	400.000.000	3,33	400.000.000	3,45	400.000.000	3,57	400.000.000	135 RTLH	2.000.000.000	
	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	0	8,3	8,3	250.000.000	16,7	250.000.000	16,7	500.000.000	25	800.000.000	25	800.000.000	25	2.600.000.000	
1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	100	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	8.500.000.000	100	4.500.000.000	100	4.500.000.000	100	26.500.000.000	
	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	6	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.200.000.000	
			Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	9	100	100		100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	6	100	100		100		100		100		100		100		100	
	3	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	16	16	16		32		48		64		80		80		2.300.000.000	
		Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	0	0	0	300.000.000	25	300.000.000	50	500.000.000	75	600.000.000	100	600.000.000	100			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
1		Sosial																	
	1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	100	100	2.300.000.000	100	2.300.000.000	100	2.500.000.000	100	2.800.000.000	100	2.800.000.000	100	12.700.000.000	
	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.700.000.000	
	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.200.000.000	
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
1		Tenaga Kerja																	
	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	25	30	35	400.000.000	40	400.000.000	45	400.000.000	50	400.000.000	55	400.000.000	55	2.000.000.000	
	2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	31	33	35	20.000.000	35	20.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	36	20.000.000	36	100.000.000	
	3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	250.000.000	
1		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
	1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	N/A	20	30	100.000.000	40	100.000.000	50	100.000.000	65	150.000.000	80	200.000.000	80	650.000.000	
	2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	N/A	50	55	20.000.000	60	20.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	90	190.000.000	
	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	800.000.000	
	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	60	65	70	150.000.000	75	150.000.000	80	350.000.000	85	500.000.000	90	500.000.000	90	1.650.000.000	
	5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	55	60	70	50.000.000	75	50.000.000	80	100.000.000	85	150.000.000	90	150.000.000	90	500.000.000	
	6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	500.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1		Pangan																
	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	40	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	40	160.000.000
	2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	350.000.000
	3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	33	50	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	100	600.000.000
	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.202	2.100	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	80.000.000	2.100	400.000.000
		tingkat konsumsi pangan AKP	qr/kap/hr	67,53	57	57	57											
		Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/hr	1.129	1.186	1.245	1.307		1.372		1.440		1.656					
		Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	57,10	58,00	59,00	60,00		61,00		62,00		63,00					
1		Pertanahan																
	1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	N/A	N/A	100	40.000.000	100	40.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000
	2	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong Hasil Inventarisasi Yang Telah Dimanfaatkan	%	N/A	20	40	40.000.000	50	40.000.000	67	80.000.000	84	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000
	3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	N/A	N/A	12	40.000.000	24	40.000.000	49	80.000.000	75	80.000.000	100	80.000.000	100	320.000.000
	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	%	N/A	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000
1		Lingkungan Hidup																
	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	9	18	36	200.000.000	55	200.000.000	73	200.000.000	91	200.000.000	100	600.000.000	100	1.400.000.000
	2	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	0	0	13	30.000.000	33	30.000.000	53	30.000.000	73	30.000.000	100	30.000.000	100	150.000.000
	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	46	100	100	100.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	440.000.000
	4	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	100	-	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	60.000.000
	5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.500.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	-	-	33,33	25.000.000	41,67	25.000.000	50,00	25.000.000	58,33	25.000.000	66,67	25.000.000	66,67	125.000.000	
	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.103,90	5.338,86	5.157,29	8.000.000.000	5.208,86	6.000.000.000	5.260,95	7.000.000.000	5.313,56	7.000.000.000	5.366,70	7.000.000.000	5.366,70	35.000.000.000	
	8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	0	16	16	40.000.000	16	40.000.000	16	40.000.000	22	60.000.000	22	60.000.000	22	240.000.000	
	9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	jumlah	14	14	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	19	160.000.000	
1		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	74,55	75,70	79,50	300.000.000	83,30	300.000.000	87,10	500.000.000	90,90	500.000.000	94,70	500.000.000	94,70	2.100.000.000	
	2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	63,045	64,544	66,01	50.000.000	67,51	50.000.000	68,95	100.000.000	70,43	100.000.000	71,95	100.000.000	71,95	400.000.000	
	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	33,33	33,33	46,67	50.000.000	66,67	50.000.000	80	70.000.000	93,33	80.000.000	100	80.000.000	100	330.000.000	
	4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
1		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	50	65	70	800.000.000	75	800.000.000	80	900.000.000	85	900.000.000	90	900.000.000	90	4.300.000.000	
	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	420.000.000	
	3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	33	50	100	1.300.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	3.100.000.000	
	4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	10	25	28,33	50.000.000	31,67	50.000.000	35	50.000.000	38,33	50.000.000	43,33	50.000.000	43,33	250.000.000	
1		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	N/A	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	-	50.000.000	1	50.000.000	4	220.000.000	
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	78,28	78,5	78,7	200.000.000	79	200.000.000	79,4	400.000.000	79,7	500.000.000	80	500.000.000	80	1.800.000.000	
			persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	65	70	75		80		83		87		90		90		
	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	79,18	79,48	79,78	500.000.000	80,08	500.000.000	80,38	500.000.000	80,68	600.000.000	80,98	600.000.000	80,98	2.700.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		Perhubungan																
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	550.000.000
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	16,94	16,94	21,36	1.200.000.000	25,77	1.200.000.000	30,19	1.800.000.000	34,60	2.000.000.000	39,02	2.000.000.000	39,02	8.200.000.000
1		Komunikasi dan Informatika																
	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	9	14	20	1.200.000.000	40	1.200.000.000	60	1.500.000.000	80	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	6.900.000.000
	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	500	600	720	2.000.000.000	840	2.000.000.000	960	2.200.000.000	1.080	2.200.000.000	1.200	2.200.000.000	5.900	10.600.000.000
1		Koperasi, usaha kecil dan Menengah																
	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	0	1,82	3,64	20.000.000	5,45	20.000.000	7,27	20.000.000	9,09	20.000.000	10,91	20.000.000	10,91	100.000.000
	2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	20	20	20	20.000.000	30	20.000.000	30	20.000.000	30	50.000.000	40	50.000.000	40	160.000.000
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4,57	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	120.000.000	4	200.000.000	4	300.000.000	4	660.000.000
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,28	3,45	3,45	200.000.000	3,45	200.000.000	3,45	500.000.000	3,45	500.000.000	3,45	500.000.000	3,45	1.900.000.000
	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19,23	19,23	19,23	20.000.000	19,23	20.000.000	19,23	100.000.000	75	150.000.000	100	150.000.000	100	440.000.000
	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	49,18	49,18	50	20.000.000	50,82	20.000.000	51,64	50.000.000	52,46	50.000.000	53,28	50.000.000	53,28	190.000.000
	7	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	57,69	57,69	58,65	550.000.000	59,62	550.000.000	60,58	550.000.000	61,54	550.000.000	62,50	550.000.000	62,50	2.750.000.000
1		Penanaman Modal																
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	173 investor	9,83	8,95	100.000.000	8,21	100.000.000	7,59	100.000.000	7,05	100.000.000	6,59	100.000.000	275 investor	500.000.000
	2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	80	80	81	100.000.000	81	100.000.000	82	150.000.000	82	150.000.000	83	150.000.000	83	650.000.000
	3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	10	15	17,5	20.000.000	21	20.000.000	24	50.000.000	27	50.000.000	30	50.000.000	30	190.000.000
	4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	N/A	N/A	65	300.000.000	70	300.000.000	72	500.000.000	74	800.000.000	76	800.000.000	76	2.700.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Kepemudaan dan Olahraga																	
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25	30	35	700.000.000	40	700.000.000	45	700.000.000	50	700.000.000	55	700.000.000	55	3.500.000.000	
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	27	27	27	8.000.000.000	28	8.500.000.000	29	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	2.500.000.000	30	24.000.000.000
		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	3	5	5	300.000.000	5	300.000.000	8	300.000.000	8	300.000.000	10	300.000.000	44	1.500.000.000
	1	Statistik																	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	50	60	65	250.000.000	70	250.000.000	75	400.000.000	80	400.000.000	85	400.000.000	85	1.700.000.000
	1	Persandian																	
		1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman.	%	3,3	3,3	20	100.000.000	40	100.000.000	60	200.000.000	80	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000
	1	Kebudayaan																	
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	13,16	13,16	13,16	500.000.000	15,13	500.000.000	15,13	1.000.000.000	15,13	1.200.000.000	15,13	1.200.000.000	15,13	4.400.000.000
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	1	1	150.000.000	4	150.000.000	4	250.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	4	1.300.000.000
		3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	1	2	150.000.000	3	150.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	1.000.000.000
		4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	54,17	350.000.000	50	350.000.000	46,88	850.000.000	44,44	1.000.000.000	42,50	1.000.000.000	42,50	3.550.000.000
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	-	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	350.000.000
	1	Perpustakaan																	
		1	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	50.000.000	4	100.000.000	0	100.000.000	4	290.000.000
		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	15,16	28,08	38,89	200.000.000	46,86	200.000.000	54,80	200.000.000	65,61	400.000.000	76,67	400.000.000	76,67	1.400.000.000
			Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	-	-	-	-		A		A		A					
			Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	3,85	5,77	11,54	15,38		21,15		26,92		32,69					
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	5,40	1,01	10,43	10,43		10,43		10,43		10,43					
	1	Kearsipan																	
		1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	N/A	-	1	80.000.000	-	80.000.000	1	180.000.000	-	180.000.000	1	180.000.000	3	700.000.000
			Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah	Tema	N/A	-	1	-		1		-		1					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK																
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	N/A	4,55	4,76		5		5,26		5,26		5,88		5,88		5,88
	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																
		Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	10,34	10,34	30		50		70		83,33		90		90		90
		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	18,18	5,56	5,88		6,25		6,67		7,69		8,33		8,33		8,33
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	N/A	-	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100	140.000.000	100	100	140.000.000	100	100	520.000.000
		Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	N/A	-	100		100		100		100		100		100		100
	3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP																
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	N/A	2	4	20.000.000	7	20.000.000	9	30.000.000	12	30.000.000	14	30.000.000	48	130.000.000	
Urusan Pilihan																		
1		Kelautan dan Perikanan																
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP																
		Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	19.341	23.210	33.422	200.000.000	40.107	200.000.000	48.128	400.000.000	57.754	500.000.000	57.754	500.000.000	57.754	1.800.000.000	
	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
		Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	105,81	126,97	182,84	100.000.000	219,41	100.000.000	263,29	250.000.000	315,95	250.000.000	315,95	350.000.000	315,95	1.050.000.000	
	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
		Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	0	0	50	100.000.000	70	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	
	4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
		Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	10	10	15	100.000.000	18	100.000.000	20	200.000.000	23	300.000.000	25	400.000.000	25	1.100.000.000	
1		Pariwisata																
	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																
		Peningkatan jumlah DTW	DTW	5	5	6	1.200.000.000	7	1.200.000.000	8	2.000.000.000	9	2.000.000.000	10	2.000.000.000	10	8.400.000.000	
	2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA																
		Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	67.648	50.000	50.000	400.000.000	100.000	400.000.000	100.000	500.000.000	100.000	600.000.000	100.000	800.000.000	567.468	2.700.000.000	
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																
		Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	20	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.050.000.000	
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL																
		Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	-	-	100	50.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.050.000.000	
1		Pertanian																
	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
		Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	40	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	500.000.000	5	800.000.000	5	800.000.000	70	2.500.000.000	
	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																
		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	40	1	2	200.000.000	2	200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	51	4.000.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	92,59	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	550.000.000
	4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	20	20	20	100.000.000	25	100.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	1.100.000.000
	5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	160.000.000
	6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	100	100	180.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	1.260.000.000
1		Kehutanan																
	1	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	0	0	0	500.000.000	4	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	8	500.000.000	24	2.500.000.000
1		Perdagangan																
	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	16,67	16,67	33,33	20.000.000	50	20.000.000	66,67	100.000.000	83,33	100.000.000	100	100.000.000	100	340.000.000
	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	3,9	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	100.000.000	3,9	500.000.000
	3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	N/A	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	160.000.000
	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	N/A	N/A	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	500.000.000
	5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	N/A	N/A	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	340.000.000
	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000
1		Perindustrian																
	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	sentra	9	9	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	14	800.000.000
	2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	N/A	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000
	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	4 perusahaan	4 Perusahaan	50	50.000.000	50	50.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	30 perusahaan	400.000.000
Unsur Penunjang																		
1		Perencanaan																
	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	80,18	74,09	100	750.000.000	100	750.000.000	100	1.500.000.000	100	1.200.000.000	100	1.500.000.000	100	5.700.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	2	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,57	82,76	100		100		100		100		100		100		11.700.000.000
		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	65,15	59,02	100	2.100.000.000	100	2.100.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100		
		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	71,43	65,70	100		100		100		100		100		100		
1	Keuangan																	
	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	117.122.645.830	100	123.028.174.613	100	125.610.768.384	100	128.004.458.467	100	130.500.573.889	100	624.266.621.182
	2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	3.000.000.000
	3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Rp20.610.403.491	Rp27.797.500.000	3,96	1.200.000.000	3,80	1.200.000.000	3,67	1.300.000.000	3,54	1.300.000.000	3,42	1.300.000.000	Rp33.294.959.469	6.300.000.000
			Persentase peningkatan retribusi daerah	%	Rp5.346.696.788	Rp5.081.744.580	3,21		3,11		3,02		2,93		2,84		Rp5.897.366.051	
1	Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan																	
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	55,12	62,68	68,11		74,43		80,17		85,47		88,47		88,47	
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	390	405	420	1.000.000.000	435	1.000.000.000	450	1.500.000.000	465	1.500.000.000	480	1.500.000.000	480	6.500.000.000
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1.242	1.392	1.592		1.742		1.942		2.092		2.242		2.242	
	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥76	%	94,46	94,72	95,02		95,42		95,42		95,42		96,22		96,22	
			Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	41	40	38	1.500.000.000	37	1.500.000.000	35	1.500.000.000	33	1.500.000.000	30	1.500.000.000	30	7.500.000.000
			Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	73	74	75		77		78		82		83		83	
1	Penelitian dan Pengembangan																	
	1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	66,67	90	500.000.000	90	500.000.000	90	800.000.000	100	800.000.000	100	800.000.000	100	3.400.000.000
			Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	0	0	5		2		3		2		3		15	
Unsur Kewilayahan																		
1	Kecamatan																	
	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	N/A	100	100	4.800.000.000	100	4.800.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	24.600.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000
	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	100	100	420.000.000	100	420.000.000	100	480.000.000	100	540.000.000	100	600.000.000	100	2.460.000.000
	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000
	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	100	100	360.000.000	100	360.000.000	100	480.000.000	100	540.000.000	100	540.000.000	100	2.280.000.000
Unsur Pendukung																		
1	Sekretariat Daerah																	
	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
			Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	7.500.000.000	100	7.500.000.000	100	8.000.000.000	100	9.000.000.000	100	9.000.000.000	100	41.000.000
			Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
			Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	3	3		3		3		5		5		5	
	2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	700.000.000	100	700.000.000	100	850.000.000	100	1.000.000.000	100	1.150.000.000	100	4.400.000.000
1	Sekretariat Dewan																	
	1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	28.000.000.000	Ada	28.800.000.000	Ada	30.000.000.000	Ada	30.500.000.000	Ada	31.000.000.000	Ada	148.300.000.000
Unsur Pengawasan																		
1	Inspektorat Daerah																	
	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	Indeks	1,41	1,50	1,60		1,70		1,80		1,90		2		2	
			Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	-	-	1	2.500.000.000	1,1	2.500.000.000	1,2	2.700.000.000	1,3	2.700.000.000	1,4	2.700.000.000	1,4	13.100.000.000
	2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	level	2+	2+	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	300.000.000	2+	1.500.000.000
Unsur Pemerintahan Umum																		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik																	
	1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Kebutuhan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	2	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	80.000.000	100	800.000.000	100	2.300.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.900.000.000	
	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	290.000.000	
	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	500.000.000	
	5	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.000.000.000	



pesona
indonesia 

#ayokebangkabarat



BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH





Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan maupun program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja tersebut menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja juga menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi melalui indikator kerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri atas unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tentang arsitektur kinerja pembangunan daerah menjelaskan bahwa tolak ukur kinerja merupakan perwujudan



visi dan pelaksanaan misi dapat direpresentasikan melalui beberapa indikator pembangunan daerah dengan tingkatan dampak (*impact*), yakni suatu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat makro dan diperoleh dari pencapaian keseluruhan program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan. Secara teknis, indikator kinerja daerah dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Sementara itu, indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat merupakan tolak ukur dan representasi atas keberhasilan perwujudan visi dan pelaksanaan misi pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Penetapan indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat tersebut merujuk dan selaras dengan indikator makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Keselarasan indikator makro pembangunan ini dibangun untuk mewujudkan sinergisitas visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Berikut uraian pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Akhir Periode RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020*	Tahun 2024	Tahun 2026	Sumber Data
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,43	4,47	4,10	BPS
2.	Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	12.233	12.977	13.349	BPS
3.	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	69,08	69,82	70,4	BPS
4.	Indeks Reformasi Birokrasi	kategori	Buruk	Baik	Baik	KEMENPAN
5.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	indeks	0,26	0,26	0,26	KEMENKEU

Catatan : *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Indikator kinerja utama (IKU) daerah dirumuskan berdasarkan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Target indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026 didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020/2021 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026 diuraikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.2 Target Indikator Kinerja Utama Daerah Sebagai Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat										
1.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,43	5,16	4,91	4,68	4,47	4,28	4,10
1.1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	9,04	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	-10,6	6,04	5,70	5,39	5,11	4,86	4,64
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,33	2,36	2,38	2,40	2,41	2,42	2,43
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	26,95	26,56	27,03	27,46	27,86	28,22	28,56
1.1.2	Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Miliar rupiah	417	532	805	828	913	995	1.024
1.1.3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,68	0,68	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Baik	Baik
1.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,29	70,39	70,91	71,43	71,94	71,94	71,94
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	41,18	41,18	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
1.2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12.233	12.419	12.605	12.791	12.977	13.163	13.349
1.2.1	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,70	2,77	2,70	2,63	2,56	2,50	2,43
1.2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	4,12	4,03	3,94	3,85	3,77	3,69	3,61

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	BASELINE		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2 Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berahlak mulia										
2.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,08	69,31	69,57	69,86	70,09	70,35	70,6
2.1.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,22	7,23	7,25	7,31	7,32	7,35	7,38
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,53	11,53	11,54	11,55	11,56	11,57	11,58
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	23,8	23,8	24,32	24,86	25,51	25,95	26,49
2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,23	70,41	70,56	70,70	70,88	71,03
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	12,38	10,36	8,75	7,46	6,40	5,52	4,79
2.1.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,03	90,50	90,67	90,82	91,06	91,33	91,50
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya
2.1.4	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	N/A	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
Misi 3 Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik										
3.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Buruk	Buruk	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
3.1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,82	70,00	70,98	71,56	72,14	72,72	73,3
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	berkembang	Berkembang	Terdefinisi
		Indeks SPBE	Indeks	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	64,37	64,60	64,84	65,07	65,30	65,53
3.1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,92	81,22	81,52	81,82	82,12	82,42	82,72
3.2	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
3.2.1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,45	8,96	8,87	9,22	9,39	9,38	9,43



Melihat tabel 8.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan indikator tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja daerah juga dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah (*impact*). Ketiga indikator tersebut menjadi hal penting untuk mengukur kinerja masing-masing program yang telah dirumuskan dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. IKK atau *key performance indicator* (KPI) atau dikenal pula sebagai *key success indicators* (KSI) bertujuan membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seberapa besar pencapaian IKK tersebut tergantung ukuran yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan target capaian IKK yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026.

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022–2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
	Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	%	97,3	97,23	97,30	97,37	97,44	97,50	97,57	97,57
	Persentase balita gizi buruk	%	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
	Prevalensi balita gizi kurang	%	3,56	3,46	3,36	3,26	3,16	3,06	3	4,79
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	6,45	8,96	8,87	9,22	9,39	9,38	9,43	9,43
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,9	85,9	86	87	88	88,5	88,7	88,7
	Penguatan cadangan pangan	%	15,00	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00	22,50	22,50
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	46,57	46,37	46,08	45,78	45,49	45,30	45,00	45,00
	Rasio Ketergantungan	%	48,3	49,08	49,18	49,28	49,37	49,47	49,57	49,57
	Produktivitas total daerah	Rupiah	130.930	131.199	131.377	131.505	131.600	131.674	131.733	131.733
	Rasio ekspor + impor terhadap PDRB	%	36,31	35,26	34,32	33,45	32,67	31,94	31,27	31,27
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Pendidikan									
	APK PAUD	Angka	87,55	88,26	88,78	89,82	92,93	96,04	99,15	99,15
	APK SD/MI/Paket A	Angka	103,94	104,42	105,02	105,67	105,89	118,28	135,26	135,26
	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	91,43	92,56	93,20	94,34	96,78	96,92	97,82	97,82
	APM SD/MI/Paket A	Angka	94,37	94,96	95,02	96,27	96,78	96,93	98,20	98,20
	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	82,67	84,34	87,90	89,35	90,80	92,25	93,70	93,70
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32	95,57	95,57	95,57

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,01	95,04	95,09	95,14	95,20	95,20	95,20	95,20
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,11
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	1,43	1,33	1,18	1,05	0,92	0,79	0,67	0,67
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,83	90,95	91,07	91,19	91,31	91,43	91,55	91,55
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68	69,68	70,54	70,85	71,25	71,25	71,25	71,25
	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	-	35	45	65	75	75
2	Kesehatan									
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,37	7	6,91	6,82	6,73	6,63	6,54	6,54
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	8,51	7,87	7,81	7,75	7,69	7,63	7,57	7,57
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	3,97	3,87	3,61	3,35	3,09	2,83	2,57	2,57
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	56,72	55,99	53,49	50,99	48,49	45,99	43,49	43,49
	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	1 : 91	1:88	1:84	1:80	1:76	1:75	1:74	1:74
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,43	0,50	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74	0,74
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,46	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76	0,76
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,61	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,38	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita	%	93,34	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	78,32	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	%	70,23	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	84,99	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	%	105,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	70,95	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	105,38	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	79,5	79,8	80	80,5	81	81,5	82	82
	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	76,8	76,9	77	78	79	80	81	81
	Persentase baduta <i>Stunting</i>	%	9,7	9,6	9,5	9	8,5	8	7,5	7,5

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	72	73	75	80	85	88	90	90
	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	50	55	60	65	70	75	80	80
	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	39,4	39,6	40	45	50	55	60	60
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	%	79,29	81,37	81,77	82,17	82,57	82,97	83,37	83,37
	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	%	94,61	97,28	100,55	103,82	107,09	107,09	113,63	113,63
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,48	88,53	88,58	88,63	88,68	88,73	88,78	88,78
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	N/A	85,54	86,58	87,62	88,66	89,70	90,74	90,74
	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	89,29	89,93	94,55	95,28	95,82	96,28	97,37	97,37
	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	42,22	46	50	54	58	62	66	66
	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	85,49	85,49	86	87	87	88	89	89

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	0	0	30	35,71	37,5	43,75	50	50
	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	186 orang	0	21,51	22,12	18,12	15,34	13,3	426 orang
	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	80,85	80,85	81,66	82,47	83,28	84,09	84,9	84,9
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	17,78	23,7	25,68	27,66	27,66
	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	3,59	4,72	5,83	6,91	6,91
	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	14,29	14,29	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43
	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	91,78	100	100	100	100	100	100	100
	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	94,01	100	100	100	100	100	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	91,26	92,65	94,19	95,72	97,25	98,78	100	100	100
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,025	0,022	0,020	0,018	0,016	0,014	0	0	0
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	6,55	6,50	6,45	6,40	6,35	6,30	6,25	6,25	6,25

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	252	252	252	252	252	252	252	252
	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	3.613 RTLH	5,67	11,74	13,3	15,34	18,12	22,12	1.408 RTLH
	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	167 RTLH	4,19	3,13	3,23	3,33	3,45	3,57	135 RTLH
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	0	8,3	8,3	16,7	16,7	25	25	25
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	%	0	100	100	100	100	100	100	100
5	Sosial									
	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase PSKS yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	325,49	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	174,35	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
1	Tenaga Kerja									
	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	25	30	35	40	45	50	55	55
	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	31	33	35	35	36	36	36	36
	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16	16	16	16	24	24	24	24
	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	N/A	20	30	40	50	65	80	80

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	N/A	50	55	60	70	80	90	90
	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	60	65	70	75	80	85	90	90
	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	55	60	70	75	80	85	90	90
	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
3	Pangan									
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	4,76	6,76	8,76	10,76	12,76	14,76	16,76	16,76
	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	40	40	40	40	40	40	40
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	90	90	90	90	90
	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	33	50	50	50	50	50	50	100
	tingkat konsumsi pangan AKE	kcal/kap/hr	2.202	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	67,53	57	57	57	57	57	57	57
	Tingkat ketersediaan pangan AKE	kcal/kap/hr	1.129	1.186	1.245	1.307	1.372	1.440	1.656	1.656
	Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	57,10	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	63,00

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Pertanahan									
	Persentase luas lahan bersertifikat	%	N/A	16,65	17,15	17,65	18,15	18,65	19,15	19,15
	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelesaian izin lokasi	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	N/A	20	40	50	67	84	100	100
	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	N/A	N/A	12	24	49	75	100	100
	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup									
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Indeks kualitas Air	Angka	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52	91,52
	Hasil Pengukuran Udara	Angka	70	88,49	88,60	88,70	88,81	88,81	88,81	88,81
	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	37,08	38,63	40,63	42,63	44,62	44,62	44,62	44,62
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	23,42	29,90	31,44	32,99	34,53	36,08	37,62	37,62

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Angka	0	1	2	3	4	5	6	6
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/tidak ada	tidak ada	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Timbulan sampah yang ditangani	%	18,37	19,37	19,87	20,37	20,87	21,37	21,87	21,87
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,09
	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	%	10,61	11,11	11,61	12,11	12,61	13,11	13,61	13,61
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	9	18	36	55	73	91	100	100
	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	0	0	13	33	53	73	100	100
	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegia	%	46	100	100	100	100	100	100	100
	an terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)									
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	-	-	33,33	41,67	50	58,33	66,67	66,67
	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.103,90	5.338,86	5.157,29	5.208,86	5.260,95	5.313,56	5.366,70	26.307,35
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	74,55	75,7	79,5	83,3	87,1	90,9	94,7	94,7
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	63,04	64,54	66,01	67,51	68,95	70,43	71,95	71,95
	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	33,33	33,33	46,67	66,67	80	93,33	100	100
	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penduduk Memiliki KTP	%	98,56	98,61	98,66	98,71	98,76	98,81	98,86	98,86
	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	%	49,93	69	75	79	85	90	95	95
	Persentase penduduk umur 0—18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	%	92,80	95,65	97,01	98,06	100	100	100	100
	Pasangan berakte nikah/ berakte perkawinan	%	47,95	69	75	79	85	90	95	95
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Angka	4	4	6	7	8	9	11	11
	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	50	65	70	75	80	85	90	90
	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	33	50	100	100	100	100	100	100
	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	10	25	28,33	31,67	35	38,33	43,33	43,33
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
	Total Fertility Rate (TFR)		N/A	N/A	2,33	2,3	2,27	2,25	2,21	2,21
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,65	9,09	8,78	8,48	8,17	7,87	7,56	7,56
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18,27	16,55	17,27	17,99	18,71	19,43	20,15	20,15
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	12,57	13,07	13,57	14,07	14,57	15,07	15,57	15,57
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84,63	85,13	85,63	86,13	86,63	87,13	87,63	87,63
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	91,95	92,45	92,95	93,45	93,95	94,45	94,95	94,95
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	79,88	80,38	80,88	81,38	81,88	82,38	82,88	82,88
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	bidang pengendalian penduduk									
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	79,18	79,33	79,21	79,09	78,96	78,84	78,72	78,72
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	25	25	25	25	25	25	25	25
	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	N/A	N/A	1	1	1	-	1	4
	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	78,28	78,5	78,7	79	79,4	79,7	80	80
	persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	65	70	75	f	83	87	90	90
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	79,18	79,48	79,78	80,08	80,38	80,68	80,98	80,98
9	Perhubungan									
	Rasio Izin Trayek	Angka	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	20,568	25.345	30.456	32.876	33.267	35.879	40.897	40.897

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org	19.842	20.109	21.361	22.013	22.365	22.665	23.169	23.869
	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	16,94	16,94	21,36	25,77	30,19	34,6	39,02	39,02
10	Komunikasi dan Informatika									
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	persen	NA	1,30	1,42	1,53	1,64	1,64	1,87	1,87
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	65,12	66,34	67,25	68,17	69,09	69,09	70,92	70,92
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Angka	0,81	0,80	0,85	0,90	0,95	0,95	1,05	1,05
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Angka	0,82	0,80	0,85	0,90	0,96	0,96	1,06	1,06
	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	9	14	20	40	60	80	100	100
	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	500	600	720	840	960	1.080	1.200	5.900
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
	Persentase koperasi aktif	%	86	86	87	88	89	90	91	91
	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	0	1,82	3,64	5,45	7,27	9,09	10,91	10,91
	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	20	20	20	30	30	30	40	40
	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4,57	4	4	4	4	4	4	4

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,28	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	75	100	100
	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	49,18	49,18	50	50,82	51,64	52,46	53,28	53,28
	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	57,69	57,69	58,65	59,62	60,58	61,54	62,5	62,5
12	Penanaman Modal									
	Realisasi Investasi PMA	Rupiah	120.875.225.604	114.784.221.527	139.644.937.641	164.505.653.756	189.366.369.870	214.227.085.984	239.087.802.098	239.087.802.098
	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	296.206.774.396	346.206.774.396	396.206.774.396	446.206.774.396	496.206.774.396	546.206.774.396	596.206.774.396	596.206.774.396
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	417.082.000.000	460.990.995.923	535.851.712.037	610.712.428.152	685.573.144.266	760.433.860.380	835.294.576.494	835.294.576.494
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	196,35	232,97	258,02	283,07	308,12	308,12	358,22	358,22
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) berskala nasional (PMDN/PMA)	%	-35	20	30	40	50	60	70	70
	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	173 investor	9,83	8,95	8,21	7,59	7,05	6,59	275 investor
	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	80	80	81	81	82	82	83	83
	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	10	15	17,5	21	24	27	30	30
	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	N/A	N/A	65	70	72	74	76	76
13	Kepemudaan dan Olah Raga									
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase Wirausaha Muda	%	13	15,43	17,04	18,66	20,27	20,27	23,49	23,49
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	12	14,20	16,54	18,87	21,20	21,20	25,87	25,87
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Angka	47	31,39	33,86	36,32	38,79	38,79	43,71	43,71
	Jumlah Atlet Berprestasi	Angka	29	60,50	62,53	64,57	66,60	66,60	70,67	70,67
	Capaian Prestasi Olahraga	Angka	3	5	6	6	7	7	8	8
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25	30	35	40	45	50	55	55
	Pencab Aktif	Jumlah	27	27	27	28	29	30	30	30
	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	3	5	5	5	8	8	10	44
14	Statistik									
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	%	50	60	65	70	75	80	85	85
15	Persandian									
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	3,3	3,3	20	40	60	80	100	100
16	Kebudayaan									
	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	13,16	13,16	13,16	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	1	1	4	4	4	4	4
	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	1	1	2	3	3	3	3	3
	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	54,17	50	46,88	44,44	42,5	42,5

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Persentase museum dalam kondisi baik	%	-	100	100	100	100	100	100	100
17	Perpustakaan									
	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	0	0	0	0	4	0	4
	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	15,16	28,08	38,89	46,86	54,8	65,61	76,67	76,67
	Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	-	-	-	-	A	A	A	A
	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	3,85	5,77	11,54	15,38	21,15	26,92	32,69	32,69
	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	5,4	1,01	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43
18	Kearsipan									
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	1	1	1	2	2	2	2
	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	N/A	-	1	-	1	-	1	3
	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	N/A	-	1	-	1	-	1	3

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	N/A	4,55	4,76	5	5,26	5,26	5,88	5,88
	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	10,34	10,34	30	50	70	83,33	90	90
	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	18,18	5,56	5,88	6,25	6,67	7,69	8,33	90
	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	N/A	-	100	100	100	100	100	100
	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	N/A	-	100	100	100	100	100	100
	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	N/A	2	4	7	9	12	14	48
19	Kelautan dan Perikanan									
	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	19.341	23.210	33.422	40.107	48.128	57.754	57.754	57.754
	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	105,81	126,97	182,84	219,41	263,29	315,95	315,95	315,95
	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	0	0	50	70	90	100	100	100
	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	10	10	15	18	20	23	25	25

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Layanan Urusan Pilihan										
1	Pariwisata									
	Peningkatan jumlah DTW	DTW	5	5	6	7	8	9	10	10
	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	67.648	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	567.468
	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	20	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	-	-	100	100	100	100	100	100
	PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	%	5,12	4,52	4,83	5,14	5,45	5,45	6,08	6,08
2	Pertanian									
	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	40	5	5	5	5	5	5	70
	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	40	1	2	2	2	2	2	51
	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	92,59	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	20	20	20	25	25	30	30	30
	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Perdagangan									
	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	16,67	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	100
	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang	%	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	penting									
	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	N/A	N/A	20	20	20	20	20	20
4	Perindustrian									
	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Sentra IKM	sentra	9	9	1	1	1	1	1	14
	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	4 perusahaan	4 perusahaan	50	50	50	50	50	30 perusahaan
Penunjang Urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									
	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	80,18	74,09	100	100	100	100	100	100
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,57	82,76	100	100	100	100	100	100
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	65,15	59,02	100	100	100	100	100	100
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang	%	71,43	65,7	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Infrastruktur dan Kewilayahan									
2	Keuangan									
	Persentase SiLPA	%	1,63	7,19	3,20	3,07	2,95	2,86	2,76	11,07
	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Rp20.610.40 3.491	Rp27.797.50 0.000	3,96	3,80	3,67	3,54	3,42	Rp33.294.959. 469
	Persentase peningkatan retribusi daerah	%	Rp5.346.696. 788	Rp5.081.744 .580	3,21	3,11	3,02	2,93	2,84	Rp5.897.366.0 51
3	Penelitian dan pengembangan									
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	0	0	16,67	6,67	10	6,67	10	50
	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	66,67	90	90	90	100	100	100
	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	0	0	5	2	3	2	3	15
4	Pengawasan									
	Persentase tindak lanjut temuan	%	-	100	100	100	100	100	100	100
	indeks manajemen resiko	Indeks	1,41	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	-	-	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4
	Level Kapabilitas APIP	level	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+	2+
5	Sekretariat Daerah									
	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	diterapkan oleh Perangkat Daerah									
	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	3	3	3	3	5	5	5
	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sekretariat Dewan									
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Pemerintahan Umum									
	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	persentase ormas yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0



#ayokebangkabarat



BAB IX

PENUTUP





9.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan bagi suatu daerah. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang memuat atau menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih. RPJMD ini juga berisi isu atau program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, cara mencapainya, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan tersebut.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah diamanatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat ini tentunya berpedoman pula pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Bangka Barat serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan janji politik bupati dan wakil bupati terpilih.

Program pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2021—2026 ini didasarkan pada skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan



terakhir adalah urusan pilihan. Dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bangka Barat pada periode 2021—2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026. Selanjutnya, Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah tersebut tentunya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
2. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Bangka Barat yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat. Pada tahap berikutnya, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka Barat.
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek. Hal ini cukup beralasan, karena setiap ketidaksesuaian, baik menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.



4. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, dapat pula menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR) BUMN, hibah atau bantuan dalam maupun luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.
5. Pasca penetapan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur atau kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026, maka dilakukanlah pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil evaluasi yang telah dilakukan tersebut wajib diinformasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat maupun kepada pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.
7. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan serta tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.



8. Partisipasi masyarakat Kabupaten Bangka Barat dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selanjutnya melakukan penindakan atas laporan dari masyarakat tersebut.
9. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 ditetapkan dengan peraturan daerah.

9.2. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 secara normatif menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2027 dan RAPBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2027. Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Pasal 201 ayat 8 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dengan sendirinya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat periode 2021—2026 akan berakhir pada November tahun 2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat terpilih pada pemilu serentak 2024 mendatang (tahun transisi) dengan tetap memperhatikan target pembangunan yang telah tercapai pada akhir jabatan kepala daerah hasil pemilihan sebelumnya. Penyelesaian target kinerja RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang belum tercapai perlu dilanjutkan oleh kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keselarasan program maupun kegiatan pembangunan



Kabupaten Bangka Barat dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN



pesona
indonesia 

#ayokebangkabar



LAMPIRAN – LAMPIRAN



PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO
RPJMD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021—2026, RPJMD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022, DAN RPJMN 2020—2024

No.	Indikator Pembangunan	TARGET NASIONAL DALAM RPJMN TAHUN 2020-2024	TARGET PROVINSI KEPULAUAN BANGKABELITUNG DALAM RPJMN TAHUN 2020—2024					TARGET PADA RPJMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017—2022					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021--2026				
		2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,5-6,5	3,9	4,6	5,1	5,5	5,8	4,5	4,6	4,7				5,16	4,91	4,68	4,47
2	Tingkat kemiskinan (%)	6,5-7,0	4,4	4,16	3,85	3,35	3	5,1	5,05	5				2,77	2,7	2,63	2,56
3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,0-4,6	3,3	3,1	3	2,5	2,2	5,5	5,4	5,3				4,03	3,94	3,85	3,77
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54						70,57	70,81	71,05				69,31	69,57	69,86	70,09
5	Rasio Gini	0,370-0,374						0,275	0,278	0,28							
6	Penurunan Emisi GRK (%)	2,73						6,00									

Keterangan : sesuai dengan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020—2024					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026						
				Target									Target						
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
1	PN	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas																	
1.1	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (%)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5											
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68,8	69,2	70,3											
1.2	PP	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4,4	4,7	5,1	5,4											
1.3	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94	95,2	URUSAN KETAHANAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	40	40	40	40		
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90	90	90		
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	33	50	50	50	50		
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.202	2.100	2.100	2.100	2.100		
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4			Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	67,53	57	57	57	57		
										Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/hr	1.129	1.186	1.245	1.307	1.372			
										Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	57,10	58,00	59,00	60,00	61,00			
1.4	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9											
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<=80											
1.5	PP	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio kewirausahaan nasional	3,6	3,7	3,8	3,9	4	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	0	1,82	3,64	5,45	7,27		
										PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP BERKATEGORI SEHAT	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	20	20	20	30	30		
										PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4,57	4	4	4	4		
										PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3,28	3,45	3,45	3,45	3,45		
										PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23		
										PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	49,18	49,18	50	50,82	51,64		
									PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	57,69	57,69	58,65	59,62	60,58			

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Kontribusi UMKM terhadap PDB	61	62	63	64	65	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	50	65	70	75	80
			Kontribusi koperasi terhadap PDB	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	100	100	100	100
										PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	33	50	100	100	100
										PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	10	25	28,33	31,67	35
1.6	PP	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian	3,7	3,7	3,9	4	4,1	URUSAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	40	5	5	5	5
										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	40	1	2	2	2
										PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	92,59	100	100	100	100
										PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	20	20	20	25	25
										PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	100
										PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	100	100	100	100
			Kontribusi PDB maritim	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	URUSAN KELAUTAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton/ tahun	19.341,90	23.210,28	33.422,80	40.107,36	48.128,84
										PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton/ tahun	105,81	126,97	182,84	219,41	263,29
										PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	0	0	50	70	90
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	10	10	15	18	20
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a))	5	5,5	6,5	7,5	8,1	URUSAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	sentra	9	9	1	1	1
										PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	N/A	100	100	100	100
										PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	4 perusahaan	4 perusahaan	50	50	50
			Kontribusi PDB pariwisata	4,8	5	5,2	5,3	5,5	URUSAN PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan Jumlah DTW	DTW	5	5	6	7	8
										PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	67.648	50.000	50.000	100.000	100.000
									URUSAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	13,16	13,16	13,16	15,13	15,13
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Jumlah								1	1	1	4	4			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	Jumlah								1	1	2	3	3			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%								50	50	54,17	50	46,88			
							PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	-	100	100	100	100			

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Nilai tambah ekonomi kreatif	1.189-1.214	.314-1.33	439-1.45	.564-1.57	1.689	URUSAN KEHUTANAN	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tabura	Jumlah	0	0	0	4	6
									URUSAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	20	-	100	100	100
			Pertumbuhan investasi	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4		URUSAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	173 investor	9,83	8,95	8,21
									PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	80	80	81	81	82
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	10	15	17,5	21		24						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	%	N/A	N/A	65	70		72						
			Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	URUSAN TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	25	30	35	40	45
										PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	31	33	35	35	36
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	100
										PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	186 orang	0	21,51	22,12	18,12
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*)	14,2	14,6	15	15,3	15,7									
			Jumlah tenaga kerja industri	19,7	20,3	20,9	21,4	22									
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	13	13,5	14	14,5	15									
Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19	20	20	21	21												
1.7	PP	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	3,9	4,2	4,8	5,5	6,2	URUSAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar terhib ukur	%	16,67	16,67	33,33	50	66,67
			Neraca perdagangan barang	0,3	1	3	7,5	15	URUSAN PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
										PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	N/A	100	100	100	100
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c))	21	23	25	27,5	30		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	N/A	N/A	20	20	20
										PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	N/A	N/A	100	100	100
										PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	100	100	100	100

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026												
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024			
1.8	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Fknomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4												
			Biaya logistik terhadap PDB	23,2	22,2	21,1	20,1	18												
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)	N/A	34-39	N/A	29-34	N/A												
2	PN	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing																		
2.1	PP	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Angka kelahiran total (Total fertility)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	N/A	N/A	1	1	1			
			Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7					URUSAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100			
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	100	100	100	100			
		Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100			
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	100	100	100	100			
2.2	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESAHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	91,5	91,8	92	93	95			
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16			Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	nilai	79,5	79,8	80	80,5	81			
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	nilai	76,8	76,9	77	78	79			
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18			Persentase baduta Stunting	%	9,7	9,6	9,5	9	8,5			
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7	URUSAN KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	72	73	75	80	85			

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	URUSAN KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standard	%	100	100	100	100	100
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190			Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standard	%	50	55	60	65	70
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan yang ber-PHBS	%	39,4	39,6	40	45
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09									
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9	8,9	8,8	8,7									
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8									
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1									
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100									
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100									
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16	14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	78,28	78,5	78,7	79	79,4
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	79,18	79,48	79,78	80,08	80,38
2.3	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	URUSAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,09	95,35	95,6	95,85	96,15
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	5,01	95,04	95,09	95,14	95,2
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68	69,68	70,54	70,85	71,25
										PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	-	35	45
2.4	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	N/A	20	30	40	50

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026										
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	N/A	50	55	60	70
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,2779	91,279	91,3347	91,38627023		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100	100
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,2448102	73,501	73,741	73,966	74,1774755		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	60	65	70	75	80
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	55	60	70	75	80
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	N/A	N/A	100	100	100
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67		URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25	30	35	40	45
										URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	27	27	27	28	29
2.5	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan , pelatihan)	27,9				40										
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50										
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000										
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000				7.750.000										
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087										
2.6	PP	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1										
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University	0	0	0	0	0										
			a. Top 200	1	1	1	1	1										
			b. Top 300	2	2	2	2	2										
			c. Top 500	43	45	47	48	50										
3	PN	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan																
3.1	PP	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter								URUSAN KESATUJUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	0	0	0	0
										URUSAN KESATUJUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	%	100	100	100	100	100
3.2	PP	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia								URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	3	5	5	5	8
3.3	PP	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama							URUSAN KESATUJUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	0	0	0	0

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
3.4	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter							URUSAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustnas	Jumlah	0	0	0	0	0
										PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	15,16	28,08	38,89	46,86	54,8
											Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	-	-	-	-	A
											Perentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	3,85	5,77	11,54	15,38	21,15
								URUSAN KELITBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Perentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	5,4	1,01	10,43	10,43	10,43	
										Perentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	66,67	90	90	90	
										Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	0	0	5	2	3	
4	PN	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar															
4.1	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar						URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	3,613 RTLH	5,67	11,74	13,3	15,34	
									PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	167 RTLH	4,19	3,13	3,23	3,33	
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS LUMUM (PSU)	Perentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	0	8,3	8,3	16,7	16,7	
									URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Perentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	N/A	N/A	100	100	100
								URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Perentase Tanah Kosong Hasil Inventarisasi Yang Telah Dimanfaatkan	%	N/A	20	40	50	67	
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Perentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	N/A	N/A	12	24	49	
								URUSAN PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN	Perentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	N/A	N/A	100	100	100	

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026										
				Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024		
4.3	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum asal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						URUSAN PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	16,94	16,94	21,36	25,77	30,19		
4.4	PP	Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100											
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408											
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4,71	4,92	5,36	5,91	6,07											
4.5	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menelenggarakan SPBE	%	9	14	20	40	60		
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3			Cakupan Layanan Telekomunikasi	Jumlah	500	600	720	840	960		
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5	98	98,5	99	100											
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75,7											
5	PN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																	
5.1	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	9	18	36	55	73		
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	0	0	13	33	53		
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,5	59	59,5	60	60,5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL / IUKL - IUKL)	%	46	100	100	100	100		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100		
										PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100		
										PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola	%	-	-	33,33	41,67	50		
										PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/ tahun	5.103,90	5.338,86	5.157,29	5.208,86	5.260,95		
								URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	0	16	16	16	16			
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	Jumlah	14	14	1	1	1			

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
				Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	
6.3	PP	Penegakan Hukum Nasional	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	URUSAN KETERTAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	100		100	100	100						
6.4	PP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelo	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70	75	80	85	85	PROGRAM RUTIN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas*	50	60	70	80	85		SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
													Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
												Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
												Tingkat kematangan UKPD	Level	3	3	3	3	3
												PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30	35	45	55	70	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program - Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada	
									URUSAN PERECANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	80,18	74,09	100	100	100	
									URUSAN PERECANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	89,57	82,76	100	100	100	
											Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	65,15	59,02	100	100	100	
											Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	71,43	65,7	100	100	100	
									URUSAN KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	
										PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	
										PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	Rp/%	20.610.403.491	27.797.500.000	3,96	3,8	3,67	
										Persentase peningkatan retribusi daerah	Rp/%	5.346.696.788	5.081.744.580	3,21	3,11	3,02		

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pemanfaatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
								URUSAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks manajemen resiko	Indeks	1,41	1,5	1,6	1,7	1,8	
										Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	-	-	1	1,1	1,2	
								URUSAN PENGAWASAN	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APiP	Level	2+	2+	2+	2+	2+	
								URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	55,12	62,68	68,11	74,43	80,17	
								URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	390	405	420	435	450	
							Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir			Orang	1.242	1.392	1.592	1.742	1.942		
							Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76			%	94,46	94,72	95,02	95,42	95,42		
							Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat			Orang	41	40	38	37	35		
									Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	73	74	75	77	78		
								URUSAN KEWILAYAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	
									PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	

No.	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	RPJMN Tahun 2020–2024					RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026									
			Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024
									URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	74,55	75,7	79,5	83,3	87,1
										PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	63,045	64,544	66,01	67,51	68,95
										PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	33,33	33,33	46,67	66,67	80
										PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	100	100	100	100
									URUSAN STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	50	60	65	70	75
									URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterangkan di desa	%	100	100	100	100	100
										PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	33	50	100	100	100
									URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang terpeliharakan	%	85,49	85,49	86	87	87
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungannya	%	0	0	30	35,71	37,5
6.5	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	URUSAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman.	%	3,3	3,3	20	40	60
			Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0,20	URUSAN KESATUJUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	100	100	100	100
			Global Terrorism Index	4,44	4,39	4,34	4,29	4,24									
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%									

Keterangan : sesuai dengan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Definisi dan Formula

Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	Formula
1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.	$PDRB\ ADHK\ (n) - PDRB\ ADHK\ (n-1) \text{ [dibagi]} PDRB\ ADHK\ (n-1) \text{ [dikali]} 100$
1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	nilai tambah pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan	$PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Pertanian,\ Kehutanan,\ dan\ Perikanan\ (n) - PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Pertanian,\ Kehutanan,\ dan\ Perikanan\ (n-1) \text{ [dibagi]} PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Pertanian,\ Kehutanan,\ dan\ Perikanan\ (n-1) \text{ [dikali]} 100$
	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	nilai tambah pada kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan	$PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Industri\ Pengolahan\ (n) - PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Industri\ Pengolahan\ (n-1) \text{ [dibagi]} PDRB\ Lapangan\ Usaha\ Industri\ Pengolahan\ (n-1) \text{ [dikali]} 100$
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Sektor Pariwisata terdiri atas: kategori transportasi dan perdagangan; penyediaan akomodasi dan makan minum	Nilai PDRB Sektor Pariwisata [dibagi] total PDRB [dikali] 100
	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Perdagangan dan jasa terdiri atas: perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya	Nilai PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa [dibagi] total PDRB [dikali] 100
1.1.2 Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah Nilai investasi PMDN dan PMA	$\text{nilai investasi tahun } n \text{ [dikurangi] nilai investasi tahun } n-1 \text{ [dibagi] nilai investasi tahun } n-1 \text{ [dikali]} 100$
1.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	rasio dari jumlah kota dalam suatu wilayah berbanding dengan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut.	Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota [dibagi] jumlah desa/kelurahan
	Indeks Bangunan Gedung	Kondisi struktur bangunan gedung negara dan cagar budaya	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung
1.1.4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Hutan/Lahan.	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
	Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan adalah desa/kelurahan di wilayah perkotaan	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan [dikali] 100
	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.	Hasil perhitungan BNPB Pusat (bahaya [dikali] jumlah desa rawan bencana [dibagi] jumlah desa tangguh bencana) $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$
1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik biaya konsumsi rumah tangga [dibagi] jumlah anggota rumah tangga
1.2.1 Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah (Data makro dan merupakan hasil Susenas)	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin [dibagi] total penduduk [dikali] 100
1.2.2 Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik jumlah pengangguran [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100
2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran capaian pembangunan manusia berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat	Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
2.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal	Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun)	Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i}$
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	SD dan SMP yang terakreditasi A	Jumlah SD & SMP terakreditasi A [dibagi] total SD & SMP [dikali] 100
2.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.	Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
	Prevalensi Stunting	Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak disebut stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus 2 (dua) standar deviasi panjang atau tinggi anak seusianya.	Jumlah balita stunting [dibagi] jumlah balita [dikali] 100

Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi	Formula
2.1.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	Hasil perhitungan Badan Pusat Statistik IPM perempuan [dibagi] IPM laki-laki
	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.1.4 Meningkatkan kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Kesalehan sosial adalah kepedulian seseorang terhadap sesama, patuh pada aturan negara, melestarikan lingkungan	Hasil survei terhadap dimensi : taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan
3.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Opini BPK	Pernyataan atas hasil pemeriksaan BPK terhadap kewajaran informasi keuangan	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penilaian dilakukan oleh AP/IP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	(nilai dimensi kualifikasi x bobot 25) + (nilai dimensi kompetensi x bobot 40) + (nilai dimensi kinerja x bobot 30) + (nilai dimensi disiplin x bobot 5)/ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)
3.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)
3.2 Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Gambaran kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Hasil perhitungan Kementerian Keuangan RI Kapasitas Fiskal Daerah suatu Kabupaten/Kota [dibagi] Rata-rata Kapasitas Fiskal Seluruh Kabupaten/Kota
3.2.1 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi] total pendapatan [dikali] 100

Program Prioritas Pembangunan, Indikator Kinerja, dan Formula

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
Pendidikan		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD [dibagi] jumlah anak usia 5-6 tahun [dikali] 100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD dan SMP [dibagi] jumlah anak usia 7-15 tahun [dikali] 100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan [dibagi] jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah [dikali] 100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	lembaga pendidikan (SD dan SMP) yang memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar [dibagi] jumlah SD & SMP se-kabupaten [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah SD & SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal [dibagi] jumlah SD & SMP se-kabupaten [dikali] 100
Kesehatan		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESAHATAN PEORANGAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	Jumlah capaian indikator SPM bidang kesehatan [dibagi] jumlah indikator SPM bidang kesehatan [dikali] 100
	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Total rata-rata SKM puskesmas
	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai SKM rumah sakit
	Persentase baduta <i>Stunting</i>	baduta stunting [dibagi] total baduta [dikali] 100
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin [dibagi] jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standard	jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standard [dibagi] jumlah puskesmas se-kabupaten [dikali] 100
	Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standard	Jumlah tenaga kesehatan yang diberikan pengembangan kompetensi sesuai standard [dibagi] jumlah tenaga kesehatan se-kabupaten [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	Jumlah desa/kelurahan yang ber-PHBS [dibagi] jumlah desa/kelurahan se-kabupaten [dikali] 100
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
PROGRAM PENYELENGGARAAN TATA RUANG	Persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang dikeluarkan atau ditetapkan [dibagi] jumlah kebijakan yang seharusnya [dikali] 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap [dibagi] panjang jalan kabupaten keseluruhan [dikali] 100
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan pada jalan kabupaten dalam kondisi baik [dibagi] total jembatan kabupaten keseluruhan [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	Jumlah titik banjir yang dimitigasi [dibagi] dengan jumlah /desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi [dikali] 100
	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	Luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis [dibagi] luas areal pertanian [dikali] 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	jumlah bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani [dibagi] jumlah bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang harusnya ditangani [dikali] 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan [dibagi] total perencanaan bangunan dan lingkungan [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikasi tahun n [dikurangi] Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikasi di tahun n-1 [dibagi] Jumlah tenaga terampil konstruksi bersertifikasi di tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase dalam kondisi baik [dibagi] panjang seluruh drainase di daerah [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPAM [dibagi] jumlah rumah tangga se-kabupaten [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	jumlah sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak [dibagi] total sarana prasarana sistem air limbah domestik [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	Jumlah sarana persampahan (TPA & TPST) yang tersedia [dibagi] jumlah kebutuhan sarana persampahan [dikali] 100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	Jumlah rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani [dibagi] jumlah rumah yang tertimpa bencana alam/sosial [dikali] 100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani [dibagi] jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh [dikali] 100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani [dibagi] jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni kawasan kumuh [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan [dibagi] jumlah perumahan di kabupaten bangka barat [dikali] 100
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	Perda dan Perkada Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditegakkan pada tahun n [dibagi] jumlah perda dan perkada yang berlaku [dikali] 100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana [dibagi] jumlah penduduk di daerah rawan bencana [dikali] 100
	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana [dibagi] jumlah penduduk yang tertimpa bencana [dikali] 100
	Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana [dibagi] jumlah penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana [dikali] 100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh instansi terkait	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dalam waktu tanggap oleh perangkat daerah [dibagi] jumlah kejadian kebakaran [dikali] 100
	Layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	Jumlah layanan pemadaman dalam waktu tanggap oleh kelompok relawan [dibagi] jumlah kejadian kebakaran [dikali] 100
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran) [dibagi] total kondisi yang membahayakan manusia (non Kebakaran) [dikali] 100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	Jumlah keterlibatan forkopimka, tomas dan toga dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum [dibagi] para pihak yang seharusnya terlibat [dikali] 100
Sosial		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	PPKS yang memperoleh jamsos [dibagi] jumlah PPKS keseluruhan [dikali] 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi [dibagi] jumlah PPKS keseluruhan [dikali] 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani [dibagi] jumlah korban [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah PSKS yang aktif [dibagi] jumlah PSKS se-kabupaten [dikali] 100
Tenaga Kerja		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi [dibagi] jumlah pencari kerja yang mendaftar [dikali] 100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan [dibagi] jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada bursa kerja [dikali] 100
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	jumlah perselisihan ketenagakerjaan yang terselesaikan [dibagi] total perselisihan ketenagakerjaan [dikali] 100
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	Jumlah OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan [dibagi] jumlah OPD di Kabupaten Bangka Barat [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	Jumlah informasi gender dan anak yang tersedia [dibagi] jumlah informasi gender dan anak yang seharusnya [dikali] 100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif [dibagi] total korban kekerasan terhadap perempuan [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	jumlah keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak tahun n [dikurangi] jumlah keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak tahun n-1 [dibagi] jumlah keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	jumlah pemenuhan hak anak di tahun n [dikurangi] jumlah pemenuhan hak anak di tahun n-1 [dibagi] jumlah pemenuhan hak anak tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	Jumlah korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif [dibagi] total korban kekerasan terhadap anak [dikali] 100
Pangan		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan yang tersedia [dibagi] infrastruktur kemandirian pangan yang seharusnya tersedia [dikali] 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	jumlah sampel pangan segar yang aman [dibagi] total sampel yang diuji [dikali] 100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani [dibagi] total daerah rawan pangan [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	tingkat konsumsi pangan AKE	(Jumlah makanan yang dikonsumsi (gr) per jumlah penduduk [dibagi] 365 hari) [dikali] %BDD [dikali] % kandungan energi dari 100 gr bahan makanan
	tingkat konsumsi pangan AKP	(Jumlah makanan yang dikonsumsi (gr) per jumlah penduduk [dibagi] 365 hari) [dikali] %BDD [dikali] % kandungan energi dari 300 gr bahan makanan
	Tingkat ketersediaan pangan AKE	(Jumlah makanan yang tersedia (gr) per jumlah penduduk [dibagi] 365 hari) [dikali] %BDD [dikali] % kandungan energi dari 100 gr bahan makanan
	Tingkat ketersediaan pangan AKP	(Jumlah makanan yang tersedia (gr) per jumlah penduduk [dibagi] 365 hari) [dikali] %BDD [dikali] % kandungan energi dari 300 gr bahan makanan
Pertanahan		
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan [dibagi] jumlah kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang harus diselesaikan [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Kosong Hasil Inventarisasi Yang Telah Dimanfaatkan	Tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan [dibagi] jumlah tanah kosong yang diinventarisasi [dikali] 100
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	Jumlah data penatagunaan tanah yang tersedia [dibagi] Jumlah data penatagunaan tanah yang seharusnya [dikali] 100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan [dibagi] total kasus sengketa tanah garapan [dikali] 100
Lingkungan Hidup		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia [dibagi] jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang seharusnya dimiliki [dikali] 100
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 [dibagi] total pelaku usaha terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3 [dikali] 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL) [dibagi] total penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan [dikali] 100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	jumlah pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditindaklanjuti [dibagi] total pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup [dikali] 100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Jumlah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti [dibagi] total kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola [dibagi] total lokasi keanekaragaman hayati yang dimiliki [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	jumlah sampah yang dikelola per tahun (ton)
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	Jumlah SD dan SMP yang mendapatkan penghargaan adiwiyata [dibagi] total SD dan SMP yang mengikuti program Adiwiyata [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	Jumlah komunitas pencinta lingkungan tahun n
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan [dibagi] jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen administrasi kependudukan [dikali] 100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil [dibagi] jumlah penduduk yang seharusnya memiliki dokumen catatan sipil [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI PENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	Jumlah data yang disediakan [dibagi] jumlah data yang dibutuhkan [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	Profil kependudukan yang tersusun [dibagi] profil yang seharusnya disusun [dikali] 100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif tahun sebelumnya (n) [dikurangi] Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif tahun n-1 [dibagi] Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	Kebijakan penataan desa yang diterapkan [dibagi] jumlah kebijakan yang berlaku [dikali] 100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	Jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang berkinerja baik [dibagi] total desa/kelurahan [dikali] 100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	Jumlah kerja sama desa yang terimplementasi [dibagi] keseluruhan kerja sama desa yang masih berlaku [dikali] 100
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk [dibagi] jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang seharusnya [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif [dibagi] total kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga [dikali] 100
	persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	Jumlah keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK [dibagi] total keluarga <i>stunting</i> [dikali] 100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-49 tahun) yang menggunakan kontrasepsi [dibagi] jumlah seluruh perempuan usia 15-49 tahun [dikali] 100
Perhubungan		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan [dibagi] jumlah pelabuhan yang diusulkan menjadi pelabuhan pengumpan lokal [dikali] 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	Jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang terpenuhi [dibagi] jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang seharusnya [dikali] 100
Komunikasi dan Informatika		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	Jumlah OPD yang telah mengimplementasikan SPBE [dibagi] total OPD [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah media yang digunakan dipantau dan dikelola
Koperasi, usaha Kecil dan Menengah		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	Jumlah KSP yang mendapatkan rekomendasi izin usaha [dibagi] jumlah permohonan [dikali] 100
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	Jumlah KSP/USP yang berkategori sehat [dibagi] jumlah KSP/USP seluruhnya [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit [dibagi] jumlah permohonan [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan [dibagi] total usaha mikro yang terdaftar [dikali] 100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah koperasi yang mengikutsertakan anggota/pengurus dalam diklat [dibagi] total koperasi [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT [dibagi] total koperasi di Bangka Barat [dikali] 100
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	Jumlah koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan [dibagi] total koperasi [dikali] 100
Penanaman Modal		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	Jumlah layanan penanaman modal tahun n [dikurangi] Jumlah layanan penanaman modal tahun n-1 [dibagi] Jumlah layanan penanaman modal tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Nilai IKM bidang penanaman modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM [dibagi] total perusahaan [dikali] 100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	Jumlah investor yang mengikuti promosi penanaman modal [dibagi] total investor [dikali] 100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
Kepemudaan dan Olahraga		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan [dibagi] jumlah penduduk berusia 16-30 tahun [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah Pencab aktif [dibagi] total Pencab [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	jumlah kegiatan Kwarcab Pramuka yang difasilitasi
Statistik		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	Jumlah data statistik sektoral yang tersedia [dibagi] total data statistik yang seharusnya [dikali] 100
Persandian		
PROGRAM PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	Jumlah OPD yang terhubung jaringan komunikasi sandi yang aman [dibagi] total OPD [dikali] 100
Kebudayaan		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah objek kebudayaan yang dikembangkan [dibagi] total objek kebudayaan [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah setiap tahun
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi per tahun
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan [dibagi] total cagar budaya yang dimiliki [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	Jumlah museum dalam kondisi baik [dibagi] total museum [dikali] 100
Perpustakaan		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	naskah kuno yang terdaftar di Perpunas
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Jumlah perpustakaan SD & SMP yang terakreditasi A dan B [dibagi] total perpustakaan SD & SMP se-kabupaten [dikali] 100
	Akreditasi perpustakaan daerah	Instrumen akreditasi perpustakaan umum
	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	Jumlah perpustakaan desa yang terakreditasi A dan B [dibagi] total perpustakaan se-kabupaten [dikali] 100
	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah pemustaka baik secara online maupun onsite [dibagi] jumlah populasi yang harus dilayani usia 6-60 [dikali] 100
Kearsipan		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah arsip statis yang telah diautentifikasi dan dialihmediakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai dengan NSPK
	Pencarian arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Jumlah arsip statis yang pengelolannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang dinyatakan hilang yang telah dibuatkan daftar pencarian arsip yang sesuai dengan NSPK
	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai dengan NSPK
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip [dibagi] jumlah OPD [dikali] 100
	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip [dibagi] jumlah arsip aktif [dikali] 100
	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik [dibagi] jumlah arsip statis [dikali] 100
	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	Jumlah OPD yang mengimplementasikan SRIKANDI [dibagi] jumlah OPD [dikali] 100
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah arsip yang bersifat tertutup yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah yang diterbitkan izin penggunaannya sesuai dengan NSPK
Kelautan dan Perikanan		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Pelaku usaha perikanan yang taat peraturan perundangan yang berlaku [dibagi] jumlah pelaku usaha perikanan [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pembinaan mutu dan keamanan yang dilakukan terhadap hasil perikanan bagi usaha perikanan dan pemasaran skala mikro dan kecil [dibagi] total usaha perikanan dan pemasaran skala mikro dan kecil [dikali] 100
Pariwisata		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW	Jumlah DTW tahun n
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun n [dikurangi] jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang tersertifikasi [dibagi] jumlah tenaga kerja bidang pariwisata [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI [dibagi] jumlah produk ekonomi kreatif [dikali] 100
Pertanian		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	jumlah sarana pertanian tahun sebelumnya (n) [dikurangi] jumlah sarana pertanian tahun n-1 [dibagi] jumlah sarana pertanian tahun n-1 [dikali] 100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	jumlah prasarana pertanian tahun sebelumnya (n) [dikurangi] jumlah prasarana pertanian tahun n-1 [dibagi] jumlah prasarana pertanian tahun n-1 [dikali] 100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Poktan/Gapoktan yang dibina [dibagi] total Poktan/Gapoktan [dikali] 100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	Jumlah bencana pertanian yang tertanggulangi [dibagi] total bencana pertanian [dikali] 100
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dikendalikan [dibagi] jumlah izin usaha pertanian [dikali] 100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	jumlah penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani [dibagi] total kasus penyakit hewan dan zoonosis [dikali] 100
Kehutanan		
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerja sama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	jumlah kerja sama yang baru dalam pemanfaatan Tahura tahun (n)
Perdagangan		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	jumlah sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur [dibagi] total sarana distribusi perdagangan [dikali] 100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	persentase kenaikan/penurunan harga (dibagi) antarwaktu perbulan/pertahun
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan [dibagi] jumlah pemohon [dikali] 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku [dibagi] total komoditi potensial [dikali] 100
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	jumlah jenis produk dalam negeri yang digunakan sebagai bahan pokok dengan setabilitas harga setandar [dibagi] Target (sembilan bahan pokok produk dalam negeri) [dikali] 100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	jumlah wajib tera yang melakukan tera/tera ulang [dibagi] total wajib tera yang seharusnya melakukan tera/tera ulang [dikali] 100
Perindustrian		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	Jumlah Sentra IKM di Kabupaten Bangka Barat per tahun
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI USAHA	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikendalikan [dibagi] total izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang telah dikeluarkan [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	jumlah Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang tersedia [dibagi] jumlah informasi industri yang seharusnya [dikali] 100
Perencanaan		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	jumlah program pada RKPd tahun n [dibagi] jumlah program pada RPJMD tahun n [dikali] 100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada RKPd tahun n [dibagi] jumlah program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada RPJMD tahun n [dikali] 100
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah program bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pada RKPd tahun n [dibagi] jumlah program bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) pada RPJMD tahun n [dikali] 100
	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada RKPd tahun n [dibagi] jumlah program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada RPJMD tahun n [dikali] 100
Keuangan		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	Keakuratan + Kepatuhan [dibagi] 2
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan [dibagi] total barang milik daerah [dikali] 100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	Pendapatan pajak daerah tahun n [dikurangi] pendapatan pajak daerah tahun n-1 [dibagi] pendapatan pajak daerah tahun n-1 [dikali] 100
	Persentase peningkatan retribusi daerah	Pendapatan retribusi daerah tahun n [dikurangi] pendapatan retribusi daerah tahun n-1 [dibagi] pendapatan retribusi daerah tahun n-1 [dikali] 100
Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan		
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki [dibagi] Total jabatan [dikali] 100
	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya
	Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir
	Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Jumlah PNS Strata II per tahun
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	Jumlah PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76 [dibagi] jumlah PNS di Kab. Bangka Barat [dikali] 100
	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat
Penelitian dan Pengembangan		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Jumlah kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah [dibagi] jumlah kajian tahun berjalan [dikali] 100
	Jumlah Inovasi Daerah	seluruh inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan ataupun inovasi bentuk lainnya

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Formula
Kecamatan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat [dibagi] total desa/kelurahan [dikali] 100
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	jumlah kasus yang terfasilitasi [dibagi] jumlah kasus yang terjadi [dikali] 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan [dibagi] jumlah kewenangan yang ada [dikali] 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan [dibagi] jumlah kewenangan yang ada [dikali] 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah pembinaan yang diberikan [dibagi] total pembinaan yang seharusnya diberikan [dikali] 100
Sekretariat Daerah		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Implementasi kebijakan pada tahun berjalan [dibagi] jumlah kebijakan yang dikeluarkan [dikali] 100
	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	Implementasi kebijakan pada tahun berjalan [dibagi] jumlah kebijakan yang dikeluarkan [dikali] 100
	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Implementasi kebijakan pada tahun berjalan [dibagi] jumlah kebijakan yang dikeluarkan [dikali] 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kematangan UKPBJ	Level kematangan UKPBJ yang dikeluarkan oleh LKPP
	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Implementasi kebijakan pada tahun berjalan [dibagi] jumlah kebijakan yang dikeluarkan [dikali] 100
Sekretariat Dewan		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Program – Program DPRD dalam melaksanakan fungsinya terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD
Inspektorat Daerah		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	penilaian terhadap 8 komponen proses manajemen risiko yang terdiri dari 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan.
	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Nilai indeks efektivitas pengendalian korupsi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Penilaian berdasarkan Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (BPKP)
Kesatuan Bangsa dan Politik		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	jumlah konflik sosial berlatar belakang ideologi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Jumlah Parpol yang difasilitasi pemda [dibagi] jumlah parpol keseluruhan [dikali] 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	Jumlah ormas yang aktif [dibagi] jumlah ormas yang terbentuk [dikali] 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	jumlah konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani [dibagi] total potensi konflik sosial [dikali] 100



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2021 - 2026